



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 2089-3515

Profil *Perempuan* INDONESIA 2020





KEMENTERIAN
PEMBANGSAAN, PEREMPULAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 2089-3515

Profil *Perempuan* INDONESIA 2020



Profil Perempuan Indonesia 2020

ISSN

2089-3515

Ukuran Buku

18,2 X 25,7

Jumlah Halaman

xviii + 178

Naskah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Gambar Kulit

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Diterbitkan Oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

TIM PENYUSUN

Pengarah : Pribudiarta Nur Sitepu

Penanggung Jawab Umum : Fakhri Usman

Lies Rosdianty

Editor : Sylvianti Angraini

Penulis Naskah : Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah

Yuliana Mahdiah

Eva Fahmadia

Indah Lukitasari

Pengolah Data : Nurhayati

Siska Ayu Tiara Dewi

Nadhira Aulia

Idha Sahara

Widya Larasati

Ofi Ana Sari

Dhani Arief Hartanto

Mariet Tetty Nuryetty

Eko Sriyanto

Daniel Bastian Lubis

Heykal

Layout : Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah

Indah Lukitasari

KATA SAMBUTAN

Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, maka keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat utama, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata.

Untuk dapat mengetahui pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dibutuhkan data yang dapat menggambarkan posisi dan kondisi serta peran dan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan. Untuk itulah publikasi Profil Perempuan Indonesia ini disusun setiap tahunnya. Melalui publikasi ini, dapat diketahui perkembangan pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia, yang tentunya sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan program, kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan, sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Hal ini sebagai wujud komitmen kehadiran negara dalam memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Secara statistik, di berbagai bidang capaian perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Padahal keterlibatan perempuan memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat namun juga sebagai pelaku pembangunan bangsa. Perempuan memiliki resiliensi dan daya juang untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

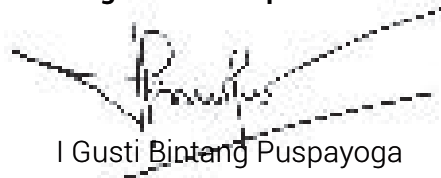
Lima arahan prioritas Presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan

dalam kewirausahaan, 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) Penurunan pekerja anak, dan 5) Pencegahan perkawinan anak. Masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan bersama demi menciptakan perempuan-perempuan tangguh yang mandiri dan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan.

Akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs), untuk itu diperlukan kerja sama antar semua sektor terkait baik dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. Kami harapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk dapat terus mendorong upaya peningkatan kemajuan perempuan Indonesia sebagai sumber daya potensial pembangunan.

Tahun ini juga merupakan tahun pertama bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempersiapkan publikasi ini secara mandiri. Kami mengucapkan Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajarannya, dan serta berbagai pihak lain yang telah mendampingi dalam penyusunan hingga tersusunnya Profil Perempuan Indonesia Tahun 2020. Semoga publikasi ini benar-benar dimanfaatkan dapat menjadi inspirasi dasar bagi berbagai para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait dalam perencanaan kebijakan dan program sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan buku ini.

Perempuan Berdaya, Indonesia Maju
Jakarta, Desember 2020
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia



I Gusti Bintang Puspayoga

KATA PENGANTAR

Isu perempuan adalah salah satu isu lintas sektoral (*cross cutting issues*) dan melebur di setiap lini pembangunan. Kesetaraan gender menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun global. Kesamaan kondisi Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hal akses yang sama sebagai manusia serta mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan adalah inti dari upaya pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Potensi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan saat ini dirasa belum optimal, ditunjukkan oleh beberapa hal, misalnya: rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan tingginya kekerasan terhadap perempuan. Keterlibatan perempuan di ruang publik juga dirasa masih rendah, terlihat dari dunia politik di mana jumlah perempuan yang menduduki kursi parlemen masih jauh di bawah batas afirmasi keterwakilan 30% persen perempuan. Pada level manajerial pun jumlah perempuan yang menduduki level manajerial maupun bidang dan profesional masih rendah.

Koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah di semua tingkat (pusat dan daerah) menjadi kunci utama untuk menjawab berbagai permasalahan terkait perempuan. Selain itu peningkatan partisipasi, sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan perlu terus ditingkatkan demi mendapatkan praktik terbaik, inovasi serta perumusan kebijakan untuk memaksimalkan potensi perempuan.

Kemen PPPA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta akademisi, lembaga masyarakat dan dunia usaha terus

dilakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Kerja bersama perlu terus perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan. Semoga buku Profil Perempuan Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan. bermanfaat dalam mempercepat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak memenuhi dan melindungi hak perempuan secara komprehensif.

Jakarta, Desember 2020
Sekretaris Kementerian

Pribudhiarta Nur Sitepu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk memberdayakan serta melindungi perempuan. Diharapkan perempuan dapat berkarya dan memberikan sumbangsih di berbagai bidang pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, pengetahuan dan teknologi informasi, kepemimpinan dsb. Hal ini juga merupakan komitmen internasional yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pendidikan bagi perempuan merupakan titik awal perubahan kehidupan perempuan yang berdampak pada kemajuan masyarakat yang lebih luas. Kualitas pendidikan perempuan berdampak positif pada kehidupan yang lebih baik, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Pada tahun 2019, Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APK) laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang sama, yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan penduduk maka semakin rendah jumlah penduduk yang berpartisipasi di dalamnya. APM perempuan berturut-turut pada pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan Perguruan tinggi adalah 97,65 persen; 79,96 persen; 62,38 persen dan 19,89 persen.

Kesenjangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan juga terlihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas. RLS penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan, di mana RLS laki-laki sudah melampaui target RPJMN 2015-2019 yaitu 8,8 tahun sedangkan untuk perempuan belum dicapai. Pada tahun 2019, RLS laki-laki sdah mencapai 9,08 tahun sedangkan perempuan tertinggal pada 8,42 tahun. Dengan capaian rata-rata lama sekolah tersebut, maka rata-rata lama sekolah pada perempuan setara dengan hampir mencapai kelas 9 SMP/ sederajat; sedangkan rata-rata sekolah laki-laki menyelesaikan jenjang sekolah SMP/ sederajat.

Pada bidang kesehatan diketahui bahwa perempuan mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Keluhan kesehatan dialami 51,99 persen perempuan Indonesia, sedangkan pada laki-laki di bawahnya yaitu sebesar 48,8 persen. Namun, demikian baru separuh penduduk yang memiliki keluhan kesehatan yang berobat jalan dalam sebulan terakhir, mereka memilih untuk mencoba melakukan upaya pengobatan sendiri tanpa melibatkan tenaga kesehatan yang tersedia. Padahal, melakukan pengobatan sendiri dapat lebih berisiko bagi status kesehatan dirinya di masa depan.

Hambatan pemberdayaan perempuan juga bisa disebabkan banyaknya perempuan yang menikah di usia muda. Perkawinan pertama perempuan masih didominasi oleh perkawinan di bawah usia 20 tahun. Penduduk perempuan berstatus kawin/ pernah kawin yang menikah pada usia 21 + hanya mencapai 41,21 persen. Terutama pada perempuan pedesaan, terdapat sekitar 2 dari 3 perempuan pedesaan yang menikah dibawah usia 20 tahun.

Pada bidang ketenagakerjaan, perempuan juga masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Dari setiap 3 laki-laki yang bekerja, terdapat 2 perempuan yang bekerja. Meskipun masih lebih rendah daripada laki-laki. Selain bekerja, kegiatan utama perempuan usia 15 tahun ke atas dalam seminggu yang lalu yang memiliki persentase tinggi di tahun 2019, adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebesar 37,04 persen. Persentase ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya. Sedangkan pada laki-laki hanya mencapai 3,55 persen. Kesenjangan TPAK perempuan secara signifikan lebih rendah di bawah laki-laki ini terlihat tidak berubah dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan yang terjadi pada perempuan sangat sedikit dan tidak mengubah kesenjangan posisi perempuan dengan laki-laki di bidang partisipasi angkatan kerja. Secara umum pun rata-rata upah/gaji pekerja perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rata-rata upah/gaji laki-laki mencapai Rp 3.167.092,- sedangkan laki-laki hanya mencapai Rp 2.451.057,-.

Akses perempuan dalam bidang pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi pun juga masih terbatas. Data penggunaan telepon seluler, kepemilikan telepon seluler, penggunaan komputer, penggunaan internet menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai bidang pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi perempuan masih tertinggal dalam kesempatan memperoleh dan mengakses informasi. Penduduk laki-laki yang mengakses internet mencapai 50,5 persen sedangkan perempuan hanya 44,86 persen.

Kepemimpinan perempuan juga masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Namun demikian meskipun capaian perempuan sebagai tenaga profesional masih di bawah 50 persen, tetapi kecenderungan meningkat pada persentase yang dicapai mengindikasikan pengakuan terhadap profesionalitas perempuan terus membaik. Meningkatnya persentase jabatan manajer perempuan yang diiringi menurunnya persentase jabatan manajer laki-laki mengindikasikan daya saing perempuan terus meningkat. Secara bertahap kepemimpinan perempuan semakin diperhitungkan seiring dengan pengakuan terhadap kualitas perempuan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor determinan yang dapat menjadi posisi tawar perempuan dalam meningkatkan karirnya menuju jabatan manajer.

Sementara di bidang Pemerintahan persentase ASN laki-laki dan perempuan hampir berimbang, meskipun terlihat ada peningkatan persentase ASN perempuan seiring dengan menurunnya ASN laki-laki di tahun 2019. Namun demikian tidak diimbangi dengan jabatan yang diemban pada tiga jenis jabatan di lingkungan ASN, perempuan jauh tertinggal di posisi jabatan struktural dibandingkan laki-laki.

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional cenderung terus meningkat. Pada tahun 2019 perempuan di parlemen mencapai 20,52 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 17,32 persen. Berdasarkan distribusi provinsi, hanya terdapat 9 provinsi yang persentase keterlibatan perempuan di parlemen lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yaitu provinsi Kalimantan Tengah (35,56 persen), Sulawesi Utara (28,89 persen), Sulawesi Selatan (27,71 persen),

Gorontalo dan Maluku Utara (26,67 persen), Sulawesi Tengah (24,44 persen), Maluku (23,26 persen), DKI Jakarta (21,7 persen) dan Sumatera Selatan (21,33 persen)

Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki ditunjukkan oleh persentase kepala rumah tangga laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Meskipun jumlah perempuan kepala rumah tangga secara nasional tampak jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, namun secara spesifik terlihat adanya peningkatan jumlah perempuan kepala rumah tangga dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kepala rumah tangga perempuan pada tahun 2017 adalah 15,17 persen meningkat menjadi 15,46 persen pada tahun 2019. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga laki-laki di semua jenjang pendidikan. Kepala rumah tangga perempuan yang tidak memiliki ijazah sebesar 40,41 persen jauh di atas laki-laki yaitu 18 persen.

Kekerasan merupakan salah satu hambatan bagi perempuan untuk maju. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selama Januari-Desember 2019 terdapat 8.745 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa yang dilaporkan. Dari kasus yang dilaporkan tersebut 65,26% di antaranya adalah kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan fisik (5158), psikis (3415) dan penelantaran (1344). Sementara layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan (5114), bantuan hukum (3237), dan kesehatan (3063).

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
Bab I Pendidikan Perempuan	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Konseptual	5
1. Angka Melek Huruf	5
2. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	5
3. Angka Partisipasi Kasar	8
4. Angka Partisipasi Murni (APM)	9
5. Rata-rata lama sekolah	10
C. Pembahasan	11
1. Kemampuan Baca Tulis	11
2. Pendidikan Tertinggi	17
3. Partisipasi Sekolah.....	21
4. Lama Sekolah	28
Bab II Perempuan dan Kesehatan	35
A. Latar Belakang	35
B. Definisi Konseptual	40
1. Kesehatan	40
2. Lingkungan Sehat	41
3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	41
4. Jaminan Kesehatan	42
5. Fasilitas Kesehatan	43
6. Tenaga Kesehatan	45
7. Keluarga Berencana	46
8. Air Bersih dan Air Layak Rumah Tangga	47

C.	Pembahasan	48
1.	Keluhan kesehatan	48
2.	Tempat Melahirkan pada Fasilitas Kesehatan (Fakes) dan Non Fakes	54
3.	Penolong Persalinan	59
4.	Keluarga Berencana dan Penggunaan Alat Kontrasepsi	61
5.	Air Bersih dan Layak Rumah Tangga	65
Bab III	Perempuan dan Dunia Kerja Ketenagakerjaan	71
A.	Latar Belakang	71
B.	Definisi Konseptual	73
1.	Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja	73
2.	Usia Produktif	75
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	76
5.	Tenaga Kerja Formal dan Informal	77
6.	Status pekerjaan.....	78
7.	Jam kerja	81
8.	Upah dan Rata-rata Upah	82
9.	Pekerja Migran	82
C.	Pembahasan	83
1.	Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas.....	83
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	85
3.	Tingkat Pengangguran.....	89
4.	Penduduk Yang Bekerja	95
Bab IV	Perempuan dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	121
A.	Latar Belakang	121
B.	Definisi Konseptual	123
1.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK).....	123
2.	Kepemilikan perangkat informasi dan komunikasi	124
3.	Akses informasi dan komunikasi	125
4.	Partisipasi dalam berkomunikasi dan informasi ..	126

C.	Pembahasan	127
1.	Penggunaan Telepon Seluler (HP)	127
2.	Kepemilikan Telepon Seluler (HP)	130
3.	Penggunaan Komputer (PC/Desktop/Laptop/ Notebook/Tablet)	133
4.	Penduduk Mengakses Internet	136
Bab V	Kepemimpinan Perempuan	143
A.	Latar Belakang	143
B.	Definisi Konseptual	146
1.	Tenaga profesional	146
2.	Aparatur Negara	148
3.	Parlemen	150
4.	Kementerian Negara	151
C.	Pembahasan	154
1.	Perempuan sebagai tenaga profesional	154
2.	Perempuan sebagai Aparatur Negara	157
3.	Perempuan di Parlemen	165
4.	Menteri Perempuan	170
Bab VI	Perempuan Kepala Rumah Tangga	173
A.	Latar Belakang	173
B.	Definisi Konseptual	176
1.	Rumah Tangga	176
2.	Kepala rumah tangga (KRT)	177
3.	Anggota rumah tangga (ART)	177
4.	Bangunan Rumah Tangga	179
5.	Status Penguasaan Tempat Tinggal	181
6.	Sumber Penerangan	182
7.	Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga	182
C.	PEMBAHASAN	183
1.	Kepala Rumah Tangga Perempuan	183
2.	Pendidikan Kepala Rumah Tangga Perempuan ...	189
3.	Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Perempuan	194
4.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Perempuan	197
5.	Kondisi Perumahan Kepala Rumah Tangga Perempuan	199

Bab VII Perempuan dan Kekerasan.....	215
A. Latar Belakang	215
B. Definisi Konseptual	217
1. Kekerasan	217
2. Jenis Kekerasan	218
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	221
4. Perdagangan Orang.....	222
5. Kekerasan terhadap Perempuan.....	223
6. Perlindungan	223
C. Pembahasan	225
1. Kekerasan terhadap Perempuan.....	225
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	232
3. Jenis Kekerasan terhadap Perempuan.....	235
4. Layanan Korban Kekerasan	238
REFERENSI	240
LAMPIRAN DAFTAR TABEL PROFIL PEREMPUAN INDONESIA 2019	249

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-59 Tahun menurut Jenis Kelamin tahun 2015 s.d. 2019	11
Tabel 1.2 Provinsi dengan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf dan Telah Mencapai Target RPJMN Tahun 2019 pada Perempuan dan Laki-laki.....	16
Tabel 1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019.	25
Tabel 2.1 Persentase Perempuan pernah kawin Berusia 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan menurut Daerah tempat tinggal dan Kelompok Pengeluaran 2019.....	57
Tabel 2.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Daerah tempat tinggal dan Kelompok Pengeluaran 2019	59
Tabel 2.3 Persentase Wanita Berusia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Status Pemakaian Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal, 2019	61
Tabel 3.1. Penduduk Setengah Penganggur (juta) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	92
Tabel 3.2. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019.	94
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	97
Tabel 3.4. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2019.	100

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2019.....	101
Tabel 3.6. Rasio Upah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2019.....	109
Tabel 3.7. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/ Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2019.....	111
Tabel 3.8. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan, 2019.....	117
Tabel 5.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019.....	160
Tabel 5.2. Pimpinan di MPR, DPR dan DPD Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2019-2024.....	169
Tabel 6.1 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut status perkawinan, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal Tahun 2019.....	184
Tabel 6.2 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019	186
Tabel 6.3 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2019.....	188
Tabel 6.4 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019.....	193
Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita, 2019	196

Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Lantai Terluas, 2019.....	196
Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Atap Terluas, 2019.....	197
Tabel 6.8 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas, 2019.....	200
Tabel 7.1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Tanggal Kejadian dan Tanggal Pelaporan Tahun 2019.	225
Tabel 7.2. Persentase Korban KDRT Menurut Tanggal Laporan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019.	229
Tabel 7.3. Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan dan Tanggal Kejadian, 2019.....	230
Tabel 7.4. Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan dan Tanggal Pelaporan Tahun 2019.	232
Tabel 7.5. Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian, 2019	234
Tabel 7.6. Jumlah Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian Tahun 2019.....	237

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2019.....	12
Gambar 1.2.	Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	13
Gambar 1.3.	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	14
Gambar 1.4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019.	18
Gambar 1.5	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pada Penduduk Usia 15-59 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019	19
Gambar 1.6.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Memiliki Ijazah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2019.....	21
Gambar 1.7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, 2019.....	23
Gambar 1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019.	24
Gambar 1.8.	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2019.....	26
Gambar 1.9.	Angka Partisipasi Murni Perempuan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019.....	27
Gambar 1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019	28

Gambar 1.11.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019 ..	30
Gambar 1.12	Provinsi dengan Rata-rata Lama Sekolah pada Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Perkotaan dan Capaian Paling Lama dan Paling Sebentar, 2019.....	32
Gambar 1.13	Provinsi dengan Rata-rata Lama Sekolah pada Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Perdesaan dan Capaian Paling Lama dan Paling Sebentar, 2019.....	33
Gambar 1.14.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia 15 tahun Ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	34
Gambar 2.1.	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019	49
Gambar 2.2.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan, Sakit, dan Tidak Berobat Jalan Karena Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019.....	50
Gambar 2.3.	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019	51
Gambar 2.4	Persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, tahun 2015 -2019	52
Gambar 2.5	Persentase penduduk perempuan yang berobat jalan dalam sebulan terakhir menurut tempat berobat jalan, tahun 2019	54
Gambar 2.6.	Persentase Perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dan usia perkawinan pertama, 2019	55

Gambar 2.7	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di Fasilitas Kesehatan menurut Provinsi, 2019.....	58
Gambar 2.8.	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut provinsi, 2019	60
Gambar 2.9	Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai Alat KB tahun 2017-2019	62
Gambar 2.10	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan berstatus Kawin di Indonesia menurut Alat/Cara KB yang sedang Digunakan, 2019	63
Gambar 2.11	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB menurut Provinsi, 2019.....	64
Gambar 2.12	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2019	67
Gambar 2.13	Persentase Rumah Tangga yang dikepalai Perempuan yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Provinsi, 2019	68
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019.	82
Gambar 3.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019.....	84
Gambar 3.3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019.	85
Gambar 3.4.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, 2019.....	87

Gambar 3.5.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019.....	88
Gambar 3.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	89
Gambar 3.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Agustus 2019.....	90
Gambar 3.7.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kelompok Umur Muda berdasarkan Jenis Kelamin, Agustus 2019	91
Gambar 3.8.	Tingkat Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2019	92
Gambar 3.9.	Distribusi Setengah Penganggur menurut Tingkat Pendidikan (Persen), Agustus 2019.....	93
Gambar 3.10.	Persentase Penduduk Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Perkawinan Tahun 2019.....	97
Gambar 3.11.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2019	103
Gambar 3.12.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama	105
Gambar 3.13.	Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin	107
Gambar 3.14.	Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2019.	108

Gambar 3.15. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2019.	111
Gambar 3.16. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	114
Gambar 3.17. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	115
Gsmbar 3.18. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan	116
Gambar 3.19. Jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019.....	118
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	126
Gambar 4.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler Berdasarkan Jenis Kelamin, 2017-2019	129
Gambar 4.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	130
Gambar 4.4. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	132

Gambar 4.5.	Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perkotaan yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2019	133
Gambar 4.6.	Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perdesaan yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2019	134
Gambar 4.7.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang pernah Mengakses Internet Berdasarkan Jenis Kelamin, 2017-2019.....	135
Gambar 4.8.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.....	137
Gambar 4.9.	Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perkotaan yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, 2019.....	138
Gambar 4.10.	Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perdesaan yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, 2019.....	139
Gambar 5.1.	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2017-2019.....	153
Gambar 5.2	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Berdasarkan Provinsi Tahun 2019.....	154
Gambar 5.3	Persentase Jabatan Manajer Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2019.....	155
Gambar 5.4.	Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019	156

Gambar 5.5	Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan menurut Provinsi Tahun 2019	157
Gambar 5.6	Persentase jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan jabatan 2019.....	158
Gambar 5.7	Persentase jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan tingkat Pendidikan 2019	159
Gambar 5.8.	Persentase PNS yang Menjabat Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Jabatan, Tahun 2019.....	160
Gambar 5.10	Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Usia Tahun 2019.....	161
Gambar 5.11	Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin dan Golongan , Tahun 2019	162
Gambar 5.12	Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kepegawaian 2019.....	163
Gambar 5.13	Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Masa Kerja Tahun 2019	164
Gambar 5.14	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi Tahun 2019	165
Gambar 5.15	Persentase Anggota DPR Perempuan Tahun 2004-2019	167
Gambar 5.16	Persentase Anggota DPD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	168
Gambar 5.17.	Menteri Kabinet Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009-2019	170
Gambar 6.1	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019	181
Gambar 6.2.	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019	182

Gambar 6.3	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Provinsi Tahun 2019	183
Gambar 6. 4	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Daerah tempat tinggal dan Status Perkawinan Tahun 2019	185
Gambar 6.5	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	187
Gambar 6.6	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2019.....	189
Gambar 6.7	Persentase Kepala Rumah Tangga yang bekerja menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal Tahun 2019.....	190
Gambar 6.8.	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan dan Laki-laki yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Tahun 2019.....	191
Gambar 6.9	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja menurut Status Pekerjaan, 2019	192
Gambar 6.10	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019.....	194
Gambar 6.11	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut distribusi pengeluaran per kapita sebulan dan jumlah anggota rumah tangga, 2019.....	195
Gambar 6.12	Persentase Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan berdasarkan Jenis Atap Terluas, 2019	198
Gambar 6.13	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.....	201

Gambar 6.14. Persentase Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Menggunakan Listrik menurut Provinsi, 2019	202
Gambar 6.15 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Jenis Sanitasi, Tahun 2019	203
Gambar 6.16 Persentase Rumah Tangga dengan kepala Rumah Tangga Perempuan yang mempunyai Sanitasi Layak, Tahun 2019.....	204
Gambar 6.17. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019	205
Gambar 6.18 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2019.....	206
Gambar 6.19 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler/Handphone menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2019	207
Gambar 6.20 Persentase Rumah Tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang Memiliki Telepon Seluler/ Handphone menurut provinsi Tahun 2019	208
Gambar 6.21. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019	209
Gambar 7.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Bulan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019.	220
Gambar 7.2. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Tanggal Pelaporan, 2019.....	221
Gambar 7.3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Tanggal Kejadian dan Tanggal Pelaporan, 2019.....	223

Gambar 7.4.	Rata-rata Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Perhari Menurut Tahun Kejadian dan Tahun Pelaporan 2019.....	224
Gambar 7.5.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Tanggal Kejadian dan Tanggal Pelaporan, 2019.....	226
Gambar 7.6.	Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Tanggal Pelaporan dan Tanggal Kejadian, 2019.	227
Gambar 7.7.	Jumlah Korban Kekerasan dan KDRT Menurut Tanggal Pelaporan Tahun 2019.	228
Gambar 7.8.	Jumlah Korban Kekerasan dan KDRT Menurut Tanggal Kejadian, 2019.....	228
Gambar 7.9.	Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019	231
Gambar 7.10.	Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian, 2019.....	235
Gambar 7.11.	Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Pelaporan, 2019.....	236
Gambar 7.12.	Jumlah Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian, 2019.....	238
Gambar 7.13.	Jumlah Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Pelaporan, 2019.....	239

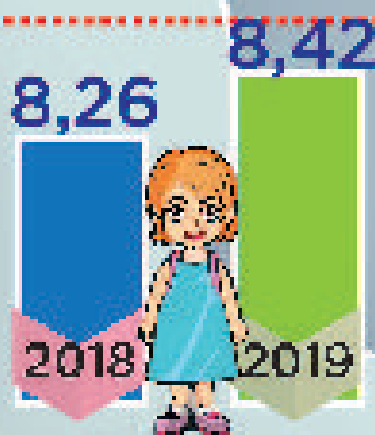
Halaman ini dibiarkan untuk kosong

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK 15+

PENDIDIKAN



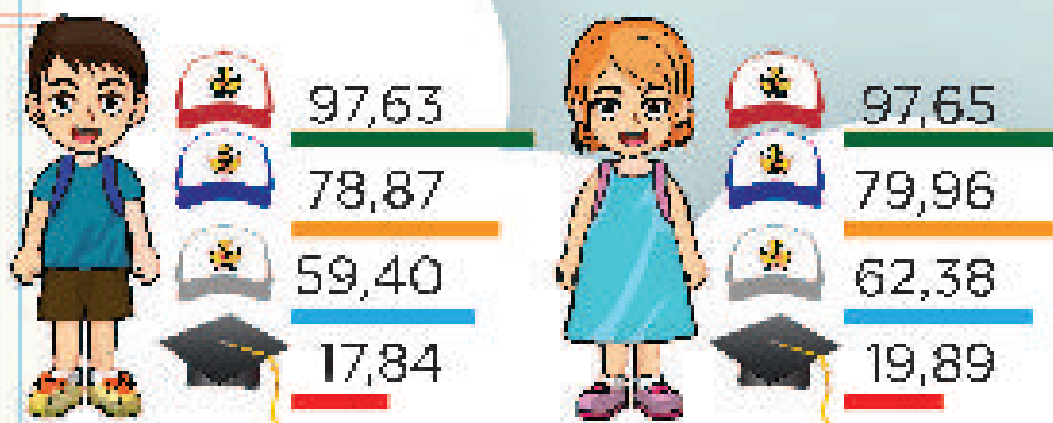
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
(OLS) PENDUDUK PERKOTAAN LEBIH
TINGGI DARIPADA PENDUDUK PERDESAHAN.



Target PRBN 2016-2019 8,8 Tahun

2019

ANGKA PARTISIPASI MURNI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN



Meningkatkan bola yang terus menurun
sehingga meningkatkan tingkat pendidikan

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan tentang hak pendidikan bagi setiap warga Indonesia (Pasal 31). Sebagai hak dasar warga negara, amanat UUD 1945 ini berkonsekuensi pada posisi negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak dasar ini. Sejumlah komponen penting dalam memastikan pemenuhan hak dasar pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti keterbukaan akses, ketersediaan fasilitas, anggaran yang berpihak, kesadaran untuk menempuh pendidikan, dan kontrol pada proses-proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Sebagaimana pada laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tiga prinsip dasar konvensi anti penghapusan diskriminasi pada perempuan- *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yaitu persamaan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban negara di bidang pendidikan telah terefleksi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan sistem pendidikan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Urgensi pemenuhan hak pendidikan ini telah menjadi bagian utama dalam RPJMN 2015-2019. Pembangunan pendidikan diorientasikan pada upaya pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Terdapat sembilan target pembangunan di bidang pendidikan yang

menjadi indikator keberhasilan pendidikan ini, yaitu: 1) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, 2) rata-rata angka melek aksara pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, 3-5) persentase nilai akreditasi SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA minimal B, 6) persentase kompetensi keahlian SMK minimal B, 7) Prodi perguruan tinggi minimal B, dan 8-9) angka rasio partisipasi kasar (APK) SMP/MTS dan SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (KPPN/BPPN, 2014).

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah dalam memastikan capaian pembangunan pendidikan ini. Diantara program prioritas di bidang Pendidikan adalah Program wajib belajar 12 tahun yang didukung dengan program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Program bantuan afirmasi pendidikan dan guru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan pembinaan pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi sekolah dan madrasah yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan sejumlah program pembangunan pendidikan ini, pemerintah dapat memastikan warga Indonesia, termasuk perempuan memperoleh akses dan dapat menikmati pendidikan –minimal- di tingkat dasar dan menengah. Pembangunan di bidang pendidikan ini merupakan ejawantah dari salah satu nawa cita pemerintah terkait peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang dengan memprioritaskan pada 6 program utama, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Zonasi Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan dan Digitalisasi Sekolah.

Kebijakan nasional ini direspon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Di dalam Permendikbud ini, capaian Pendidikan pada tahun 2019 merujuk pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Terdapat 6 IKSS yang digunakan, yaitu 1) Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan, 2) Pemberdayaan Pelaku

Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan, 3) Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, 4) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, 5) Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dan 6) Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik (Permendikbud No. 12. Tahun 2018). Strategi dalam meningkatkan capaian Pendidikan ini dikuatkan melalui penganggaran yang berpihak dari APBN. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya anggaran di bidang pendidikan, terutama untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah (Renstra Kemendikbud 2015-2019).

Perhatian negara pada pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan ini merupakan strategi efektif untuk pengembangan intelektual dan profesional sumber daya manusia Indonesia. Kualitas bangsa harus meliputi laki-laki dan perempuan agar keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam memajukan bangsa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kokoh, berkualitas dan berdaya saing global. Namun demikian, pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah akibat keadaan geografis, sarana prasarana, partisipasi pendidikan, kualifikasi guru dan calon peserta didik, serta penyerapan lulusan (Aristo, 2019; Arifa & Prayitno, 2019). Di beberapa daerah, masalah pendidikan juga masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang belum menempatkan pendidikan perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan masih belum menjadi prioritas dalam memperoleh akses pendidikan yang ideal sehingga perlu terus didorong agar dapat mencapai kondisi setara dengan laki-laki, terutama di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan bagi perempuan merupakan titik awal perubahan kehidupan perempuan yang berdampak pada kemajuan masyarakat yang lebih luas. Kualitas pendidikan perempuan berdampak positif

pada kehidupan yang lebih baik, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Kontribusi perempuan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan keluarga sangat signifikan, seiring tuntutan budaya yang masih memosisikan tanggung jawab perempuan dalam pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Perempuan yang berpendidikan juga dapat memberi kontribusi yang positif pada pendapatan keluarga, sanitasi, gizi, prestasi sekolah, dan kesehatan reproduksi, sehingga capaian pendidikan perempuan dapat secara langsung menopang berbagai persoalan di bidang pembangunan lainnya, seperti AKI, AKB, *stunting*, dan gizi buruk.

Kesadaran tentang belum tercapainya pendidikan perempuan secara ideal ini mengantarkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan ke-4 tentang mutu pendidikan sebagai acuan pembangunan pendidikan di Indonesia. Agenda SDGs ini memiliki target tahun 2030 pembangunan pendidikan sudah mencapai 10 indikator berikut, (1) menjamin dan memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas; (2) semua anak mendapat akses pendidikan dini yang berkualitas, (3) terbukanya akses yang setara terjangkau dan berkualitas untuk pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan, dan universitas; (4) meningkatkan SDM dengan keahlian yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha; (5) menghilangkan disparitas gender dan kelompok rentan dalam pendidikan dan akses di semua tingkatan pendidikan dan dan training pelatihan kejuruan, (6) kemampuan literasi dan numerasi, (7) kontribusi pengetahuan dan keahlian untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup, HAM, kesetaraan gender, budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan, (8) mutu fasilitas pendidikan yang sensitif gender, anak dan disabilitas dan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua, (9) memperbanyak jumlah beasiswa, dan (10) kualitas guru yang memadai.

B. Definisi Konseptual 3

Definisi konseptual yang digunakan pada bab ini merujuk pada laman Sistim Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020.

1. Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka melek huruf digunakan untuk melihat persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya seperti huruf jawa, huruf kanji atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Angka melek huruf ini berkorelasi dengan proporsi Angka Buta Huruf (ABH), jumlah yang menunjukkan proporsi penduduk di usia tertentu yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Angka melek huruf dilihat pada penduduk usia 15 tahun sampai 59 tahun, demikian juga angka buta huruf merujuk pada rentang usia yang digunakan pada angka melek huruf. Angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah. Indikator melek huruf mengindikasikan adanya kemampuan literasi dasar yang dimiliki penduduk yang dapat berguna untuk mengakses informasi dan pengetahuan, serta memperluas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, Angka Melek Huruf digunakan sebagai indikator penting yang dapat menjadi acuan dalam melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan atau tidak (Sirusa.bps.go.id)

2. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah yang dijalannya.

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan diukur melalui kepemilikan tanda tamat sekolah atau ijazah (Sirusa.bps.go.id). Pendidikan yang ditamatkan dapat diperoleh melalui salah satu dari dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat, dan PT. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal dan non formal ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga/ institusi pendidikan negeri maupun swasta.

Beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan pendidikan yang ditamatkan adalah:

- a. Tidak memiliki Ijazah menjelaskan tentang status penduduk yang belum pernah sekolah, termasuk penduduk yang sudah tamat atau belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan pendidikannya di tingkat sekolah dasar.
- b. SD/ Sederajat
Tamat Sekolah Dasar (SD) merupakan kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Dasar. Sederajat dengan SD adalah Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah yang setara dengannya, termasuk Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri).

c. SMP/Sederajat

Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah merupakan kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Sekolah yang setara dengan SMP di antaranya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Hoogere Burgerschool* (HBS) 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga, dan Paket B dan memperoleh ijazah persamaan SMP.

d. SMA/Sederajat

Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah adalah kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), *Hoogere Burgerschool* (HBS) 5 tahun, *Algemene Middelbare School* (AMS), Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan SLTA para atlit, dan Paket B dan memperoleh ijazah persamaan SMA.

e. Diploma I-IV dan S1

Tamat Diploma Tamat Program Diploma I/II adalah pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII. Bagi mereka yang tamat program DI/DII pada suatu fakultas yang tidak mengeluarkan gelar Sarjana Muda maka mahasiswa yang duduk di tingkat 4 dan 5 tetap dicatat sebagai tamat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk Tamat Program Diploma III adalah kategori bagi mereka yang tamat Akademi/ Diploma III, tamat program Akta III atau yang telah mendapatkan gelar Sarjana Muda pada suatu fakultas,

dan Tamat Program Diploma IV/S1 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV dan Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV.

f. S2/S3

Tamat Program S2/S3 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Pasca Sarjana dan Doktor atau Spesialisasi I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi (sirusa.bps.go.id).

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Penghitungan APK dikelompokkan berdasarkan kelompok umur sesuai jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat SD/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 7-12 tahun, APK tingkat SMP/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 13-15 tahun, APK tingkat SMA/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 16-18 tahun, dan APK tingkat perguruan tinggi memperhitungkan penduduk di rentang umur 19-24 tahun (sirusa.bps.go.id).

APK digunakan untuk menunjukkan besaran umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (Sirusa.bps.go.id).

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Penghitungan APM merujuk pada jumlah murid di tingkatan pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia sekolah di jenjang umur tersebut. Sebagai contoh, APM untuk tingkat SD/ sederajat akan menghitung jumlah siswa dalam rentang usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia tepat waktu bagi penduduk dalam menempuh pendidikan di tingkat SD/ sederajat. Metode ini akan menghasilkan nilai APM dalam rentang kisaran 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya di umur yang seharusnya berada di

tingkatan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah (Sirusa.bps.go.id). Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian (KEMEN PPPA, 2019)

5. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diukur melalui rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk di jenjang pendidikan tertentu. Rata-rata lama sekolah dilakukan pada penduduk mulai usia 15 tahun ke atas untuk melihat jumlah tahun efektif bersekolah formal yang sudah dicapai penduduk dalam menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Untuk penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat Sekolah Menengah diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun (sirusa.bps.go.id). Rata-rata ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan apakah penduduk tersebut menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan karena alasan tertentu, misalnya pernah tinggal kelas, pernah melakukan berhenti sementara (cuti), atau pernah mengulang tingkat jenjang atau kelas tertentu karena alasan khusus. Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah merujuk pada 4 informasi berikut, 1) partisipasi sekolah, 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki 3) Ijasah tertinggi yang dimiliki

dan 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (sirusa.bps.go.id).

Interpretasi pada hasil rata-rata lama sekolah bermakna bahwa semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Dengan demikian, data yang ditunjukkan dalam hasil rata-rata lama sekolah ini dapat menginformasikan tentang kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

C. Pembahasan

1. Kemampuan Baca Tulis

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam memastikan tercapainya target pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan ke-4 SDG's, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua di tahun 2030. Komitmen ini terlihat pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pada tabel 5.1 tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang ada dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang menargetkan capaian angka melek huruf meningkat sebesar dua persen dari 94,1% pada tahun 2013 menjadi 96,1 persen pada tahun 2019 (Bappenas, 2014).

Capaian angka melek huruf (aksara) yang telah dicapai pada tahun 2019 menunjukkan capaian yang melampaui target RPJMN di tahun 2019. Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa angka melek huruf pada penduduk usia 15-59 tahun telah mencapai 98,22 persen. Angka ini lebih tinggi dari target RPJMN 2015-2019 yang menargetkan capaian Angka Melek Huruf sebesar 96,1 persen (Tabel 1.1).

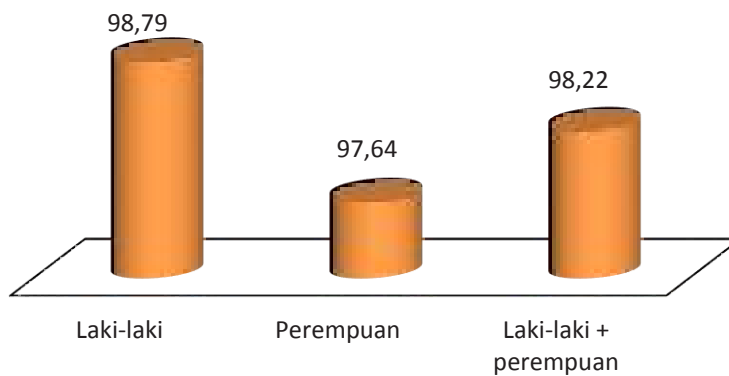
Tabel 1.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-59 Tahun menurut Jenis Kelamin tahun 2015 s.d. 2019

Jenis Kelamin	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	98,46	98,59	98,59	98,70	98,79
Perempuan	96,96	97,26	97,27	97,44	97,64
Total	97,71	97,93	97,93	98,07	98,22

Sumber: BPS, Susenas 2015-2019

Merujuk pada data tabel 1.1., kemampuan baca tulis penduduk Indonesia tahun 2019 telah dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia usia 15-59 tahun. Dalam lima tahun terakhir, angka melek huruf penduduk Indonesia terus mengalami kecenderungan meningkat secara konsisten, kecuali pada tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2019, angka melek huruf penduduk usia 15-59 tahun meningkat sebesar 0,15 persen dibandingkan dengan capaian di tahun 2018 yaitu sebesar 98,07 persen. Capaian angka melek huruf tahun 2019 ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilakukan pemerintah. Keberhasilan ini juga ditopang oleh partisipasi masyarakat dalam mengupayakan penurunan angka buta aksara di Indonesia.

Berdasarkan jenis kelamin penduduk, pada tahun 2019 sebanyak 97,64 persen perempuan usia 15-59 tahun telah mampu membaca dan menulis huruf latin, arab, atau lainnya, sedangkan persentase kemampuan membaca dan menulis pada laki-laki mencapai 98,79 persen. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan situasi pada perempuan dan laki-laki dalam kemampuan membaca dan menulis (Gambar 1.1).

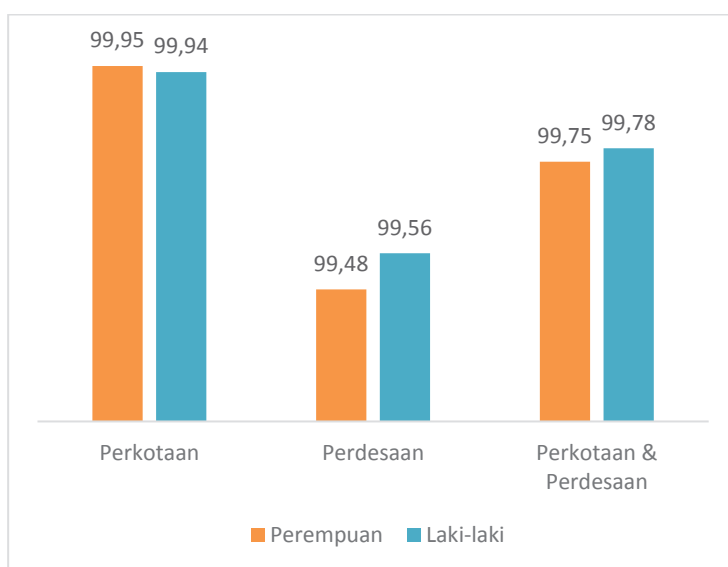


Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.1. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2019.

Perbedaan persentase pada angka melek huruf (aksara) pada laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun ini sebesar 1,15 persen. Dengan jumlah penduduk perempuan Indonesia yang diproyeksikan pada tahun 2019 sebesar 133.416.900 jiwa dengan jumlah perempuan usia 15-59 tahun sebanyak 85.413.900 jiwa, maka kesenjangan jumlah 1,15 persen angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan usia 15-59 tahun berada dalam kisaran jumlah 1.281.208 perempuan (Lampiran tabel 1.1.).

Gambaran yang berbeda dapat dilihat melalui pemilahan usia penduduk di rentang usia 15-24 tahun. Pada rentang usia ini, capaian angka melek huruf pada perempuan dan laki-laki terlihat setara, dimana angka melek huruf pada laki-laki sebesar 99,78 persen dan perempuan sebesar 99,75 persen. Dalam gambar 1.2 terlihat masih adanya kesenjangan pada penduduk melek huruf yang tinggal di perkotaan dengan di perdesaan, baik pada laki-laki dan terutama pada perempuan.



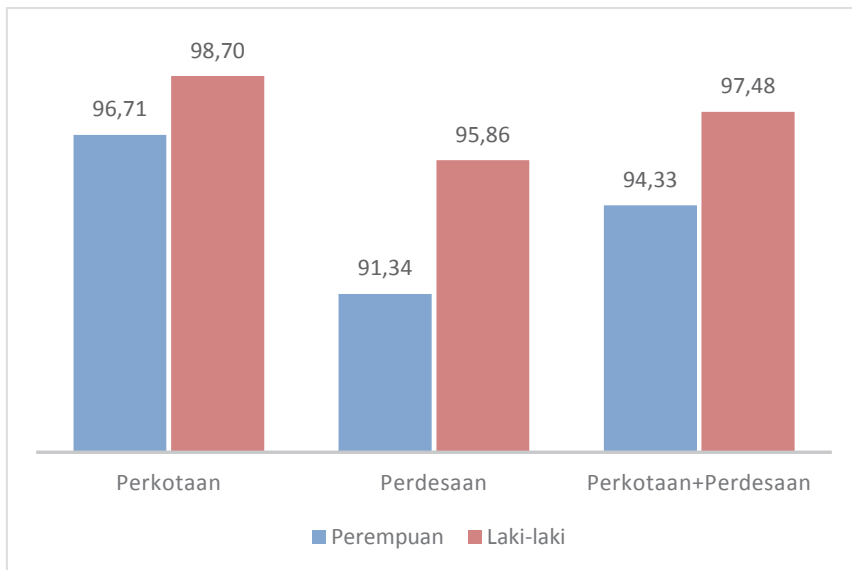
Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019

Jika di dalam rentang usia 15-24 tahun terlihat kesetaraan pada angka melek huruf perempuan dan laki-laki, maka situasi sebaliknya terlihat pada penduduk melek huruf di rentang usia 60 tahun ke atas. Penduduk laki-laki melek huruf yang berusia 60 tahun ke atas hanya sebesar 88,29 persen dan perempuan dalam kondisi lebih buruk, yaitu sebesar 73,40 persen (Lihat Lampiran 1.4). Provinsi dengan kondisi terburuk pada kategori usia ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan angka melek huruf pada laki-laki hanya sebesar 65,66 persen. Kondisi yang lebih buruk terjadi pada perempuan di perdesaan dan perkotaan yang sedangkan perempuan hanya sebesar 38,66 persen. Itu artinya, di Provinsi NTB, terdapat dua dari tiga perempuan usia 60 tahun ke atas masih dalam kondisi buta huruf.

Dengan adanya kesenjangan capaian melek huruf berdasarkan kategori usia yang berbeda, maka penting melihat keseluruhan angka melek huruf dari usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, kesenjangan jenis kelamin pada kemampuan membaca dan menulis ini terjadi di wilayah perdesaan. Di wilayah perdesaan, angka

melek huruf pada laki-laki dan perempuan masih dibawah 96,1 persen yang merupakan target RPJMN Tahun 2019, yaitu di mana laki-laki baru mencapai 95,86 persen dan perempuan baru mencapai 91,34 persen. Kondisi ini berbeda secara signifikan dengan kondisi di perkotaan, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama telah mencapai persentase lebih dari 96,1 persen. Meskipun sama-sama telah menunjukkan capaian yang baik, namun persentase angka melek huruf perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kesenjangan jenis kelamin yang ada di perkotaan dan perdesaan mengakibatkan persentase angka melek huruf pada perempuan di tingkat nasional masih sangat rendah, bahkan di bawah target RPJMN tahun 2019, yaitu hanya mencapai 94,33 persen (Gambar 1.3).



Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.3. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019

Kesenjangan angka melek huruf pada perempuan dan laki-laki penting menjadi perhatian karena disparitas kemampuan membaca dan menulis akan beresiko pada hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang lainnya. Jumlah disparitas kemampuan membaca dan menulis yang masih berbeda berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan masih adanya persoalan akses dan kesempatan

perempuan dalam memperoleh pendidikan. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena masalah kemiskinan dan kendala teknis. Implementasi program penguatan kemampuan baca tulis pada kelompok utama masih dihadapkan pada kendala kemiskinan karena kelompok prioritas lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Marlina, Suratman, & Rachmat, 2017).

Kemampuan membaca dan menulis merupakan pintu masuk dalam mencapai kemajuan pembangunan, termasuk kepada perempuan. Urgensi mendorong perempuan dapat melek aksara sangat signifikan, karena akan meminimalisir berbagai hambatan yang akan dialami perempuan yang buta huruf. Pemahaman yang terbatas karena tidak dapat mengakses informasi, beresiko pada akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan kualitas kesehatan perempuan. Memberantas buta aksara pada perempuan sangat penting karena akan dapat mengurangi kerentanan jumlah perempuan miskin, korban kekerasan, dan dimarginalkan atau tidak diperhitungkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan literasi merupakan kekuatan bagi perempuan untuk bisa lebih maju, mampu mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara (Wiedarti, 2015). Dengan demikian, perempuan dapat berpartisipasi aktif di semua bidang pembangunan dan turut serta membangun bangsa menuju negara yang maju dan berdaya saing global.

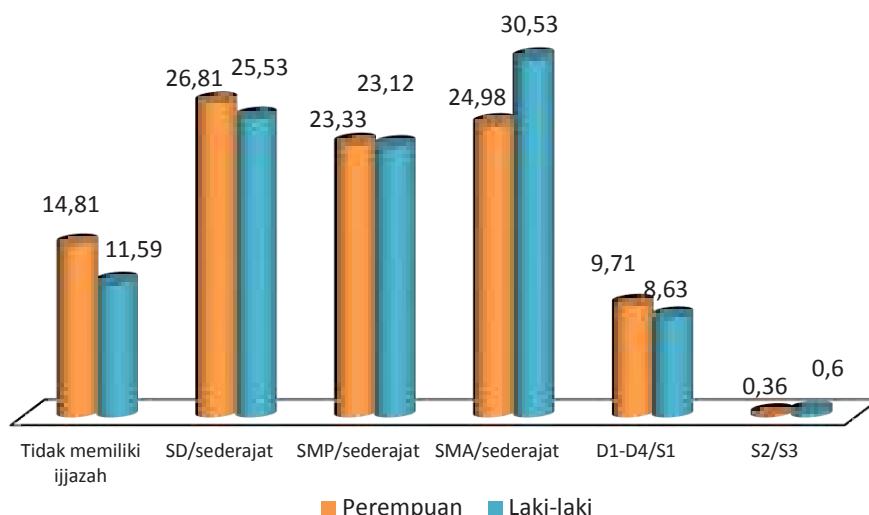
DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian tertinggi angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Angka melek huruf DKI Jakarta pada perempuan usia 15 tahun ke atas mencapai 99,57 persen, sedangkan pada laki-laki mencapai 99,91 persen atau hampir seluruh laki-laki di DKI Jakarta sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Provinsi lain yang mencapai angka melek huruf di atas 99 persen pada laki-laki dan perempuan adalah Sulawesi Utara dan Maluku, dengan Angka Melek Huruf pada laki-laki sebanyak 99,76 persen dan perempuan 99,83 persen di Provinsi Sulawesi Utara;

serta 99,50 persen pada laki-laki dan 99,28 persen pada perempuan di Provinsi Maluku.

Terdapat 21 provinsi yang telah mencapai angka melek huruf lebih dari target RPJMN tahun 2019 atau di atas 96,1 persen pada perempuan dan laki-laki (Tabel 1.2), selebihnya 13 merupakan provinsi dengan capaian angka melek huruf belum mencapai target RPJMN Tahun 2019, terutama pada perempuan. Beberapa provinsi seperti Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Kalimantan Utara telah mencapai angka melek huruf melebihi target 96,01 persen hanya pada penduduk laki-laki, sedangkan namun belum terjadi pada penduduk perempuan, di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Kalimantan Utara. Tiga provinsi dengan Angka Melek Huruf terendah di Indonesia Tahun 2019 adalah Provinsi Papua dengan Angka Melek Huruf perempuan hanya mencapai 73,07 persen dan laki-laki hanya mencapai 82,36 persen; NTB dengan Angka Melek Huruf pada Perempuan sebesar 83,49 persen dan laki-laki sebesar 92,12 persen; dan Jawa Timur dengan capaian Angka Melek Huruf pada perempuan sebesar 89,53 persen dan laki-laki sebesar 95,23 persen (Lihat Lampiran Tabel 1.2).

2. Pendidikan Tertinggi

Tingkat pendidikan seseorang merefleksikan capaian pendidikan tertinggi yang telah dijalani. Capaian pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan juga mencerminkan tingkat intelektualitas seseorang yang dapat berpengaruh pada status seseorang di lingkungan sosial budayanya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang maka akan semakin baik tingkat pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan cara berfikir kritis pada dirinya. Jika melihat capaian jenjang pendidikan yang paling tinggi dalam sistem pendidikan formal, yaitu S3 atau program doktoral, maka pada tahun 2019 ini capaian pendidikan formal tertinggi di Indonesia masih jauh dari harapan. Penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan tertinggi di tingkatan S2 dan S3 masih sangat rendah, yaitu hanya 0,36 persen pada perempuan dan 0,6 persen pada laki-laki (Gambar 1.4).

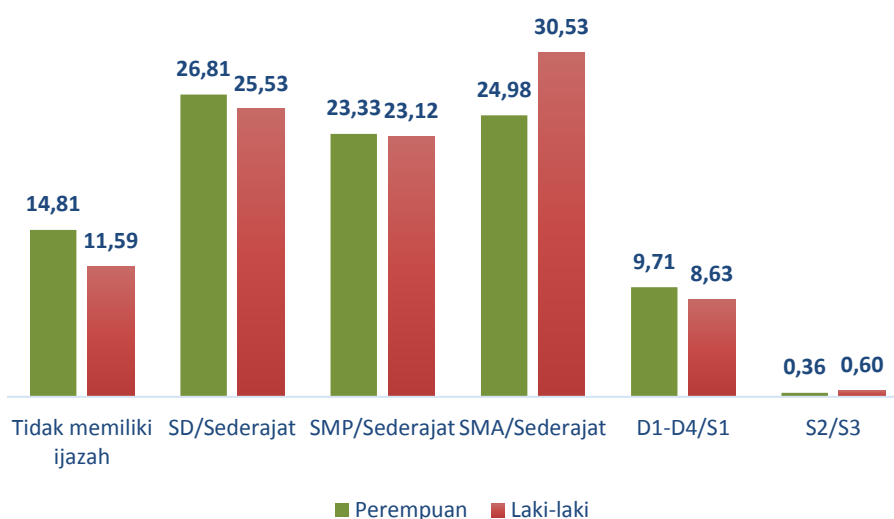


Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019.

Di tahun 2019, persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan dengan laki-laki yang telah menamatkan SD/ sederajat yaitu 26,81 persen untuk perempuan dan 25,53 persen untuk laki-laki, sedangkan SMP/ sederajat sebesar 23,33 persen untuk perempuan dan 23,12 persen untuk laki-laki. Jika pada tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat posisi perempuan lebih tinggi, maka di tingkat SMA/ sederajat menunjukkan hasil yang berbeda. Persentase laki-laki usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA/ sederajat lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan persentase untuk laki-laki sebesar 30,53 persen dan untuk perempuan sebesar 24,98 persen. Walaupun persentase perempuan yang telah menamatkan D1-D4/ S1 lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan persentase masing-masing 9,71 persen dan 8,63 persen, tetapi persentase laki-laki yang telah menamatkan pendidikan S2/S3 lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan besar masing-masing 0,60 persen dan 0,36 persen (Gambar 1.4).

Gambaran situasi yang tidak terlalu berbeda terlihat pada persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada penduduk usia 15-59 tahun. Kesenjangan berbasis jenis kelamin yang cukup signifikan terlihat pada jenjang pendidikan tingkat SMA/ sederajat dengan kesenjangan mencapai 5,69 persen (Gambar 1.5). Ketertinggalan perempuan di tingkat SMA/ sederajat ini masih sama dengan situasi di tahun 2018, dimana perempuan usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tertinggi di tingkat SMA/ sederajat sebesar 32,53 persen atau dalam kesenjangan sebesar 5,13 persen ketimbang laki-laki yang mencapai 37,70 persen (KEMEN PPPA, 2019).



Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.5 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pada Penduduk Usia 15-59 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berada dalam persentase yang cukup tinggi, baik pada perempuan maupun laki-laki, yaitu sebesar 11,59 persen untuk laki-laki dan 14,81 persen untuk perempuan. Penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah masih berjumlah lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena berbagai factor, diantaranya karena praktik budaya yang masih memosisikan perempuan tidak penting menempuh pendidikan, prioritas pendidikan bagi anak laki-laki

dalam keluarga kurang beruntung secara ekonomi, anak perempuan sudah dianggap cukup ketika sudah bisa membaca dan menulis meskipun tidak bersekolah formal, tingkat pendidikan orang tua rendah, kesadaran orang tua tentang pendidikan bagi perempuan, dan persepsi masyarakat tentang pendidikan yang cenderung beresiko merugikan perempuan (Nasir, 2017; Mujiati, Nasir, & Ashari, 2018; Rizaludin, Basri, & Arif, 2019).

Pertimbangan menyekolahkan perempuan juga masih dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran pada keselamatan perempuan, apalagi jarak sekolah jauh atau berada di kota yang berbeda. Nilai ekonomi pada anak laki-laki yang diorientasikan untuk menjadi kepala keluarga dan mampu mencari nafkah juga dapat menjadi alasan mengapa perempuan tidak memiliki ijazah atau tidak menempuh pendidikan formal secara baik. Karena itu, laki-laki lebih didorong untuk mendapatkan pendidikan formal lebih tinggi ketimbang perempuan. Kondisi ini tampak berkorelasi dengan persentase kepemilikan ijazah pada perempuan dan laki-laki, terutama di tingkat SMA/ sederajat sebagai bagian dari hak dasar pendidikan 12 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan provinsi, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah dengan persentase terbanyak berada di provinsi Gorontalo, dengan jumlah persentase 30,50 persen pada laki-laki dan 25,84 persen pada perempuan. Persentase yang cukup tinggi pada penduduk yang tidak memiliki ijazah juga terlihat di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dengan persentase lebih dari 20 persen. Jika dilihat perbandingan berdasarkan jenis kelaminnya, hampir seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan perempuan lebih banyak tidak memiliki ijazah dibandingkan laki-laki. Demikian juga terlihat pada Provinsi dengan kondisi penduduk usia 15 tahun ke atas yang paling sedikit tidak memiliki ijazah, yaitu DKI Jakarta. Persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah di DKI Jakarta paling rendah di tingkat nasional, dengan jumlah 1,88 persen untuk penduduk laki-laki dan 4,53 persen untuk perempuan (Gambar 1.6). Meskipun masih ada kesenjangan jumlah dengan kondisi kepemilikan ijazah pada perempuan lebih buruk ketimbang laki-laki, namun persentase

yang dicapai DKI Jakarta tahun 2019 patut menjadi contoh baik bagi provinsi lainnya.

Pada tahun 2019, masih dijumpai penduduk usia produktif 15-59 tahun yang tidak memiliki ijazah, dimana 10,88 persen penduduk perempuan dan 8,71 persen penduduk laki-laki. Jika dilihat sebaran provinsinya terdapat 21 provinsi dengan penduduk perempuan tidak memiliki ijazah di atas nilai Indonesia. Di sisi lain terdapat 20 provinsi dengan persentase penduduk laki-laki tidak memiliki ijazah melebihi nilai nasional. Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah lebih dari 20 persen (laki-laki 28,36 persen dan perempuan 22,89 persen).

Secara lebih spesifik, pada perempuan usia 60 tahun ke atas, lebih dari separoh setengah perempuan tidak memiliki ijazah dijumpai di 10 provinsi, yaitu di provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, NTB, NTT, dan Kalimantan Selatan; atau mendekati separoh setengah di provinsi Jawa Timur dan Selatan (Lihat Lampiran 1.7). Situasi ini hampir tidak terlihat pada persentase penduduk laki-laki usia 60 tahun ke atas, kecuali di Gorontalo dan NTB (Lihat Lampiran 1.8). Kesenjangan yang sangat lebar ini penting menjadi perhatian pemerintah agar kemandirian penduduk usia 60 tahun ke atas tidak terabaikan, terutama pada perempuan. Dengan demikian, meskipun sudah memasuki usia lanjut, laki-laki maupun perempuan tetap dapat hidup sehat, produktif, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada generasi yang lebih muda.

3. Partisipasi Sekolah

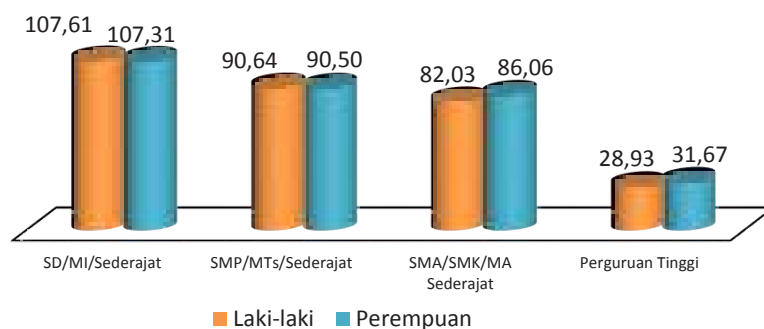
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada penduduk menunjukkan tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan formal di tingkat nasional. Pada tahun 2019, nilai APK laki-laki dan perempuan masih menggambarkan situasi yang tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ada, maka nilai APK laki-laki dan perempuan sama-sama

semakin menurun. Nilai APK perempuan untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat sebesar 107,31 persen, APK jenjang SMP/MTs/ sederajat sebesar 90,50 persen, APK jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 86,06 persen, dan APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) hanya sebesar 31,67 persen. Kondisi yang tidak jauh berbeda terlihat pada laki-laki (Gambar 1.7).

Nilai APK di tingkat pendidikan SD/MI/ sederajat nilainya lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat anak yang mengenyam pendidikan dasar diluar usia 7-12 tahun. Itu artinya, terdapat penduduk yang masih bersekolah di tingkat SD/MI/ sederajat yang berusia lebih dari 12 tahun sebagaimana usia yang disyaratkan dalam sistem pendidikan nasional. Tingginya partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang tertuang pada RPJMN 2015-2019, namun sayangnya capaian di atas 90 persen masih belum terlihat di tingkat SMA/MA/ SMK/ sederajat.

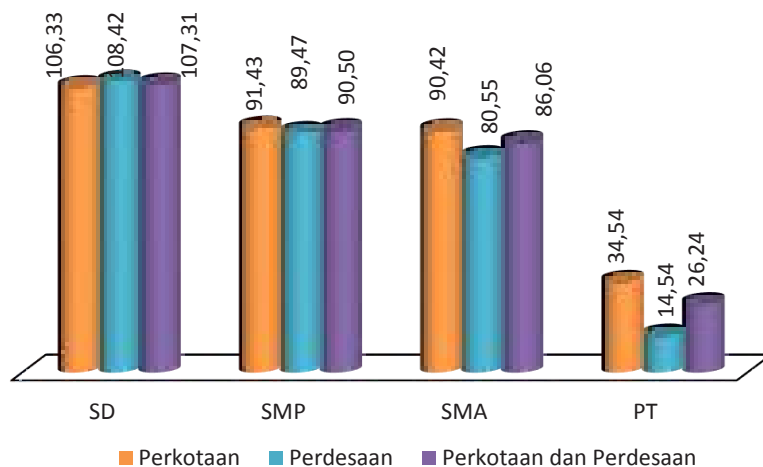
Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi perempuan di bidang pendidikan dapat dikatakan sudah mendekati posisi setara dengan laki-laki. Di jenjang pendidikan SD dan SMP dan sederajatnya, APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki. APK jenjang SD/MI/ sederajat untuk perempuan dan laki-laki yaitu 107,31 persen dan 107,61 persen, sedangkan APK jenjang SMP/MTs/ sederajat untuk laki-laki 90,64 persen dan perempuan 90,50 persen. Kondisi yang berbeda terlihat di APK tingkat menengah atas (SMA/MA/ SMK/ sederajat). APK perempuan cukup signifikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, APK perempuan mencapai 86,06 persen sedangkan laki-laki hanya 82,03 persen. Kondisi yang tidak berbeda terlihat pada jenjang perguruan tinggi, APK perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu sebesar 31,67 persen sedangkan laki-laki sebesar 28,93 persen (Gambar 1.7).



Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, 2019

Jika dibandingkan berdasarkan daerah tempat tinggal, APK perempuan pada jenjang pendidikan SD di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu sebesar 106,33 persen berbanding 108,42 persen. Kondisi sebaliknya terlihat di jenjang pendidikan SMP, SMA, dan PT, APK perempuan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, bahkan di tingkat perguruan tinggi (PT), APK perempuan di perkotaan hampir 2,5 kali lipat dibandingkan APK perempuan di perdesaan (Gambar 1.8). Kesenjangan ini dapat dipahami mengingat mayoritas perguruan tinggi berada di perkotaan. Selain itu, akses perempuan perdesaan pada perguruan tinggi masih dihadapkan pada berbagai kendala budaya, termasuk pelabelan masih mengungkung perempuan perdesaan melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini mengakibatkan perempuan perdesaan lebih tertinggal dalam mengembangkan dirinya sendiri di dalam keluarga dan sektor publik (Kusumaningrum, 2016). Faktor ekonomi juga menyulitkan posisi perempuan perdesaan dalam dilema antara memilih bekerja, menikah, atau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.



Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019.

Dibandingkan laki-laki, APK perempuan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan posisi perempuan lebih unggul di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di perkotaan, APK laki-laki lebih tinggi dari perempuan hanya di jenjang SD dan SMP, namun di jenjang SMA dan Perguruan tinggi, APK perempuan lebih tinggi daripada APK laki-laki. Gambaran sedikit berbeda terlihat di wilayah perdesaan. APK laki-laki lebih tinggi hanya di jenjang SD, sementara di jenjang SMP sampai perguruan tinggi, nilai APK perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Secara khusus, untuk jenjang SMA/ sederajat, ketertinggalan laki-laki cukup signifikan, yaitu 4,53 persen lebih rendah dibandingkan perempuan (Tabel 1.3).

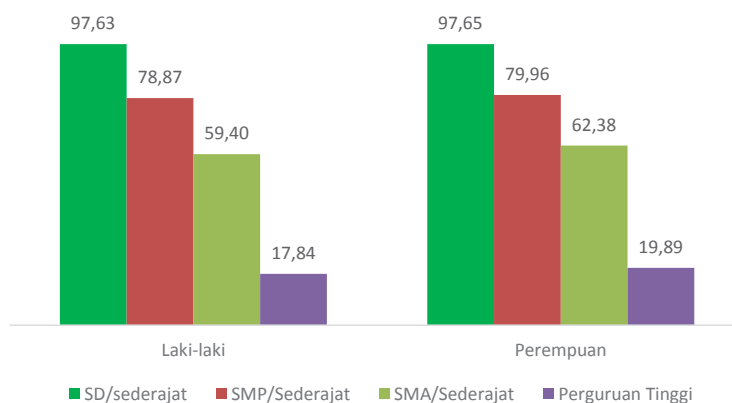
Tabel 1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019.

Jenis Kelamin	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
Perempuan	106,33	91,43	90,42	34,54	108,42	89,47	80,55	14,54	107,31	90,50	86,06	26,24
Laki-laki	106,47	92,77	87,45	31,80	108,99	88,10	75,02	12,75	107,61	90,64	82,03	24,05

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) laki-laki dan perempuan di tahun 2019 menunjukkan situasi yang hampir sama dengan APK. Pola yang sama juga terlihat pada APM laki-laki dan perempuan, yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan penduduk maka semakin rendah jumlah penduduk yang berpartisipasi di dalamnya. Di tahun 2019, tidak ada nilai APM yang mencapai angka 100 persen di seluruh jenjang pendidikan formal baik di tingkat dasar, menengah, maupun tingkat atas (Gambar 1.8). Data ini menginformasikan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan yang seharusnya ditempuh.

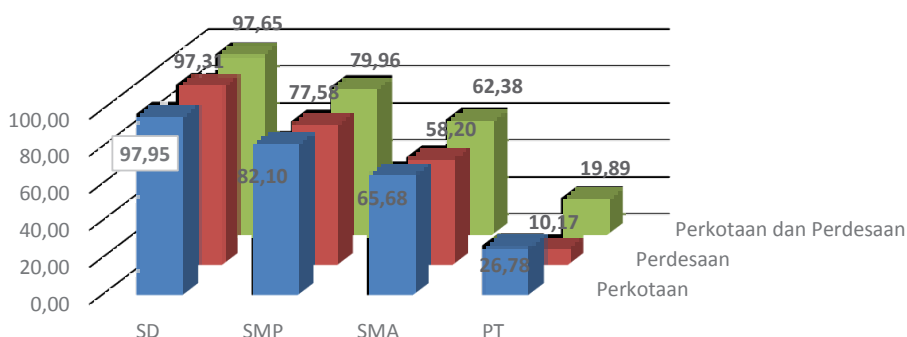


Sumber: BPS, Susenas 2019.

Gambar 1.8. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin, 2019.

Pada kelompok perempuan, jenjang pendidikan SD/ sederajat memiliki nilai APM paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Hal tersebut terjadi baik di perdesaan maupun di perkotaan. Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, perbedaan APM antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga semakin terlihat kesenjangannya. Sebagaimana nilai APK, pada APM juga terlihat kesenjangan di perdesaan semakin melebar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan APM antara wilayah perkotaan dan perdesaan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan tinggi

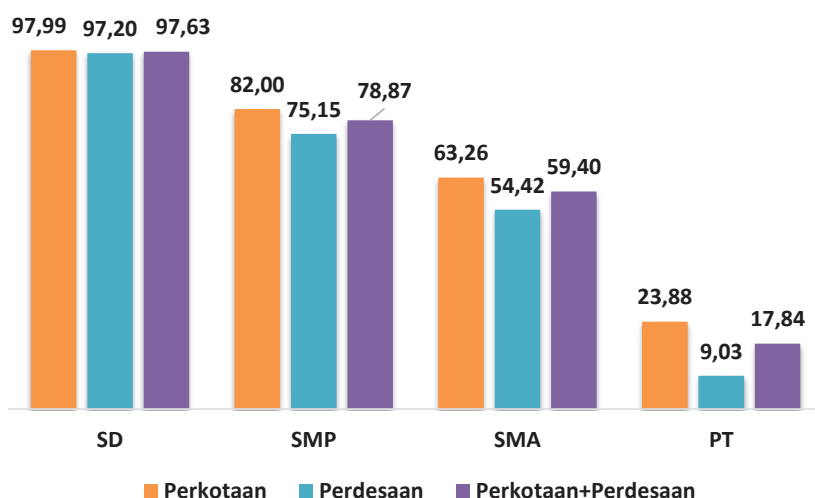
atau Perguruan Tinggi dengan perbandingan kesenjangan hingga mencapai 2 kali lipat. APM perempuan di perkotaan mencapai 26,78 persen namun APM perempuan di perdesaan hanya mencapai 10,17 persen (Gambar 1.9).



Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.8. Angka Partisipasi Murni Perempuan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019

Pola yang sama juga terjadi pada APM untuk kelompok laki-laki. Persentase APM laki-laki di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan (Tabel 1.10). Hal ini semakin memperkuat analisis tentang aksesibilitas di perkotaan jauh lebih terbuka dan terjangkau dibandingkan di perdesaan. Penduduk perdesaan harus menyediakan biaya yang lebih besar untuk bisa mengakses layanan pendidikan di perkotaan dibandingkan penduduk yang tinggal di perkotaan. Lembaga-lembaga penyedia layanan Pendidikan yang berkualitas dan memiliki fasilitas lengkap, baik negeri maupun swasta juga lebih banyak berada di wilayah perkotaan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan mengapa partisipasi murni penduduk di bidang pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan masih menunjukkan kesenjangan di perdesaan.



Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019

Kesenjangan partisipasi di bidang pendidikan berbasis kota dan desa ini semakin terlihat kuat melalui nilai sebaran APM berdasarkan provinsi. Baik pada perempuan maupun laki-laki, kesenjangan di wilayah perdesaan merata terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, baik pada laki-laki maupun perempuan yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan, tidak ada APM yang mencapai 100 persen di semua jenjang pendidikan yang ada (lihat lampiran 1.14 dan 1.15). Data ini menunjukkan masih adanya penduduk yang belum menikmati bangku sekolah pada usia yang seharusnya mereka memiliki pengalaman belajar di tingkatannya.

Pada kelompok perempuan, untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat, provinsi dengan APM perempuan terendah di perkotaan terjadi di provinsi Papua Barat sebesar 90,12 persen, sedangkan di perdesaan terjadi di provinsi Papua yang hanya mencapai 74,37 persen. Provinsi dengan APM perempuan jenjang SD/MI/ sederajat tertinggi di perkotaan terdapat di provinsi Lampung sebesar 99,80 persen, sedangkan di perdesaan terdapat di Jambi sebesar 99,53. Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, provinsi yang mencapai APM di atas 80 persen untuk kelompok perempuan yang tinggal

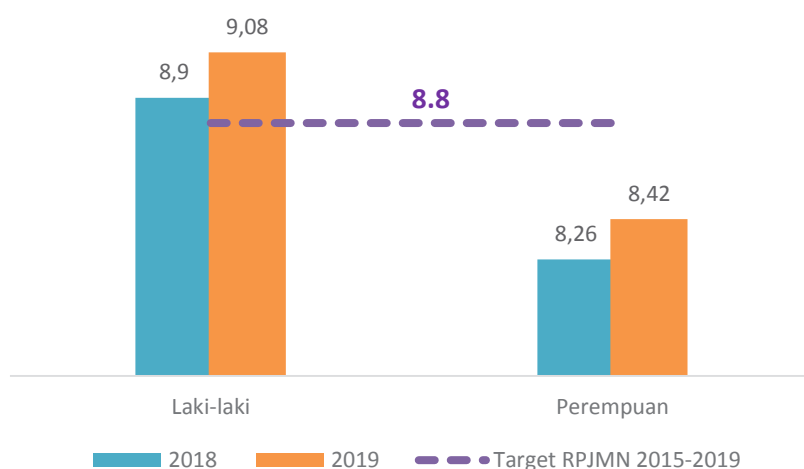
di wilayah perkotaan hanya terdapat di 16 provinsi diantaranya Provinsi Aceh, Banten, Bali dan NTB; sedangkan di perdesaan hanya dicapai oleh 10 provinsi, diantaranya di provinsi Bali, Lampung, dan Kepulauan Riau. Provinsi dengan capaian APM perempuan di perdesaan tertinggi di provinsi DI Yogyakarta dengan nilai APM sebesar 93,59 persen (Lihat lampiran table 1.14).

Untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat bagi kelompok perempuan, hanya hanya terdapat 13 provinsi di perkotaan yang memiliki nilai APM di atas 70 persen, diantaranya adalah Aceh, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. APM tertinggi untuk jenjang SMA/ sederajat di wilayah perkotaan terdapat di provinsi Sumatera Barat dengan capaian APM sebesar 80,42 persen. Untuk wilayah perdesaan, Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan capaian APM jenjang SMA/ sederajat tertinggi yaitu sebesar 84,71 persen. Provinsi dengan capaian APM jenjang SMA/ sederajat di atas 70 persen di perdesaan hanya terdapat 4 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan DI Yogyakarta. Pada tingkat Perguruan Tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan APM perempuan tertinggi, yaitu sebesar 52,83 persen, sedangkan yang terendah di Provinsi Maluku dengan capaian APM perempuan sebesar 23,25 persen (lihat lampiran tabel 1.14)

4. Lama Sekolah

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia dapat dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah yang dijalani perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah pada perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah pada laki-laki sudah mencapai 8,90 tahun, sedangkan pada perempuan mencapai 8,26 tahun (Kemen PPPA, 2019). Di tahun 2019, capaian rata-rata lama sekolah pada laki-laki meningkat menjadi 9,08 tahun sedangkan pada perempuan juga mengalami kenaikan menjadi 8,42 tahun. Baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019, capaian rata-rata lama sekolah pada perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dan belum mencapai target RPJMN

2014-2019 yang menetapkan selama 8,8 tahun, sedangkan pada laki-laki, capaian rata-rata lama sekolah sudah melebihi target RPJMN (gambar 1.11). Capaian rata-rata lama sekolah ini cukup jauh dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin tahun 2019, yaitu 12,87 tahun pada laki-laki dan 13,03 tahun pada perempuan (BPS, 2020).



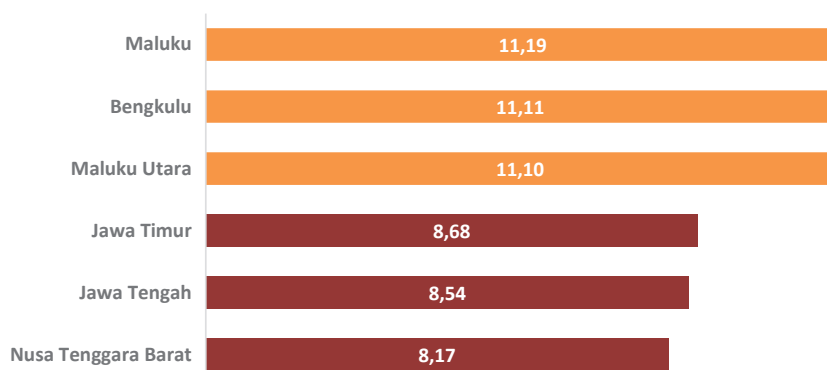
Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.10. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019

Dengan capaian rata-rata lama sekolah tersebut, maka rata-rata lama sekolah pada perempuan setara dengan hampir mencapai kelas 8 9 SMP/ sederajat; sedangkan rata-rata sekolah laki-laki sudah mencapai kelas 8 atau sudah menyelesaikan jenjang sekolah SMP/ sederajat dan mencapai kelas 9 SMA/ sederajat (Gambar 1.11). Gambaran rata-rata lama sekolah ini mengindikasikan kelompok perempuan lebih banyak yang tidak sampai jenjang sekolah menengah atas dan atau tidak menamatkan jenjang pendidikannya di tingkat SMP/ sederajat; sedangkan laki-laki lebih banyak yang telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat SMP/ sederajat namun belum menuntaskan jenjang Pendidikan di tingkat SMA/ sederajat. Rata-rata lama sekolah yang dicapai pada tahun 2019 ini masih jauh dibawah harapan program wajib belajar 12

tahun yang telah dicanangkan pemerintah serta angka harapan lama sekolah, baik pada perempuan maupun pada laki-laki.

Pada kelompok jenis kelamin perempuan usia 15 tahun ke atas yang tinggal di perkotaan, provinsi dengan rata-rata lama sekolah terlama berada di provinsi Maluku, yaitu 11,19 tahun atau setara dengan kelas 11 SMA/ sederajat atau sedang di kelas 12 SMA/ sederajat. Provinsi lain yang mencapai rata-rata lama sekolah hingga 11 tahun di wilayah perkotaan hanya terjadi di dua provinsi lainnya, yaitu Provinsi Bengkulu dan Maluku Utara. Untuk provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah terendah di wilayah perkotaan terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas selama 8,17 tahun atau bersekolah sampai dengan kelas 8 SMP/ sederajat. Provinsi dengan capaian terendah lainnya terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan rata-rata lama sekolah perempuan mencapai 8,54 tahun dan 8,68 tahun (Gambar 1.12, lihat detail di Lampiran Tabel 1.11).

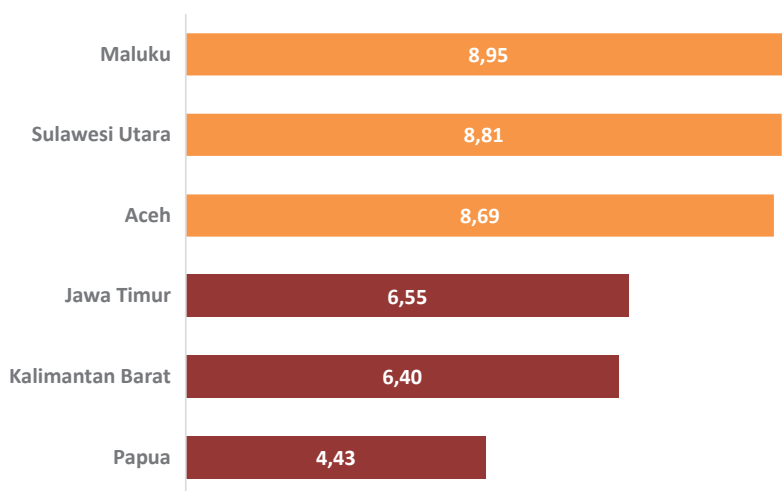


Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.11 Provinsi dengan Capaian Rata-rata Lama Sekolah pada Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Perkotaan dan Capaian Paling Lama dan Paling Sebentar Tinggi dan Paling Rendah, 2019

Di wilayah perdesaan, terjadi kesenjangan yang signifikan pada rata-rata lama sekolah pada perempuan usia 15 tahun ke atas. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah perempuan tertinggi di wilayah perdesaan berada di provinsi Maluku

dengan capaian sebesar 8,95 tahun atau setara dengan kelas 9 SMP/ sederajat. Provinsi dengan capaian kurang lebih sama dengan Maluku adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Aceh dengan capaian rata-rata lama sekolah 8,81 tahun dan 8,69 tahun. Di wilayah perdesaan untuk kelompok perempuan, hanya provinsi Maluku dan Sulawesi Utara yang berhasil mencapai target RPJMN 2019 sebesar 8,8 tahun. Sementara itu, untuk wilayah perdesaan dengan capaian rata-rata lama sekolah terendah terjadi di provinsi Papua dengan capaian hanya 4,43 tahun atau setara dengan sampai kelas 4 SD/ sederajat saja. Provinsi dengan capaian terendah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Jawa Timur dengan capaian selama 6,55 tahun dan 6,40 tahun atau setara dengan kelas 6 SD/ sederajat atau baru menyelesaikan Pendidikan di tingkat SD/ sederajat (Gambar 1.13, lihat detail di Lampiran Tabel 1.11).

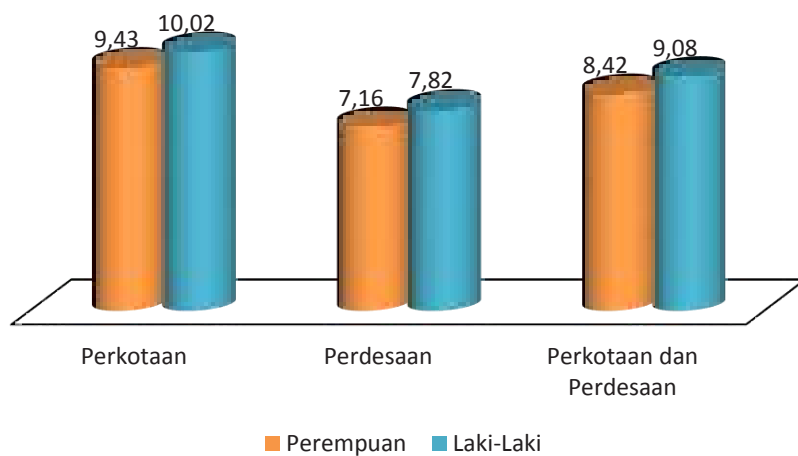


Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Gambar 1.12 Provinsi dengan Capaian Rata-rata Lama Sekolah pada Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Perdesaan dan Capaian Paling Lama dan Paling Sebentar Tinggi dan Paling Rendah, 2019

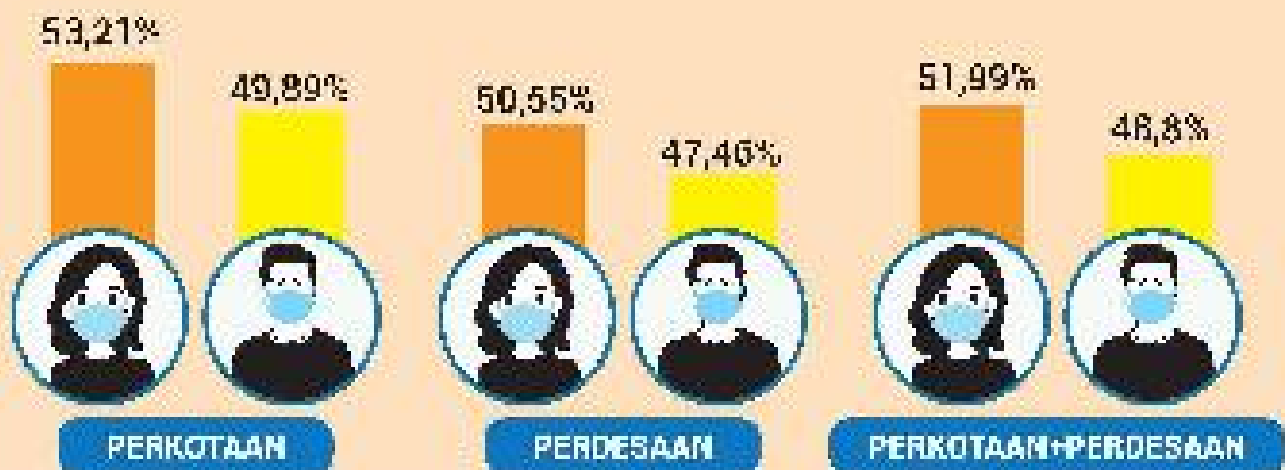
Jika dibandingkan dengan laki-laki berdasarkan wilayah tempat tinggal, baik di perdesaan maupun di perkotaan, rata-rata lama sekolah perempuan usia 15 tahun ke atas masih lebih rendah dibanding laki-laki. Pada wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah perempuan 15 tahun ke atas lebih tinggi

dibandingkan di perdesaan. Perempuan di perkotaan telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP/ sederajat, sedangkan perempuan di perdesaan hanya mampu menamatkan sekolah sampai dengan kelas 6 SD/ sederajat. Kecenderungan yang sama juga terlihat untuk laki-laki 15 tahun ke atas di perkotaan yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SMP, sedangkan laki-laki di perdesaan mempunyai rata-rata lama sekolah sebesar 7,82 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat atau sedang di kelas 8 SMP/ sederajat (Gambar 1.14).



Gambar 1.13. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia 15 tahun Ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.

KELUHAN KESEHATAN



Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan



PEREMPUAN
USIA 10+
BERSTATUS
KAWIN
MENURUT USIA
KAWIN PERTAMA



BAB 2. PEREMPUAN DAN KESEHATAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus terpenuhi dengan kualitas kesehatan yang paling tinggi, termasuk pada perempuan. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagai bagian dari HAM, kesehatan perempuan menjadi isu penting di semua tingkatan, baik di tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas kesehatan perempuan akan berpengaruh pada peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara di tingkat global. Karena itulah, setiap upaya yang diorientasikan untuk peningkatan derajat kesehatan perempuan harus setara dengan upaya yang sama bagi laki-laki. Prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan merupakan tiga prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam memastikan derajat kesehatan perempuan dapat ditingkatkan.

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan berdampak positif tidak hanya pada diri perempuan saja. Meningkatnya kesehatan perempuan juga akan namun juga menguntungkan dan berpengaruh pada derajat kesehatan pihak lain yang berelasi dengan perempuan. Setidaknya, ada tiga kelompok yang akan mendapatkan keuntungan langsung atas status kesehatan perempuan, pertama janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis secara langsung dari perempuan, yaitu ketika janin masih di dalam rahim perempuan dan bayi yang masih menerima ASI; kedua,

keluarga yang memiliki hubungan biologis dengan perempuan, yaitu anak dan orang tua dari perempuan; dan ketiga, laki-laki yang memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan perempuan, yaitu suami. Tingginya ketergantungan kesehatan tiga kelompok ini pada perempuan dikarenakan tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada perempuan. Selain kepada keluarga, kesehatan perempuan juga berdampak tidak langsung bagi masyarakat sekitarnya, pekerjaannya, serta kemajuan bangsa dan negara. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa gangguan kesehatan (termasuk pada perempuan) dapat merugikan ekonomi yang besar bagi negara, dan peningkatan kesehatan yang dilakukan negara sejatinya bermakna investasi bagi pembangunan negara Indonesia.

Di Indonesia, upaya pemenuhan kesehatan masyarakat, termasuk perempuan telah dilakukan dengan upaya yang maksimal. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kesungguhan negara di bidang kesehatan adalah kenaikan anggaran APBN untuk kesehatan. Di tahun 2019, anggaran kesehatan di Indonesia naik 1,2 Triliun dari RAPBN 2019 2018, sehingga alokasi anggaran bagi kesehatan di Indonesia tahun 2019 bernilai 123,1 Triliun atau sekitar 5% dari Belanja APBN (Visual.kemenkeu.go.id). Meskipun persentase anggaran kesehatan ini belum memenuhi ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan alokasi kesehatan di setiap negara minimal 15% dari total APBN atau setara dengan 5% PDB Produk Domestik Bruto (PDB), namun setidaknya sudah sejalan dengan amanat pasal 171 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menetapkan alokasi anggaran kesehatan pemerintah minimal 5% dari APBN. (pasal 171). Anggaran ini harus dialokasikan sebanyak 2/3-nya untuk pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, usia lanjut, dan anak terlantar (pasal 172), serta secara spesifik perbaikan gizi harus memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja perempuan, dan ibu hamil dan menyusui (pasal 142).

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan manusia

dilakukan dalam bentuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Berbagai program pembangunan dikembangkan dengan berbagai pendekatan, terutama pendekatan kesehatan, peningkatan pengetahuan, keterbukaan akses, perubahan budaya, perlindungan finansial, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan ejawantah dari amanat pembangunan nasional yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang sejalan dengan tujuan ke-3 dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu **memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, termasuk perempuan.**

Terdapat 9 target utama dari tujuan ke-3 SDG's yang diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2030, yaitu (1) mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran, **(2)** mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran, **(3)** mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya, **(4)** mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan, **(5)** Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol, **(6)** secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, **(7)** akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional, **(8)** Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obatobatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua, **(9)** mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah (www.sdg2030indonesia.org).

Capaian yang telah diperoleh setiap negara dalam upaya memenuhi target SDGs ini dilaporkan melalui *Voluntary National Review* (VNR). Dalam laporan VNR tahun 2019 menunjukkan bahwa hampir semua negara VNR telah menunjukkan komitmennya untuk isu kesehatan. Mayoritas negara telah melaporkan perkembangan kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang membaik. Kesehatan dinilai sebagai prasyarat kunci dalam memastikan keberhasilan capaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan agenda 2030 mendatang. Hampir semua negara menjadikan kesehatan sebagai salah satu indikator utama yang membutuhkan strategi solusi lintas sektoral untuk mendapatkan capaian maksimal dan mengakui dampak positif teknologi dalam memaksimalkan upaya promosi kesehatan, perlindungan, dan pengobatan dengan tetap berprinsip pada '*no one left behind*' (United Nations, 2019).

Indonesia sebagai salah satu negara yang disebutkan dalam laporan VNR tahun 2019 dilaporkan dijelaskan sebagai salah satu negara yang memiliki strategi dan kebijakan khusus yang diberlakukan untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan dan memastikan kesehatan dan kesejahteraan untuk semua. Namun demikian, baik Indonesia maupun sejumlah negara lain mengakui adanya kekhawatiran atas tantangan yang masih ada, yang meliputi: (1) populasi yang tumbuh, menua dan beragam; (2) pertumbuhan ekonomi yang lambat akhir-akhir ini; (3) meningkatkan kualitas layanan; (4) kapasitas finansial dan teknis; (5) penyakit tidak menular dan menular; (6) implikasi kesehatan dari perubahan iklim dan bencana alam; (7) kurangnya tenaga medis, termasuk kesenjangan antara jumlah tenaga medis di perkotaan dan pedesaan; (8) kekerasan, termasuk dari serangan teroris, sebagai penyebab utama kematian; dan (9) jumlah kematian yang signifikan akibat kecelakaan lalu lintas (United Nations, 2019:40)

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) tahun 2014-2019 pada agenda ke 5, yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja Indonesia sejahtera. Program Indonesia Sehat memiliki 3 komponen utama, yang terdiri

dari 1) Revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat, yang dilakukan sejak dini dengan indikator penurunan AKI, AKB, dan bayi dengan stunting; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan, dengan tujuan pemerataan fasilitas layanan kesehatan dan rujukan, terutama di wilayah pinggiran, dan pemerataan tenaga kesehatan (Nakes) di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); dan 3) Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan indikator kepesertaan BPJS dan fasilitas kesehatan yang bergabung dalam program JKN (www.kemendes.go.id).

Untuk mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat terbaik sebagaimana nawa cita pemerintah yang telah diintegrasikan dalam RPJMN dan sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka kesehatan perempuan menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Selain karena mayoritas kualitas kesehatan keluarga masih bergantung pada perempuan karena beban budaya yang masih menuntut perempuan bertanggung jawab atas kesehatan keluarga, namun sejatinya, status kesehatan perempuan merefleksikan sejauh mana keadilan sosial bagi perempuan telah diwujudkan. Merujuk pada teori Henrik L. Blum (1974) yang menyebutkan bahwa 4 faktor determinan yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang adalah faktor gaya hidup, faktor lingkungan, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan budaya), faktor keturunan/genetik, dan faktor pelayanan kesehatan yang terdiri dari jenis, cakupan, dan kualitas, maka realitas kesehatan perempuan juga dipengaruhi 4 faktor tersebut.

Kesehatan perempuan memiliki kompleksitas yang lebih dibandingkan laki-laki. Perbedaan biologis dalam organ reproduksi yang dimiliki perempuan berkonsekuensi pada perhatian yang lebih pada isu kesehatan perempuan. Selain itu, problem kesehatan perempuan tidak bisa hanya dilihat dari perspektif biologis semata, namun juga aspek psikologis, sosial, dan kultural menjadi komponen penting yang memengaruhi status kesehatan perempuan. Sunat perempuan, *premenstrual syndrom*, kehamilan yang tidak diinginkan, pemaksaan perkawinan, komplikasi kehamilan, penggunaan alat kontrasepsi, hingga angka kematian ibu masih menjadi problem kesehatan reproduksi perempuan yang masih menjadi agenda

besar. Status kesehatan perempuan sangat berhubungan dengan diri perempuan sebagai subyek atau obyek, bergantung pada relasi yang setara atau timpang, keberpihakan, serta kesadaran dan akses perempuan terhadap sumber-sumber daya terkait kesehatan, baik sumber informasi, pengetahuan, pelayanan kesehatan dan control terhadap sumber dana yang ada. Oleh karena itulah, urgensi status kesehatan perempuan harus dilihat secara komprehensif, termasuk posisinya dalam pengambilan keputusan.

B. Definisi Konseptual

1. Kesehatan

UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi ini sama sejalan dengan WHO (1958) yang mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi seseorang yang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya (diukur dari) tidak adanya penyakit dan kelemahan pada tubuhnya. Definisi ini menunjukkan pergeseran makna kesehatan yang sebelumnya hanya dilihat dari aspek fisik semata. Karena itu, penyakit tidak lagi dilihat sebagai sebuah kondisi, namun merupakan proses dari dampak yang dialami seseorang karena berbagai faktor yang ada di sekelilingnya, termasuk gaya hidup, pola makan, lingkungan, dan keterjangkauan pada fasilitas kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Indonesia dilakukan dengan menerapkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (Pasal 2 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (pasal 3). Oleh

karena itu, pembangunan kesadaran tentang kesehatan dan upaya promosi kesehatan yang terus menerus memungkinkan setiap individu untuk melakukan ikhtiyar dan kontrol atas kesehatannya. Penilaian atas kesehatan seseorang tidak lagi semata-mata bergantung sepenuhnya pada tenaga medis, namun juga dapat dikembangkan melalui penguatan mental dan kesadaran individu masing-masing sehingga partisipasi masyarakat untuk menciptakan rasa sehat dan meningkatkan kualitas kesehatan diri dan lingkungannya dapat lebih mudah dicapai.

2. Lingkungan Sehat

Lingkungan sehat merupakan kondisi lingkungan yang dapat menopang dan mendukung kesehatan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di dalam pasal 162 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menekankan tujuan kesehatan lingkungan pada upaya menciptakan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, lingkungan yang sehat tidak berisiko timbulnya suatu penyakit atau risiko lain yang berdampak pada kualitas kesehatan makhluk yang hidup di dalamnya, terutama manusia.

Beberapa indikator lingkungan sehat dalam UU Kesehatan ini dapat dilihat dari ketiadaan unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluhan kesehatan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa,

termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (www.sirusa.bps.go.id). Gangguan kesehatan fisik dapat berupa sesak nafas, panas, diare, sakit kepala, penyakit kronis dan akut, atau gangguan kesehatan karena kecelakaan. Sedangkan gangguan jiwa atau psikis dapat berupa rasa tertekan atau depresi, gelisah, ketakutan, trauma, skizofrenia, atau gangguan psikis lain yang berkaitan dengan gangguan cara berpikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), dan perilaku (*psychomotor*).

Dalam data BPS, angka kesakitan merujuk pada jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir dan merasa terganggu kegiatannya sehari-hari dikarenakan keluhan kesehatan dibandingkan jumlah seluruh penduduk. Data keluhan kesehatan dan angka kesakitan ini bermanfaat dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum sebagai basis data yang digunakan untuk mengembangkan upaya pembangunan di bidang kesehatan, yang dapat diakses semua lapisan masyarakat sehingga memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata demi tercapainya derajat kesehatan laki-laki dan perempuan yang terbaik (www.sirusa.bps.go.id).

4. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan (JKN) merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN ini bersifat asuransi sosial yang meliputi (1) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; (2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; (3) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; (4) bersifat nirlaba. Dalam implementasinya, JKN menerapkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya (www.djsn).

go.id). Di dalam UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menetapkan seluruh warga Indonesia wajib turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial (pasal 13). Dengan mengikuti jaminan kesehatan baik melalui sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah, memberi kepastian layanan kesehatan yang lebih terjamin, terutama pada situasi gangguan kesehatan akut dan kronis.

Untuk memastikan jaminan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, pemerintah membagi peserta JKN (peserta BPJS) melalui dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI JK). Keanggotaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) diprioritaskan pada peserta Jaminan Kesehatan dari kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari: (1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, (2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, dan (3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya (www.jkn.kemkes.go.id). Masyarakat yang termasuk non PBI JK diantaranya ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, pekerja mandiri, dan pensiunan.

5. Fasilitas Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan mendefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Di dalam pasal 4 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan dibagi dalam dua bentuk, yaitu (1) pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau (2) pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan

jenisnya, fasilitas kesehatan dapat berupa 10 varian berikut ini, yaitu (1) tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, (2) pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), (3) klinik, (4) rumah sakit, (5) apotek, (6) unit transfusi darah, (7) laboratorium kesehatan, (8) optikal, (9) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan (9) fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Semua jenis fasilitas kesehatan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (non pemerintah).

Fasilitas kesehatan memiliki tingkatan layanan yang berbeda. Terdapat 4 tingkatan layanan fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan jenisnya, yaitu (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan dasar, (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua memberikan pelayanan kesehatan spesialis (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga memberikan pelayanan kesehatan subspesialis, dan (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat dibawahnya. Untuk memastikan ketercapaian derajat kesehatan masyarakat dengan keterjangkauan fasilitas kesehatan secara merata, UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 14-17 menetapkan bahwa pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang ramah bagi semua lapisan sosial ekonomi masyarakat, menjamin ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata, dan bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.. Dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, Pemerintah dapat mempertimbangkan unsur-unsur luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi (pasal 35). Oleh karena itu, dalam pasal 31 dan 32 dijelaskan bahwa fasilitasn kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

dan dalam keadaan darurat fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

6. Tenaga Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 1 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat berupa dokter, psikolog, perawat, bidan, apoteker, pembimbing kesehatan, tenaga administrasi kesehatan, tenaga biostatistik, tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, ahli gizi, terapis, penata anestesi, radiographer, ahli laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, ortotik prostetik, tenaga kesehatan tradisional berketerampilan, dan tenaga kesehatan tradisional ramuan.

Setiap tenaga kesehatan memiliki kualifikasi minimum yang berbeda-beda. Dalam memastikan mutu profesionalitas tenaga kesehatan, pemerintah wajib mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Pasal 21 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pasal 26 UU Kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk kepentingan pemerataan pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Selain mengenai penempatan, UU ini juga mengatur tentang kewenangan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan sesuai bidang keahliannya dengan izin dari pemerintah. Setiap fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat (non pemerintah) dilarang mengutamakan pada kepentingan yang bernilai materi (pasal 23).

7. Keluarga Berencana

Undang-undang nomor Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (pasal 1). Keluarga berencana berorientasi pada terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sehat, tidak hanya pada anak-anak yang akan dilahirkan, namun terutama pada kesehatan perempuan yang mengemban peran kodrati dalam proses kehamilan dan persalinan. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam keluarga berencana berorientasi pada setidaknya di 5 aspek berikut: (1) pengaturan kehamilan yang diinginkan; (2) menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; (3) meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (4) meningkatkan partisipasi dan keterlibatan laki-laki dalam praktik keluarga berencana; dan (5) mempromosikan pemberian ASI sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan (pasal 20-21 UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Dalam memastikan tujuan terbangunnya keluarga berencana tercapai, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana yang secara spesifik bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Keputusan penting yang terkait dengan keluarga berencana mencakup usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi (UU No. 52/2009 pasal 21). Selain penguatan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, UU Kesehatan juga menetapkan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana

pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana (pasal 77), dan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat (pasal 78).

Cara mengatur waktu kehamilan dapat dilakukan secara alami/tradisional dan modern. Contoh kontrasepsi alami adalah senggama terputus (*coitus interruptus*) dan pantang berkala/kalender; sedangkan contoh kontrasepsi modern yang digunakan perempuan adalah sterilisasi/tubektomi/MOW, IUD/AKDR/spiral, suntikan, susuk/implan, pil, intravag/kondom wanita/diafragma; menyusui alami (metode amenore laktasi/LAM), metode sympto-thermal (pengecekan perubahan lendir serviks, suhu tubuh dan konsistensi serviks), metode *two day* (pengamatan keberadaan lendir serviks), dan kontrasepsi yang digunakan laki-laki adalah sterilisasi/vasektomi/MOP dan kondom.

8. Air Bersih dan Air Layak Rumah Tangga

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber-sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun. Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisa jadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 6 SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci. Di antara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SDGs ini melalui sejumlah kebijakan program pembangunan yang ada.

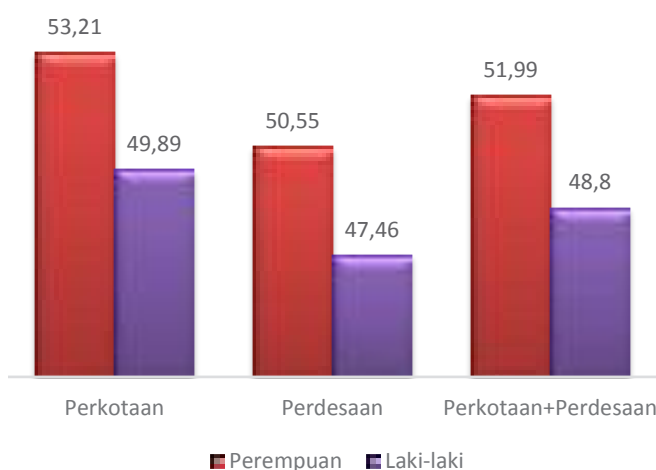
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menegaskan bahwa air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (pasal 1). Badan Pusat Statistik mendefinisikan air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah (www.sirusa.bps.go.id). Akses terhadap sumber air berkualitas dan layak konsumsi bagi rumah tangga, termasuk perempuan dan laki-laki ini penting dianalisis karena air yang tidak berkualitas dapat menjadi penyebab langsung berbagai penyakit.

C. Pembahasan

1. Keluhan kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat berpengaruh terhadap kualitas kehidupannya. Salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui evaluasi tingkat keluhan kesehatan yang dilaporkan,

baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Data keluhan kesehatan dapat menjadi dasar pertimbangan suatu negara dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk lebih memastikan kesehatan masyarakat terpenuhi secara ideal melalui program-program yang kongkrit. Pada tahun 2019, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam satu bulan terakhir lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan perbandingan sebesar 51,99 persen pada perempuan dan 48,8 persen pada laki-laki (Gambar 2.1). Keluhan kesehatan dengan posisi perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki ini terjadi di perkotaan dan perdesaan dengan persentase lebih rendah di perdesaan.

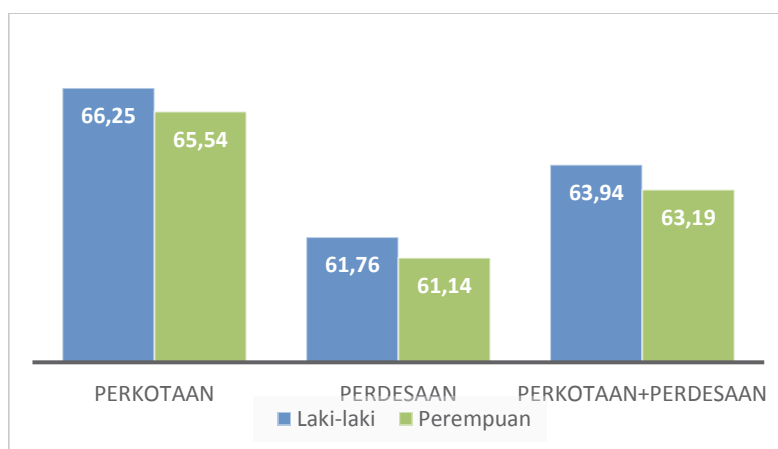


Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.1. Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019

Lebih tingginya laporan keluhan kesehatan di wilayah perkotaan dapat mengindikasikan adanya kesenjangan pada pengetahuan dan layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat perkotaan dan perdesaan. Dalam studi kasus yang dijumpai, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengetahuan dengan keluhan kesehatan, termasuk sikap dan tindakan terhadap keluhan kesehatan masyarakat perdesaan (Kurniadi, 2018).

Merespon keluhan kesehatan dan sakit, seseorang dapat melakukan pengobatan sendiri atau mengupayakan pengobatan. Di tahun 2019, persentase laki-laki yang melakukan pengobatan sendiri atau mengupayakan melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri tanpa saran atau resep dari tenaga kesehatan sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan atau dapat dikatakan hampir sama, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan, terdapat 66,25 persen laki-laki yang melakukan pengobatan sendiri atas sakit atau keluhan sakit yang dirasakan, sedangkan perempuan sebanyak 65,54 persen, atau hanya berbeda 0,71 persen saja. Keadaan yang tidak berbeda terlihat di perdesaan, perbedaan perempuan dan laki-laki yang melakukan pengobatan sendiri hanya 0,64 persen saja (Gambar 2.2).

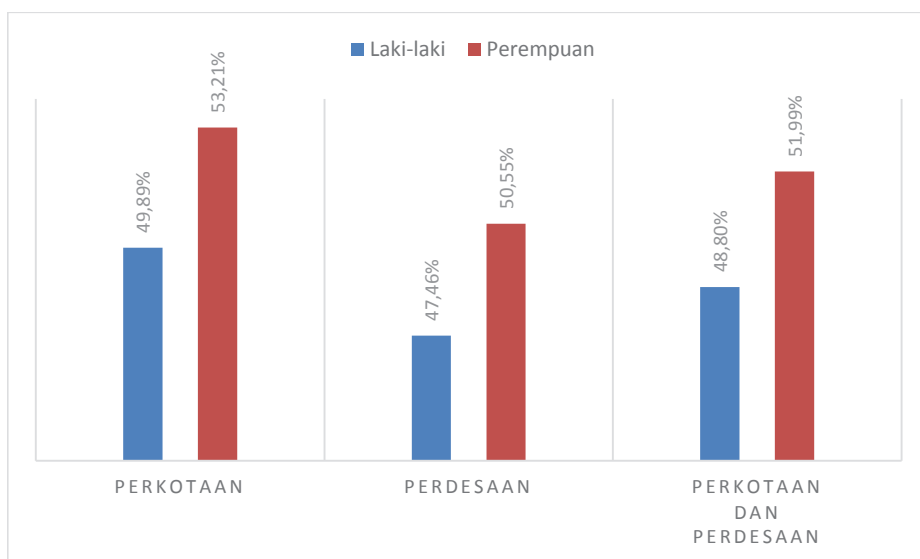


Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan, Sakit, dan Tidak Berobat Jalan Karena Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019

Kondisi yang berbeda terlihat pada perempuan yang melakukan berobat jalan dalam sebulan terakhir. Dalam mengupayakan berobat jalan, perempuan atau laki-laki melakukan upaya memeriksakan diri untuk mendapatkan pengobatan dengan cara mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, atau mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Upaya

berobat jalan ini pada perempuan yang memiliki keluhan cukup signifikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di perkotaan, perempuan yang melakukan upaya berobat jalan sebanyak 53,21 persen, sementara laki-laki sebanyak 49,89 persen. Demikian juga di perdesaan, perempuan yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan sebanyak 50,55 persen, sedangkan laki-laki 47,46 persen (Gambar 2.3). Kondisi ini menunjukkan perempuan memiliki kesadaran yang lebih baik dalam merespon keluhan kesehatan yang dirasakan dengan melakukan upaya berobat jalan dibandingkan laki-laki.



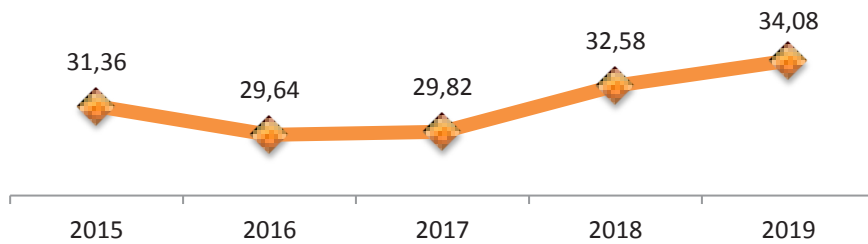
Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.3. Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019

Meskipun perempuan memiliki persentase lebih banyak ketimbang laki-laki dalam merespon keluhan kesehatan yang dirasakannya, namun jumlah persentase jumlah persentase laki-laki dan perempuan yang memiliki keluhan kesehatan dan melakukan upaya berobat jalan masih hanya berjumlah sekitar separoh (Gambar 2.3). Persentase ini sejalan dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang memiliki keluhan kesehatan dan mengupayakan berobat sendiri dalam persentase lebih dari

separoh (Gambar 2.2). Kondisi ini mengindikasikan tingkat kepedulian masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam merespon keluhan kesehatan dan sakit yang dialaminya masih perlu dikuatkan. Situasi ini juga merefleksikan pilihan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan masih belum maksimal, karena masih lebih dari separoh laki-laki dan perempuan memilih untuk mencoba melakukan upaya pengobatan sendiri tanpa melibatkan tenaga kesehatan yang tersedia. Pemanfaatan pengobatan tradisional dan merujuk pada pengobat tradisional (dukun) masih cukup tinggi sebagai alternatif pertama yang dipilih masyarakat (Suharmiati, 2012). Padahal, melakukan pengobatan sendiri dapat lebih berisiko bagi status kesehatan dirinya di masa depan.

Pada kelompok perempuan, persentase perempuan yang memiliki keluhan kesehatan dalam empat tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2016, keluhan kesehatan perempuan sebanyak 29,64 persen, meningkat sedikit di tahun 2017 menjadi 29,82 persen, namun terjadi peningkatan sekitar 2 persen poin di tahun 2018 dan 2019 menjadi 32,58 persen dan 34,08 persen. Itu artinya, di tahun 2019 terdapat sekitar 1 dari 3 perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir (Gambar 2.4). Meningkatnya persentase keluhan kesehatan pada perempuan ini penting menjadi perhatian dalam pembangunan di bidang kesehatan agar status kesehatan masyarakat, terutama perempuan dapat lebih maksimal. Sosialisasi, komunikasi, dan informasi untuk meningkatkan gaya hidup sehat serta pemanfaatan layanan kesehatan menjadi komponen penting dalam mendorong kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dirinya.



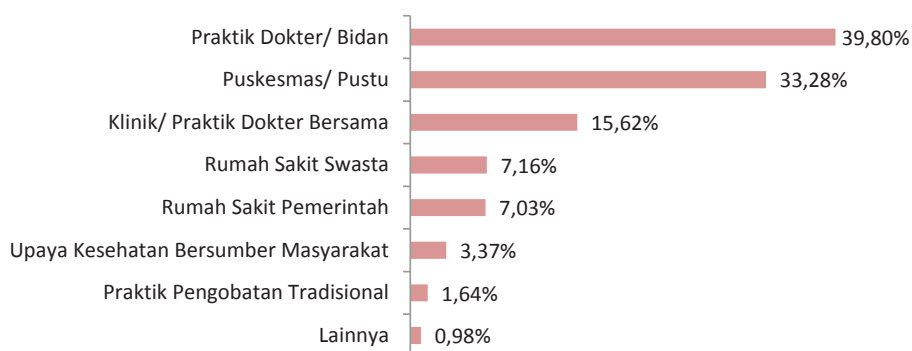
Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.4 Persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, tahun 2015 -2019

Urgensi terus meningkatkan sosialisasi, komunikasi, dan informasi di bidang kesehatan akan berpengaruh pada pilihan dan cara masyarakat merespon keluhan kesehatan dan sakit yang dirasakan. Dalam sejumlah studi kasus menunjukkan pengetahuan perempuan pada informasi tentang kesehatan yang baik, terutama kesehatan reproduksinya masih tergolong rendah (Buaton, Sinaga & Sitorus, 2019; Herdiani & Rosiana, 2020). Informasi ini masih memberikan gambaran yang tidak berbeda dengan hasil SDKI tahun 2017, bahwa pengetahuan perempuan belum kawin usia 15-24 tahun terhadap sistem reproduksi masih sangat rendah, misalnya tentang pengetahuan masa subur hanya diketahui 33 persen perempuan, anemia hanya diketahui dengan baik oleh 8 persen perempuan saja (BPS & Kemenkes, 2018). Di perdesaan, sumber informasi dan pengetahuan terkait kesehatan, terutama kesehatan reproduksi masih mayoritas merujuk pada orang tua, nasehat turun temurun dan orang terdekat, meskipun sebagian telah merujuk pada tenaga kesehatan seperti bidan ([Rosfiantika](#), 2018).

Pada perempuan yang melakukan upaya berobat jalan dalam satu bulan terakhir, tenaga kesehatan menjadi sumber rujukan utama. Hal ini terlihat pada tempat berobat jalan, perempuan lebih banyak berobat jalan di praktik dokter atau bidan yaitu sebanyak 39,80%, dan di puskesmas atau puskesmas pembantu (pustu) sebanyak 33,28%. Upaya melakukan pengobatan dari sumber selain tenaga kesehatan,

yaitu pada masyarakat sebesar 3,37 persen, praktik pengobatan tradisional sebesar 1,64 persen, dan lainnya sebesar 0,98 persen (Gambar 2.5). Sedangkan persentase perempuan yang pernah rawat inap dalam satu tahun terakhir adalah 6,09% lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 4,02% (lihat lampiran 2.6).



Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.5 Persentase penduduk perempuan yang berobat jalan dalam sebulan terakhir menurut tempat berobat jalan, tahun 2019

2. Tempat Melahirkan pada Fasilitas Kesehatan (Fakes) dan Non Fakes

Pilihan tempat melahirkan sangat bergantung pada sejauh mana akses dan layanan kesehatan yang tersedia. Akan tetapi, dalam melihat akses perempuan pada tempat melahirkan dan layanan kesehatan, tidak cukup hanya didasarkan pada bagaimana perempuan memilih tempat melahirkan dan layanan Kesehatan yang ada, namun juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan perempuan atau perempuan bersama pasangannya mengambil keputusan. Relasi gender dalam proses pengambilan keputusan memiliki korelasi yang signifikan, karena relasi gender yang timpang pada perempuan dapat menjadikan posisi perempuan tidak dapat mengakses layanan kesehatan meskipun dari segi jarak dan lokasi sangat memungkinkan dijangkau.

Program pemerintah di bidang kesehatan telah banyak menyupayakan akses perempuan terhadap layanan kesehatan,

termasuk layanan kehamilan dan persalinan. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ramah pada perempuan dan laki-laki, bermutu, berkualitas, dan mendekatkan keterjangkauan perempuan pada layanan kesehatan yang ada. Ikhtiyar ini dimaksudkan agar kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau dengan baik, mengurangi risiko berat bayi lahir rendah (BBLR), stunting, dan komplikasi persalinan. Dengan upaya pembangunan yang ada, layanan kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit, polindes, posyandu, dan penyediaan obat-obatan yang terjangkau dapat diakses masyarakat secara merata, baik di perkotaan, terutama di perdesaan.

Tempat melahirkan yang paling ideal bagi perempuan adalah di layanan kesehatan yang dibantu oleh tenaga medis yang bertanggung jawab. Melahirkan dengan dibantu tenaga medis yang tepat akan berkontribusi pada risiko bertambahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Pada gambar 2.5 terlihat bahwa berdasarkan usia perkawinan pertamanya, urutan persentase perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dari yang paling tinggi adalah usia 21 tahun ke atas (42,21 persen), usia 19-20 tahun (22,57 persen), usia 17-18 tahun (20,74 persen) dan usia kurang dari 16 tahun (15,48 persen).



Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.6. Persentase Perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dan usia perkawinan pertama, 2019

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) menetapkan bahwa usia paling aman bagi perempuan untuk hamil/melahirkan adalah 20-29 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan usia minimal perempuan dan laki-laki menikah adalah 19 tahun. Perempuan akan mengalami penurunan kesuburan organ reproduksinya ketika memasuki umur 30 tahun (Kemen PPPA, 2019). Jika melihat pada usia pertama perempuan melakukan perkawinan, yaitu di usia 21 tahun ke atas, maka risiko perempuan dalam menjalani masa kehamilan pertama yang tergolong aman belum mencapai separoh dari jumlah perempuan yang menikah. Perkawinan pertama di usia dibawah 20 tahun masih mendominasi usia perkawinan pertama perempuan. Terutama pada perempuan pedesaan, terdapat sekitar 1 dari 3 perempuan pedesaan yang menikah dibawah usia 20 tahun.

UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan minimal usia perkawinan perempuan adalah 19 tahun, sedangkan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perlindungan anak menetapkan batas seseorang disebut dewasa adalah usia 18 tahun. Merujuk pada gambar 2.6, maka persentase perkawinan pertama pada perempuan yang dilakukan dibawah 18 tahun atau termasuk kategori perkawinan usia anak masih tinggi, yaitu 36,22 persen. Dengan kata lain, terdapat 1 dari 3 perempuan menjalani perkawinan usia anak. Jumlah ini semakin tinggi di perdesaan, yaitu 43,72 persen atau hampir 1 dari 2 perempuan perdesaan menikah di usia anak. Informasi ini menjadi catatan penting yang harus diantisipasi, terutama pada terjadinya kehamilan berisiko pada perempuan dan janin yang dikandungnya, karena kesiapan organ reproduksi anak perempuan masih belum sepenuhnya aman untuk menjalani fungsi reproduksinya, termasuk kehamilan.

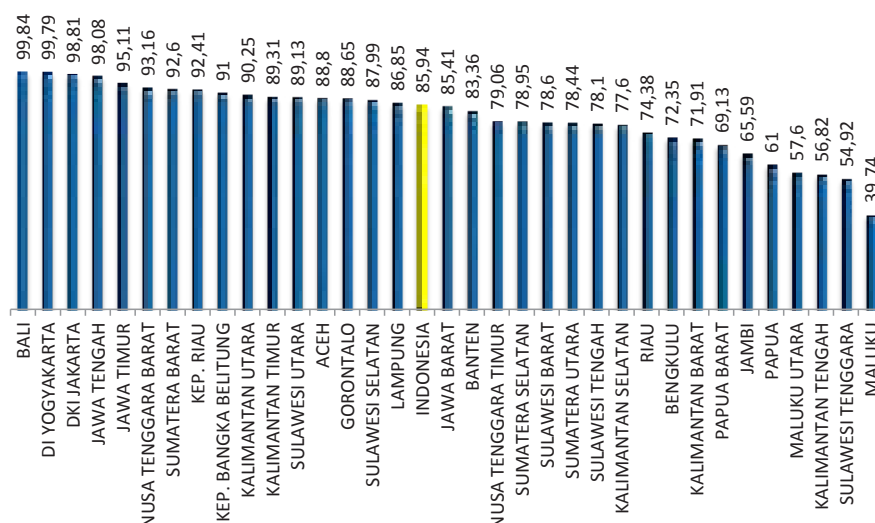
Berdasarkan tempat tinggal, persentase perempuan di perdesaan yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, yaitu sebesar 22,44 persen berbanding 7,34 persen (Tabel 2.1). Kesenjangan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di perkotaan dan perdesaan dapat menjadi salah satu faktor persentase tempat bersalin perempuan perdesaan pada selain fasilitas kesehatan cukup tinggi. Aksesibilitas pelayanan kesehatan di perdesaan juga masih perlu ditingkatkan, terutama pada sarana prasarana dan tenaga kesehatan profesional yang mencukupi dan ramah pada pasien (Megatsari, dkk., 2018). Akan tetapi, jika dilihat persentase secara nasional pada tahun 2019, persentase perempuan kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan sudah mencapai 85,94 persen, dimana perempuan di perkotaan telah mencapai 92,66 persen.

Tabel 2.1 Persentase Perempuan pernah kawin Berusia 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan menurut Daerah tempat tinggal dan Kelompok Pengeluaran 2019

Karakteristik	Fasilitas Kesehatan	Bukan Fasilitas Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	92,66	7,34	100,00
Perdesaan	77,56	22,44	100,00
Perkotaan +Perdesaan	85,94	14,06	100,00
Kelompok Pengeluaran			
Kuartil 1	78,45	21,55	100,00
Kuartil 2	83,97	16,03	100,00
Kuartil 3	86,91	13,09	100,00
Kuartil 4	89,79	10,21	100,00
Kuartil 5	94,94	5,06	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Provinsi dengan persentase perempuan yang pernah kawin berusia 15-49 tahun dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan paling banyak terletak di Provinsi Bali sebanyak 99,84 persen dan DI Yogyakarta sebesar 99,79 persen, namun provinsi dengan persentase perempuan yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan paling sedikit berada di Maluku dengan capaian hanya 39,74 persen. Provinsi lain yang persentase melahirkan di fasilitas kesehatan di bawah 60 persen adalah Maluku Utara (57,6 persen), Kalimantan Tengah (56,82 persen) dan Sulawesi Tenggara (54,92%) (Gambar 2.6).



Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.7 Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di Fasilitas Kesehatan menurut Provinsi, 2019

3. Penolong Persalinan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. Pemerintah telah mengembangkan program pembangunan kesehatan yang salah satu targetnya adalah penurunan AKI, sebagaimana menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan mengalami kematian dalam proses persalinannya, seperti kehamilan di usia terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak dengan kehamilan sebelumnya, dan kehamilan dalam jumlah yang terlalu banyak. Kehamilan berisiko tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya komplikasi selama masa kehamilan. Selain itu, metode dan tempat bersalin juga berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan proses persalinan yang dijalani perempuan.

Ikhtiyar dalam meminimalisir risiko kematian dalam proses persalinan adalah dengan melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga medis yang profesional, seperti bidan atau dokter. Secara nasional, 94,71 persen perempuan

Indonesia proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Berdasarkan daerah tempat tinggal dan kelompok pengeluaran rumah tangga, persentase perempuan di perdesaan yang proses bersalinnya dibantu oleh bukan tenaga kesehatan lebih tinggi daripada di perkotaan dengan jumlah 8,96 persen berbanding 2,35 persen (Tabel 2.2).

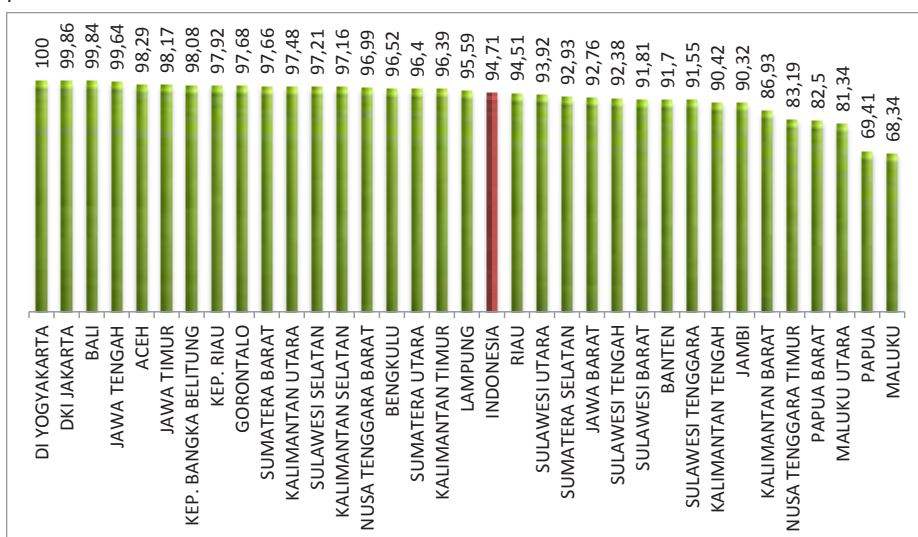
Tabel 2.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Daerah tempat tinggal dan Kelompok Pengeluaran 2019

Karakteristik	Tenaga Kesehatan	Bukan Tenaga Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	97,65	2,35	100,00
Perdesaan	91,04	8,96	100,00
Perkotaan +Perdesaan	94,71	5,29	100,00
Kelompok Pengeluaran			
Kuartil 1	89,9	10,1	100,00
Kuartil 2	93,84	6,16	100,00
Kuartil 3	96,01	3,99	100,00
Kuartil 4	97,27	2,73	100,00
Kuartil 5	99	1	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Secara umum, terdapat 28 provinsi dengan perempuan yang proses melahirkan terakhirnya dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih lebih dari 90 persen (Gambar 2.8). Semua perempuan di Provinsi Yogyakarta (100 persen) proses melahirkan terakhirnya dibantu oleh Tenaga Kesehatan terlatih, selanjutnya paling banyak di Provinsi DKI Jakarta (99,86 persen), Bali (99,84 persen), dan Jawa Tengah (99,64 persen). Perempuan yang proses melahirkan terakhirnya dibantu oleh Tenaga Kesehatan terlatih paling sedikit adalah di provinsi

Maluku hanya 68,34 persen dan di Provinsi Papua sebesar 69,41 persen.



Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.8. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahirannya terakhirnya ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut provinsi, 2019

4. Keluarga Berencana dan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Di Indonesia, salah satu badan negara yang secara khusus melaksanakan pembangunan keluarga berencana adalah Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui program keluarga berencana, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara lebih baik, pengasuhan dan pendidikan anak lebih berkualitas, menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan keluarga berencana, diharapkan dapat mendorong risiko angka kematian pada ibu dan bayi.

Salah satu bentuk kegiatan dalam keluarga berencana adalah penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman.

Alat kontrasepsi ini dapat menjadi salah satu ikhtiyar dalam mengatur kehamilan yang direncanakan dengan matang dan pencegahan terhadap risiko penyakit menular seksual. Keluarga berencana merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam mengukur pencapaian SDGs, terutama pada target 3.7 pada tahun 2030, yaitu menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Pada tabel 2.3 menunjukkan banyaknya perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin menurut status pemakaian alat/cara KB dan daerah tempat tinggal.

Menurut daerah tempat tinggal, secara umum partisipasi perempuan di perdesaan dalam program KB lebih besar dibanding di perkotaan. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang pernah dan sedang menggunakan alat/cara KB di perkotaan sebesar 66,56 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 72,2 persen. Secara nasional, persentase perempuan berusia 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB adalah 55,96 persen. Persentase ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 58,73 persen.

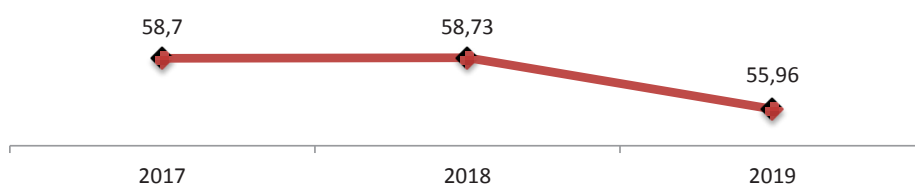
Tabel 2.3 Persentase Wanita Berusia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Status Pemakaian Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal, 2019

Karakteristik	Ya, sedang	Ya, pernah	Tidak pernah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	53,15	13,41	33,44	100,00
Perdesaan	59,33	12,87	27,80	100,00
Perkotaan +Perdesaan	55,96	13,17	30,87	100,00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Jika dilihat pada tiga tahun terakhir, penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan tidak terjadi menunjukkan

peningkatan signifikan di antara tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi, di tahun 2019 menunjukkan menurun sebesar 2,77 persen dibandingkan tahun 2018 (Gambar 2.9). Penurunan penggunaan alat kontrasepsi ini penting diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat, terutama laki-laki dalam memanfaatkan alat kontrasepsi sebagai salah satu metode dalam keluarga berencana. Mendorong partisipasi laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi merupakan tindakan yang penting dan bijak agar tanggung jawab kesehatan reproduksi perempuan juga menjadi perhatian utama bagi laki-laki.

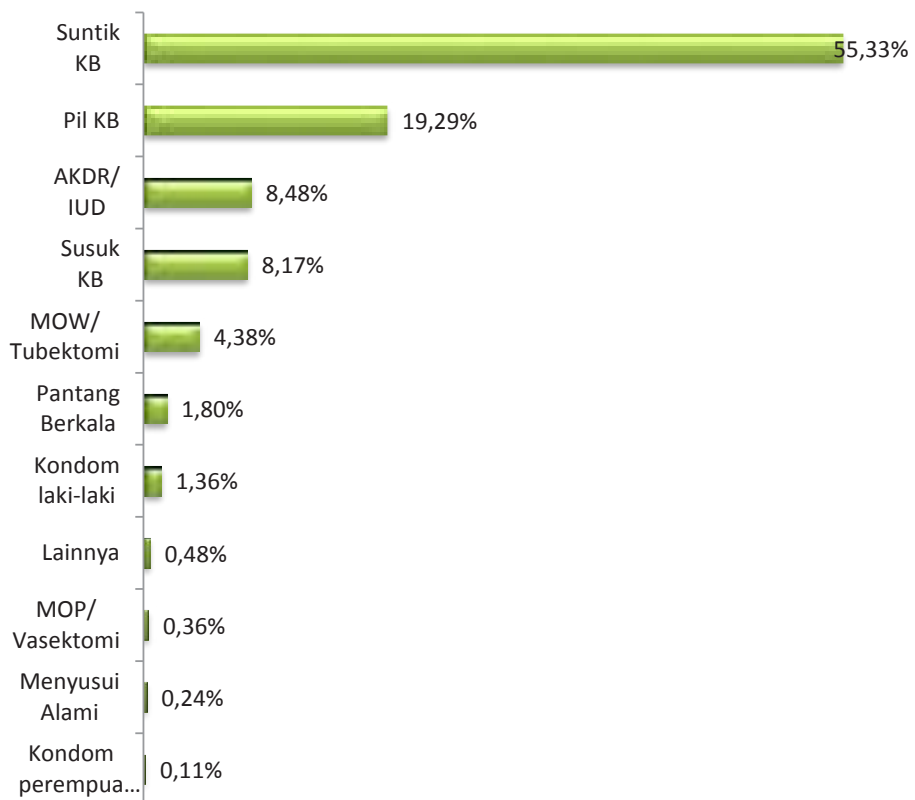


Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.9 Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai Alat KB tahun 2017-2019

Terdapat sejumlah jenis alat/cara yang dapat digunakan perempuan dalam KB. Alat/cara KB dibedakan menjadi kontrasepsi sederhana tanpa alat (menyusui alami, pantang berkala), kontrasepsi sederhana dengan alat (kondom laki-laki dan kondom perempuan), kontrasepsi hormonal (pil KB, suntik KB dan susuk KB), alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)/ (IUD) serta kontrasepsi mantap (Metode Operatif Wanita (MOW)/ tubektomi dan Metode Operatif Pria(MOP)/vasektomi) dan alat/cara KB lainnya. Persentase perempuan berusia 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara KB sederhana hanya 2,52 persen sedangkan yang menggunakan alat/cara KB non sederhana adalah 97,48 persen. Jenis alat/cara KB yang banyak digunakan perempuan pernah kawin adalah suntik KB sebanyak 55,33 persen dan pil KB sebanyak 19,29 persen. Jenis alat/cara KB lainnya yang juga banyak digunakan selain suntik dan pil adalah IUD/AKDR sebesar 8,48 persen dan susuk KB/

implan sebanyak 8,17 persen. Jenis alat/cara KB yang paling sedikit digunakan perempuan adalah kondom perempuan sebesar 0,11 persen. Pada tahun 2019, penggunaan alat kontrasepsi kondom laki-laki sangat rendah, hanya 1,36 persen saja. Persentase ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,47 persen (Gambar 2.10).

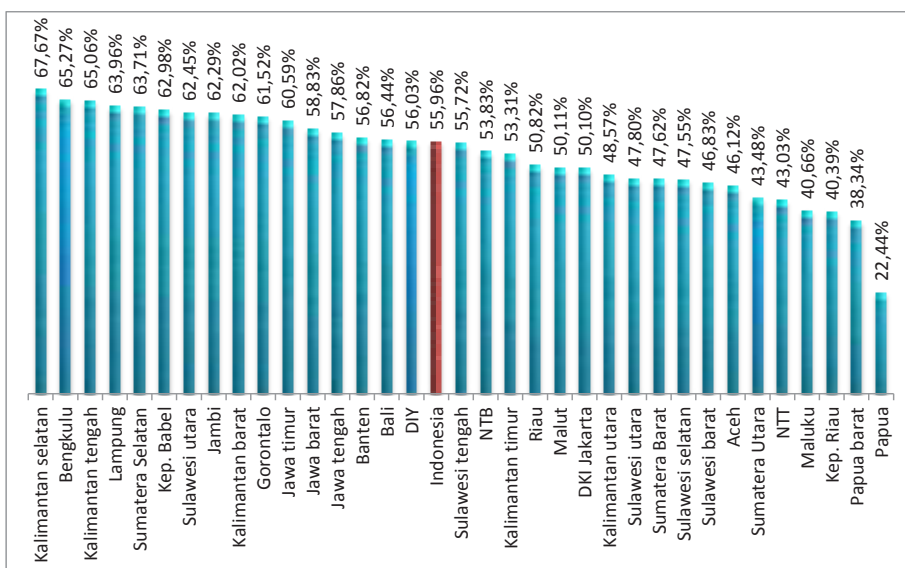


Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.10 Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan berstatus Kawin di Indonesia menurut Alat/Cara KB yang sedang Digunakan, 2019

Pada gambar 2.11 menunjukkan banyaknya perempuan yang sedang menggunakan alat/cara KB menurut provinsi. Pada tahun 2019, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan (67,67 persen) melebihi angka nasional

yang hanya sebesar 55,96 persen. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat/cara KB terdapat di 11 provinsi dengan persentase diatas 60 persen, sedangkan provinsi yang paling rendah persentasenya terletak di Provinsi Papua Barat (38,34 persen) dan Papua (22,44 persen).



Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.11 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB menurut Provinsi, 2019

5. Air Bersih dan Layak Rumah Tangga

Syarat dalam mewujudkan kesehatan masyarakat mensyaratkan adalah terpenuhinya kesehatan lingkungan, atau lingkungan yang sehat berkontribusi pada status kesehatan masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan mendefinisikan kesehatan lingkungan sebagai salah satu bentuk pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Mewujudkan kesehatan lingkungan

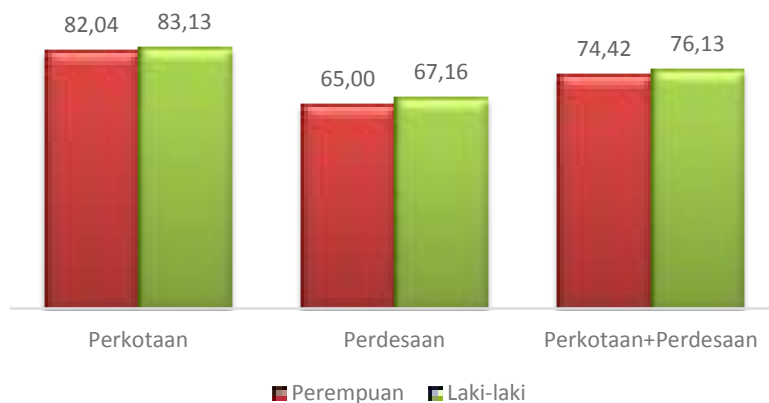
merupakan salah satu bentuk nyata dalam memastikan kesehatan laki-laki dan perempuan lebih berkualitas dan terjamin. Hak ini telah secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 162 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa urgensi kesehatan lingkungan dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Salah satu indikator kesehatan lingkungan yang penting adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan. Sumber air dan kualitas air menjadi tonggak utama dalam pemenuhan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat. Kesehatan keluarga, terutama perempuan sangat bergantung pada sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan layak. Karena itulah, air bersih dan sanitasi menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan merupakan tujuan ke-6 SDGs, yaitu mendorong terjaminnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Indonesia telah berupaya mengarah pada penghitungan indikator akses air minum yang aman dan berkelanjutan (*safe and sustainable drinking water*) secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030. Air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, dan kimia (Bappenas/BPS, 2018).

Sumber air minum layak merupakan air yang menjadi sumber air minum utama yang digunakan dan dapat meliputi air ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak, termasuk jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan (BPS, 2020). Sumber air bersih dan layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama perempuan dan anak. Sumber air yang tidak layak berisiko pada tingkat kerentanan seseorang terhadap berbagai penyakit menular seperti kolera, disentri, hepatitis A, tipus, dan diare (Nurzanah dkk., 2019; Yuningsih dkk., 2019; dan Birawida,

2020). Sulitnya akses terhadap sumber air bersih beresiko pada perilaku hidup tidak sehat, seperti tidak terbiasa mencuci tangan dan tidak memiliki jamban sehat (Yuningsih, 2019), Pada akhirnya, akses terhadap air bersih dan air minum layak berkorelasi pada kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Secara nasional, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih sudah mencapai 75,27 persen pada tahun 2019. Itu artinya, masih ada sekitar 25 persen rumah tangga yang tidak menggunakan air minum bersih. Gambar 2.11 menyajikan persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih menurut tempat tinggal dan jenis kelamin kepala rumah tangga. Rumah tangga yang dikepalai perempuan yang menggunakan air minum bersih di perkotaan sebesar 82,04 persen, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 65 persen. Pola yang sama terjadi pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki, dimana penggunaan air minum bersih lebih banyak di perkotaan dibandingkan perdesaan, yaitu 83,13 persen berbanding 67,16 persen. Menurut jenis kelamin, rumah tangga yang dikepalai laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan kepala keluarga perempuan dalam menggunakan air minum bersih. Kesenjangan ini terjadi di perkotaan dan di perdesaan (Gambar 2.12).



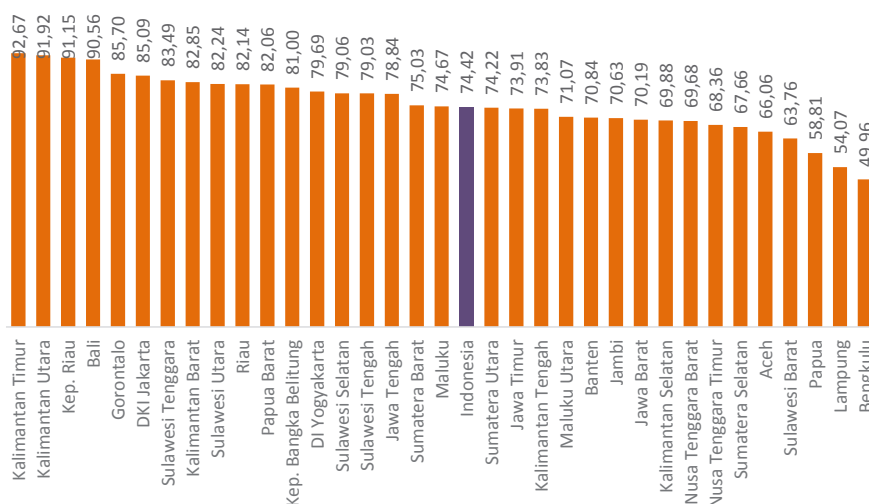
Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.12 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2019

Tidak semua air tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan air minum, apalagi pada wilayah-wilayah yang mengalami degradasi lingkungan dan intrusi air laut seperti Semarang (Alihar, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan air minum layak, masyarakat melakukan berbagai upaya, seperti penggunaan air minum kemasan, air isi ulang, pemanfaatan air hujan dan lainnya. Bagi sebagian masyarakat pengguna air minum kemasan dan air isi ulang, hasil studi Elsi dkk. (2018) menunjukkan bahwa pengguna air minum kemasan/isi ulang pada keluarga yang belum memiliki sumber air minum yang layak lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan sumber air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang belum memiliki akses sumber air minum yang layak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyediaan air minum layak melalui air minum kemasan/isi ulang. Keterbatasan akses terhadap air minum layak juga mendorong sejumlah masyarakat mengembangkan sistem penyediaan air minum berbasis komunitas (Maryati, Rahmani & Rahajeng, 2018). Strategi pemanfaatan sumber air dari potensi curah hujan sebagai sumber air baku alternatif selain air tanah dengan cara pembangunan waduk, sarana penampungan air hujan secara

mandiri, dan disertai upaya konservasi menjadi alternatif yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum layak yang terbatas (Messakh, dkk., 2015).

Pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih secara nasional sebanyak 74,42 persen. Berdasarkan provinsi dengan persentase tertinggi pada rumah tangga yang menggunakan air minum bersih yang dikepalai perempuan terjadi di 4 provinsi, adalah Kalimantan timur sebesar 92,67 persen, Kalimantan Utara sebanyak 91,92 persen, Kepulauan Riau sebesar 91,15 persen dan Bali sebesar 90,56 persen. Provinsi lain yang mencapai antara 80-90 persen dalam penggunaan air minum bersih terdapat di 8 provinsi dan sebanyak 14 provinsi lain yang baru mencapai 70-80 persen. Provinsi dengan persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan dan penggunaan air minum bersih dibawah 70 persen masih cukup tinggi, yaitu terdapat di 9 provinsi, di antaranya Sulawesi Barat (63,76 persen) dan Aceh (66,06 persen) (Gambar 2.13).



Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Gambar 2.13 Persentase Rumah Tangga yang dikepalai Perempuan yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Provinsi, 2019

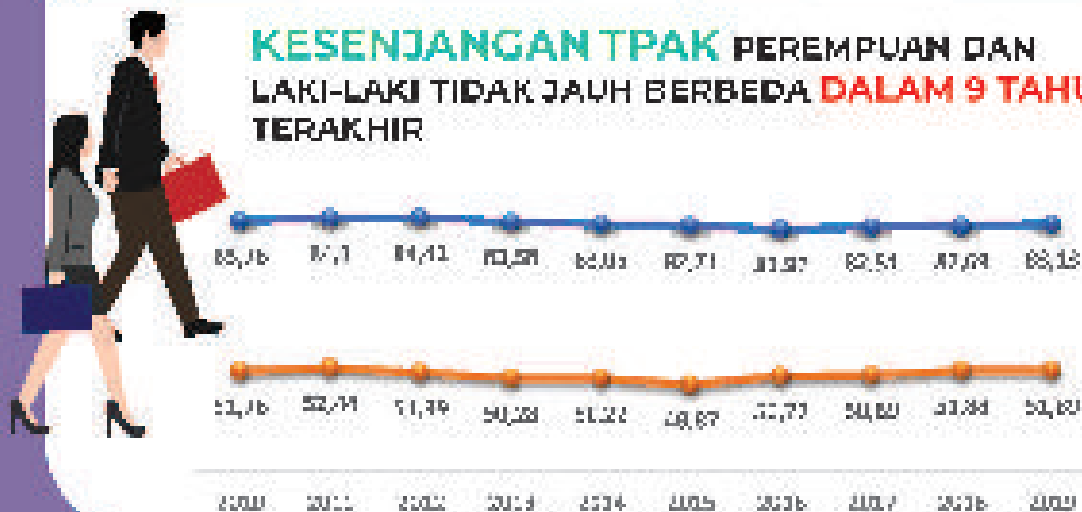
Tiga Provinsi dengan persentase paling rendah dalam menggunakan air minum bersih dengan rumah tangga yang dikepalai perempuan berada di provinsi Bengkulu, yang hanya mencapai 49,96 persen, Lampung dengan capaian 54,07 persen, dan Papua sebanyak 58,81 persen. Tiga provinsi ini juga merupakan 3 provinsi dengan presentase terendah pada kategori yang sama di tahun 2018, bahkan persentase yang dicapai di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018, yaitu Bengkulu sebanyak 50,82 persen, Lampung sebanyak 57,02 persen, dan Papua sebesar 58,10 persen (KPPPA, 2019). Hal ini menunjukkan masih ada sekitar separoh rumah tangga yang dikepalai perempuan di Bengkulu, Papua, dan Lampung yang belum menggunakan air minum bersih, sehingga kerentanan terhadap berbagai penyakit di wilayah ini menjadi lebih besar.

Rendahnya akses air bersih di Provinsi Bengkulu terjadi karena adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi dan akses sanitasi yang sangat rendah. Sarana sanitasi dan ketersediaan air bersih di wilayah perkotaan masih lebih baik ketimbang di perdesaan, sehingga masih dijumpai pola hidup yang tidak sehat pada mayoritas masyarakat perdesaan, seperti melakukan pembuangan tinja tidak saniter atau tanpa jamban/ buang air besar sembarangan dan saluran pembuangan air limbah masih terbuka (Nurzanah dkk., 2019). Melakukan strategi promosi kesehatan dan mendorong dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi salah satu langkah efektif, terutama advokasi mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran yang berpihak pada upaya mewujudkan ketersediaan air bersih layak dan sanitasi yang berkelanjutan.

KETENAGAKERJAAN



KESENJANGAN TPAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI TIDAK JAUH BERBEDA **DALAM 9 TAHUN** TERAKHIR



RATA-RATA UPAH/GAJI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Laki-laki		Rp. 3.067.092	Rp. 2.438.452	Rp. 3.809.060
		Perkotaan-Perdesaan	Perdesaan	Perkotaan
Perempuan		Rp. 2.481.087	Rp. 1.568.682	Rp. 2.712.637
		Perkotaan-Perdesaan	Perdesaan	Perkotaan

Upah/Gaji Perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki baik di perkotaan maupun di pedesaan

BAB III PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA KETENAGAKERJAAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki karena hakikat pembangunan nasional adalah untuk pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan, karena peran tenaga kerja tidak hanya sebagai pelaku pembangunan, namun tenaga kerja juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Dalam memastikan pembangunan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, akses, dan partisipasi tenaga kerja penting diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses-proses pembangunan, termasuk pada tenaga kerja perempuan. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya harus berbasis pemenuhan hak dasar tenaga kerja secara setara dan non diskriminatif. Pada tenaga kerja perempuan, hak dasar yang terkait dengan perbedaan kodrati (menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui) menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemenuhan hak dasar tenaga kerja perempuan.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, penting melihat berbagai aspek utama pada tenaga kerja, baik selama, sebelum dan sesudah masa kerja. Aspek-aspek yang ada pada diri tenaga kerja memiliki korelasi yang kuat dengan upaya pembangunan masyarakat yang dikembangkan pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari kepentingan dunia usaha. Simbiosis mutualisme ini harus sama-sama memperhatikan kesenjangan gender dan berusaha mengurangi atau menghilangkan berbagai aspek yang dapat memperlebar atau memperburuk kesenjangan yang ada. Karena itu, pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas

dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial harus tetap memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis pada perempuan dan laki-laki.

Komitmen pemerintah dalam memastikan kemajuan tenaga kerja Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk nyata penghargaan terhadap hak-hak dasar tenaga kerja di tempat kerja dilakukan pemerintah melalui langkah nyata dengan meratifikasi delapan konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO). Terdapat 4 aspek utama yang termuat dalam delapan konvensi dasar ILO, yaitu 1) Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98), 2) Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111), 3) Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105) dan 4) Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182). Pembangunan ketenagakerjaan juga termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Salah satu sasaran pokok di bidang ketenagakerjaan menetapkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 menjadi 4,8 persen sampai 5,2 persen dan meningkatkan persentase tenaga kerja formal menjadi 51,0 persen.

Pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) di tahun 2030 melalui pilar pembangunan ekonomi. Pilar ini didasarkan pada 5 tujuan SDG's, yaitu tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17. Secara khusus, tujuan ke-8 SDG's berorientasi pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dari 10 target yang ingin dicapai pada tujuan ke-8 SDG's ini, target 8.5 dan 8.8 merupakan target yang melandasi urgensi tenaga kerja perempuan harus menjadi perhatian utama. Pada target 8.5 disebutkan bahwa pada tahun 2030, Bangsa Indonesia akan mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan

yang sama nilainya, sedangkan target 8.8 menetapkan target perlindungan pada hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Bentuk nyata pembangunan ketenagakerjaan juga terefleksi dalam Sembilan agenda prioritas (Nawacita) pembangunan nasional 2015-2019 melalui kemandirian di bidang ekonomi. Dalam agenda ke-5 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja Indonesia sejahtera. Selain agenda ke-5, pembangunan ketenagakerjaan juga terlihat pada agenda ke-6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk mencapai agenda ke-5 dan ke-6 ini, tenaga kerja perempuan merupakan entitas bangsa yang menjadi prioritas pembangunan ketenagakerjaan menuju kemandirian ekonomi. Kemajuan dan keberdayaan perempuan di dunia kerja menjadi salah satu indikator menuju kemajuan bangsa yang mandiri dan berintegritas tinggi.

B. Definisi Konseptual

Konsep dan definisi yang digunakan Badan Pusat Statistik terkait ketenagakerjaan merujuk pada *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO).

1. Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

BPS mendefinisikan tenaga kerja sebagai orang yang sedang bekerja dan/atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja juga mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian, pekerja *outsourcing* dan tenaga kerja asing. Seseorang disebut sebagai tenaga kerja diukur melalui usia, dimana usia penduduk dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Pada

penduduk yang masuk kategori usia kerja dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusaha 15 tahun ke atas. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang dinilai berpotensi untuk bekerja. Usia 15 tahun merupakan batas usia minimal seseorang disebut sebagai Angkatan kerja, termasuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang dan saat ini statusnya sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau dan pengangguran. Pada kategori penduduk yang bukan angkatan kerja ditujukan pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Mengetahui jumlah atau persentase angkatan kerja, akan memberikan informasi tentang potensi penduduk yang bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja (sirusa.bps.go.id).

Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Tenaga kerja yang sedang bekerja atau disebut pekerja dapat dibedakan sebagai pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Pekerja penuh merupakan pekerja yang bekerja minimal 35 jam seminggu, sedangkan pekerja tidak penuh adalah pekerja yang bekerja di bawah jam normal 35 jam seminggu. Pekerja Tidak Penuh terdiri dari (sirusa.bps.go.id):

- a) **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (sebelumnya disebut setengah pengangguran terpaksa).

- b) **Pekerja Paruh Waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebelumnya disebut setengah pengangguran sukarela).

2. Usia Produktif

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Usia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun disebut penduduk usia tidak produktif dan masuk kategori angka beban tanggungan. Pada rentang usia yang dinilai produktif ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu usia sangat produktif dan usia produktif. Usia sangat produktif merujuk pada penduduk yang berusia 15 sampai 49 tahun, sedangkan usia produktif ditujukan pada penduduk usia 50 sampai 64 tahun. Tindakan produktif merupakan tindakan kreatif yang dapat menghasilkan sesuatu dan usia produktif diasumsikan usia seseorang yang dianggap dapat memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Dengan mengetahui usia produktif pada penduduk, maka akan diketahui potensi penduduk yang dapat menghasilkan produk maupun jasa yang dapat menunjang kehidupannya secara optimal.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK digunakan untuk mengetahui tingkat pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang ada berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK ditujukan pada penduduk usia 15 tahun keatas atau usia angkatan kerja. Karena itu, tinggi atau rendahnya TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK suatu wilayah, dapat mengindikasikan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (sirusa.bps.go.id).

Perempuan usia 15 tahun ke atas atau usia angkatan kerja beresiko tidak dinilai berpartisipasi pada TPAK karena

melakukan kerja-kerja domestik atau kerja yang dilakukan untuk kepentingan rumah tangga sendiri, seperti memasak, mengasuh anak, merawat keluarga yang sakit, atau mendampingi orang lanjut usia yang ada di dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan berpotensi tidak dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja, terutama pada status perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menghasilkan produk yang dikonsumsi dan dinikmati oleh anggota keluarga sendiri (UNFPA, 2014 dalam Kemen PPPA, 2019). Pilihan menjadi ibu rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang secara budaya dikonstruksikan sebagai tugas perempuan menyulitkan partisipasi perempuan di dunia kerja.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan bekerja namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah 1) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 2) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. 3) tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 4) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau sementara tidak bekerja, yaitu keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Beberapa contoh kategori punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah a) pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya, b) petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah), dan c) pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang

cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya (sirusa.bps.go.id).

Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (sirusa.bps.go.id). TPT dapat digunakan untuk melihat kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara, mengukur ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, melihat pasokan tenaga kerja yang tidak digunakan di sebuah wilayah atau negara (ILO dalam Kemen PPPA, 2019).

5. Tenaga Kerja Formal dan Informal

Tenaga kerja atau pekerja dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu sektor formal dan sektor informal. Pekerja sektor formal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tenaga kerja sektor informal tidak selalu mensyaratkan tingkat pendidikan di jenjang minimal tertentu atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pelatihan atau kursus. Karena itu, pekerja sektor informal tidak harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tertentu dan terkadang tidak memiliki standar upah yang layak. Pada umumnya, pekerjaan di sektor informal dikembangkan secara individu dengan atau tanpa melibatkan tenaga kerja lain yang dibayar atau tidak. Sebagai contoh usaha mandiri yang dilakukan dari dalam rumah, pedagang kaki lima, pekerja di bidang pertanian dan kelautan, dan berjualan di warung kebutuhan pokok milik sendiri. Jenis pekerjaan di sektor informal pada umumnya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah dan memiliki pola kegiatan yang

fleksibel. Karena itu, dalam kerja informal, terkadang tidak memiliki jam kerja yang tetap, menggunakan peralatan atau teknologi yang sederhana atau tradisional, dan berbasis modal kecil. Dari segi perlindungan, pekerja informal tidak memiliki jaminan perlindungan dari pemerintah secara langsung sehingga lebih rentan mengalami ketidakadilan dan lebih sulit melakukan upaya hukum dibandingkan pekerja formal.

Tuntutan pekerjaan di wilayah domestik pada perempuan kerap kali menjadikan perempuan memilih sebagai pekerja di sektor informal. Selain fleksibilitas waktu yang dapat disesuaikan dengan kondisi perempuan, sektor informal juga memungkinkan menawarkan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Meskipun menjadi peluang dan alternatif pendapatan bagi perempuan yang kesulitan bekerja di sektor formal, namun kedudukan pekerja di sektor informal beresiko pada jaminan perlindungan atas hak dasar dirinya sebagai tenaga kerja dan kerentanan pada kekerasan berbasis gender.

Mengetahui persentase kerja di sektor formal dan informal dapat menjadi landasan untuk mendorong dibentuk atau dikembangkannya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada upaya mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor non-pertanian (sirusa.bps.go.id).

6. Status pekerjaan

Status pekerjaan merupakan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan atau status seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan tertentu. Status/kedudukan pekerjaan utama merupakan jenis kedudukan kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam pekerjaan utama. Persentase status pekerjaan utama pada penduduk memberikan informasi tentang kondisi tenaga kerja dan menentukan kelompok sosial ekonomi penduduk. Status pekerjaan utama juga dapat

memberikan gambaran tentang tingkatan upah atau gaji yang diterima seseorang. Tingginya upah atau gaji pekerja pada sebuah negara dapat mengindikasikan majunya pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Indikator status pekerjaan utama dibedakan dalam dua kategori dari seluruh pekerja, yaitu (a) pekerja penerima upah/gaji dan (b) orang yang mempekerjakan dirinya sendiri dan/atau orang lain. BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) mengklasifikasi status pekerjaan dalam tujuh macam, dengan penjelasan sebagaimana berikut (sirusa.bps.go.id):

- a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau **berusaha** atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus

pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

- f. **Pekerja bebas di nonpertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
- g. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari 1) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/ anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar, 2) Bukan anggota rumah tangga tetapi

keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar, atau 3) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

7. Jam kerja

Jam kerja merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jam kerja dapat dilakukan di siang hari dan/atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada waktu istirahat mingguan dan/ atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Wijayanti dalam Kemen PPPA, 2019).

BPS menggunakan indikator jumlah jam kerja seluruh pekerjaan dengan maksud melihat lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili saudara/kawan dan sebagainya (sirusa.bps.go.id). Jam kerja memiliki batasan maksimal, yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja

tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

8. Upah dan Rata-rata Upah

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya. Orang yang menerima upah disebut sebagai tenaga kerja dibayar, yaitu semua orang yang bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah dan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang. Bentuk upah dapat berupa uang maupun barang.

Rata-rata upah merupakan penghitungan rata-rata upah pekerja setiap hari didasarkan pada banyaknya upah yang diterima oleh pekerja dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu yang sama. Indeks perkembangan rata-rata upah dilihat menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, atau jenis tanaman perkebunan. Indeks perkembangan rata-rata upah dilakukan dengan membandingkan besar upah antara semester/tahun berjalan dengan upah pada semester/tahun dasar dengan penimbang tetap hari kerja pekerja (sirusa.bps.go.id)

9. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Pekerja migran dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu pekerja migran internal, internasional dan risen. Pekerja migran internal adalah Pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satu negara, umumnya melalui urbanisasi dan transmigrasi, pekerja migran internasional adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk

keperluan bekerja; dan pekerja migran risen adalah pekerja yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Persentase pekerja migran risen dilihat pada jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui fenomena pekerja yang melakukan mobilitas permanen khususnya migrasi risen. Persentase yang diperoleh melalui indikator ini dapat dimaknai dengan semakin tinggi persentase pekerja migran risen mengindikasikan tingginya pergerakan penduduk yang melakukan mobilitas secara permanen.

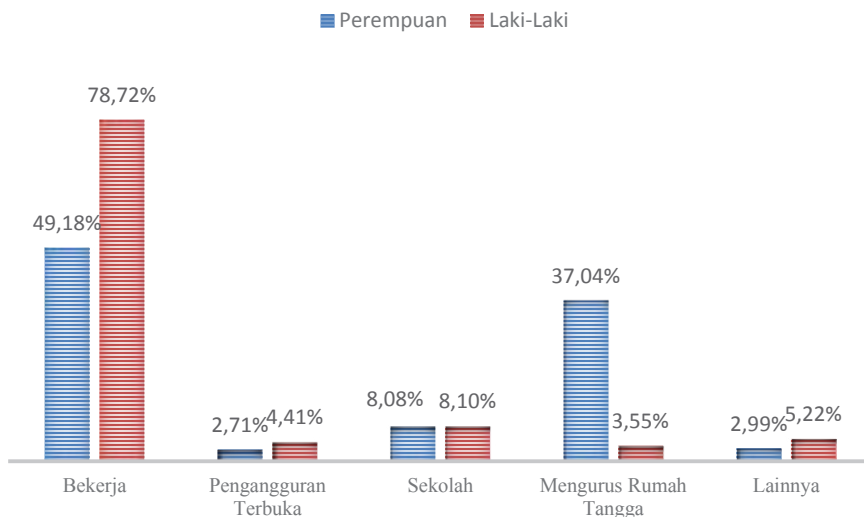
C. Pembahasan

1. Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas

Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dilihat dalam lima varian, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Pada tahun 2019, hampir separoh penduduk umur 15 tahun ke atas memiliki kegiatan bekerja, yaitu sebesar 49,18%. Dibandingkan perempuan, laki-laki yang memiliki kegiatan bekerja dalam seminggu terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan persentase 78,73 persen berbanding 49,18 persen. Itu artinya, setiap 3 laki-laki yang bekerja, terdapat 2 perempuan yang bekerja. Meskipun masih lebih rendah daripada laki-laki, namun informasi ini mengindikasikan peran perempuan di dunia kerja sudah cukup signifikan (Gambar 3.1).

Pada kelompok perempuan, selain bekerja, kegiatan yang memiliki persentase tinggi dilakukan perempuan usia 15 tahun ke atas dalam seminggu yang lalu adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebesar 37,04 persen. Persentase ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya. Bagi kelompok laki-laki, meskipun persentase laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang mengurus rumah tangga sangat kecil yaitu hanya 3,55 persen,

namun menunjukkan kegiatan mengurus rumah tangga juga dimungkinkan dilakukan oleh laki-laki (Gambar 3.1). Informasi ini menguatkan pemahaman bahwa mengurus rumah tangga bukan semata-mata menjadi tugas perempuan, namun bisa dilakukan juga oleh laki-laki, atau dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki.



Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

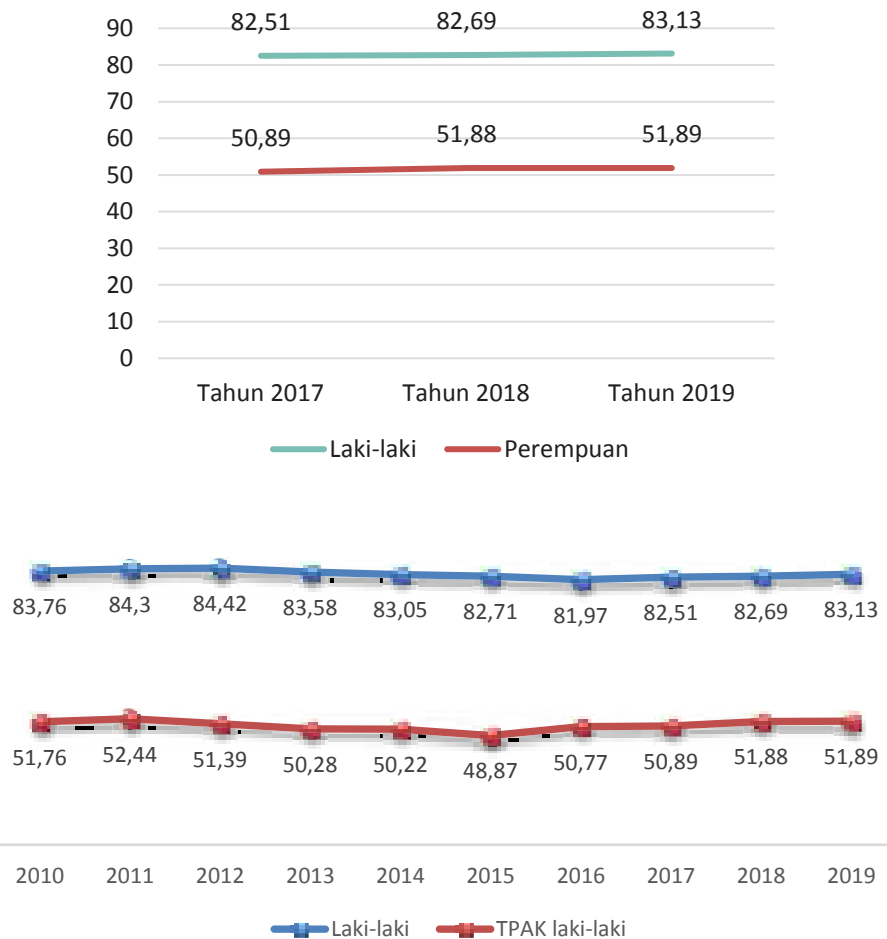
Gambar 3.1. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019.

Berdasarkan sebarannya, persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja dalam seminggu lalu paling tinggi di Bali yaitu sebesar 65,12 persen. Selain Bali, provinsi dengan persentase tertinggi di tingkat nasional lainnya adalah Papua dengan capaian sebesar 64,29 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 62,29 persen. Untuk provinsi dengan capaian persentase perempuan bekerja terendah berada di Sulawesi Utara dengan jumlah sebesar 41,48 persen, Kepulauan Riau sebesar 42,17 persen dan Riau sebesar 42,19 persen (Lampiran Tabel 3.3.).

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Proporsi partisipasi penduduk di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor jumlah penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, sebaran usia, upah/gaji yang diterima, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dsb). Tinggi rendahnya TPAK juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya.

Kesenjangan TPAK perempuan yang signifikan lebih rendah di bawah laki-laki ini terlihat tidak berubah dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2017, TPAK laki-laki mencapai jumlah 82,51 persen, meningkat sedikit di tahun 2018 menjadi 82,69 persen dan di tahun 2019 meningkat menjadi 83,13 persen. Pada perempuan, TPAK yang dicapai di tahun 2017 hanya sebesar 50,89 persen, meningkat 1,01 persen di tahun berikutnya menjadi 51,88 persen, dan di tahun 2019 hanya meningkat 0,01 persen menjadi 51,89 persen (Gambar 3.2). Jika ditarik lebih jauh lagi kondisi TPAK Perempuan tidak banyak mengalami peningkatan sejak tahun 2010 di mana TPAK perempuan sebesar 51,76 persen. Peningkatan yang terjadi pada perempuan sangat sedikit dan tidak mengubah kesenjangan posisi perempuan dengan laki-laki di bidang partisipasi angkatan kerja.



Sumber: BPS RI, Sakernas 2010-2019

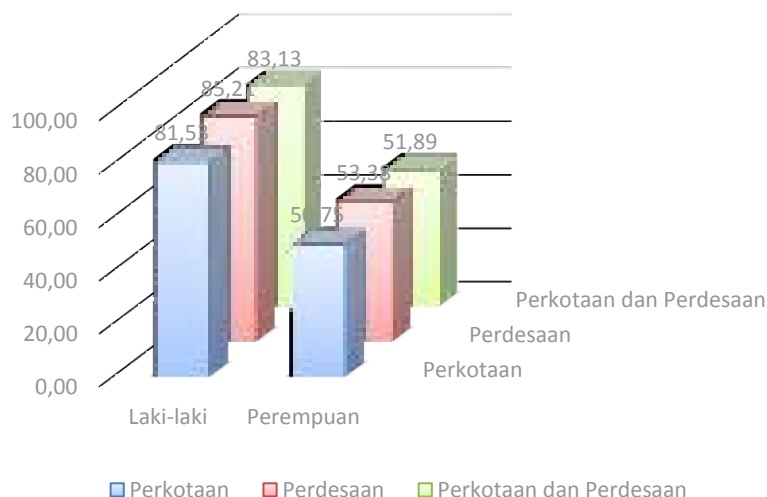
Gambar 3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019.

Persentase yang diperoleh laki-laki dalam TPAK menunjukkan bahwa di tahun 2019, dari 100 laki-laki yang masuk kategori angkatan kerja, terdapat sekitar 83 orang yang bekerja. Kesenjangan jumlah ini merupakan jumlah yang signifikan dibandingkan angkatan kerja yang sedang tidak bekerja. Kondisi sebaliknya terlihat pada perempuan, dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar separuh perempuan atau 52 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menunjukkan kegiatan perempuan masih banyak dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak produktif.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tuntutan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dikonstruksikan bertanggung jawab di ranah domestik sehingga tidak memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Faktor lain yang turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan usia angkatan kerja adalah relasi yang timpang pada perempuan yang masih menjadi fenomena di masyarakat. Pengambilan keputusan pada pilihan kegiatan yang dilakukan perempuan kerap tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perempuan, termasuk pada anak.

Melihat jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang mencapai sekitar setengah penduduk Indonesia, maka kontribusi perempuan di bidang ekonomi sangat penting. Jika TPAK perempuan dinaikkan menjadi minimal 64 persen saja, maka akan terdapat sekitar 20 juta angkatan kerja yang masuk kategori *semi-skilled* dan *skilled* baru. Dengan demikian, potensi dan keterampilan perempuan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan capaian pembangunan di Indonesia.

Kondisi tingkat partisipasi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki ini terlihat tidak hanya di wilayah perdesaan, namun juga terrefleksi di perkotaan. TPAK perempuan di perkotaan sebesar 50,57 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 81,53 persen. Di perdesaan, TPAK perempuan hanya sebesar 53,38 persen sementara laki-laki sebesar 85,21 persen (Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2019.

Berdasarkan provinsi dan daerah tempat tinggal, TPAK perempuan tertinggi di perkotaan terdapat di Bali dengan capaian sebesar 63,28 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 62,75 persen dan Sulawesi Barat sebesar 57,00 persen. Dua provinsi dengan persentase TPAK perempuan di perkotaan yang terendah terdapat di Maluku Utara dan Kalimantan Utara dengan capaian TPAK sama, yaitu sebesar 44,31 persen, sedangkan provinsi dengan TPAK perempuan terendah lainnya adalah Kepulauan Riau sebesar 45,44 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 45,85 persen. Untuk wilayah perdesaan, TPAK perempuan tertinggi terjadi di Papua dengan capaian sebesar 74,25 persen, Bali sebanyak 71,43 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 68,15 persen. Provinsi dengan capaian TPAK perempuan terendah terjadi di Kepulauan Riau dengan jumlah sebesar 39,19 persen, Riau sebesar 42,68 persen dan Banten sebanyak 44,02 persen (Lampiran Tabel 3.4).

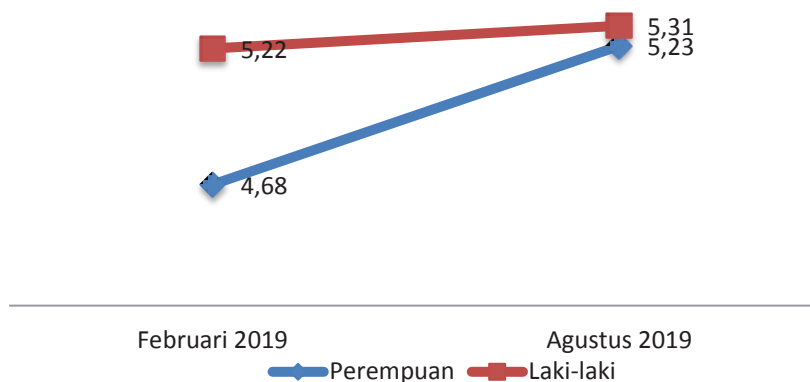
3. Tingkat Pengangguran

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk dengan status pengangguran menjadi beban ekonomi bagi penduduk lainnya. Semakin tinggi angka pengangguran akan beresiko pada tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Untuk mengurangi Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM masyarakat, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan peluang kerja yang bersifat kreatif dan inovatif. Dengan SDM yang berkualitas, maka TPT dapat ditekan. Jika TPT berkurang, maka beban ekonomi keluarga berkurang dan pendapatan keluarga akan lebih baik. Dengan pendapatan yang baik, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

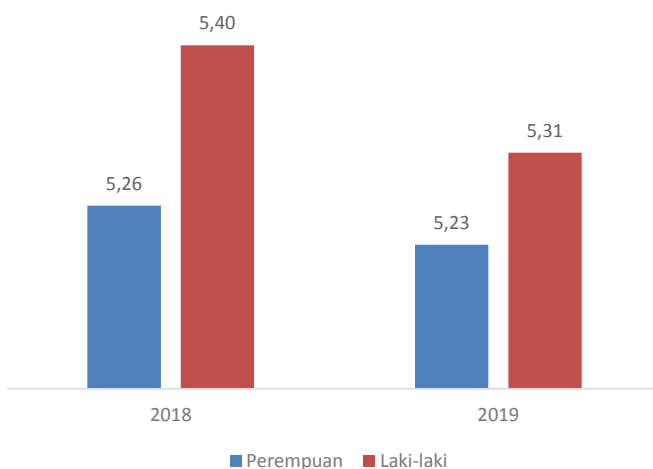
Perempuan usia angkatan kerja yang memiliki pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kemandirian ekonomi pada perempuan dapat meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) perempuan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan kesehatan diri dan keluarga, serta meningkatkan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang ada. Karena itu, TPT perempuan penting ditekan dengan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan pada perempuan.

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Februari 2019 dan Agustus 2019 menunjukkan bahwa TPT laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPT perempuan. Pada Februari 2019, TPT laki-laki sebesar 5,22 persen, sedangkan TPT perempuan hanya 4,68 persen. Pada Agustus 2019, TPT laki-laki dan perempuan sebesar 5,31 persen dan 5,23 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja (baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan), terdapat sekitar 5 orang yang termasuk kategori penganggur (Gambar 3.4).



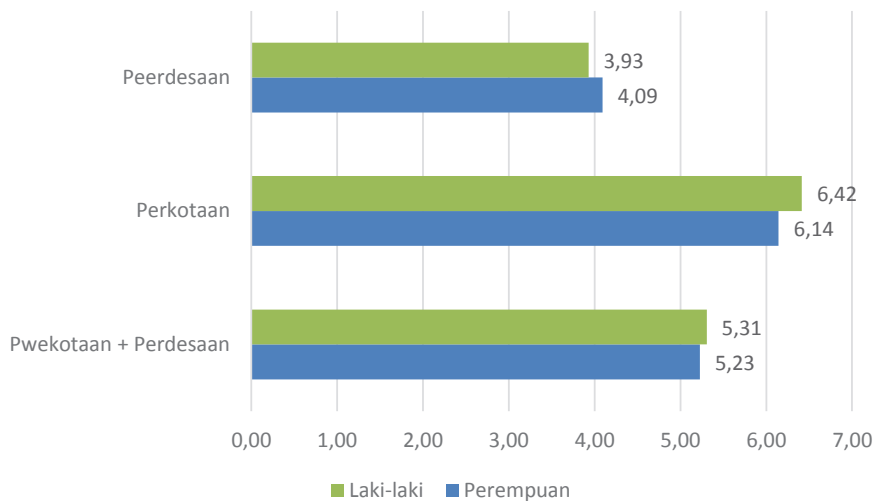
Gambar 3.4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, 2019

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPT tahun 2019 menunjukkan peningkatan baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Pada perempuan, tahun 2018 TPT mencapai angka 5,26 persen dan di tahun 2019 meningkat menjadi 5,40 persen. Demikian juga pada laki-laki, di tahun 2018 jumlah TPT laki-laki sebanyak 5,23 persen dan meningkat menjadi 5,31 persen di tahun 2019. Jumlah TPT perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik di tahun 2018 maupun tahun 2019.



Gambar 3.5. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perempuan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding di perdesaan. TPT perempuan di perkotaan sebesar 6,14 persen, lebih tinggi 2,05 persen dibanding TPT perempuan di perdesaan sebesar 4,09 persen. Keadaan yang sama terlihat pada TPT laki-laki, dimana TPT laki-laki di perkotaan lebih tinggi 2,49 persen dibanding di perdesaan (Gambar 3.6).

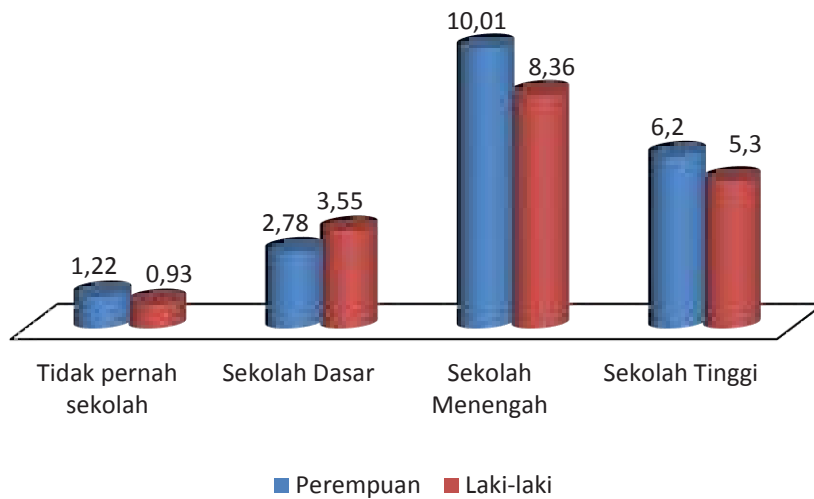


Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.

TPT perempuan di Bali merupakan yang terendah diantara semua provinsi, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan pemerintah provinsi dalam upaya menekan TPT di wilayah Bali sehingga mampu menekan TPT tersisa hanya 1,25 persen di perkotaan dan 0,89 persen di perdesaan. TPT perempuan tertinggi di perkotaan terdapat di Provinsi Maluku yang mencapai jumlah sebesar 11,36 persen, sedangkan di perdesaan terjadi di Banten dengan TPT perempuan mencapai angka sebesar 10,11 persen (Lampiran Tabel 3.5).

Menurut tingkat pendidikan, hasil Sakernas pada Agustus 2019 menunjukkan bahwa TPT tertinggi terdapat pada jenjang Sekolah Menengah dengan perempuan sebesar 10,01 persen dan laki-laki sebesar 8,36 persen. Hal tersebut dapat menggambarkan jika penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah. Sementara itu, TPT terendah terdapat pada kelompok tidak pernah sekolah yaitu perempuan sebesar 1,22 persen dan laki-laki sebesar 0,93 persen (Gambar 3.7).

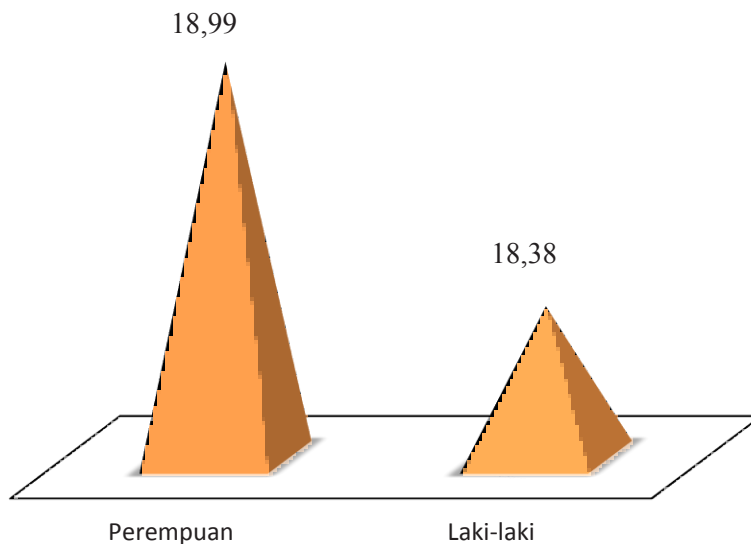


Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Agustus 2019.

Gambar 3.8. menunjukkan TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2019. Istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. TPT kelompok umur muda antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh, laki-laki sebesar 18,38 persen sedangkan perempuan sebesar 18,99 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja laki-laki kelompok umur

muda terdapat sekitar 18 orang yang termasuk kategori penganggur, sedangkan pada perempuan sekitar 19 orang yang termasuk kategori penganggur.



Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.7. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kelompok Umur Muda berdasarkan Jenis Kelamin, Agustus 2019

b. Setengah Penganggur

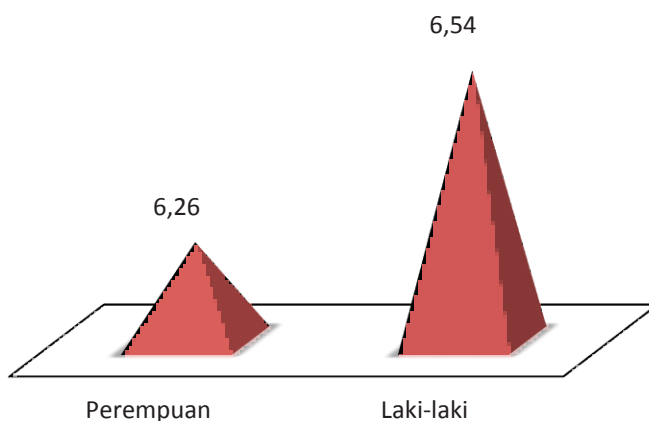
Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Februari 2019 mencapai 9,53 juta orang, yang terdiri dari 5,88 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,65 juta orang adalah perempuan. Apabila dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2019, terjadi penurunan jumlah setengah penganggur baik pada perempuan maupun laki-laki. Dengan penurunan masing-masing sebanyak 0,60 juta dan 0,79 juta (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Penduduk Setengah Penganggur (juta) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Jenis Kelamin	Februari 2019	Agustus 2019
Perempuan	3,65	3,05
Laki-laki	5,88	5,09
Jumlah	9,53	8,14

Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Tingkat Setengah Penganggur merupakan persentase jumlah setengah penganggur terhadap total penduduk yang bekerja. Sakernas Agustus 2019 menunjukkan bahwa Tingkat Setengah Penganggur perempuan sebesar 6,26 persen dan laki-laki sebesar 6,54 persen (Gambar 3.8).

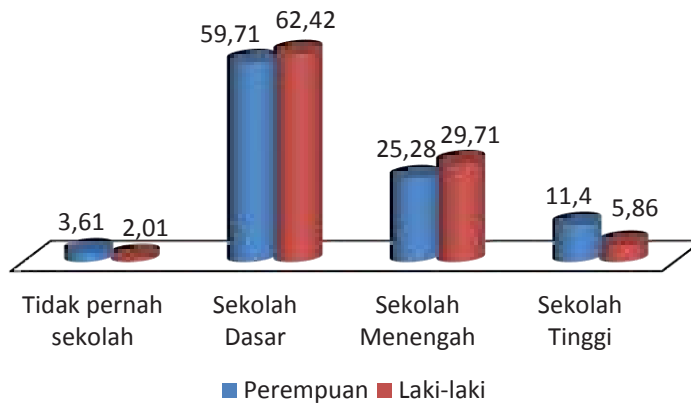


Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.8. Tingkat Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2019

Hasil Sakernas Agustus 2019 tentang distribusi setengah penganggur menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa setengah penganggur tertinggi terdapat pada jenjang Sekolah Dasar dengan perempuan sebesar 59,71 persen dan laki-laki sebesar 62,42 persen.

Sementara itu, setengah penganggur terendah terdapat pada kelompok tidak pernah sekolah yaitu perempuan sebesar 3,61 persen dan laki-laki sebesar 2,01 persen (Gambar 3.9).



Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.9. Distribusi Setengah Penganggur menurut Tingkat Pendidikan (Persen), Agustus 2019

4. Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan bekerja di sektor formal dan informal, menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin.

a. Tingkat Pendidikan

Salah satu upaya dalam meningkatkan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan adalah melalui pendidikan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan laki-laki dan perempuan akan berkorelasi pada pilihan pekerjaan yang tersedia dan akses terhadapnya. Tingkat pendidikan juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran gaji/upah yang ditawarkan. Dengan tingkat pendidikan yang baik, laki-laki dan perempuan tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, namun juga mendapatkan peluang pendapatan yang

lebih tinggi dan pilihan pekerjaan yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuan yang ada.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di daerah perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan karakteristik yang sangat signifikan. Di daerah perkotaan, mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas yaitu sebesar 53,43 persen untuk perempuan dan 54,33 persen untuk laki-laki. Situasi sebaliknya terlihat di daerah perdesaan, mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja justru penduduk yang berpendidikan maksimum Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 55,75 persen untuk perempuan dan 50,39 untuk laki-laki (Tabel 3.2).

Persentase tingkat pendidikan terkecil pada perempuan dan laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan menunjukkan tingkat pendidikan yang sama yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pekerja perempuan yang berpendidikan SMP di perdesaan sebesar 17,22 persen, lebih besar 1,26 persen daripada pekerja perempuan di perkotaan.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019.

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas
Perkotaan	Laki-laki	28.10%	17.57%	54.33%
	Perempuan	30.62%	15.96%	53.43%
Perdesaan	Laki-laki	50.39%	20.11%	29.50%
	Perempuan	55.75%	17.22%	27.03%
Perkotaan+Perdesaan	Laki-laki	38.19%	18.72%	43.08%
	Perempuan	42.00%	16.53%	41.47%

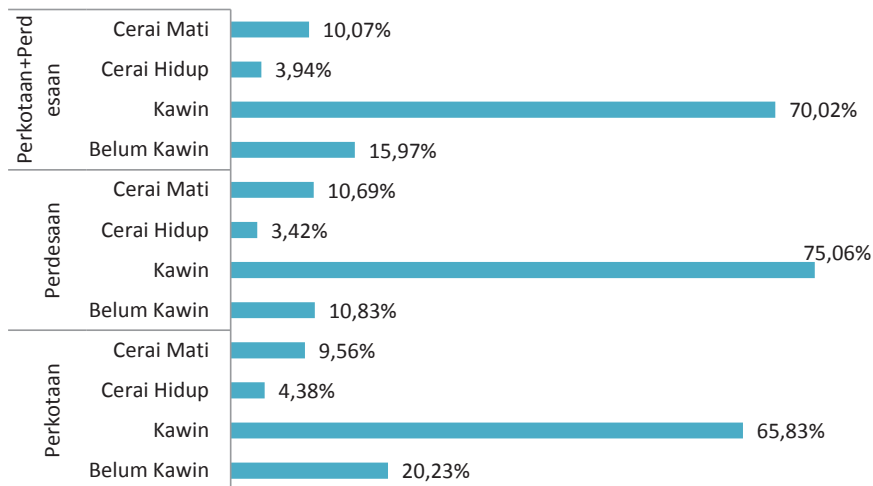
Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Di perkotaan, laki-laki yang tamat jenjang SMA ke atas dan bekerja berjumlah lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan yang setara, dengan perbandingan sebesar 54,33 persen dan 53,43 persen. Sangat berbeda terlihat di perdesaan, dimana perempuan yang hanya tamat SD ke bawah dan bekerja lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan ijazah yang setingkat SD ke bawah, dengan perbandingan 30,62 persen pada perempuan dan 28,10 persen pada laki-laki. Untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat, baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan situasi yang sama, dimana persentase perempuan usia 15 tahun ke atas dan yang bekerja dalam seminggu lalu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kesenjangan lulusan SMP/ sederajat antara laki-laki dan perempuan yang bekerja dalam seminggu lalu ini sebesar 2,89 persen di perdesaan dan 1,61 persen di perkotaan (Gambar 3.10).

Bila dilihat antar provinsi, perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan maksimal tamat SD, tamat SMP atau SMA ke atas angkanya sangat bervariasi. Persentase tertinggi dari perempuan perkotaan yang bekerja dengan tingkat pendidikan tamat SD ke bawah ada di Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 43,46 persen, berpendidikan SMP ada di Jawa Tengah sebesar 17,76 persen dan yang berpendidikan SMA ke atas ada di Maluku sebesar 72,90 persen. Sedangkan persentase tertinggi dari perempuan perdesaan yang bekerja dengan tingkat pendidikan tamat SD ke bawah ada di Papua yaitu sebesar 80,79 persen, berpendidikan SMP ada di Lampung sebesar 22,48 persen dan yang berpendidikan SMA ke atas ada di Sulawesi Utara sebesar 47,34 persen. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa pekerja perempuan berumur 15 tahun ke atas di perkotaan provinsi Maluku dan di perdesaan provinsi Sulawesi Utara memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja perempuan di provinsi lainnya (Lampiran Tabel 3.6).

b. Status Perkawinan Pekerja

Gambaran perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu lalu berdasarkan status perkawinannya dapat dilihat melalui empat status, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Persentase perempuan yang berstatus kawin menempati persentase terbesar pada status perkawinan perempuan yang bekerja selama seminggu yang lalu. Hal ini terlihat sama-sama tinggi di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan, perempuan dengan status kawin dan bekerja selama seminggu lalu mencapai jumlah sebesar 65,83 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 75,06 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus kawin dan bekerja di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Situasi sebaliknya terlihat pada perempuan berstatus belum kawin, persentase perempuan yang bekerja di perdesaan dalam seminggu yang lalu justru berjumlah lebih kecil dibandingkan di perkotaan dengan perbandingan 20,23 persen dan 10,83 persen. Pada status cerai, perempuan yang bekerja dalam seminggu lalu di perkotaan dan perdesaan menunjukkan gambaran yang sama, baik status cerai hidup maupun cerai mati (Gambar 3.10).



Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.10. Persentase Penduduk Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Perkawinan Tahun 2019.

Secara nasional di tahun 2019, persentase laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berstatus kawin serta belum kawin sama-sama lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sebaliknya, persentase perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berstatus cerai hidup atau cerai mati, sama-sama lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Daerah Tempat Tinggal Jenis Kelamin	Status Perkawinan			
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
Perkotaan				
Perempuan	20,23%	65,83%	4,38%	9,56%
Laki-laki	22,68%	73,56%	1,84%	1,92%
Perdesaan				
Perempuan	10,83%	75,06%	3,42%	10,69%
Laki-laki	19,43%	76,69%	1,66%	2,22%
Perkotaan + Perdesaan				
Perempuan	15,97%	70,02%	3,94%	10,07%
Laki-laki	21,21%	74,98%	1,76%	2,06%

Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Tingginya perbedaan status cerai hidup dan cerai mati pada perempuan dan laki-laki yang bekerja dapat mengindikasikan dua kemungkinan, pertama perubahan status duda pada laki-laki lebih cepat terjadi dibandingkan perempuan dengan melakukan perkawinan baru sehingga statusnya berubah menjadi status kawin, atau kedua, laki-laki yang berstatus cerai hidup dan cerai mati sedang tidak bekerja atau menganggur. Indikasi yang sama dapat dianalisis pada perempuan bekerja dengan status cerai hidup dan cerai mati. Tingginya perbedaan persentase status cerai pada perempuan dibandingkan laki-laki merefleksikan perempuan tidak segera melangsungkan perkawinan pasca perceraianya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Melihat perbandingan status perkawinan pada perempuan yang bekerja dalam seminggu yang lalu berdasarkan provinsi di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang kurang lebih sama. Perempuan

yang tinggal di daerah perkotaan umur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan status kawin tertinggi terdapat di provinsi Bali sebesar 73,17 persen. Provinsi lain yang mencapai lebih dari 70 persen pada perempuan perkotaan yang bekerja dan berstatus kawin terletak di dua provinsi, yaitu provinsi Jambi sebesar 70,19 persen dan Bengkulu sebanyak 70,03 persen. Untuk gambaran perempuan perdesaan yang berstatus kawin dan bekerja dengan persentase tertinggi terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian sebesar 81,46 persen, sedangkan provinsi lain yang mencapai persentase di atas 80 persen terletak di 2 provinsi, yaitu provinsi Lampung sebesar 80,51 persen dan Bengkulu mencapai persentase 80,41 persen (Lihat Lampiran Tabel 3.8)

Provinsi dengan persentase laki-laki yang tinggal di perkotaan dan bekerja serta berstatus kawin tertinggi terletak di Kepulauan Riau dengan capaian sebesar 77,46 persen, disusul provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 76,08 persen. Untuk provinsi dengan persentase laki-laki bekerja yang berstatus kawin dan tinggal daerah perdesaan terletak di Jawa Barat dengan capaian jumlah 81,52 persen. Selain Jawa Barat, terdapat dua provinsi yang telah melampaui 80 persen laki-laki berstatus menikah dan bekerja, yaitu provinsi DI Yogyakarta sebesar 81,21 persen dan Kepulauan Riau sebanyak 80,29 persen (lihat Lampiran Tabel 3.9).

c. Jam Kerja

Lama jam kerja seseorang dalam satu minggu maksimal 40 (empat puluh) jam, jika lebih dari batas waktu tersebut, maka tenaga kerja berhak atas uang lembur atas kelebihan waktu bekerja yang dijalani. Ketentuan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 102/MEN/VI/2004 Pasal 1 angka 1 tentang sistem jam kerja. Merujuk pada pengalaman jam kerja yang dijalani penduduk angkatan kerja yang

bekerja, pada tahun 2019 menunjukkan lebih dari separoh perempuan dan laki-laki yang tinggal di perkotaan dan bekerja, menjalani jam kerja melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan (40 jam). Hal ini menunjukkan lebih dari setengah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di wilayah perkotaan menerima uang lembur sebagai kompensasi dari waktu kerja yang lebih lama dari ketentuan Kemenakertrans. Pada perempuan perkotaan, terdapat 48,59 persen perempuan bekerja melebihi maksimal jam kerja, sementara laki-laki yang bekerja dengan lembur lebih tinggi dari perempuan dengan jumlah 60,80 persen.

Berbeda dengan perempuan di perkotaan, terdapat 54,51 persen perempuan perdesaan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu atau mereka bekerja selama 1 sampai 34 jam seminggu, sedangkan perempuan perdesaan yang bekerja lebih dari 40 jam sebanyak 29,09 persen. Itu artinya, perempuan yang bekerja lebih dari 40 jam lebih banyak terjadi di perkotaan, sedangkan perempuan yang bekerja 1-34 jam lebih dominan dialami perempuan perdesaan. Gambaran yang sedikit juga terlihat pada laki-laki perdesaan yang bekerja kurang dari 35 jam sebanyak 38,66 persen, atau lebih rendah dibandingkan laki-laki di perkotaan.

Di wilayah perdesaan perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan dengan selisih sebesar 19,05 persen. Hal berbeda dialami laki-laki perdesaan, persentase laki-laki yang bekerja lebih dari 40 jam di perdesaan mencapai 43,18 persen, sementara laki-laki perdesaan yang bekerja kurang dari 34 jam sebesar 38,66 persen. Demikian demikian, baik di perkotaan maupun di perdesaan, persentase laki-laki yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu menempati persentase yang sama-sama paling tinggi (Tabel 3.4).

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2019.

Tempat Tinggal	Jam Kerja				Total
	0	1-34	35-40	>40	
Perempuan					
Perkotaan	2,07	30,45	18,89	48,59	100,00
Perdesaan	2,60	54,61	13,70	29,09	100,00
Laki-laki					
Perkotaan	2,15	18,67	18,37	60,80	100,00
Perdesaan	2,52	38,66	15,64	43,18	100,00

Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Berdasarkan sebaran provinsi, perempuan yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu tertinggi ada di Kepulauan Riau dengan jumlah sebanyak 55,63 persen, sedangkan paling rendah di Papua sebanyak 20,38 persen. Laki-laki yang bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu paling banyak terdapat di DKI Jakarta yang mencapai jumlah 69,71 persen, sedangkan yang terendah di Sulawesi Barat yaitu sebesar 28,30 persen (lihat Lampiran Tabel 3.13). Merujuk pada usia tenaga kerja yang bekerja, di tahun 2019 masih dijumpai perempuan usia di atas 60 tahun yang bekerja melebihi jam kerja lebih dari 40 jam dengan persentase yang signifikan, yaitu sebesar 31,97 persen, sedangkan pada laki-laki usia 60 tahun ke atas yang bekerja lembur lebih tinggi dari perempuan dengan capaian sebesar 40,92 persen (Tabel 3.5 Lampiran 3.12).

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja, 2019.

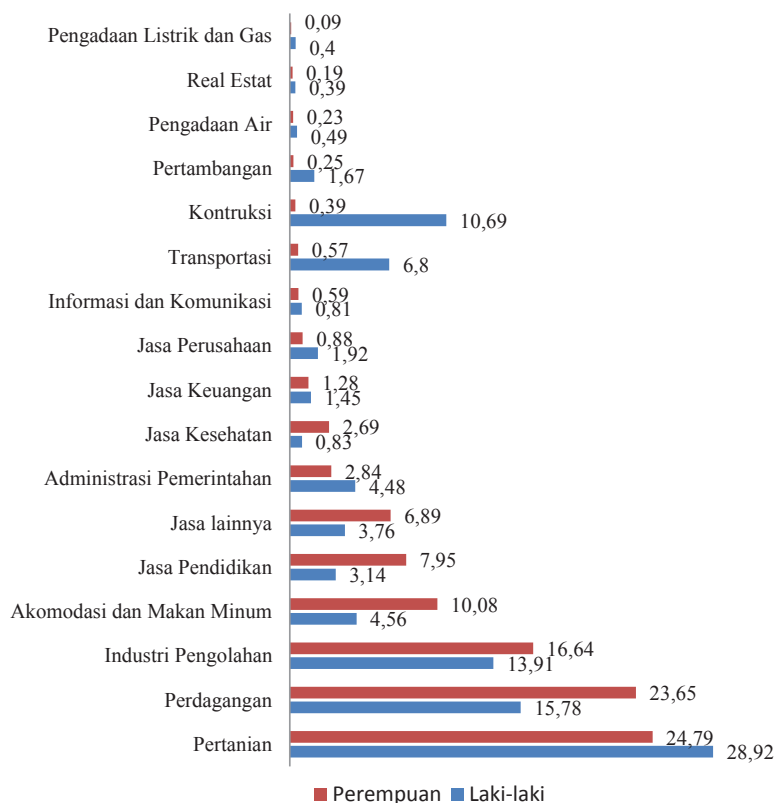
Kelompok Umur	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perkotaan+Perdesaan										
15-19	1,02	39,28	10,60	49,10	100,00	1,32	41,78	9,91	46,99	100,00
20-24	1,73	24,87	18,96	54,43	100,00	1,91	20,13	14,98	62,98	100,00
25-29	2,35	30,89	20,61	46,15	100,00	1,60	16,47	17,12	64,81	100,00
30-34	2,15	34,75	19,28	43,83	100,00	1,93	15,39	17,20	65,49	100,00
35-39	2,11%	34,68	18,74	44,47	100,00	1,91	15,51	17,12	65,46	100,00
40-44	2,17%	36,30	17,31	44,22	100,00	1,93	16,77	17,06	64,24	100,00
45-49	2,15%	37,08%	16,88%	43,89%	100,00%	2,31%	18,72%	17,92%	61,05%	100,00%
50-54	2,12%	38,91%	17,80%	41,17%	100,00%	2,72%	20,87%	18,80%	57,61%	100,00%
55-59	2,67%	41,49%	17,79%	38,04%	100,00%	3,39%	27,06%	18,44%	51,12%	100,00%
60+	4,05%	50,89%	13,09%	31,97%	100,00%	4,24%	40,43%	14,41%	40,92%	100,00%
Total	2,31%	36,47%	17,59%	43,63%	100,00%	2,32%	21,38%	16,72%	59,58%	100,00%

d. Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan utama yang tersedia dan diakses oleh perempuan dan laki-laki kerap kali masih menunjukkan stereotipe gender. Perempuan dan laki-laki yang memiliki lapangan pekerjaan utama masih menggambarkan konstruksi gender terus memengaruhi pilihan lapangan pekerjaan utama perempuan dan laki-laki. Gambaran ini terlihat pada hasil Sakernas Agustus 2019 yang menunjukkan adanya kesenjangan lapangan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan karakter maskulin tampak didominasi oleh laki-laki ketimbang perempuan, sementara jenis-jenis pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dilakukan perempuan juga terlihat didominasi oleh perempuan. Hal ini terkonfirmasi melalui persentase yang terluat pada lapangan pekerjaan utama laki-laki dan perempuan. Lapangan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki yaitu kategori pertanian, administrasi

pemerintahan, jasa perusahaan, transportasi, konstruksi, pertambangan, pengadaan air, real estat, serta pengadaan listrik dan gas. Kategori lapangan pekerjaan perdagangan, industri pengolahan, akomodasi makan dan minum, jasa pendidikan, jasa lainnya, serta jasa kesehatan didominasi oleh perempuan.

Kesenjangan terbesar terlihat pada laki-laki bekerja yang berada pada kategori jenis pekerjaan konstruksi dengan persentasi sebesar 10,69 persen, sementara perempuan yang menggeluti bidang konstruksi hanya sebesar 0,39 persen saja. Kesenjangan gender yang mencolok juga terlihat pada proporsi perempuan yang bekerja berada pada kategori perdagangan yaitu sebesar 7,87 persen, dengan persentasi perempuan sebesar 23,65 dan laki-laki sebesar 15,78 persen. Sementara untuk jasa keuangan dan informasi komunikasi, tidak terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Untuk jasa keuangan, persentase laki-laki sebesar 1,45 persen dan perempuan sebesar 1,28 persen (Gambar 3.11).



Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.11. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2019

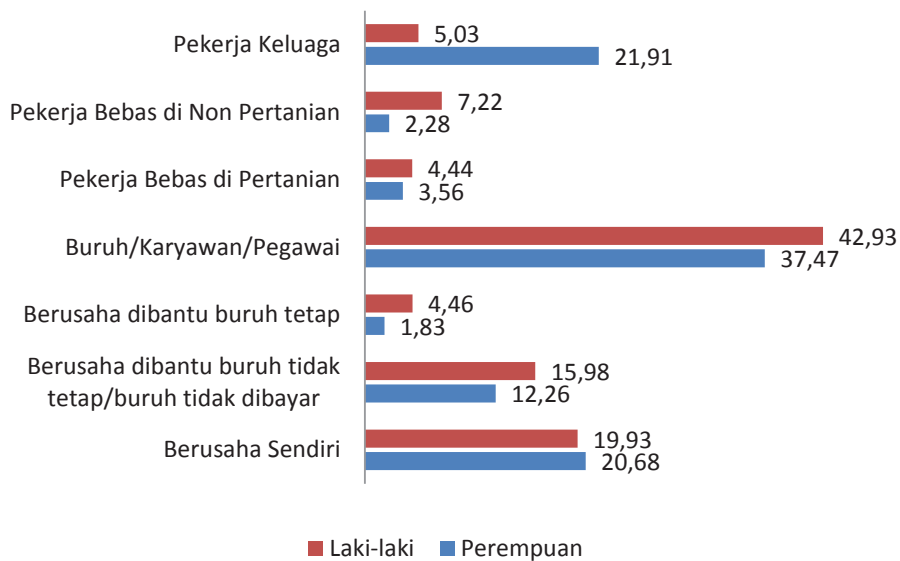
Persentase terbesar lapangan pekerjaan utama pada perempuan dan laki-laki sama-sama berada pada kategori pertanian, yaitu sebesar 24,79 persen untuk perempuan dan 28,92 persen untuk laki-laki. Informasi ini menguatkan bukti bahwa Indonesia adalah negara agraris karena sekitar seperempat persen penduduknya, baik laki-laki maupun perempuan bekerja di sektor pertanian. Secara spesifik pada kelompok perempuan, selain sektor pertanian, perempuan juga banyak yang bekerja di sektor perdagangan yaitu sebanyak 23,65 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 16,64 persen. Persentasi terkecil lapangan pekerjaan perempuan berada pada kategori pengadaan listrik dan air yaitu sebesar 0,09

persen, disusul kategori real estat sebesar 0,19 persen dan pengadaan air sebesar 0,23 persen.

f. Status Pekerjaan Utama

Tahun 2019, status pekerjaan utama pada perempuan dan laki-laki menunjukkan pola yang sama. Persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai menempati posisi tertinggi, yaitu perempuan sebesar 37,47 persen dan laki-laki sebesar 42,93 persen. Status pekerja perempuan dan laki-laki yang menjalankan usaha dengan dibantu buruh menduduki tingkat status yang paling sedikit, yaitu sebesar 1,83 persen untuk perempuan dan 4,46 persen untuk laki-laki (Gambar 3.12).

Pada status pekerjaan dengan adanya buruh, baik buruh yang dibayar tetap maupun yang tidak tetap menunjukkan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara untuk status berusaha sendiri, perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Situasi ini mengindikasikan usaha atau kerja yang dilakukan perempuan dan laki-laki masih mengalami kesenjangan modal. Laki-laki lebih memiliki modal untuk berusaha dengan melibatkan buruh ketimbang perempuan. Situasi ini dapat menggambarkan akses modal bagi perempuan perlu diperkuat melalui cara-cara yang memudahkan prosedur perempuan mendapatkan akses tersebut.



Gambar 3.12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama

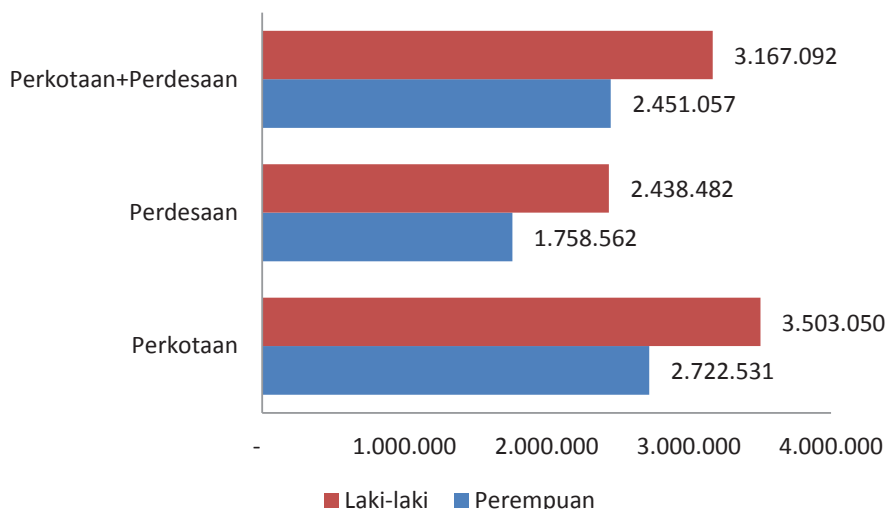
Status pekerjaan utama dalam kategori pekerja keluarga menunjukkan keadaan tenaga kerja Indonesia masih dipengaruhi oleh cara pandang yang membakukan peran gender. Ruang domestik yang dikonstruksi sebagai ruang milik perempuan masih tergambar pada status pekerjaan pada kategori pekerja keluarga. Jenis-jenis pekerjaan yang berbasis pengasuhan dan perawatan keluarga masih dianggap sebagai pekerjaan perempuan, sehingga di tahun 2019 ini, situasi tersebut masih terlihat dalam data. Persentase perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga sangat signifikan besar jika dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 21,91 persen berbanding 5,67 persen (Gambar 3.12). Perempuan sebagai pekerja keluarga terbanyak terdapat di Papua dengan jumlah sebesar 59,79 persen, sedangkan perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga paling sedikit terdapat di dua provinsi yaitu di DKI Jakarta dan Kepulauan Riau dengan jumlah sebesar 7,09 persen. Selain sebagai pekerja keluarga, perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai menempati urutan

tertinggi. Persentase tertinggi perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah sebesar 64,83 persen, sedangkan yang terendah di Papua dengan jumlah sebesar 13,25 persen (Lampiran Tabel 3.22).

g. Rata-rata Upah

Informasi tentang rata-rata upah/gaji merupakan salah satu aspek paling penting dalam data tentang pasar tenaga kerja. Urgensi analisis pada upah/gaji digunakan sebagai bahan evaluasi pada SDM yang ada serta standar hidup dan kondisi dari pekerjaan dan kehidupan dari para pekerja. Informasi tersebut juga dibutuhkan dalam perencanaan ekonomi dan pengembangan sosial, penentuan kebijakan pendapatan dan fiskal, pengaturan perlindungan sosial, dan pengaturan minimum upah/gaji (ILO dalam KPPPA, 2019).

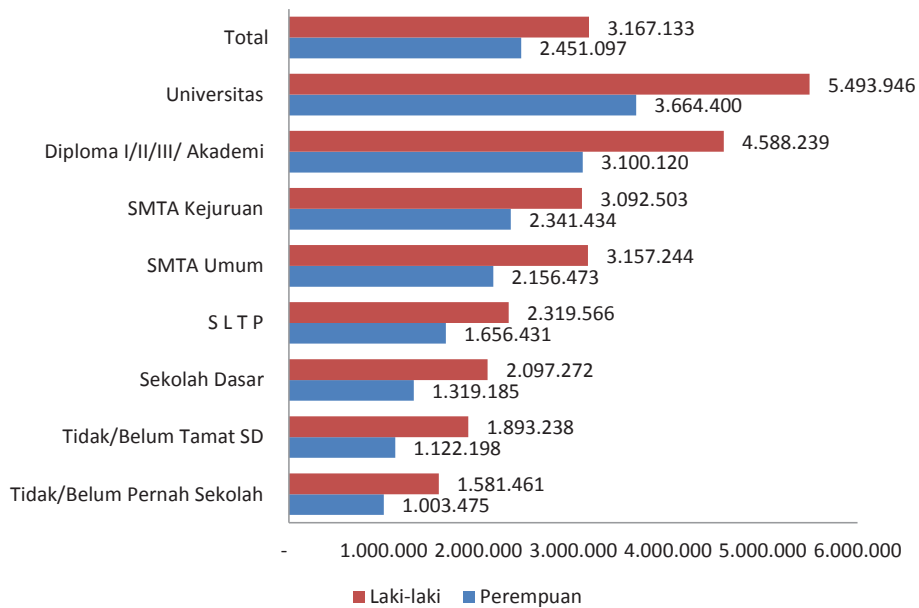
Secara umum rata-rata upah/gaji pekerja perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kondisi ini tidak berbeda dengan tahun 2018. Di perkotaan, rata-rata upah/gaji pekerja perempuan sebesar Rp 2.722.531, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan rata-rata upah sebesar Rp 3.503.050. Situasi yang tidak berbeda juga terjadi di perdesaan, upah rata-rata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan rata-rata upah yang dialami perempuan. Jika melihat pada nilai rata-rata upah yang diterima laki-laki dan perempuan di perkotaan dan perdesaan, maka kesenjangan upah yang dialami perempuan sebesar Rp 780.519 di perkotaan dan sebesar Rp 679.920 di perdesaan (Gambar 3.13).



Gambar 3.13. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Kesenjangan upah yang diterima perempuan dan laki-laki dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satu faktor yang penting dilihat kembali adalah status perempuan dan laki-laki bekerja dan kepala keluarga. Konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah keluarga mengakibatkan perempuan tidak bisa memperoleh tunjangan keluarga. Jika pun dimungkinkan diperoleh tunjangan keluarga pada perempuan pekerja, maka pekerja perempuan dituntut memberikan bukti-bukti yang sah tentang status dirinya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini tidak terjadi pada laki-laki, karena status menikah pada pekerja laki-laki kerap kali menjadikan pekerja laki-laki secara otomatis dicatat sebagai kepala keluarga dan berhak mendapatkan tunjangan tambahan. Dengan demikian, selain menguatkan perempuan di bidang pendidikan dan keahlian untuk mendorong kesamaan penghargaan atas upah, kebijakan yang berpihak pada hak-hak pekerja perempuan juga penting diadvokasi.

Dengan demikian, perempuan tidak dihadapkan pada situasi sulit ketika menggantikan peran dirinya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.



Gambar 3.14. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2019.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan untuk menentukan gaji yang akan diterima seseorang. Pada Gambar 3.15 menunjukkan dengan jelas bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka semakin besar nilai upah/gaji yang diterima. Di tahun 2019, tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dan berpendidikan lebih tinggi memperoleh rata-rata upah/gaji yang lebih besar ketimbang jenjang pendidikan di bawahnya. Hal ini dapat dipahami karena tingkat pendidikan dapat mempengaruhi nilai gaji/upah yang diterima seseorang.

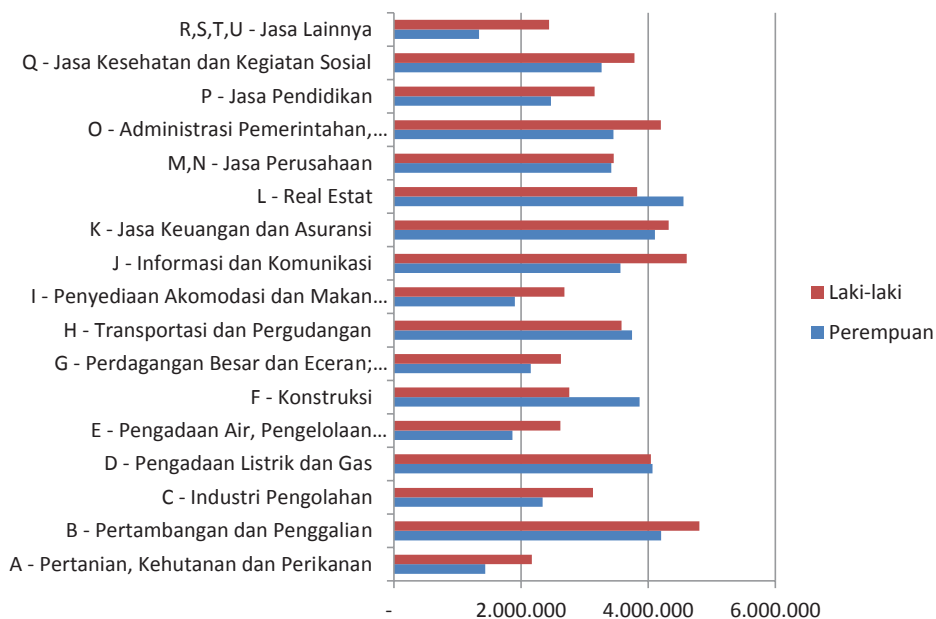
Catatan penting dari nilai upah/gaji yang terlihat pada Gambar 3.14 di atas adalah kesenjangan yang diterima perempuan dengan jenjang pendidikan yang sama dengan laki-laki. Di semua jenjang pendidikan yang ditamatkan, nilai upah/gaji perempuan sebagai buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir mengalami perbedaan perlakuan atas nilai upah yang diterima perempuan secara signifikan. Perbedaan yang cukup besar terlihat pada tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD, dimana rasio upah yang ada mencapai 59,27 persen. Hal ini bermakna upah/gaji yang diterima perempuan hanya 59,27 persen dari upah/gaji yang diterima laki-laki. Rasio upah/gaji yang diperoleh perempuan dengan laki-laki dengan perbedaan yang paling sedikit adalah pada kelompok pendidikan SMTA Kejuruan yaitu dengan rasio 75,71 persen (Tabel 3.6).

Tabel 3.6. Rasio Upah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2019.

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.003.475	1.581.461	63,45
Tidak/Belum Tamat SD	1.122.198	1.893.238	59,27
Sekolah Dasar	1.319.185	2.097.272	62,90
S L T P	1.656.431	2.319.566	71,41
SMTA Umum	2.156.473	3.157.244	68,30
SMTA Kejuruan	2.341.434	3.092.503	75,71
Diploma I/II/III/ Akademi	3.100.120	4.588.239	67,57
Universitas	3.664.400	5.493.946	66,70
Total	2.451.097	3.167.133	77,39

Perbedaan rata-rata upah/gaji antara pekerja perempuan dan laki-laki juga terjadi pada pekerjaan berdasarkan lapangan pekerjaan utama. Rata-rata upah/gaji pekerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki pada kategori pekerjaan (1) real estate, (2) transportasi

dan perdagangan, (3) konstruksi, dan (4) pengadaan listrik dan gas. Selain empat lapangan pekerjaan utama tersebut, rata-rata upah/gaji pekerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki (Gambar 3.15). Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, rasio gaji/upah perempuan hanya sebesar 77,39 persen dibandingkan laki-laki. Kesenjangan upah/gaji yang diterima laki-laki dan perempuan ini cukup lebar dan merefleksikan penghargaan terhadap kerja perempuan masih dilihat subordinat dibandingkan laki-laki. Kesamaan upah/gaji menjadi agenda advokasi yang penting bagi keadilan perempuan di bidang tenaga kerja. Dengan demikian, pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan pekerja perempuan dapat lebih dirasakan keadilannya.



Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.15. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2019.

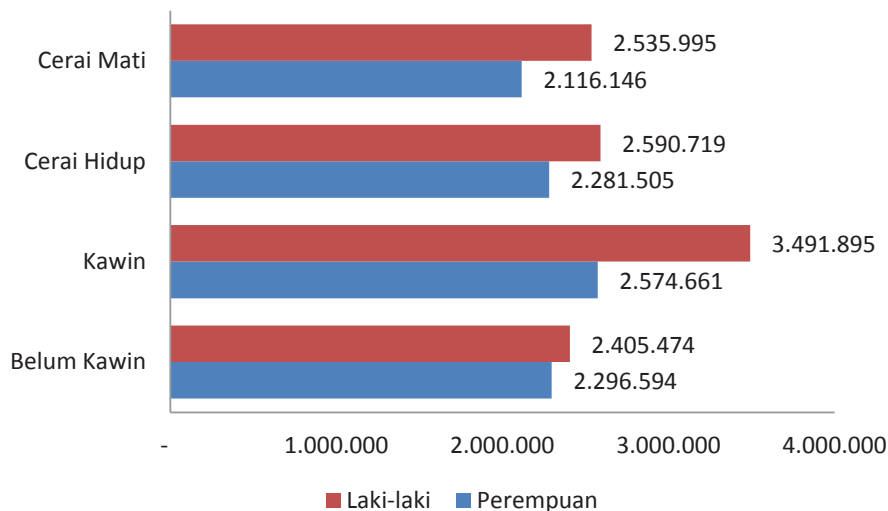
Tabel 3.7. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/ Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2019.

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
A - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.437.325	2.169.562	66,25
B - Pertambangan dan Penggalian	4.203.774	4.807.813	87,44
C - Industri Pengolahan	2.338.092	3.131.721	74,66
D - Pengadaan Listrik dan Gas	4.068.005	4.042.040	100,64
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.865.838	2.618.243	71,26
F - Konstruksi	3.863.034	2.757.877	140,07
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.152.828	2.628.600	81,90
H - Transportasi dan Pergudangan	3.746.388	3.581.861	104,59
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.904.633	2.681.500	71,03
J - Informasi dan Komunikasi	3.564.076	4.606.791	77,37
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	4.108.619	4.321.528	95,07
L - Real Estat	4.555.134	3.827.604	119,01
M,N - Jasa Perusahaan	3.420.280	3.457.031	98,94
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.453.680	4.198.409	82,26
P - Jasa Pendidikan	2.470.326	3.156.431	78,26
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.268.753	3.784.202	86,38
R,S,T,U - Jasa Lainnya	1.340.502	2.442.069	54,89
Total	2.451.097	3.167.133	77,39

Pada tabel 3.7 Lampiran tabel 3.21 menunjukkan rasio upah yang berbeda pada perempuan dan laki-laki karena jenis lapangan pekerjaan utama. Rasio upah dengan angka diatas 100 menunjukkan bahwa rata-rata

upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Terdapat 4 lapangan pekerjaan utama dengan rasio diatas 100 pada perempuan. Sebagai contoh, jenis pekerjaan pengadaan listrik dan gas memiliki rasio upah sebesar 100,64 persen pada perempuan. Hal tersebut mengandung arti bahwa upah/gaji bersih pekerja perempuan lebih tinggi 0,64 persen dibandingkan dengan upah/gaji bersih pekerja laki-laki. Selain pengadaan listrik dan gas, lapangan pekerjaan utama lainnya dengan rasio upah diatas 100 adalah konstruksi sebesar 140,07, transportasi dan pergudangan sebesar 104,59 persen dan real estate sebesar 119,01 persen. Namun demikian, pada jenis lapangan pekerjaan selain 4 macam di atas, rasio rata-rata upah/gaji perempuan berada di bawah laki-laki dengan varian yang berbeda-beda. Rasio upah terendah terdapat pada jasa lainnya sebesar 54,89 persen. Hal tersebut mengandung arti bahwa upah/gaji bersih pekerja perempuan hanya sebesar 54,89 persen dari upah/gaji yang diterima laki-laki (Tabel 3.7).

Perbedaan rata-rata upah/gaji bersih antara pekerja perempuan dan laki-laki juga terlihat pada pekerjaan berdasarkan status perkawinan. Gambar 3.17 menunjukkan pekerja perempuan dengan status belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati berdampak pada besaran nilai upah/gaji yang diterima. Pada semua status yang ada pada diri perempuan, nilai rata-rata upah/gaji perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan total rasio sebesar 77,39 persen (lihat Lampiran 3.23). Dari status pekerja perempuan, kesenjangan rata-rata upah/gaji terbesar terlihat pada pekerja perempuan yang berstatus kawin, dengan selisih nilai upah/gaji sebesar Rp 917.234 atau dalam rasio hanya 73,73 persen dari nilai upah/gaji yang diterima laki-laki.



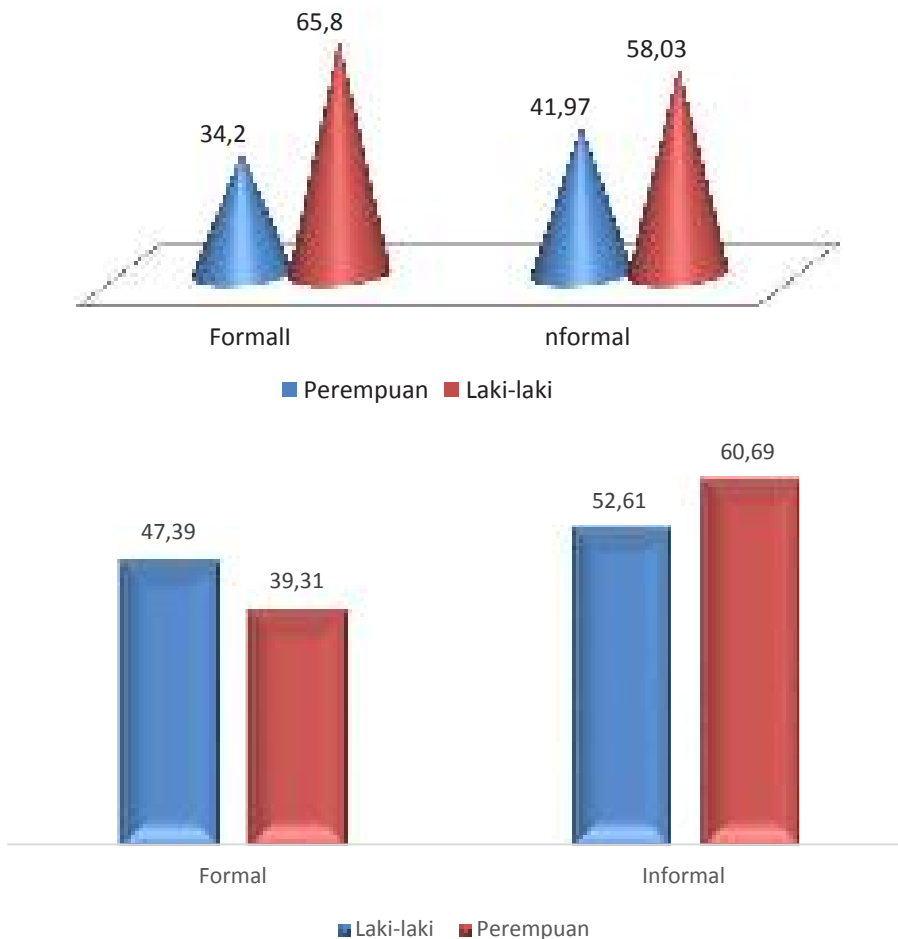
Gambar 3.16. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

g. Pekerja di Sektor Informal dan Formal

Partisipasi perempuan di dunia kerja tidak hanya terbatas pada kerja di sektor formal saja. Perempuan juga memiliki peran yang signifikan pada kerja-kerja informal. Kerja di sektor informal merupakan peluang kerja alternatif yang memberi harapan pendapatan yang tidak selalu lebih kecil dibandingkan kerja di sektor formal. Di negara berkembang, kerja informal menjadi kekuatan ekonomi yang dapat merefleksikan kemandirian penduduknya dalam pemanfaatan sumber-sumber daya lokal yang ada. Termasuk pada perempuan, partisipasi di bidang kerja informal menjadi peluang tumbuhnya ekonomi kreatif yang inovatif dan mandiri bagi upaya pemberdayaan perempuan.

Di tahun 2019, secara nasional berdasarkan jenis kelamin, penduduk bekerja pada kegiatan formal dan informal masih didominasi laki-laki perempuan. Persentase perempuan yang bekerja di sektor formal

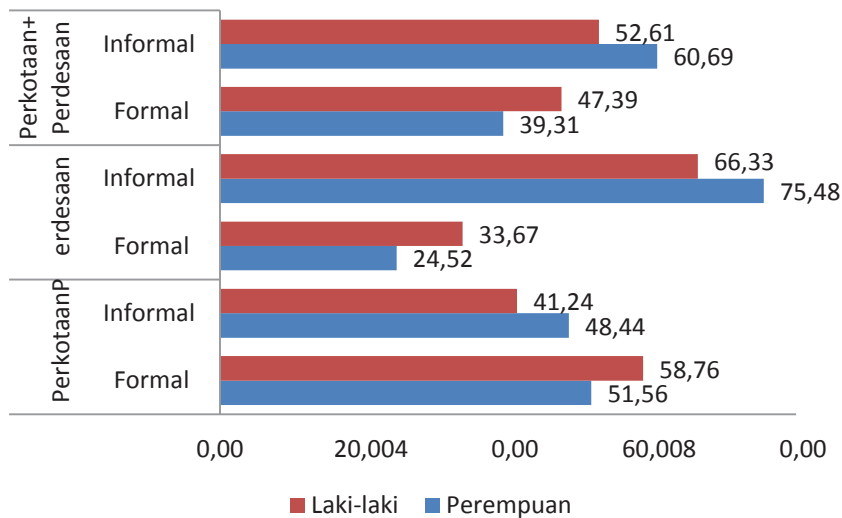
hanya sebesar 34,20 47,39 persen dan 41,97 60,69 persen perempuan bekerja di kegiatan informal (Gambar 3.17). Sedangkan untuk laki-laki jumlahnya hampir berimbang di mana Sebesar 65,80 52,61persen laki-laki bekerja di sektor formal dan 58,03 47,39 persen bekerja pada sektor informal.. Kesenjangan persentase ini menunjukkan masih pentingnya perempuan didorong untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan formal dan informal.



Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 3.17. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/ Informal dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Berdasarkan daerah tempat tinggal, perempuan yang tinggal di perkotaan dan bekerja di sektor informal lebih banyak daripada pekerja laki-laki dengan selisih sebesar 7,2 persen. Demikian juga di perdesaan, pekerja perempuan di sektor informal lebih besar 9,15 persen daripada pekerja laki-laki. Namun sebaliknya, pekerja laki-laki di sektor formal lebih besar persentasenya daripada perempuan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.



Gambar 3.18. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal, salah satunya karena fleksibilitas waktu yang ditawarkan sector informal lebih memudahkan perempuan mengatur dan menyeimbangkan pekerjaan dan tugas domestik yang diemban. Selain itu, setor informal tidak selalu menuntut jenjang tertentu dari pendidikan formal yang ditamatkan pekerja. Meskipun demikian, dari data Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan, jenjang pendidikan tidak

menggambarkan kesenjangan yang signifikan pada perempuan dan laki-laki. Hal ini terlihat pada persentase tertinggi pada tingkat pendidikan pekerja laki-laki dan perempuan sama-sama di sektor informal dengan tingkat pendidikan tamat SD ke bawah, yaitu sebesar 83,47 persen pada perempuan dan 72,43 persen pada laki-laki. Gambaran yang sama juga terlihat pada sektor formal, persentase tertinggi adalah pekerja laki-laki berada di jenjang tamat pendidikan SMA ke atas sebesar 67,06 dan perempuan di jenjang tamat pendidikan SMA ke atas sebanyak 65,72 persen (Tabel 3.8). Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada sektor pekerjaan yang dipilih. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar kemungkinan untuk bekerja pada sektor formal, dan semakin rendah jenjang pendidikan, maka pilihan bekerja di sektor informal menjadi alternatif yang dipilih.

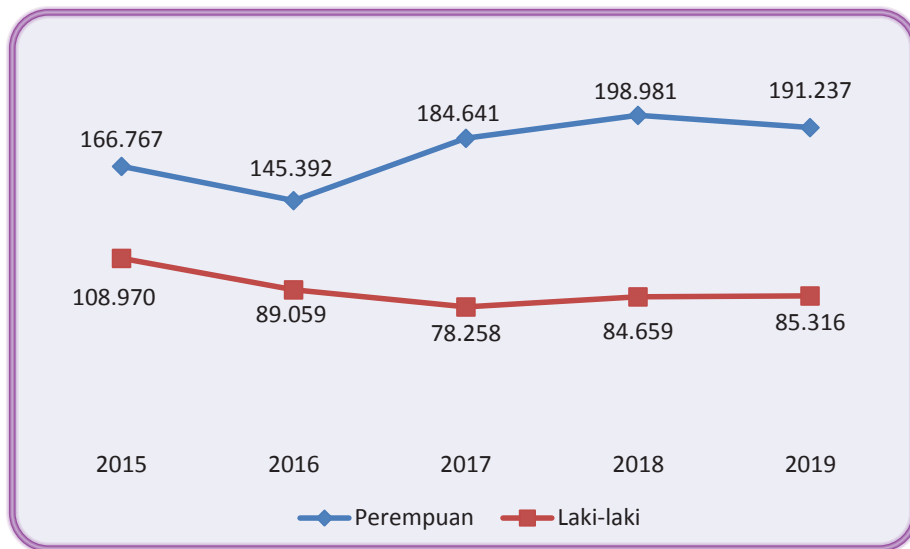
Tabel 3.8. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan, 2019.

Tingkat Pendidikan	Laki-laki			Perempuan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tamat SD Ke bawah	27,57	72,43	100,00	16,53	83,47	100,00
SMP	42,59	57,41	100,00	30,93	69,07	100,00
SMA ke atas	67,06	32,94	100,00	65,72	34,28	100,00
Total	47,39	52,61	100,00	39,31	60,69	100,00

i. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja migran Indonesia berwajah perempuan, hal ini terlihat dari Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Tahun 2019. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menunjukkan jumlah pekerja migran Indonesia didominasi perempuan. Di tahun 2019, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)

sebanyak 276.553 PMI yang terdiri dari 85.316 PMI laki-laki dan 191.237 PMI perempuan. PMI perempuan berjumlah lebih dari dua kali PMI laki-laki, atau dalam 2 PMI laki-laki terdapat 5 PMI perempuan. Perbandingan jumlah PMI perempuan dan laki-laki ini tampak sama dengan dengan perbandingan yang terlihat di tahun 2018 dan 2017 (Gambar 3.19).



Gambar 3.19. Jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019.

Jumlah PMI perempuan dan PMI laki-laki dari tahun 2015, terlihat adanya tren yang cenderung meningkat pada PMI sejak tahun 2016. Pada perempuan, tren kenaikan jumlah PMI perempuan berhenti di tahun 2018 dan sedikit menurun di tahun 2019. Berbeda dengan PMI perempuan, pada PMI laki-laki tren kenaikan jumlahnya terlihat konsisten terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Tren yang cenderung naik pada jumlah PMI ini mengindikasikan minat tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar wilayah Republik Indonesia cukup tinggi, seiring dengan peluang kerja yang ditawarkan memungkinkan diakses oleh PMI perempuan dan laki-laki (Gambar 3.19)

Berdasarkan sebaran provinsi di tahun 2019, provinsi wilayah pengirim (*sending area*) PMI perempuan terbesar berasal dari Jawa Timur dengan jumlah PMI perempuan sebanyak 51.437 jiwa. Provinsi asal PMI perempuan terbanyak lainnya berasal dari Jawa Barat dengan jumlah 47.613 PMI perempuan dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 45.194 PMI perempuan. Untuk PMI laki-laki, provinsi asal terbanyak berasal dari Nusa Tenggara Barat dengan jumlah PMI laki-laki sebanyak 23.883 orang, disusul dari provinsi Jawa Timur sebanyak 17.303 jiwa dan Jawa Tengah sebanyak 15.238. Di tahun 2019, tidak ada PMI perempuan yang berasal dari Provinsi Papua, sedangkan asal daerah PMI laki-laki yang paling sedikit berasal dari Papua yaitu sebanyak 4 orang (Lampiran Tabel 3.25).

Halaman ini dibiarkan untuk kosong

PEREMPUAN DAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI



Porkataan



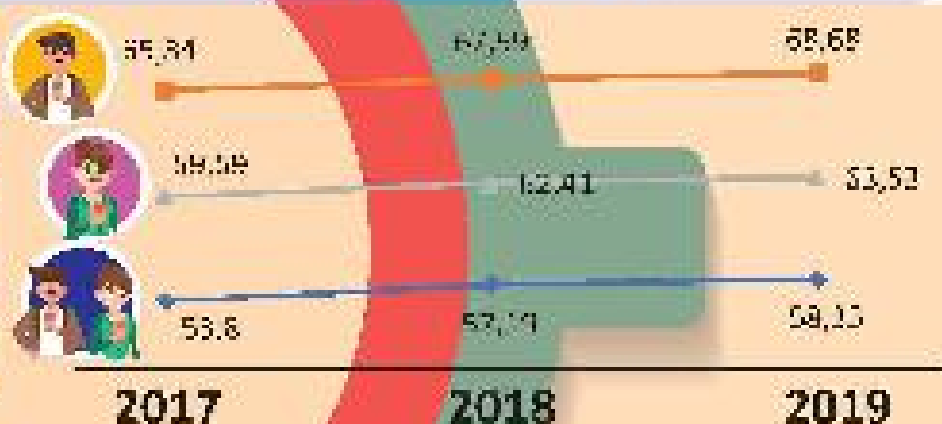
Pendesaan



Porkataan
+Pendesaan

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN TELEFON SELULER DI JAWA BARAT TERAKHIR

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MEMILIKI TELEFON SELULER



STRATEGI PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN KOMPUTER (PC/LAPTOP) APRESIASI YANG TARIK, DALAM 6 BULAN TERAKHIR



PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN INTERNET (FEBRUARI 2020) (FACEBOOK, WHATSAPP, ETC.) DALAM 6 BULAN TERAKHIR

BAB IV PEREMPUAN DAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK)

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan bagian dari kebutuhan mendasar dalam upaya percepatan pembangunan suatu negara. Daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global membutuhkan kualitas pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang tinggi. Melalui IP-TIK, sejumlah kreativitas, inovasi, dan rekayasa pembangunan dapat dimaksimalkan demi tujuan mewujudkan cita-cita luhur bangsa, pembangunan yang merata, dan berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki. Baik di bidang sosial budaya, pendidikan, ketahanan, keamanan, dan ekonomi, IP-TIK dapat diintegrasikan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Peranan IP-TIK pada setiap tahapan pembangunan nasional merupakan bagian dari target pembangunan di Indonesia, terutama untuk mencapai target capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2030.

Pemerintah Indonesia telah merespon revolusi industri 4.0 melalui sejumlah kebijakan dan program yang berorientasi pada penguatan SDM dan SDA, termasuk IP-TIK. Sebagai contoh, dalam mendorong pemanfaatan perkembangan teknologi digital sebagai sumber daya pembangunan, pemerintah Indonesia melakukan 3 upaya mendasar, yaitu 1) literasi digital kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memilah dan memilih informasi yang diakses, 2) mengintervensi akses informasi dengan melakukan pembatasan akses dan pemblokiran pada berbagai sumber informasi yang beresiko merugikan masyarakat dan bangsa, dan 3) melakukan penegakan dan penindakan hukum

melalui bekerjasama dengan kepolisian agar manfaat IPTEK dapat menguntungkan bangsa dan negara (www.kominfo.go.id). Meningkatkan teknologi digital ini dinilai mampu mempengaruhi hingga 89% kinerja negara dalam memenuhi target SDG's.

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni merupakan kunci utama pembangunan yang termaktub dalam RPJPN tahun 2005-2025. Dalam RPJPN tersebut dijelaskan Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2025 yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur penting dilakukan. Target capaian diorientasikan pada upaya memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah telah berupaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu Pusat Pengembangan Iptek dan inovasi di Kawasan Asia dan Dunia. Terdapat 8 langkah strategis yang dilakukan pemerintah, antara lain: 1) Pembentukan Sistem Nasional Iptek dan Inovasi, serta inisiatif Dana Inovasi; 2) Peningkatan kapasitas institusi dan Pembibitan SDM Iptek; 3) Pengembangan teknologi berbasis potensi kewilayahan dan budaya; 4) Pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk menunjang inovasi dan produktivitas di masyarakat; 5) optimalisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Global Value Chain* (GVC) sebagai sarana alih teknologi; 6) pelembagaan *Triple Helix*; 7) pembangunan infrastruktur pendukung *Research And Development* (R&D) yang bernilai strategis; dan 8) penciptaan ekosistem yang kondusif untuk menumbuhkan *technopreneur* dan *startup* (bappenas.go.id).

Penguatan IP-TIK sebagai landasan percepatan pembangunan dikuatkan dengan adanya regulasi yang menguatkan semua pihak memiliki peran dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK menjadi payung dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan nasional. UU ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ilmu pengetahuan,

teknologi, informasi dan komunikasi (IP-TIK) dapat dilakukan oleh semua pihak, baik perorangan, kelompok, institusi, badan usaha, lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan tinggi seperti universitas dan perguruan tinggi. Akan tetapi, kekuatan regulasi tentang IPTEK dan strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan IPTEK sebagaimana tercantum dalam RPJMN mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari laki-laki dan perempuan secara menyeluruh.

Keseimbangan akses terhadap sumber daya IP-TIK bagi perempuan dan laki-laki dan masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di bidang IP-TIK menjadi fokus pemerintah, selain pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pembangunan IP-TIK. Pemerataan pembangunan dapat dicapai secara ideal dan proses pembangunan akan memberikan manfaat yang berkeadilan jika perempuan juga maju dan mumpuni di bidang IP-TIK. Oleh karena itu, sinergi *triple helix* yang terjadi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha dengan memaksimalkan peran serta masyarakat menjadi kekuatan dalam pembangunan IP-TIK yang berkeadilan gender dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

B. Definisi Konseptual

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT DI). IP-TIK digunakan untuk mengukur standar tingkat pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. IP-TIK juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur *gap* digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Bappenas melakukan penghitungan IP-TIK dengan metode

terkini berdasarkan buku *Measuring Information Society* 2016 yang dipublikasikan oleh ITU. Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi dalam 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian (Bappenas, 2018).

2. Kepemilikan perangkat informasi dan komunikasi

Penjelasan konseptual pada sejumlah konsep merujuk pada definisi operasional dalam laman sistem informasi rujukan statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik.

a. Persentase Rumah Tangga dengan Komputer

Komputer merupakan komputer desktop, komputer laptop (portabel), komputer berbentuk tablet atau komputer genggam dan sejenisnya. Pembatasan pengertian komputer di sini, tidak termasuk peralatan lain yang memiliki kemampuan komputasi tertanam, seperti perangkat televisi pintar, atau perangkat dengan fungsi utama telepon, seperti ponsel atau smartphone. Rumah tangga dengan komputer berarti bahwa komputer tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Komputer mungkin dimiliki atau mungkin tidak dimiliki oleh rumah tangga, tetapi harus dianggap sebagai aset rumah tangga

b. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon tetap” mengacu pada jumlah saluran telepon tetap analog yang aktif, langganan Voice-over-Internet Protocol (VoIP), pelanggan lokal tetap nirkabel, Integrated Services Digital Network setara dengan saluran suara dan telepon umum. Ini mencakup semua akses melalui infrastruktur tetap (fixed) yang mendukung telepon suara menggunakan kabel tembaga, layanan suara menggunakan Protokol Internet (IP) yang disampaikan melalui infrastruktur fixed broadband (misalnya digital subscriber line (DSL), serat optik), dan

layanan suara yang disediakan melalui jaringan televisi kabel coaxial (modem kabel).

c. Pelanggan Telepon Seluler per 100 Penduduk

Istilah “pelanggan telepon seluler” mengacu pada jumlah pelanggan ke layanan telepon seluler publik yang menyediakan akses ke jaringan telepon umum yang menggunakan teknologi seluler. Ini mencakup jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar aktif selama tiga bulan sebelumnya. Tidak termasuk langganan melalui kartu data atau modem USB, langganan ke layanan data seluler publik, radio seluler trunked pribadi, telepoint, paging radio, M2M (machine-to-machine) dan layanan telemetri.

3. Akses informasi dan komunikasi

a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga yang minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses Internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Persentase Individu yang menggunakan Internet (*percentage of individual using the internet*) Individu yang menggunakan internet mengacu pada individu berusia lima tahun ke atas yang menggunakan internet tanpa mempertimbangkan lokasi, tujuan, serta perangkat dan jaringan yang digunakan dalam tiga bulan terakhir. Penggunaan dapat melalui komputer (misalnya komputer desktop, laptop, tablet atau komputer genggam sejenis), ponsel, mesin game, televisi digital, dan lainnya. Akses dapat melalui jaringan tetap atau seluler.

b. Pelanggan *Fixed Broadband Internet*

Pelanggan fixed broadband meliputi pelanggan modem kabel, DSL, fiber ke rumah/bangunan, langganan bandwidth (kabel) tetap lainnya, *broadband* satelit dan *broadband* nirkabel tetap terrestrial.

c. Pelanggan *Mobile Broadband Internet* Aktif

Pelanggan *mobile broadband* internet aktif merupakan jumlah pelanggan yang pernah mengakses internet melalui *mobile broadband* dalam tiga bulan terakhir, termasuk langganan ke jaringan *broadband* seluler yang menyediakan kecepatan unduhan minimal 256 kbit/s (misalnya WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e dan LTE), dan tidak termasuk langganan yang hanya memiliki akses ke GPRS, EDGE dan CDMA 1xRTT (sirusa.bps.go.id)

4. Partisipasi dalam berkomunikasi dan informasi

a. Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling)

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

b. Angka Partisipasi Kasar Sekunder (Secondary Gross Enrolment Ratio)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekunder adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (13-18 tahun). Tingkat pendidikan ini berdasarkan klasifikasi International Standard Classification of

Education (ISCED) 2011 dimana pendidikan tersier termasuk pada ISCED 3 dan 4 yang di Indonesia setara dengan SMP/ sederajat hingga SMA/ sederajat.

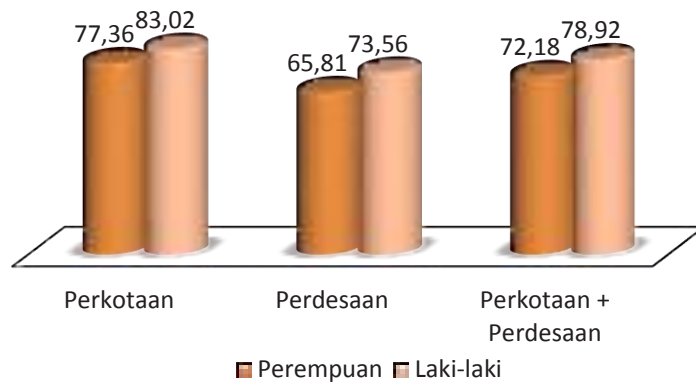
- c. Angka Partisipasi Kasar Tersier (Tertiary Gross Enrolment Ratio)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tersier adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan D1 sampai dengan S1 (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (19-23 tahun). Tingkat pendidikan ini berdasarkan klasifikasi International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 dimana pendidikan tersier termasuk pada ISCED 5 dan 6 yang di Indonesia setara dengan D1 hingga S1 (sirusa.bps.go.id).

C. Pembahasan

1. Penggunaan Telepon Seluler (HP)

Penggunaan telepon selular pada perempuan dan laki-laki masih belum setara. Data Susenas 2019 menunjukkan baik di perkotaan maupun di perdesaan, persentase penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini tidak berbeda pada perempuan dan laki-laki yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, persentase perempuan yang menggunakan telepon seluler sebesar 77,36 persen, sedangkan laki-laki 83,02 persen. Terdapat kesenjangan sebesar 9,46 persen lebih tinggi laki-laki. Di perdesaan, persentase perempuan yang menggunakan telepon seluler lebih rendah 7,75 persen dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan sebesar 65,81 persen sedangkan laki-laki sebesar 73,56 persen (Gambar 4.1).



Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019

Jika melihat perbedaan kesenjangan jenis kelamin di wilayah perkotaan dan perdesaan, kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam menggunakan telepon selular terlihat lebih besar di daerah perkotaan, meski persentase penggunaan telepon selular lebih tinggi di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan kesenjangan penggunaan telepon selular bukan semata-mata karena ketersediaan infrastruktur terkait telepon selular, karena wilayah perkotaan memiliki infrastruktur terkait telepon selular yang lebih baik dibandingkan perdesaan. Ada faktor lain yang mempengaruhi penggunaan telepon selular pada perempuan yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur pendukung telepon selular yang baik seperti di perkotaan. Hal ini bisa jadi berkaitan erat dengan relasi gender dan pengambilan keputusan.

Jika dibandingkan antarprovinsi, perempuan di perkotaan yang menggunakan telepon seluler terbesar terdapat di Kalimantan Utara sebesar 87,44 persen, kemudian Kalimantan Timur sebesar 87,39 persen, dan di Sulawesi Utara sebesar 87,27 persen. Provinsi dengan perempuan yang menggunakan telepon seluler paling rendah berada di Provinsi Banten (72,88 persen), Jawa Tengah (72,97 persen), dan Jawa Barat (73,40 persen). Perempuan di perdesaan yang menggunakan telepon seluler terbesar berada di Provinsi Kalimantan Timur (80,21 persen), Gorontalo (77,44 persen), dan Sulawesi Selatan (76,92 persen), sedangkan yang terendah di Provinsi Papua sebesar 23,32 persen, Maluku Utara sebesar 55,21 persen dan Kalimantan Barat sebesar 57,17 persen (Lampiran Tabel 4.1).

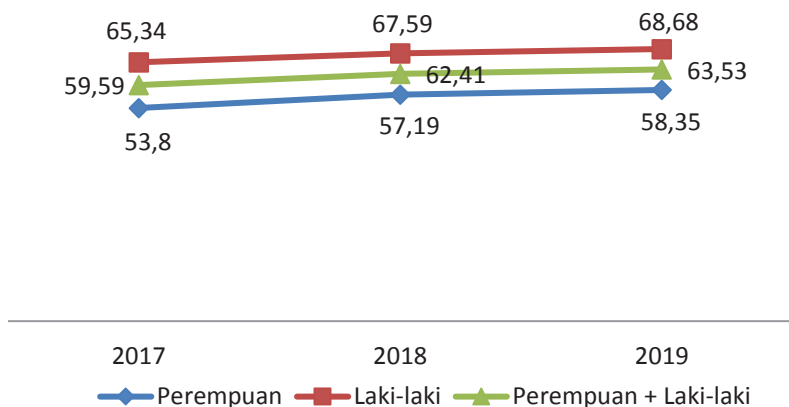
Data tersebut menunjukkan adanya keterbukaan akses terhadap telepon seluler tidak hanya di wilayah perkotaan, namun juga di wilayah perdesaan di Indonesia, meskipun dengan kualitas akses jaringan, perangkat, dan layanan yang bervariasi. Selain keterbukaan akses, pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya media komunikasi berbentuk telepon seluler telah menunjukkan situasi yang positif, sebagaimana contoh kasus di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Masyarakat perdesaan telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat telepon seluler bagi kehidupan sosial ekonominya. Meskipun demikian, belum semua masyarakat desa memahami dan mampu memanfaatkan perangkat pendukung yang menjadi fitur tambahan pada telepon seluler yang mereka miliki (Sunarsi & Dirgahayu 2015). Pada penduduk desa dengan status pekerjaan yang digeluti, penggunaan telepon seluler menimbulkan perbedaan persepsi antara pengguna dengan satu pekerjaan atau lebih terkait pengalamannya saat berinteraksi dengan telepon seluler (Dinarah, 2017). Di wilayah perbatasan seperti Tanjung Beringin Sedang Bedagai Sumatera Utara, masyarakat perbatasan sudah menggunakan telepon seluler, namun cenderung lebih banyak digunakan untuk alat komunikasi yaitu menelepon dan mengirimkan pesan pendek melalui layanan SMS. Sebagian

kecil masyarakat perbatasan menggunakan telepon selular berjenis *smartphone* namun kebanyakan masih digunakan untuk mengakses jejaring sosial dan bermain game online atau offline (Ginting, 2019).

Persentase perempuan yang menggunakan telepon selular di perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Provinsi dengan persentase perempuan perkotaan dengan persentase tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 87,39 persen, sedangkan di wilayah perdesaan, perempuan yang menggunakan telepon selular dengan persentase tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 80,21 persen atau terdapat kesenjangan sebesar 7,18 persen. Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan sebesar 7,18% ini menjadi lebih signifikan dengan melihat perbedaan perempuan pengguna telepon selular dari wilayah persentase terendah. Perempuan di wilayah perkotaan dengan penggunaan telepon selular terendah di wilayah Jawa Barat sebanyak 73,40 persen, sedangkan perempuan di wilayah perdesaan dengan penggunaan telepon selular terendah di Provinsi Papua sebesar 23,32 persen, atau terdapat kesenjangan mencapai 50,08 persen (lihat Lampiran 4.1).

2. Kepemilikan Telepon Seluler (HP)

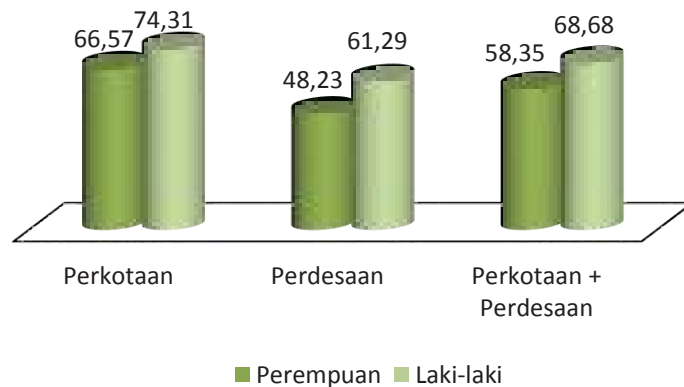
Penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki telepon selular tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 baik perempuan maupun laki-laki menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 perempuan yang memiliki telepon selular sebesar 53,80 persen, meningkat menjadi 57,19 persen pada tahun 2018 dan 58,35 persen pada tahun 2019. Sedangkan laki-laki yang memiliki telepon selular pada tahun 2017 sebesar 65,34 persen meningkat menjadi 67,59 persen pada tahun 2018 dan 68,68 persen pada tahun 2019. Meskipun antara perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan kecenderungan meningkat, tetapi persentase perempuan yang memiliki telepon selular masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase laki-laki yang memiliki telepon selular (Gambar 4.2).



Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler Berdasarkan Jenis Kelamin, 2017-2019

Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa persentase perempuan berumur 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel dalam 3 bulan terakhir baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan yang memiliki telepon seluler di perkotaan sebesar 66,57 persen, lebih rendah dibanding laki-laki (74,31 persen). Begitu juga di perdesaan, perempuan yang memiliki telepon seluler sebesar 48,23 persen, sedangkan laki-laki sebesar 61,29 persen (Gambar 5.3). Kesenjangan persentase kepemilikan telepon seluler pada perempuan, baik yang terjadi di perkotaan maupun perdesaan mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kepemilikan telepon seluler. Di perkotaan, kesenjangan kepemilikan telepon seluler pada perempuan dan laki-laki mencapai 7.74 persen, sedangkan di perdesaan, kesenjangan kepemilikan telepon seluler pada perempuan mencapai persentase yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yaitu sebesar 13.06 persen.



Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.

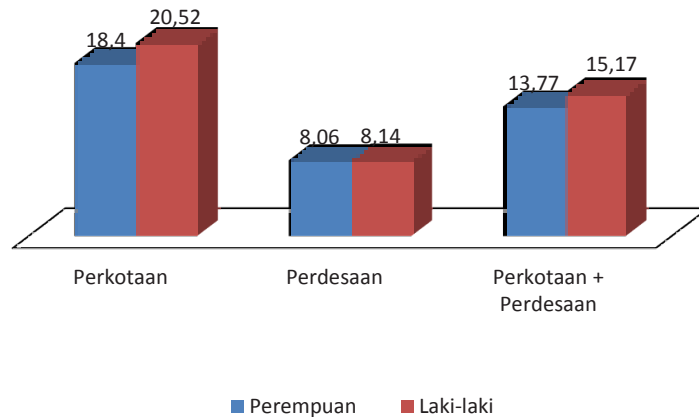
Perempuan di wilayah perkotaan yang memiliki telepon selular tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan, meliputi Kalimantan Tengah (77,04 persen), Kalimantan Utara (76,89 persen) dan Kalimantan Timur (76,87 persen). Pemilik telepon selular dengan persentase terendah pada perempuan berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (58,67 persen), Sulawesi Barat (61,05 persen) dan Jawa Tengah (61,33 persen). Di perdesaan, perempuan yang memiliki telepon selular tertinggi yaitu Kalimantan Timur (68,06 persen), Sulawesi Utara (62,09 persen) dan Kalimantan Utara (61,79 persen). Sedangkan yang terendah adalah Papua sebesar 18,62 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 32,80 persen dan Kalimantan Barat sebesar 42,01 persen (lihat lampiran 4.2.).

Kesenjangan kepemilikan perempuan pada telepon selular di wilayah perkotaan dan perdesaan ini menunjukkan kondisi yang hampir sama dengan persentase penggunaan telepon selular di perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan dengan persentase terbesar, kesenjangan kepemilikan pada telepon selular sebesar 8,98 persen, sedangkan di wilayah dengan persentase terendah, kesenjangan kepemilikan perempuan pada telepon selular sebesar 58,25 persen. Jika

dibandingkan dengan penggunaan telepon selular, persentase kepemilikan perempuan pada telepon selular lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penggunaan perempuan pada telepon selular. Pada perempuan di wilayah paling banyak dalam penggunaan telepon selular, kepemilikan perempuan pada telepon selular sedikit lebih tinggi, yaitu 1.8 persen, namun di wilayah dengan persentase paling sedikit, kepemilikan perempuan pada telepon selular lebih besar 8.17 persen dibandingkan penggunaan perempuan pada telepon selular.

3. Penggunaan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/ Tablet)

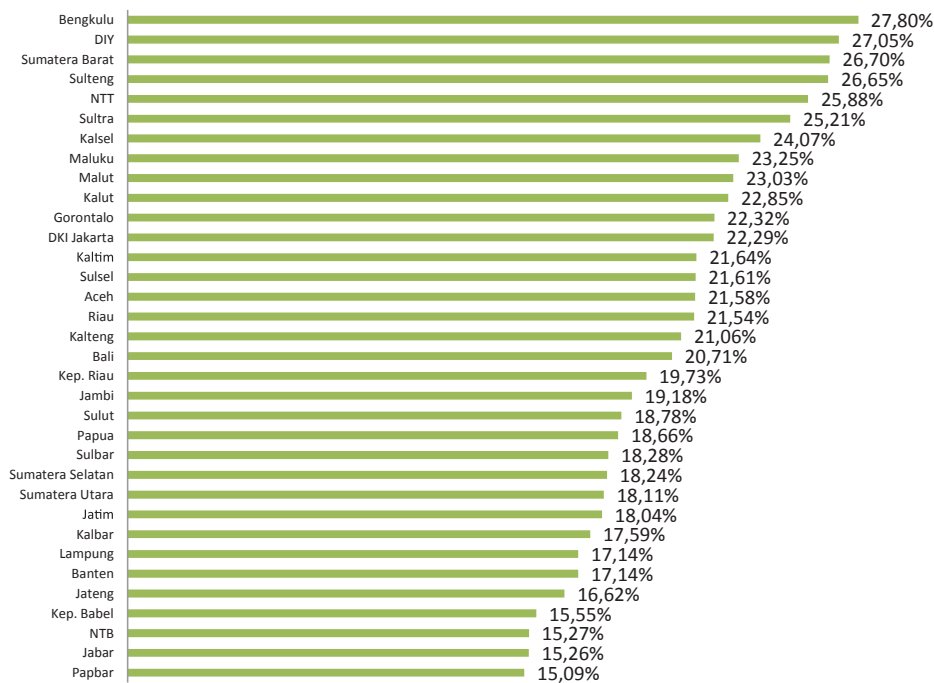
Secara umum, persentase penduduk umur di atas 5 tahun yang menggunakan komputer (PC/Desktop/Laptop/ Notebook/Tablet) selama 3 bulan terakhir pada tahun 2019 baik di perkotaan maupun di perdesaan belum menunjukkan kondisi yang setara. Penggunaan computer pada perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan, perempuan yang menggunakan komputer selama 3 bulan terakhir sebesar 18,40 persen lebih rendah dibanding laki-laki sebesar 20,52 persen. Di perdesaan, perempuan yang menggunakan komputer selama 3 bulan terakhir sebesar 8,06 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 8,14 persen. (Gambar 4.4).



Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.4. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019

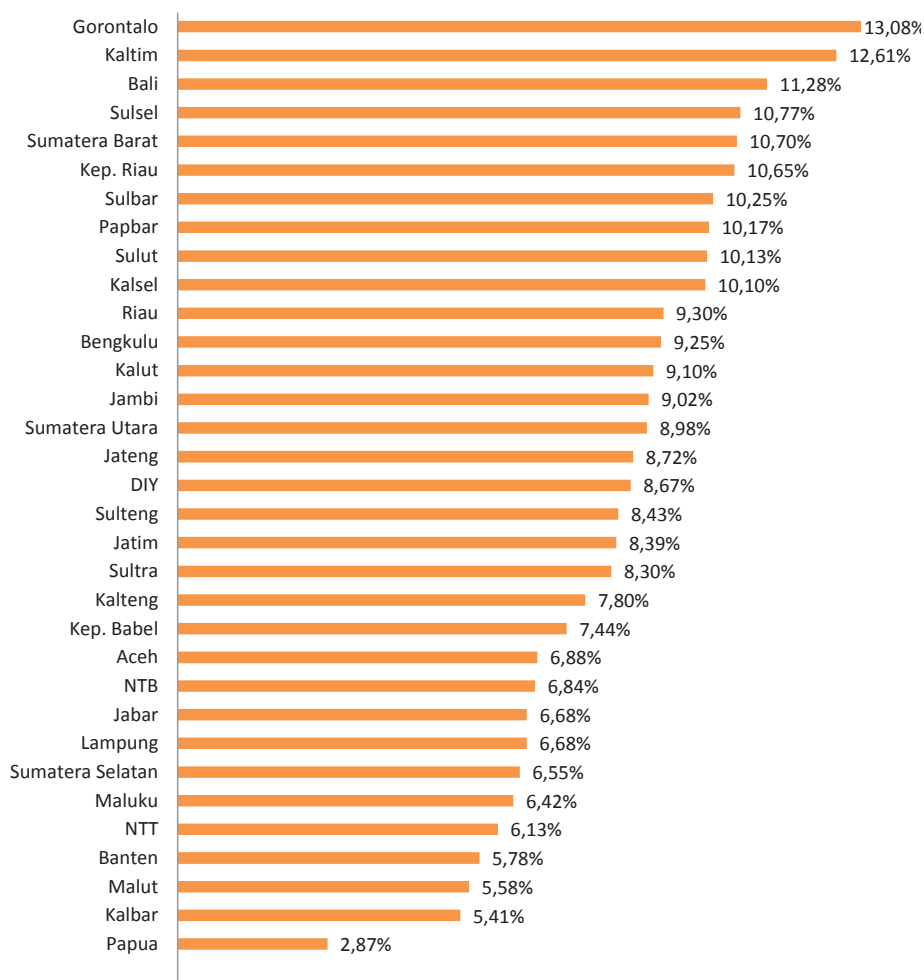
Berdasarkan provinsi, perempuan berumur 5 tahun ke atas di perkotaan yang menggunakan komputer tertinggi selama 3 bulan terakhir terdapat di Bengkulu (27,80 persen), disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (27,05 persen) dan Sumatera Barat (26,70 persen). Provinsi dengan dengan perempuan berumur 5 tahun ke atas di perkotaan yang menggunakan komputer terendah selama 3 bulan terakhir adalah Papua Barat sebesar 15,09 persen, Jawa Barat sebesar 15,26 persen dan Nusa Tenggara Barat sebesar 15,27 persen (Gambar 4.5).



Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.5. Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perkotaan yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2019

Di perdesaan, perempuan berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer tertinggi selama 3 bulan terakhir terdapat di Gorontalo (13,08 persen), disusul Kalimantan Timur (12,61 persen) dan Bali (11,28 persen). Provinsi dengan penggunaan komputer terendah berada di Papua sebesar 2,87 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,41 persen dan Maluku Utara sebesar 5,58 persen (Gambar 4.6).



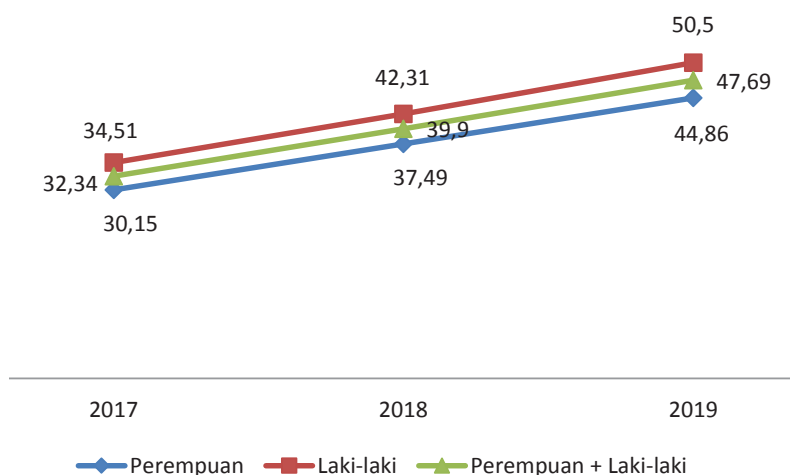
Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.6. Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perdesaan yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, 2019

4. Penduduk Mengakses Internet

Penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat, baik pada perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2017 perempuan yang pernah mengakses internet sebesar 30,15 persen, meningkat menjadi 37,49 persen pada

tahun 2018 dan 44,86 persen pada tahun 2019. Peningkatan yang sama juga terlihat pada laki-laki yang pernah mengakses internet dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sebesar 34,51 persen meningkat menjadi 42,31 persen pada tahun 2018 dan 50,50 persen pada tahun 2019. Meskipun memiliki kesamaan kecenderungan meningkat, akan tetapi persentase perempuan yang pernah mengakses internet masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase laki-laki yang pernah mengakses internet (Gambar 4.7).



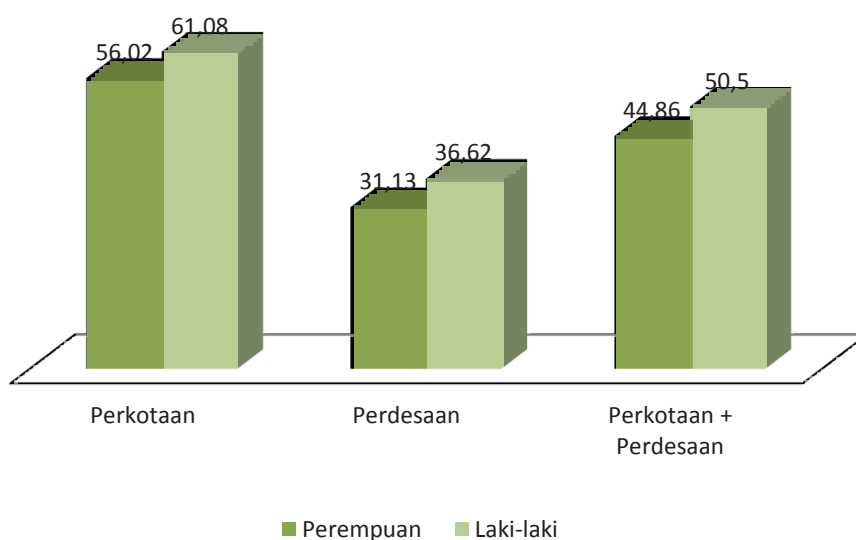
Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.7. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang pernah Mengakses Internet Berdasarkan Jenis Kelamin, 2017-2019.

Pada tahun 2019, kesenjangan perempuan yang pernah mengakses internet sebesar 5,64 persen dibandingkan laki-laki. Kondisi ini tidak berbeda dengan kesenjangan yang terjadi pada dua tahun sebelumnya, yaitu 4,82 persen di tahun 2018 dan sebesar 4,36 persen di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan yang sama-sama meningkat pada perempuan dan laki-laki dalam mengakses internet ternyata tidak mengubah situasi akhir kesenjangan yang ada pada perempuan. Kondisi ini merefleksikan kemajuan yang lebih

baik pada keduanya, namun belum mengubah kesetaraan hasil yang dicapai perempuan.

Akses internet (termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) antara penduduk perempuan dan laki-laki berumur 5 tahun ke atas berdasarkan daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa baik di perkotaan maupun di perdesaan persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di perkotaan, penduduk perempuan yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir sebesar 56,02 persen dan laki-laki sebesar 61,08 persen, sedangkan di perdesaan, persentase perempuan dan laki-laki yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir, perempuan hanya sebesar 31,13 persen dan laki-laki sebesar 36,62 persen (Gambar 4.8.)

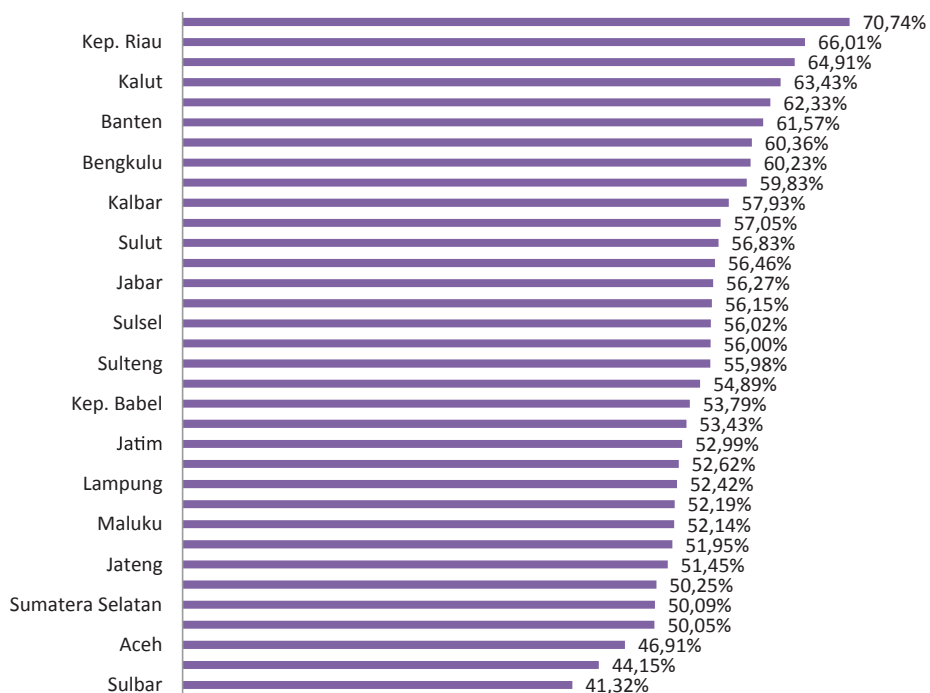


Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.8. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019.

Secara nasional, Papua merupakan provinsi dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang paling rendah mengakses internet dibandingkan dengan provinsi lainnya. Di Provinsi Papua, jumlah perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet di perkotaan dan perdesaan hanya sebesar 19,59 persen, sedangkan laki-laki sebesar 23,59 persen. Di wilayah Papua dan NTT, pemanfaatan internet baru terlihat di sector pendidikan, rumah tangga dan individu, sementara di bidang ekonomi bisnis dan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk mendukung pelayanan masyarakat melalui pengelolaan e-government (Amin, 2016).

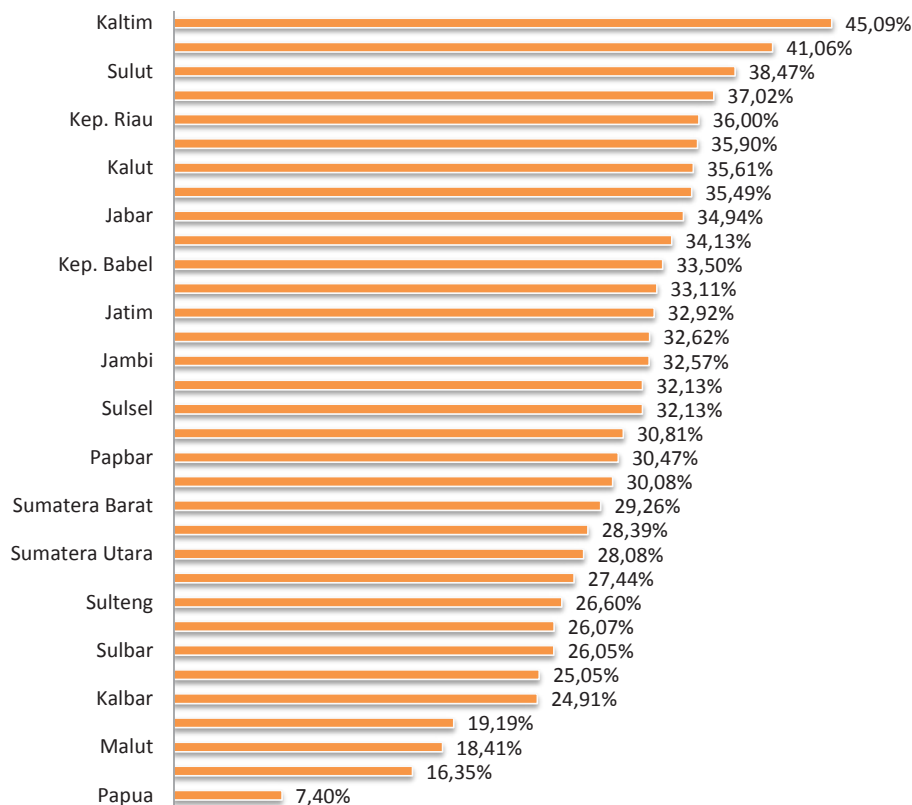
Secara spesifik pada perempuan, berdasarkan provinsi tempat tinggal perempuan yang mengakses internet (termasuk untuk mengakses Facebook, Twitter, dan Whatsapp), terdapat perbedaan pada perempuan di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, perempuan berumur 5 tahun ke atas yang paling banyak mengakses internet berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 70,74 persen. Provinsi terbanyak kedua adalah Kepulauan Riau dengan jumlah sebanyak 66,01 persen dan provinsi terbanyak ketiga adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sebanyak 64,91 persen. Untuk provinsi dengan jumlah perempuan yang mengakses internet terendah berada di provinsi Sulawesi Barat sebesar 41,32 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 44,15 persen dan Aceh sebesar 46,91 persen (Gambar 4.9.)



Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.9. Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perkotaan yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, 2019.

Di wilayah perdesaan, perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan Timur sebesar 45,09 persen, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 41,06 persen dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 38,47 persen. Perempuan perdesaan yang paling sedikit mengakses internet berada di Provinsi Papua sebesar 7,40 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 16,35 persen dan Maluku Utara sebesar 18,41 persen (Gambar 4.10.).



Sumber: BPS Susenas 2019

Gambar 4.10. Persentase Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas di Perdesaan yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, 2019.

Tingginya akses internet perempuan di Perdesaan Provinsi DI Yogyakarta dapat menjadi bagian dari dampak pembangunan *Desa Broadband Terpadu* yang telah dikembangkan di perdesaan Yogyakarta. Usman (2016) melihat upaya pengelolaan potensi desa melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama internet di tiga desa di DI Yogyakarta, membutuhkan 3 mekanisme dasar. Mekanisme pertama yang harus dibangun adalah mekanisme *empowering* pada penguatan kemitraan di antara masyarakat desa, pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur fisik internet, koneksitas, tata kelola, dan konten. Mekanisme kedua adalah mekanisme *directing* yang memosisikan pemerintah sebagai

lembaga yang dominan dalam pembangunan infrastruktur fisik internet, koneksitas, tata kelola, dan konten; dan mekanisme ketiga adalah mekanisme *supporting* yang memberikan peran yang besar pada peran serta masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Akses internet sangat penting, tidak hanya bagi penduduk perkotaan. Kemudahan terhadap akses internet di perdesaan akan membuka akses informasi yang bermanfaat untuk memajukan perkembangan desa, terutama pada penguatan akses pendidikan, pengetahuan masyarakat, kemampuan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Kesenjangan akses internet yang terlihat pada perempuan (dan laki-laki) di perdesaan berpengaruh pada pemerataan hasil pembangunan, terutama karena tidak meratanya akses dan penyebaran informasi dan pengetahuan di wilayah perdesaan.

Kemajuan pembangunan di bidang IP-TIK merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan, baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan social budaya. Pembangunan infrastuktur jaringan internet di perdesaan penting menjadi prioritas pembangunan negara agar kesenjangan akses internet di perdesaan dapat dikurangi dalam waktu cepat. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat dirasakan seluruh penduduk Indonesia, terutama bagi perempuan di wilayah perdesaan demi masa depan bangsa yang berdaya saing global.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

PERSENTASE PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL TAHUN 2017-2019

46,31



2017

47,02

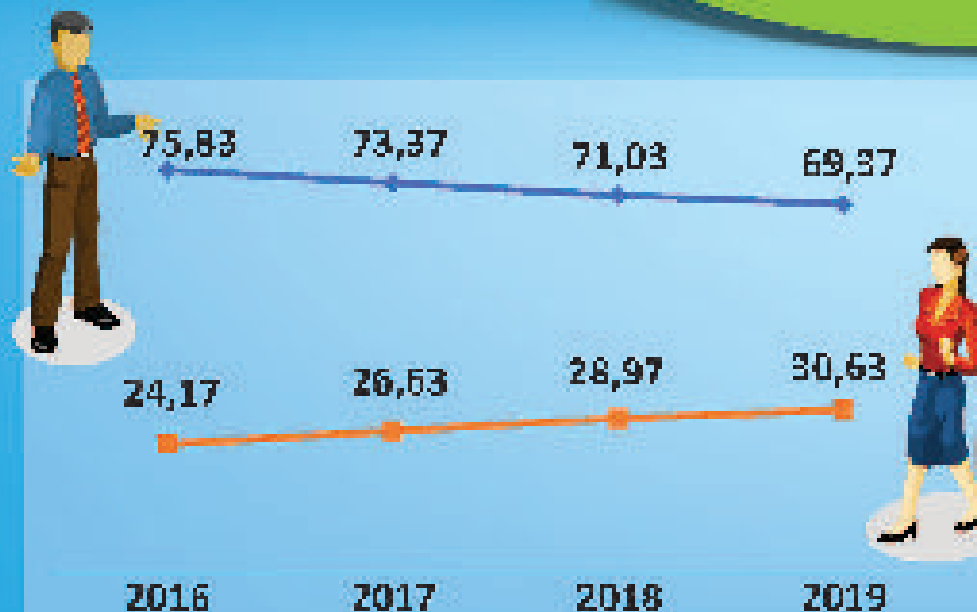


2018

47,46

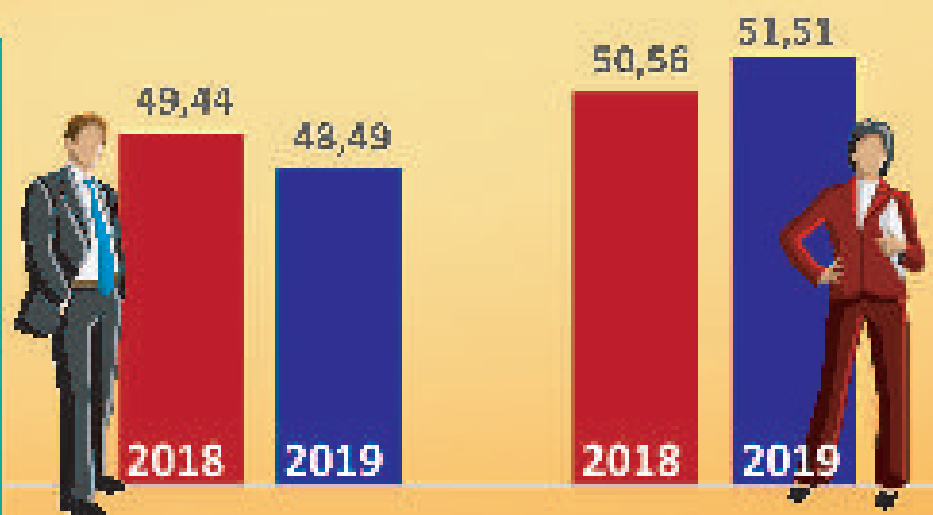


2019



JABATAN MANAJER PEREMPUAN YANG DIIRINGI MENURUNNYA PERSENTASE JABATAN MANAJER LAKI-LAKI

PERSENTASE PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT JENIS KELAMIN



BAB V KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Latar Belakang

Menjadi pemimpin merupakan bagian dari hak asasi manusia, baik pada perempuan maupun laki-laki. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Sebagai hak asasi, akses menjadi pemimpin tidak bisa diabaikan karena alasan jenis kelamin atau alasan penyerta lainnya, seperti ras, suku, agama, atau kondisi fisik. Hak menjadi pemimpin dilindungi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan berhak dipilih dalam pemilihan umum. Secara khusus, hak perempuan menjadi pemimpin juga diatur dalam pasal 49 ayat 1, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan berhak dipilih dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Di satu sisi, urgensi perempuan menjadi pemimpin berpijak pada pentingnya suara perempuan diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses-proses pembangunan. Jumlah perempuan yang mencapai separoh dari penduduk Indonesia membutuhkan kehadiran perempuan sebagai representasi suara perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Di sisi lain, kehadiran perempuan pemimpin menjadi proses advokasi kebijakan yang merespon berbagai masalah gender. Persoalan ketidakadilan gender telah memosisikan perempuan sebagai kelompok rentan dengan risiko tinggi menjadi korban. Kehadiran perempuan sebagai pemimpin akan menguatkan keberpihakan kebijakan dan program pembangunan pada kelompok rentan dan upaya perlindungan dengan menggunakan perspektif perempuan.

Pemenuhan hak perempuan sebagai pemimpin harus disertai berbagai upaya, terutama keterbukaan akses dan peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap peluang dan kesempatan yang ada. Memastikan akses dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Dalam pembangunan berkelanjutan (SDG's), kepemimpinan perempuan menjadi bagian dari tujuan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dalam tujuan ke-5 ini, terdapat dua target utama yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, yaitu 1) memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik, dan 2) mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

Mendorong partisipasi perempuan untuk mengambil peran sebagai pemimpin masih membutuhkan penguatan. Di satu sisi, perempuan sebagai pemimpin mensyaratkan adanya kompetensi kepemimpinan yang dibutuhkan. Kemampuan manajerial dan komunikasi yang efektif, keterampilan lobby dan negosiasi, pengembangan karakter dan kepercayaan diri menjadi bagian penting yang perlu disiapkan pada diri perempuan, selain pengetahuan, pendidikan, wawasan dan penguasaan teknologi informasi. Akan tetapi, di sisi lain, kepemimpinan perempuan juga harus diiringi dengan pembangunan relasi gender yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan pada diri perempuan betul-betul didasarkan pada kapasitas dan kepentingan perempuan, bukan karena tuntutan dan tekanan dari pihak lain yang dikarenakan posisi inferior perempuan.

Komitmen pemerintah dalam memastikan akses dan partisipasi perempuan sebagai pemimpin terefleksi dalam Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 2014-2019. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat 2 agenda prioritas yang diorientasikan untuk mendorong

partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Prioritas pembangunan Pertama, terlihat pada agenda prioritas kedua: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; selanjutnya pada sub-agenda prioritas 2, yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Komitmen prioritas pembangunan Kedua dapat dilihat terlihat pada agenda prioritas keempat yang dimaksudkan untuk memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dimana pada sub-agenda prioritas 8 menyebutkan pentingnya negara hadir untuk memastikan adanya perlindungan pada anak, perempuan, dan kelompok marginal.

Implementasi tersebut dapat dilihat pada berbagai kebijakan dan program pembangunan yang memastikan perempuan terlibat sebagai bagian dari pengambil keputusan. Salah satu contoh nyata adalah upaya pemerintah dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, posisi pemimpin di Kementerian/Lembaga pemerintah dari kelompok perempuan, serta penguatan akses pendidikan bagi perempuan. Keterwakilan perempuan yang masih sangat minim dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua UU ini memuat kebijakan *zipper system* dengan ketentuan minimal terdapat 30 persen perempuan yang dicalonkan dalam daftar anggota parlemen. Kebijakan adanya kuota khusus ini bersifat tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Dalam putusan MK tersebut dinyatakan bahwa *affirmative action* merupakan tindakan diskriminatif positif yang dilakukan dalam rangka menyeimbangkan keterwakilan antara perempuan dan laki-laki serta mendorong peran perempuan di dunia politik.

Adanya regulasi yang memberikan peluang perempuan berpartisipasi di posisi sebagai pengambilan keputusan, tidak serta merta menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang sama baiknya dengan laki-laki. Terdapat banyak hambatan kultural yang

masih harus dihadapi perempuan ketika perempuan memutuskan untuk mengambil peluang menjadi calon pemimpin. Setidaknya terdapat 4 faktor utama yang menjadi kendala perempuan menjadi pemimpin, yaitu faktor kebijakan, sosial budaya, organisasional, dan individual (Young Shin & Bang, 2013). Keempat faktor ini bisa menguatkan perempuan sebagai pemimpin, sekaligus bisa menjadi faktor yang melemahkan perempuan mengambil peran sebagai pemimpin. Sebagai contoh, kebijakan yang tidak berpihak membuat perempuan tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, termasuk melibatkan perempuan sebagai bagian dari para pengambil keputusan. Demikian juga pada faktor sosial budaya, jika faktor sosial budaya masih tidak mengakui kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan perempuan, maka akan terus menjerumuskan perempuan untuk tetap berada dalam kelompok subordinat dalam setiap pengambilan keputusan. Situasi yang sama juga dapat dilihat pada faktor organisasi yang kerap kali menuntut standar ganda pada perempuan yang menjadi pemimpin, termasuk menciptakan dilema dan konflik antara kerja dan keluarga pada perempuan, sedangkan faktor individu berkaitan dengan kepercayaan diri, gaya komunikasi, strategi kepemimpinan, serta situasi sulit perempuan yang mengalami rasa takut menjadi sukses (*fear of success*).

B. Definisi Konseptual

1. Tenaga professional

Tenaga professional merupakan orang yang ahli di bidang sesuatu dan menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu. Tenaga professional ini mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik. Kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna, termasuk mencakup aktivitas kantor pusat (sirusa.bps.go.id).

Seseorang disebut sebagai tenaga professional ketika ia memiliki suatu pekerjaan atau profesi yang mengandalkan keahlian tinggi yang ada pada dirinya. Melalui keahlian

husus yang dimilikinya, seseorang mempraktikkannya dalam pekerjaannya dengan maksimal. Karena itu, seorang professional memiliki indikator standar kualitas minimum yang menjadi landasan citra dan perilaku dirinya dalam bekerja. Pekerja professional tidak hanya berpengaruh pada keahlian khusus yang dimiliki, namun juga berkorelasi dengan tingkat pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan yang dilakukan.

Tenaga professional mensyaratkan adanya pengetahuan, keahlian dan tingkatan akademik tertentu. Pengetahuan tenaga professional merujuk pada kemampuan kognitif yang diperoleh melalui proses pendidikan yang pernah dilalui dan pengalaman belajar/bekerja yang digeluti. Keahlian tenaga profesional berkorelasi dengan cabang ilmu tertentu yang secara spesifik dimiliki baik melalui proses pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan. Pada suatu tingkat tenaga professional tertentu, pendidikan non formal yang bersifat khusus dapat menjadi prasyarat, seperti seorang calon pejabat eselon di pemerintah mensyaratkan telah mengikuti pendidikan prajabatan untuk jenjang tertentu sesuai tingkat jabatan yang akan dicapai.

Kepemimpinan perempuan diukur melalui proporsi perempuan di posisi kepemimpinan tertentu di sejumlah area, seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan, Manajer Administrasi dan Komersial, Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus, dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya. Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Proporsi perempuan dalam memegang jabatan dapat memberikan gambaran bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik. Jumlah perempuan sebagai tenaga

manajer per 100 tenaga manajer (semakin meningkatnya indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dan mendapat kesempatan yang sama dalam jabatan kepemimpinan) (sirusa.bps.go.id).

2. Aparatur Negara

Aparatur negara merupakan bagian dari kelengkapan suatu negara, termasuk kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Aparatur negara memiliki tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan proses pemerintahan. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 8 dan 9 menjelaskan bahwa pegawai ASN memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN adalah orang yang melaksanakan kebijakan pemerintah dan memiliki keberpihakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, pegawai ASN harus terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu, termasuk kepentingan partai politik.

Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 2 kelompok, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu seseorang yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). ASN yang telah diangkat memiliki nomor induk pegawai yang bersifat nasional. ASN kelompok kedua adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu seseorang yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini diangkat sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kebutuhan pemerintah terhadap jenis profesi atau keahlian yang sedang dibutuhkan (UU No. 5/2014).

Di dalam sistem aparatur negara, pejabat atau pimpinan ditunjuk dengan menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan (pasal 16). Terdapat 3 jenis jabatan yang diatur di dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Jabatan Administrasi;
Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana. Masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- b. Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional terdiri dari dua macam, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri dari jabatan Ahli utama, Ahli madya, Ahli muda dan Ahli pertama. Untuk jabatan fungsional ketrampilan terdiri dari Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula.
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Jabatan Pimpinan Tinggi bertanggung jawab dalam memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui 3 aspek utama, yaitu 1). Kepeloporan dalam bidang keahlian professional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen; 2) Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan 3) Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan Pimpinan Tinggi dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

3. Parlemen

Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tipe parlemen di Indonesia adalah bikameral, karena DPR dan DPD masing-masing memiliki golongan sendiri yang mereka wakili dan keduanya menjalankan fungsi legislasi (<https://indonesia.go.id/profil/parlemen>). Undang-undang yang mengatur parlemen di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali. UU terakhir yang disahkan pada tahun 2019 adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 15 mengalami perubahan dengan menetapkan bahwa Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Prodesur pemilihan dapat diusulkan oleh fraksi dan kelompok anggota dalam sidang paripurna MPR.

Ketentuan pemimpin di DPR diatur dalam dalam Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang menetapkan batasan pimpinan DPR terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua. Pemilihan pimpinan DPR berbasis musyawarah dan dipilih dari dan oleh anggota DPR melalui sidang DPR. Pasal 121 mengatur Pimpinan Mahkamah yang merupakan satu kesatuan kolektif dan kolegial. Batasan pemimpin dalam Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Calon pimpinan dapat diusulkan oleh setiap fraksi. Dalam Pasal 260 mengatur Batasan pimpinan DPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua

yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

4. Kementerian Negara

Kementerian di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada pasal 1 dijelaskan tentang definisi Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang Menteri yang dipilih dan diangkat oleh presiden. Menteri negara berada dibawah kepemimpinan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden (pasal 4). Menteri merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan khusus.

Ruang lingkup urusan pemerintah yang dikelola oleh kementerian negara meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang dikelola oleh kementerian meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Selain itu, urusan pemerintahan juga meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Dalam memilih dan mengangkat Menteri, presiden memiliki kewenangan penuh berdasarkan pertimbangan khusus dan memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas

kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan dinilai sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden. Meskipun demikian, dalam pasal 22 menetapkan persyaratan seseorang yang dapat dipilih menjadi calon Menteri, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, terdapat 34 kementerian yang terdiri dari 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian. Jika kementerian menangani urusan pemerintahan, berbeda dengan kementerian koordinator yang tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan sinkronisasi urusan kementerian yang berada di bawah ruang lingkup tugasnya. Dengan demikian, terdapat sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi 4 kementerian koordinator. Selain Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berikut ini kementerian koordinator dan kementerian yang berada di bawah koordinasinya dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kementerian yang berada dalam koordinasi kementerian koordinator ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar

Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian yang berada dalam koordinasi kementerian coordinator ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian yang berada dalam koordinasi kementerian coordinator ini adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga

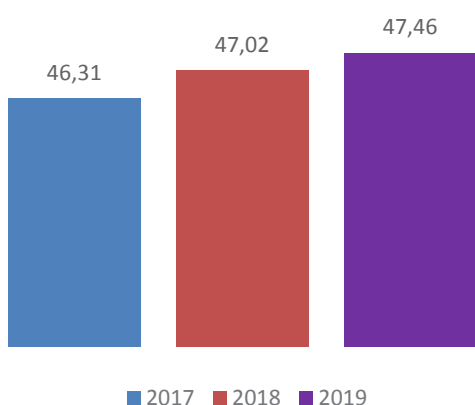
d. Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian yang berada dalam koordinasi kementerian coordinator ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

C. Pembahasan

1. Perempuan sebagai tenaga profesional

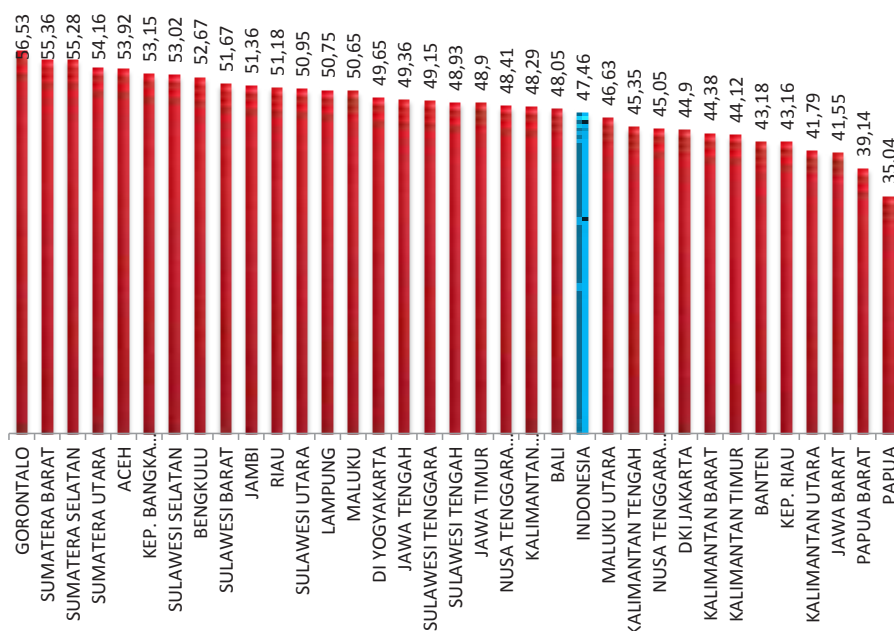
Partisipasi perempuan di ruang publik menunjukkan kemampuan perempuan berkontribusi di berbagai sektor pembangunan. Peran serta perempuan sebagai tenaga profesional merefleksikan kapasitas perempuan telah diperhitungkan. Di berbagai bidang pekerjaan, perempuan telah diakui sebagai entitas yang memiliki nilai profesionalitas dalam bekerja. Pengakuan terhadap kapasitas perempuan ini terlihat dari kecenderungan yang terus meningkat pada persentase perempuan sebagai tenaga profesional dari tahun ke tahun. Meskipun angka kenaikannya kecil, namun persentase perempuan sebagai tenaga profesional terus bertambah dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2017, persentase perempuan sebagai tenaga profesional sebanyak 46,31 persen, meningkat 0,71 persen di tahun 2018 menjadi 47,02 persen. Di tahun 2019, peningkatan jumlah perempuan sebagai tenaga profesional menjadi 47,46 persen atau bertambah 0,44 persen (Gambar 5.1). Meskipun capaian perempuan sebagai tenaga profesional masih di bawah 50 persen, namun kecenderungan meningkat pada persentase yang dicapai mengindikasikan pengakuan terhadap profesionalitas perempuan terus membaik.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 5.1. Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2017-2019.

Berdasarkan distribusinya, sekitar 65 persen provinsi di Indonesia menunjukkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional di atas nilai rata-rata nasional (Gambar 5.2). Terdapat 14 provinsi yang persentase perempuan sebagai tenaga profesional lebih dari 50 persen. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan persentase perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi yaitu 56,33 persen, sedangkan Papua menunjukkan persentase terendah yaitu 35,04 persen.

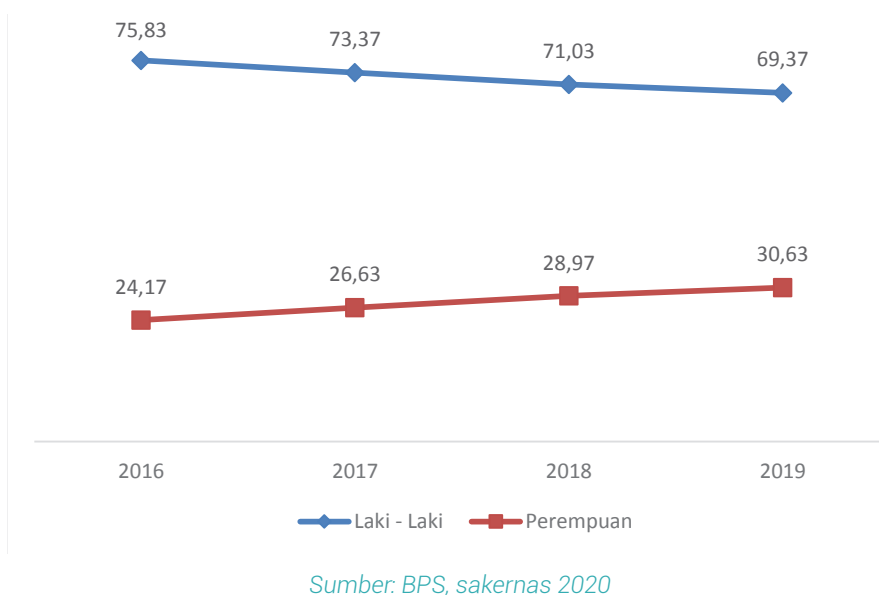


Sumber: BPS, 2020

Gambar 5.2 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Berdasarkan Provinsi Tahun 2019

Untuk distribusi jabatan manajer tahun 2019, persentase perempuan yang menjabat sebagai manajer masih mengalami kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan laki-laki. Jabatan manajer pada laki-laki sebesar 69,37 persen, sedangkan perempuan hanya 30,63 persen. Meskipun masih berada dalam posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun terjadi peningkatan persentase jabatan manajer perempuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di

tahun 2019, persentase perempuan yang menjabat sebagai manajer sebesar 30,63 persen, atau lebih tinggi meningkat 1,66 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 28,97 persen dan tahun 2017 sebesar 26,63 persen (Gambar 5.3). Hal ini menunjukkan kemajuan yang dicapai perempuan telah berkontribusi pada posisi mengecilnya kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam jabatan sebagai manajer.



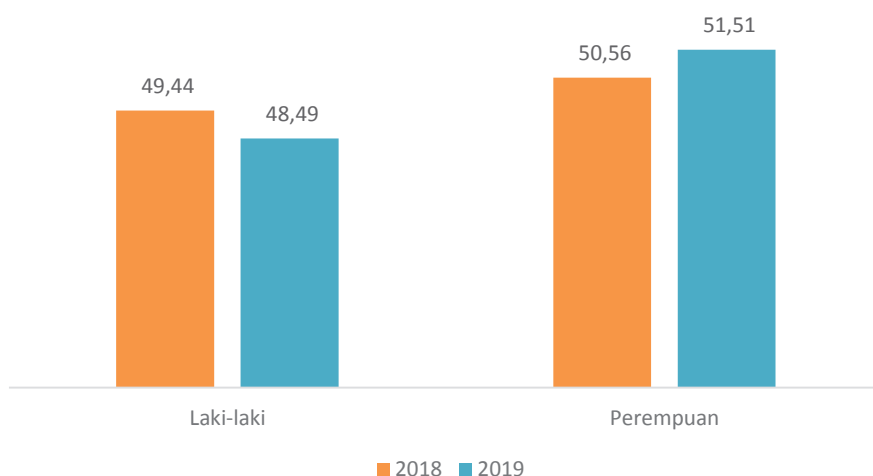
Gambar 5.3 Persentase Jabatan Manajer Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2019

Meningkatnya persentase jabatan manajer perempuan yang diiringi menurunnya persentase jabatan manajer laki-laki mengindikasikan daya saing perempuan terus meningkat. Secara bertahap kepemimpinan perempuan semakin diperhitungkan seiring dengan pengakuan terhadap kualitas perempuan. Peningkatan peran perempuan sebagai tenaga profesional dapat diperkuat dengan penurunan tingkat kelahiran, peningkatan harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, lama sekolah perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan serta peningkatan kualitas modal perempuan (Wilson, 2017). Dengan demikian, tingkat pendidikan merupakan salah satu

faktor determinan yang dapat menjadi posisi tawar perempuan dalam meningkatkan karirnya menuju jabatan manager.

2. Perempuan sebagai Aparatur Negara

Secara nasional, persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan pada tahun 2019 sedikit lebih tinggi dibandingkan ASN laki-laki dengan perbandingan 51,51 persen dengan 48,49 persen. Kondisi yang sama juga terlihat pada tahun 2018, dimana laki-laki berjumlah lebih sedikit dibandingkan perempuan. Pada kelompok perempuan, terdapat peningkatan jumlah ASN perempuan sebanyak 45.515 pegawai atau sekitar 0,95 persen, demikian juga pada ASN laki-laki, terdapat peningkatan jumlah sebanyak 34.458 ASN namun persentase di tahun 2019 menurun sebesar 0.95 persen jika dibandingkan tahun 2018 (Gambar 5.4)

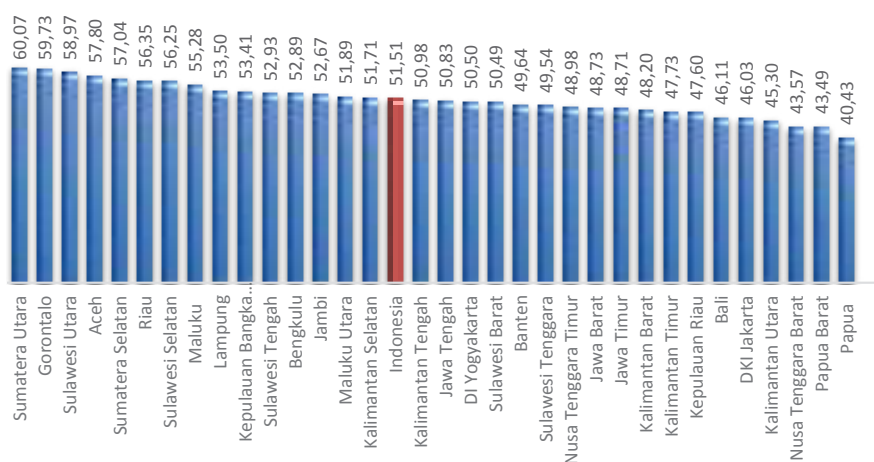


Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.4. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019

Berdasarkan provinsi pada kelompok perempuan, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah ASN perempuan tertinggi di Indonesia yaitu 60,07 persen. Provinsi lain yang memiliki jumlah persentase ASN perempuan di atas rata-rata nasional terdapat di 15 provinsi, diantaranya provinsi

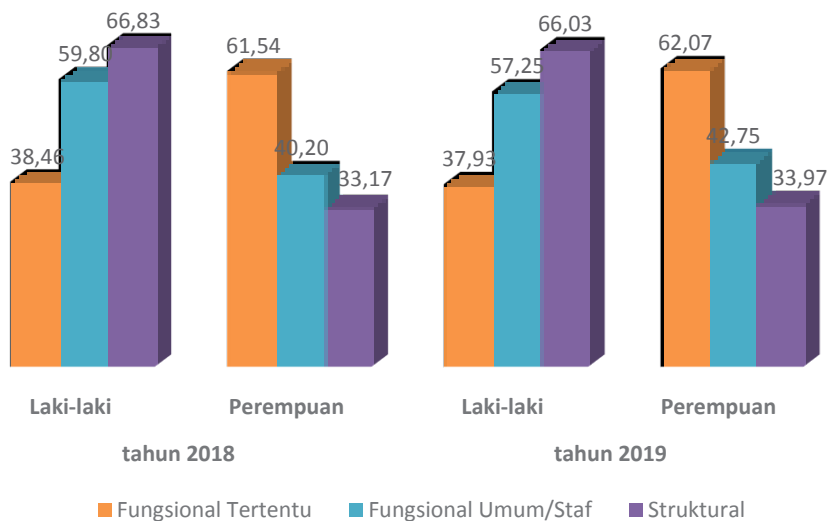
Gorontalo, Sulawesi Utara, Aceh dan Sumatera Selatan. ASN perempuan dengan jumlah dibawah rata-rata nasional terletak di 18 provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan jumlah ASN perempuan yang paling sedikit, yaitu 40,43 persen. (Gambar 5.5).



Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.5 Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara Perempuan menurut Provinsi Tahun 2019

Lebih banyaknya jumlah persentase ASN perempuan tidak diimbangi dengan jabatan yang diemban pada tiga jenis jabatan di lingkungan ASN. Berdasarkan jabatannya, pada tahun 2019 Aparatur Sipil Negara perempuan lebih banyak mempunyai jabatan sebagai fungsional tertentu, sebanyak 62,07 persen lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebanyak 37,93 persen. Pada dua jenis jabatan lainnya, yaitu jabatan fungsional umum dan structural, posisi perempuan yang memiliki jabatan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jabatan struktural merupakan jabatan yang paling sedikit diduduki oleh ASN perempuan dengan persentase hanya 33,97 persen (Gambar 5.6).

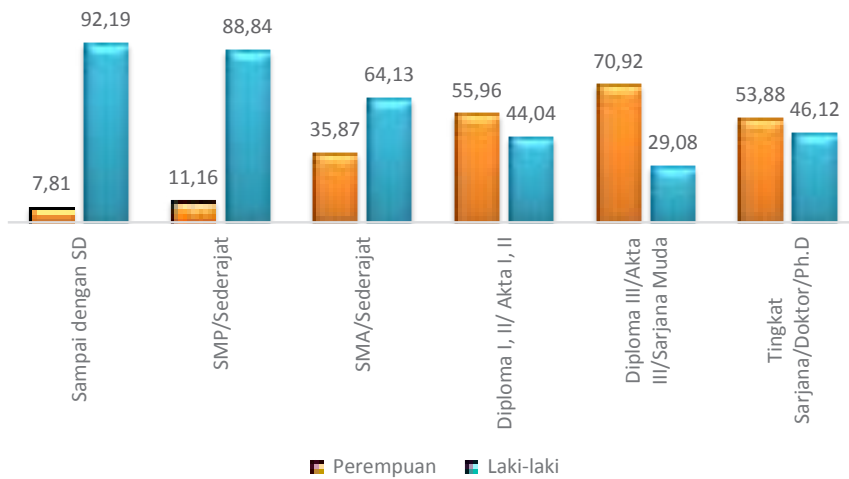


Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.6 Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara menurut jenis kelamin dan jabatan 2019

Lebih rendahnya jabatan fungsional umum dan jabatan structural ini tidak berbanding dengan tingkat pendidikan pada ASN perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, hanya 7,81 persen ASN perempuan yang tingkat pendidikannya sampai dengan SD, jauh sangat sedikit dibandingkan dengan ASN laki-laki yang mencapai 91,19 persen. Tingkat pendidikan ASN perempuan juga signifikan sedikit pada tingkat dasar dan menengah, yang hanya mencapai 11,16 persen di tingkat SMP/ sederajat dan 35,87 persen di tingkat SMA/ sederajat. Untuk tingkat pendidikan tinggi, baik di tingkat diploma dan sarjana, perempuan justru mencapai persentase lebih tinggi dibandingkan ASN laki-laki. Pada tingkat Diploma III atau setingkat sarjana muda, tingkat pendidikan ASN perempuan mencapai 70,92 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 29,08 persen. Situasi yang sama juga terlihat pada jenjang pendidikan tertinggi, yaitu tingkat sarjana/ doctor/Ph.D., ASN perempuan mencapai jumlah lebih dari separoh ASN laki-laki, yaitu sebesar 53,88 persen (Gambar 5.7).

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)



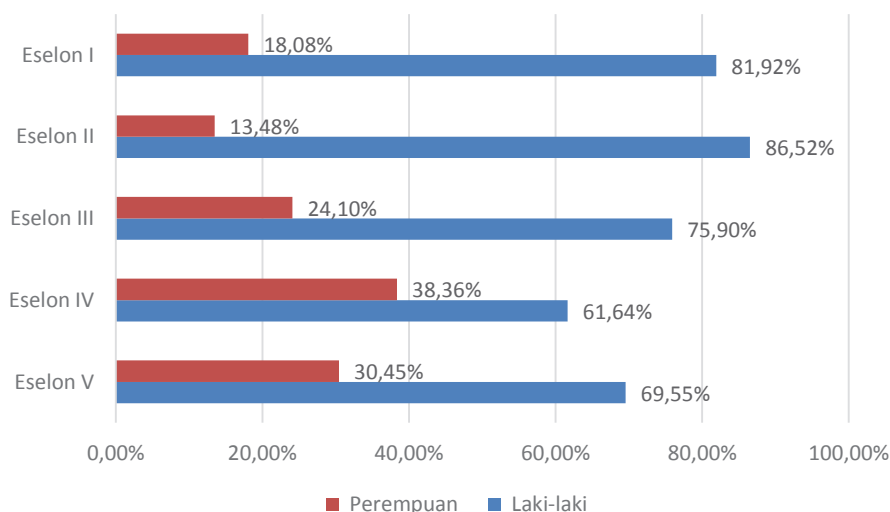
Gambar 5.7 Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara menurut jenis kelamin dan tingkat Pendidikan 2019

Secara lebih spesifik, pada jabatan structural, semakin tinggi tingkat jabatan struktural, maka semakin kecil jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Kesenjangan ini terjadi di tahun 2019 dan tidak mengubah kondisi ASN perempuan yang menjadi pejabat structural pada tahun 2018. Di tingkat eselon IV, jumlah perempuan yang menduduki jabatan ini sebanyak 126.999 ASN perempuan, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah eselon IV dari ASN laki-laki yang mencapai jumlah 204.104 pegawai. Demikian juga pada eselon III, jumlah pejabat perempuan hanya berjumlah 24.286 pejabat, sementara laki-laki mencapai jumlah 76.469 pejabat. Di tingkat eselon II, pejabat laki-laki berjumlah 16.737 pejabat, sementara perempuan hanya berjumlah 2.608 pejabat; dan di tingkat eselon I, ASN perempuan hanya berjumlah 113 pejabat, sedangkan laki-laki berjumlah 512 pejabat (Tabel 5.1). Jika dipersentase, maka ASN perempuan yang menduduki jabatan structural tingkat eselon II hanya 13,48 persen dan pejabat eselon I hanya berjumlah 18,08 persen saja (Gambar 5.8).

Tabel 5.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Menduduki Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019.

Jabatan Struktural	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon V	10,290	4,489	14,779	10,356	4,533	14,889
Eselon IV	208,670	125,149	333,819	204,104	126,999	331,103
Eselon III	77,536	23,745	101,281	76,469	24,286	100,755
Eselon II	17,649	2,660	20,309	16,737	2,608	19,345
Eselon I	518	103	621	512	113	625
Jumlah	314,663	156,146	470,809	308,178	158,539	466,717

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

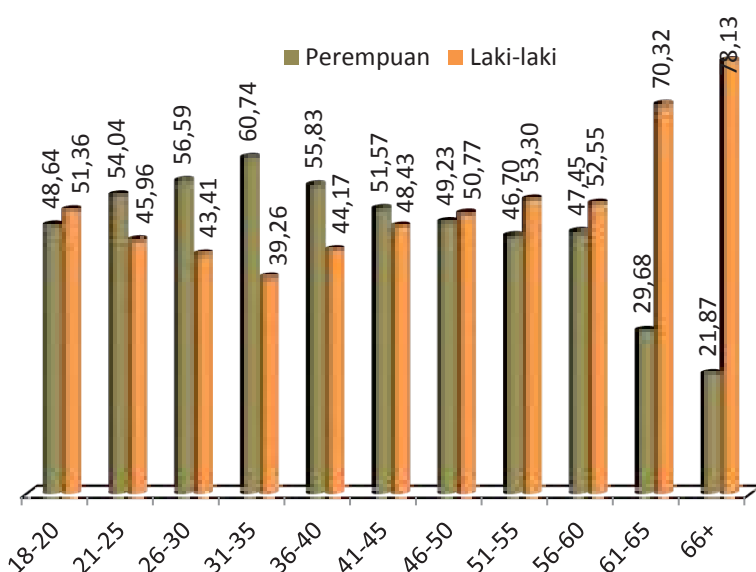


Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.8. Persentase ASN yang Menjabat Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Jabatan, Tahun 2019

Pada Tabel 5.9 menyajikan persentase ASN berdasarkan usia. Usia ASN perempuan yang lebih tinggi dibandingkan ASN laki-laki berada dalam rentang usia 21 sampai 40 tahun, dengan persentase terbesar di usia 31-35 tahun sebesar 60,74 persen. Kondisi ini berbeda dengan ASN laki-laki yang mayoritas berada

dalam rentang usia 51 tahun ke atas dengan persentase paling besar di usia 66+ tahun yang berjumlah 78,13 persen (Gambar 5.10). Informasi ini menunjukkan ASN perempuan yang berada di usia 18-49 tahun atau masuk kategori sangat produktif lebih besar 10,83 persen poin dibandingkan ASN laki-laki dengan perbandingan 72,57 persen berbanding 61,74 persen. Kondisi yang sama terlihat pada persentase ASN perempuan yang masuk kategori usia produktif atau dalam rentang 50-65 tahun sebesar 38,22 persen lebih banyak dibandingkan laki-laki sebanyak 31,68 persen (lihat lampiran 5.7). ASN dengan usia lebih dari 60 tahun umumnya diduduki oleh pejabat fungsional tingkat utama. Kesenjangan tinggi antara ASN laki-laki dan perempuan usia 60 tahun ke atas menunjukkan pada pencapaian karirnya perempuan masih tertinggal dari laki-laki.

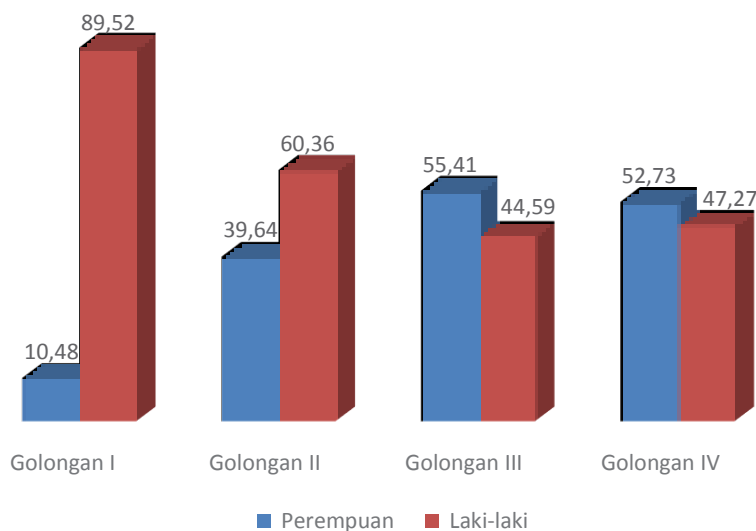


Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.10 Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin dan Usia Tahun 2019

Berdasarkan golongan kepegawaiannya, ASN perempuan lebih banyak berada di golongan III dengan jumlah mencapai

55,41 persen dan di golongan IV sebesar 52,73 persen. Untuk dua tingkat golongan ini, ASN perempuan lebih tinggi dibandingkan golongan kepegawaian ASN laki-laki. Untuk golongan 1 dan II, ASN laki-laki mendominasi secara sangat signifikan, terutama sangat tinggi di golongan 1 yang mencapai 89,52 persen berbanding dengan 10,48 persen pada perempuan (Gambar 5.11). Golongan kepegawaian ASN laki-laki yang sangat tinggi di tingkat golongan I dan II dan berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan ASN perempuan pada tingkat golongan III dan IV ini dikarenakan tingkat pendidikan ASN perempuan yang mayoritas lebih tinggi di jenjang pendidikan Diploma/ sederajat dan Sarjana/doctor/sederajat, sehingga golongan kepegawaian ASN perempuan juga lebih tinggi.

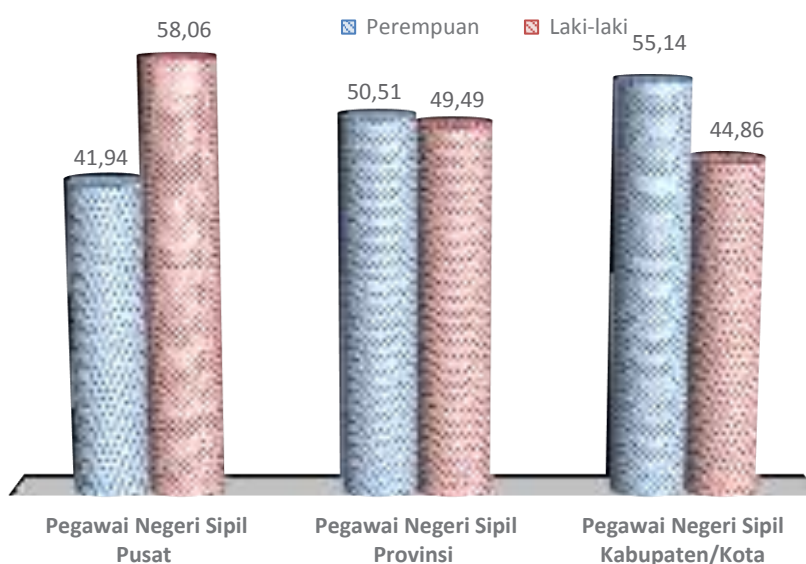


Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.11 Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Kelamin dan Golongan , Tahun 2019

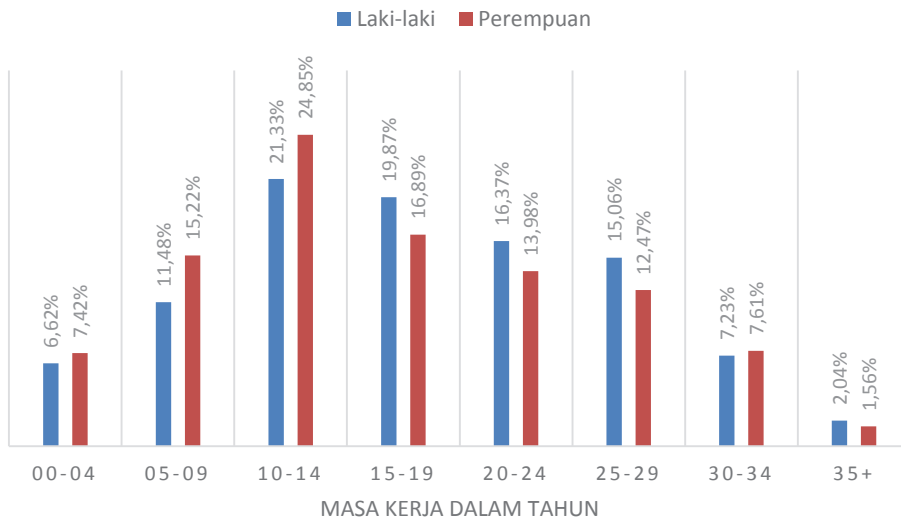
Di tingkat Kabupaten/Kota, persentase ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki dengan persentase mencapai 55,14 persen, sedangkan ASN di tingkat provinsi menunjukkan persentase yang hamper sama dengan laki-laki. Di tingkat pusat, ASN laki-laki lebih mendominasi dibandingkan

perempuan dengan jumlah mencapai 58,06 persen (Gambar 5.12). Untuk masa kerja ASN perempuan paling banyak mempunyai masa kerja selama 10-14 tahun dengan persentase sebesar 24,85 persen dan 15-19 tahun sebesar 16,85 persen. Jika dibandingkan dengan laki-laki, masa kerja pada laki-laki berada di rentang masa yang sama dengan perempuan, paling banyak di masa kerja 10-14 tahun sebesar 21,33 persen dan masa kerja 15-19 tahun sebanyak 19,87 persen. Secara keseluruhan, gambaran masa kerja ASN perempuan dan laki-laki dalam sebaran yang hampir setara (Gambar 5.13).



Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.12 Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kepegawaian 2019



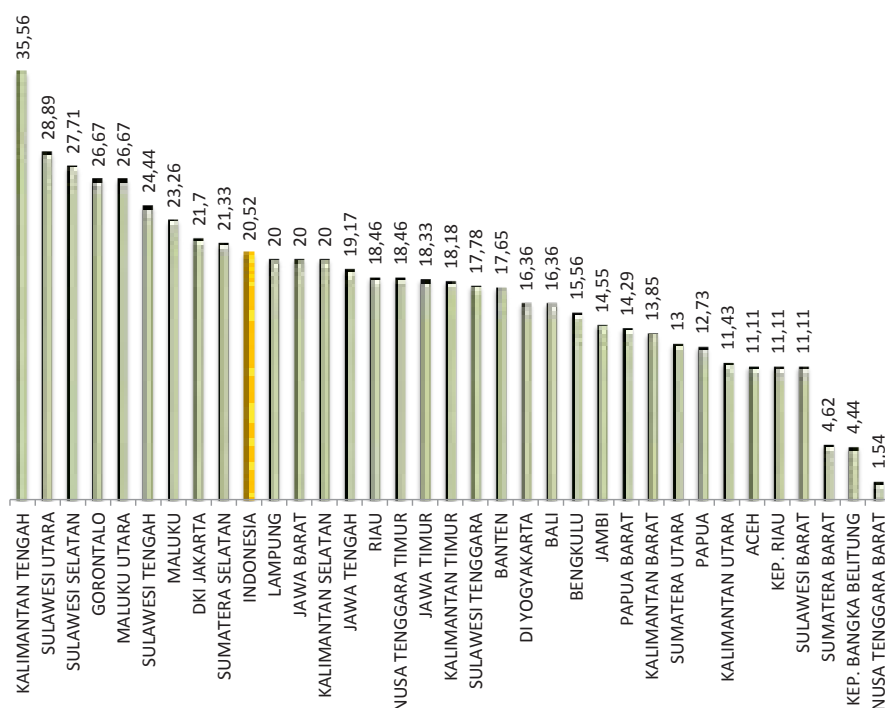
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 5.13 Persentase Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin dan Masa Kerja Tahun 2019

3. Perempuan di Parlemen

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional cenderung terus meningkat. Pada tahun 2019 perempuan di parlemen mencapai 20,52 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu 17,32 persen. Berdasarkan distribusi provinsi, hanya terdapat 9 provinsi yang persentase keterlibatan perempuan di parlemen lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yaitu provinsi Kalimantan Tengah (35,56 persen), Sulawesi Utara (28,89 persen), Sulawesi Selatan (27,71 persen), Gorontalo dan Maluku Utara (26,67 persen), Sulawesi Tengah (24,44 persen), Maluku (23,26 persen), DKI Jakarta (21,7 persen) dan Sumatera Selatan (21,33 persen). Provinsi dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen yang terendah adalah Nusa Tenggara Barat dengan capaian hanya 1,54 persen. Provinsi lain dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen yang rendah dibawah 10 persen adalah Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 4,44 persen dan

Sumatera Barat sebanyak 4,62 persen (Gambar 5.14)



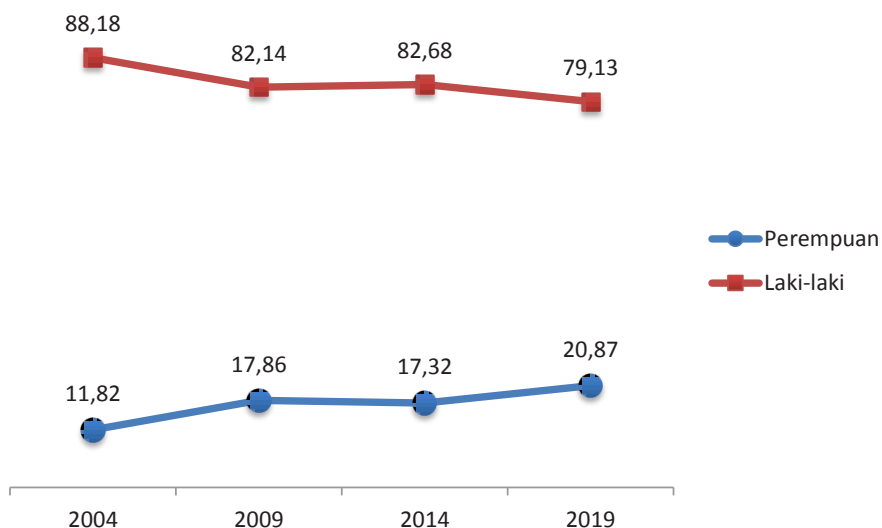
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Gambar 5.14 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi Tahun 2019

Tahun 2019, jumlah anggota DPR perempuan mengalami peningkatan meskipun belum mencapai minimal keterwakilan perempuan 30 persen. Persentase anggota DPR perempuan di tahun 2019 mencapai 20,87 persen, meningkat dibandingkan tahun 2004, 2009 dan 2014 (Gambar 5.15). Sulitnya jumlah anggota DPR perempuan mencapai persentase kuota minimal ini disebabkan banyak factor. Beberapa studi menunjukkan kegagalan perempuan menjadi anggota legislatif dikarenakan sistem budaya politik dan sistem rekrutmen oleh partai yang belum menunjukkan keberpihakan pada calon anggota DPR perempuan, dan sistem pemilu proporsional terbuka yang melemahkan calon perempuan ketika berjuang mendulang suara (Syahputri, 2014; Purwanti, 2015; Ibrahim, Hasnani, & Nanning, 2019). Selain sistem pemilu, faktor lain yang juga

harus dilihat dalam memahami representasi perempuan yang tidak mencapai kuota minimal antara lain kualifikasi perempuan, kebijakan elite partai untuk mencalonkan perempuan dalam jumlah signifikan, motivasi kandidat, sumber daya (sosial, politik dan ekonomi), pengalaman, ambisi, dan minat mereka untuk bekerja penuh waktu di arena politik (Soecipto dalam Margaret, 2018).

Secara khusus di Sumatera Barat, rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat disebabkan faktor minimnya biaya kampanye, stereotipe gender yang merugikan perempuan, lemahnya kemampuan calon perempuan dalam politik serta modal komunikasi yang belum baik (Chairiyah, 2019). Untuk memastikan keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif dapat mencapai jumlah yang ideal baik di pusat maupun daerah, pembangunan di bidang politik bagi perempuan penting terus ditingkatkan, selain kebijakan *affirmative action* diimplementasikan dengan kekuatan sistem politik dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan keterwakilan perempuan.

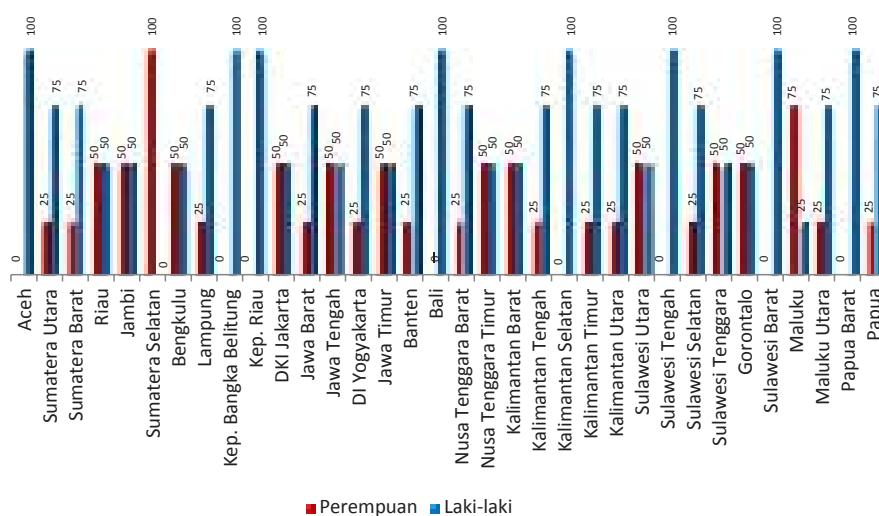


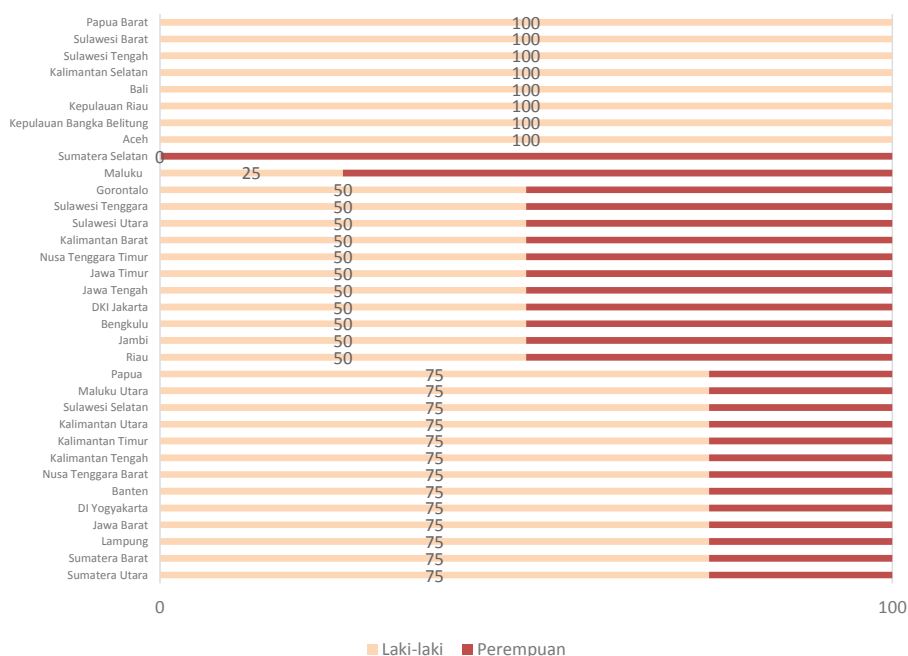
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Gambar 5.15 Persentase Anggota DPR Perempuan Tahun 2004-2019

Jika persentase perempuan di DPR masih 20,87 persen atau masih jauh dari harapan mencapai kuota minimal 30 persen, namun keterwakilan perempuan di DPD menunjukkan capaian yang diharapkan. Secara nasional di tahun 2019, anggota DPD perempuan sudah mencapai persentase minimal keterwakilan perempuan, yaitu 30,88 persen. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai persentase anggota DPD Perempuan tertinggi yaitu 100 persen, sedangkan Maluku mencapai 75 persen. Terdapat 11 provinsi yang memiliki anggota DPD dalam jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan atau masing-masing 50 persen, di antaranya Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, masih didapatkan 8 provinsi yang tidak ada anggota DPD perempuan atau 0 persen, yaitu provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat (Gambar 5.16).

Sumber: Komisi Pemilihan Umum





Gambar 5.16 Persentase Anggota DPD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat pimpinan yang terdiri dari ketua dan beberapa wakil ketua di setiap MPR, DPR, DPD. Pada tahun 2019, pimpinan Lembaga legislatif masih didominasi laki-laki. Dari 19 posisi pimpinan yang ada, hanya ada dua perempuan yang menduduki jabatan pimpinan, yaitu satu orang ketua DPR dan satu orang wakil ketua MPR yang mewakili fraksi Nasional Demokrat. Jika dipersentase, maka perempuan pemimpin di Lembaga legislatif di tingkat pusat hanya 10,53 persen di bawah laki-laki yang mencapai 89,47 persen (Tabel 5.2). Jabatan pimpinan sebagai ketua DPR, tahun 2019 merupakan sejarah pertama kali ketua DPR dipimpin oleh perempuan. Untuk itu, penguatan pada perempuan di lembaga

legislatif masih perlu ditingkatkan agar lebih diperhitungkan sebagai salah satu pimpinan, melakukan negosiasi, advokasi, dan peran penting lain untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan yang diputuskan.

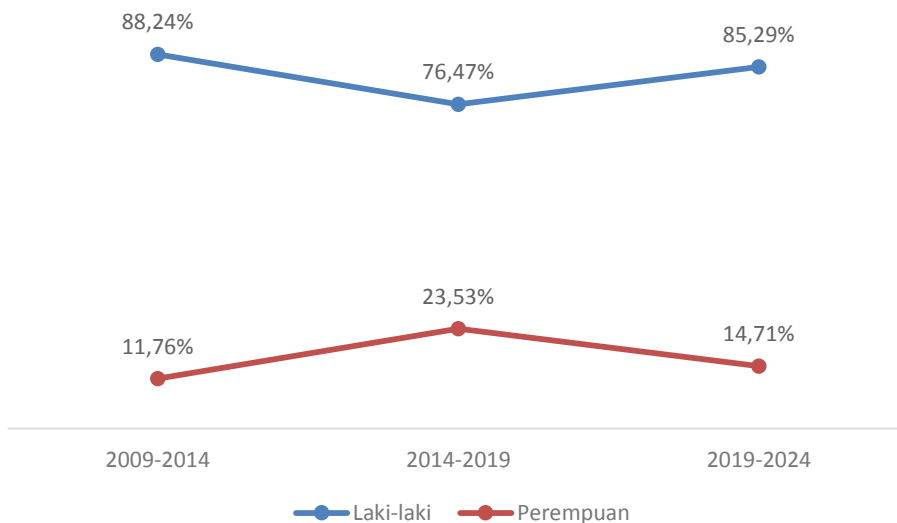
Tabel 5.2. Pimpinan di MPR, DPR dan DPD Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2019-2024

Jabatan	Jumlah Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Ketua MPR	1	1	0
Wakil Ketua MPR	9	8	1
Ketua DPR	1	0	1
Wakli Ketua DPR	4	4	0
Ketua DPD	1	1	0
Wakil Ketua DPD	3	3	0
Jumlah	19	17	2

Sumber: <http://www.dpr.go.id/akd/index/id>

4. Menteri Perempuan

Perempuan menjabat sebagai menteri pada tahun 2019 dapat dilihat dari masa Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Pada periode 2014-2019, dari 34 jabatan Menteri yang dilantik pada tahun 2014, terdapat 8 menteri perempuan dan 26 menteri laki-laki, atau 23,53 persen jabatan Menteri merupakan Menteri perempuan. Jumlah Menteri perempuan ini lebih banyak dibandingkan jumlah Menteri di masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II periode 2009-2014. Pada periode tersebut, perempuan yang menduduki jabatan sebagai Menteri hanya berjumlah empat orang atau sebesar 11,76 persen (Gambar 5.17).



Sumber: presidenri.go.id.

Gambar 5.17. Menteri Kabinet Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009-2019

Delapan Menteri perempuan yang menjabat di dalam Kabinet Kerja 2014-2019 terdiri dari 1) Menteri Kelautan dan Perikanan, 2) Menteri Luar Negeri, 3) Menteri BUMN, 4) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 5) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 6) Menteri Kesehatan, 7) Menteri Sosial, dan 8) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, jumlah perempuan yang menjabat sebagai Menteri sebanyak 5 orang atau 14,71 persen. Jika dibandingkan pada periode sebelumnya, maka Menteri di periode Kabinet Indonesia Maju berjumlah lebih sedikit dibandingkan periode 2014-2019. Lima jabatan Menteri yang diduduki perempuan di periode ini adalah 1) Menteri Luar Negeri, 2) Menteri Ketenagakerjaan, 3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4) Menteri Keuangan, dan 5) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

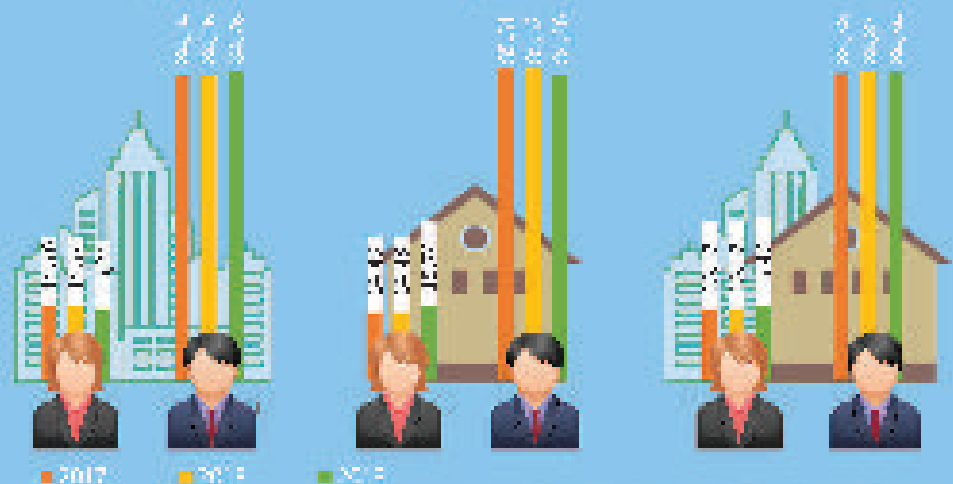
Halaman ini dibiarkan untuk kosong

KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

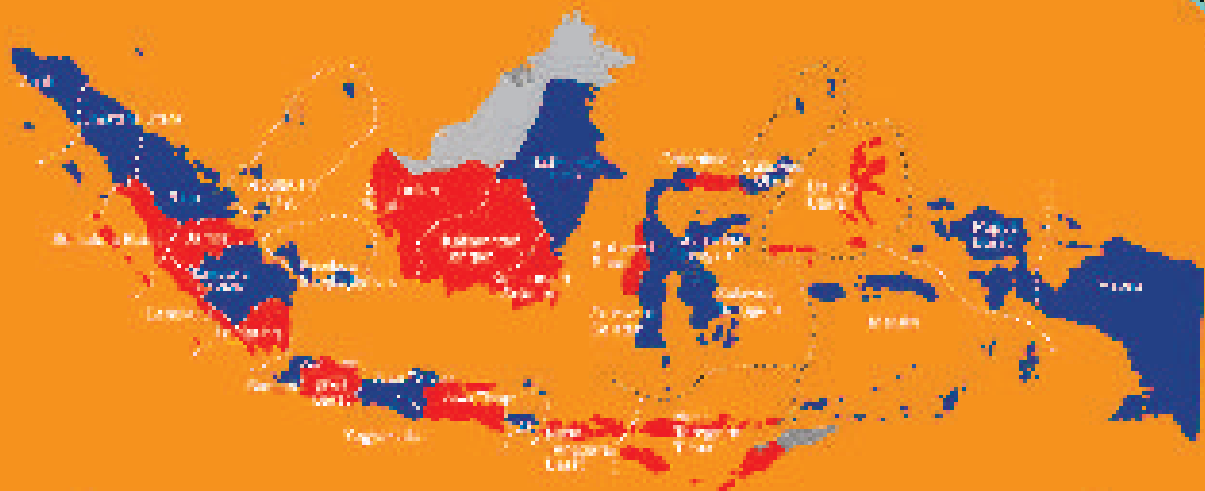


JUMLAH PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA BERDASAR NASIONAL TAMPAK JAUH LEBIH BEDIKIT DIBANDINGKAN LAKI-LAKI

Ada peningkatan jumlah perempuan kepala rumah tangga dibandingkan 2 tahun sebelumnya



JENJANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN OLEH KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN LAKI-LAKI



Masih terdapat 10 provinsi yang memiliki rumah tangga dengan RRT perempuan yang memiliki kuantitas lebih di bawah rata-rata Indonesia

BAB VI PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA

A. Latar Belakang

Kepala rumah tangga atau kepala keluarga tidak hanya menjadi kedudukan laki-laki. Perempuan juga memungkinkan menjadi kepala rumah tangga karena berbagai factor, misalnya karena perceraian hidup atau meninggal dunia, belum menikah/lajang namun menanggung kehidupan pihak lain, kesepakatan dengan suami, atau suami pergi dalam kurun waktu lama tanpa memberi nafkah. Perempuan menjadi kepala rumah tangga juga bisa dikarenakan kondisi suami yang tidak memungkinkan menjadi kepala keluarga karena sakit, mengalami PHK/sedang menganggur, perkawinan poligami dengan suami yang tidak memberi nafkah, atau suami melakukan penelantaran ekonomi keluarga.

Di Indonesia, kedudukan kepala rumah tangga perempuan dihadapkan pada dua perspektif yang berbeda, yaitu: pemahaman agama dan budaya sebagai satu perspektif dan hukum formal sebagai perspektif lainnya. Dari sudut pandang budaya dan pemahaman agama, masih dijumpai ada sebagian masyarakat yang masih mendudukan peran kepala rumah tangga hanya untuk laki-laki. Mereka melihat peran kepala rumah tangga sebagai peran kodrati bagi laki-laki. Pandangan ini berpendapat bahwa perempuan tidak akan pernah bisa menjadi kepala rumah tangga, apapun alasannya.

Perspektif yang berbeda dapat dilihat pada sistem hukum formal di Indonesia. Undang-undang Indonesia yang terkait dengan peran kepala keluarga memosisikan perempuan dalam dua kedudukan hukum yang berbeda. Di satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum berubah, bahwa hanya laki-

laki yang berhak atas peran penting ini (pasal 31). Pada saat UU ini mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, pasal ini tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi peluang atas kedudukan kepala rumah tangga perempuan. Dalam UU ini, tidak ada pasal yang menyatakan kedudukan kepala rumah tangga harus laki-laki. Itu artinya, UU ini memberi peluang terhadap adanya kepala rumah tangga perempuan.

Pengakuan pemerintah terhadap kepala rumah tangga perempuan terlihat dari data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial terhadap bantuan sosial yang diberikan. Dalam sejumlah data BPS, terdapat data terpilah berdasarkan kategori kepala rumah tangga perempuan. Pemilahan data kepala rumah tangga berbasis jenis kelamin ini menguatkan fakta bahwa di masyarakat, dijumpai kepala rumah tangga perempuan yang penting dipertimbangkan dalam proses-proses pembangunan dan pemberdayaan. Perhatian negara kepada kepala rumah tangga perempuan juga terlihat pada data penerima bantuan sosial yang berbasis kepala rumah tangga, baik berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Pengakuan negara terhadap perempuan kepala rumah tangga menunjukkan komitmen negara terhadap konvensi internasional anti diskriminasi pada perempuan atau CEDAW. Konvensi ini mengingatkan tentang sikap negara-negara yang telah meratifikasi untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada perempuan, termasuk perempuan dengan status sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga perempuan yang kebanyakan masih berada dalam kehidupan ekonomi yang terbatas. Dalam Sembilan program prioritas untuk perubahan untuk Indonesia yang termaktub dalam Nawacita pemerintah tahun 2014-2019, terdapat 2 program prioritas yang terkait dengan perempuan kepala rumah tangga, yaitu program prioritas ke 6 dan 7. Dalam Program prioritas ke-6, pemerintah berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, sedangkan program prioritas ke-7 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik. Dua program pemerintah tersebut menjadi peluang yang penting dalam upaya pemberdayaan dan penguatan keluarga Indonesia menuju bangsa yang mandiri dan berkualitas.

Pembangunan manusia, termasuk perempuan kepala rumah tangga juga menjadi bagian dari tujuan SDG's, terutama tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), dan 5 (kesetaraan gender). Dengan tujuan SDG's ini, perempuan kepala rumah tangga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. SDG's menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu sektor ekonomi, sosial dan lingkungan secara terintegrasi dan simultan. Dalam prinsip SDG's juga menerapkan prinsip tidak ada yang ditinggalkan (*No One Left Behind*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk perempuan kepala rumah tangga harus dilihat dan diposisikan tidak hanya sebagai subyek penerima manfaat dari kebijakan dan program pembangunan, namun harus dilibatkan dan dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan dan substansi pembangunan. Prinsip ini semakin menguatkan kedudukan perempuan kepala rumah tangga sebagai bagian dari pembangunan, sama pentingnya dengan kepala rumah tangga laki-laki.

Wujud nyata perhatian negara terhadap perempuan kepala rumah tangga, selain melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok perempuan kepala rumah tangga. Terdapat sejumlah program yang dilakukan untuk menguatkan perempuan kepala rumah tangga secara khusus. Di antaranya program Kemen PPPA yang menyentuh langsung perempuan kepala rumah tangga ini adalah sekolah perempuan yang dimaksudkan membuka akses informasi dan pendidikan bagi perempuan, termasuk kepala rumah tangga perempuan. Selain itu, Kemen PPPA juga memberikan komitmen anggarannya melalui bantuan dana usaha untuk penguatan ekonomi, mengadakan sejumlah kegiatan untuk menguatkan kemampuan dan keterampilan perempuan kepala rumah tangga sehingga mereka mampu mengembangkan ekonomi

kreatif dan inovatif. Pemerintah juga telah berupaya membuka akses perempuan kepala rumah tangga dalam mengembangkan pola-pola kerjasama dengan dunia usaha melalui program-program yang memiliki keberpihakan kepada perempuan kepala rumah tangga.

B. Definisi Konseptual

Semua definisi konseptual yang digunakan dalam menjelaskan perempuan kepala rumah tangga merujuk pada definisi yang telah dibangun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses melalui laman sirusa.bps.go.id.

1. Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik membagi kategori rumah tangga dalam dua bentuk, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus:

- a. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:
 - 1) Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
 - 2) Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
 - 3) Pondokandanmakan(indekost)yangpemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
 - 4) Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa

- 5) Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya
- b. Rumah Tangga Khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga khusus antara lain orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya, asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsì). Di antara contoh rumah tangga khusus adalah orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan; sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang. Kategori Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam kegiatan Susenas.

2. Kepala rumah tangga (KRT)

BPS mendefinisikan kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Dengan definisi ini, kepala rumah tangga tidak harus berjenis kelamin laki-laki. Kepala rumah tangga juga memungkinkan diperankan perempuan ketika situasi sebagaimana definisi tersebut terjadi dalam sebuah keluarga. Definisi ini menunjukkan kesetaraan dalam memosisikan suami dan istri, sama-sama berpeluang menjadi kepala keluarga dan mendapatkan hak-hak yang sama sebagai kepala rumah tangga.

3. Anggota rumah tangga (ART)

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal, di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga bisa terdiri dari suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, kerabat keluarga lain, pekerja rumah tangga, sopir, dan tukang kebun. Dengan

demikian, anggota rumah tangga bisa diperinci sebagaimana berikut:

- a. Bayi yang baru lahir;
- b. Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih;
- c. Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang);
- d. Pekerja rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan; Pembantu rumah tangga atau sopir yang hanya makan atau tinggal saja di rumah majikannya dianggap bukan art majikannya.
- e. Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang;

Merujuk pada definisi di atas, maka beberapa kategori berikut ini tidak dikategorikan sebagai anggota rumah tangga, yaitu:

- a. ART yang tinggal di tempat lain (luar rumah tangga/BS), misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari;
- b. Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah;
- c. Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk pindah;
- d. Pekerja rumah tangga, sopir, tukang kebun yang tidak tinggal di rumah tangga majikan;

- e. Orang yang mondok tidak dengan makan;
- f. Orang yang mondok dengan makan (indekos) lebih dari 10 orang.

4. Bangunan Rumah Tangga

Beberapa konsep yang digunakan dalam menjelaskan tentang bangunan rumah tangga, termasuk pada perempuan kepala rumah tangga adalah:

- a. Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik. Contoh bangunan fisik bukan tempat tinggal adalah hotel, toko, pabrik, sekolah, masjid, kuil, gereja, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya. Rumah tangga yang tinggal bukan di bangunan fisik seperti bangunan liar di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, di gerbong kereta, di bantaran sungai, dan sejenisnya tidak termasuk dalam pendataan.
- b. Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota keluarga yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Atap dibedakan dengan beberapa jenis atap, yaitu:
 - 1) Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
 - 2) Genteng adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng fiber cement, dan genteng keramik.

- 3) Sirap adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
 - 4) Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi epoxy dan acrylic).
 - 5) Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
 - 6) Ijuk/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enu atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.
 - 7) Lainnya adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya papan, bambu, dan daun-daunan.
- c. Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Dinding rumah tangga dibagi dalam 4 kategori, yaitu:
- 1) Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah Dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, yang biasanya berjarak 1 - 1,5 m;
 - 2) Kayu adalah dinding yang terbuat dari kayu;
 - 3) Bambu/rumbia adalah dinding yang terbuat dari bambu atau rumbia. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
 - 4) Lainnya adalah selain kategori 1-3.

- d. Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer, keramik, granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah dan lainnya seperti bambu.

5. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal pada rumah tangga dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik krt atau salah satu seorang art. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan statussewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.
- b. Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/ art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.
- c. Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
- d. Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- e. Rumah milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/ sanak/saudara, dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
- f. Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

- g. Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

6. Sumber Penerangan.

Di dalam sebuah rumah tangga, sumber penerangan terbagi menjadi lima kategori, yaitu:

- a. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.
- b. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya lain yang tidak dikelola oleh PLN.
- c. Petromak/aladin adalah sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, dan aladin, termasuk lampu gas.
- d. Pelita/sentir/obor adalah lampu minyak tanah lainnya, seperti lampu teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya.
- e. Lainnya seperti Lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri.

7. Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga. Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas

sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

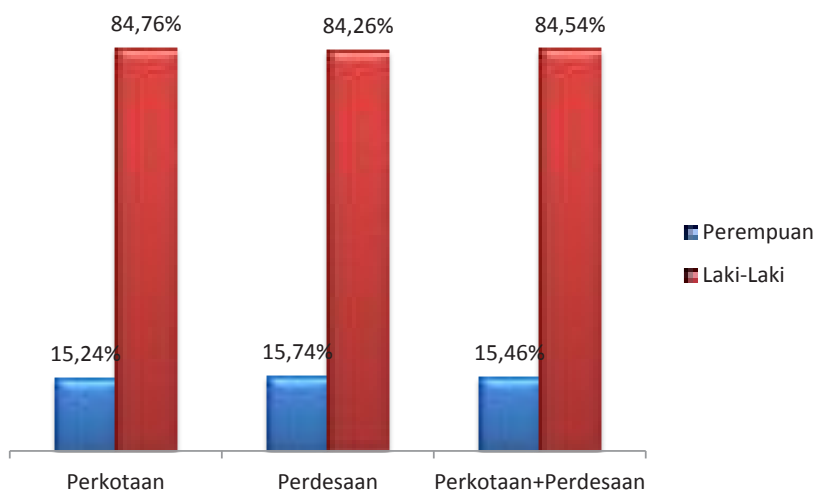
Ada dua cara penggunaan pendapatan, yaitu 1) membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi atau 2) tidak membelanjakannya seperti ditabung. **P**engeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi, seperti sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya, yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

C. PEMBAHASAN

1. Kepala Rumah Tangga Perempuan

Pada umumnya, perempuan menjadi kepala rumah tangga karena adanya kejadian dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tidak berjalannya peran laki-laki menjadi kepala rumah tangga karena berbagai alasan. Perempuan mengambil peran sebagai kepala rumah tangga untuk memastikan rumah tangga tetap berjalan dengan baik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itu, dari segi persentase jumlah kepala rumah tangga, dibandingkan laki-laki, jumlah kepala rumah tangga perempuan jauh lebih sedikit. Demikian juga data yang terlihat di tahun 2019, persentase kepala rumah tangga perempuan lebih sedikit dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki. Gambaran jumlah ini terlihat sama, baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

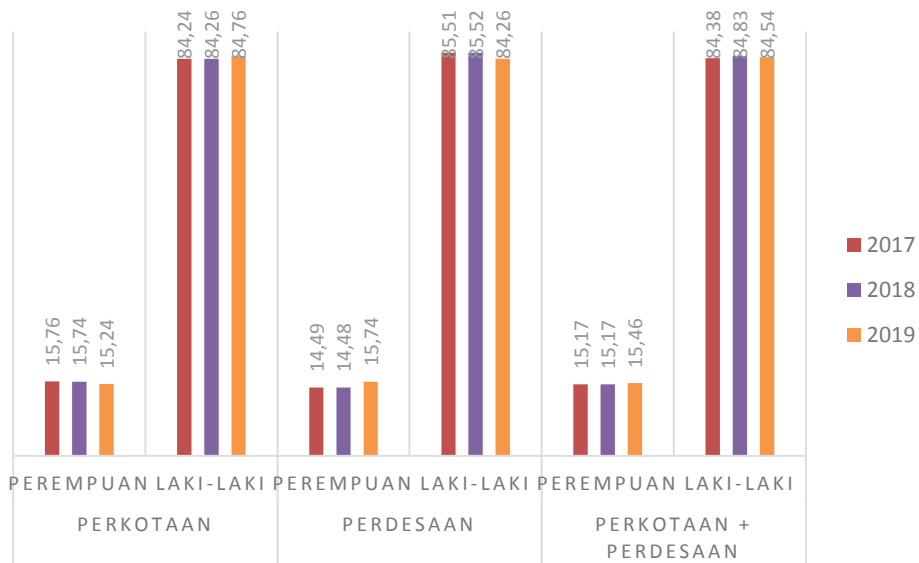
Secara nasional, jumlah perempuan sebagai kepala rumah tangga di Indonesia sebesar 15,46 persen, jumlah ini memang jauh lebih sedikit dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki sebesar 84,54 persen. Baik di perdesaan maupun di perkotaan, persentase perempuan kepala rumah tangga dalam jumlah 15,24 persen dan 15,74 persen. Hal ini menunjukkan jumlah perempuan kepala rumah tangga di perdesaan sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan kepala rumah tangga di perkotaan (Gambar 6.1). Organisasi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pernah melakukan pendataan terhadap anggotanya, hasil analisis menunjukkan bahwa persentase perempuan kepala keluarga bisa jadi lebih banyak dari data sebenarnya. Salah satu factor adanya dugaan ini dimungkinkan karena tidak terdatanya kepala keluarga perempuan dan perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga yang status kependudukannya masih dikepalai laki-laki (Zulminarni & Suryahadi, dkk., 2014). Hal ini dinilai beresiko terhadap terbatasnya akses perempuan kepala rumah tangga dalam berbagai program pembangunan pemerintah, seperti bantuan social, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan pengetahuan dan informasi.



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.1 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

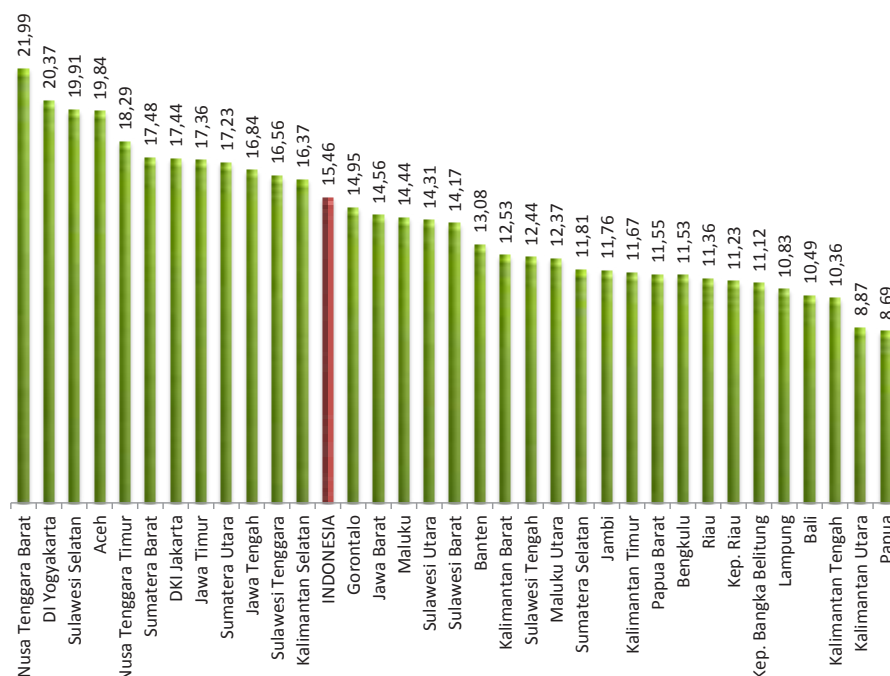
Meskipun jumlah perempuan kepala rumah tangga secara nasional tampak jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, namun secara spesifik terlihat adanya peningkatan jumlah perempuan kepala rumah tangga dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Di tahun 2017 dan 2018, jumlah perempuan kepala rumah tangga sama-sama sebesar 15,17 persen dengan persentase lebih banyak di perkotaan. Di tahun 2019, jumlah perempuan kepala rumah tangga meningkat menjadi 15,46 persen dengan persentase lebih besar di perdesaan (Gambar 6.2). Situasi ini berbeda dari dua tahun sebelumnya, dimana perempuan kepala rumah tangga sedikit lebih banyak berada di wilayah perkotaan.



Sumber: BPS RI, Susenas 2017-2019

Gambar 6.2. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

Dilihat dari sebaran provinsi kepala rumah tangga perempuan, Gambar 6.3 menunjukkan adanya 12 provinsi yang mempunyai persentase kepala rumah tangga perempuan lebih tinggi dari angka nasional. Provinsi dengan kepala rumah tangga perempuan terbanyak berada di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah sebesar 21,99 persen, dan DI Yogyakarta sebanyak 20,37 persen, dan Sulawesi Selatan sebesar 19,91 persen. Provinsi dengan kepala rumah tangga perempuan paling sedikit berada di wilayah Papua dengan jumlah sebanyak 8,6 persen, Kalimantan Utara sebesar 8,87 persen, dan Kalimantan Tengah sebanyak 10,36 persen.



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.3 Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Provinsi Tahun 2019

Gambaran kondisi perempuan kepala rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah. Dalam studi pada perempuan kepala keluarga di Nusa Tenggara Barat, kebanyakan mereka berpendidikan rendah dan tidak memiliki kemampuan literasi yang baik. Jenis pekerjaan yang digeluti perempuan kepala keluarga di NTB kebanyakan bekerja sebagai buruh tani, pedagang sayuran dengan hanya 2-3 jenis jenis sayuran. Rata-rata pendapatan maksimal yang diperoleh perhari hanya sekitar Rp. 30.000, padahal anggota rumah tangga yang menjadi beban tanggungan perempuan kepala rumah tangga ini mencapai jumlah 4-6 orang (Choiriawaty, 2019). Tingginya perempuan kepala rumah tangga di NTB juga dapat berkorelasi dengan kasus perkawinan anak yang masih tinggi. Perkawinan di usia anak memiliki kerentanan yang sangat tinggi pada konflik rumah tangga yang beresiko tidak tinggal satu rumah

dan terjadi pengabaian pemenuhan nafkah, perceraian di usia lima tahun pertama perkawinan, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Situasi buruk ini bisa berdampak pada posisi perempuan harus menjadi kepala rumah tangga demi kelangsungan hidupnya setelah perkawinan atau perceraian yang dijalani.

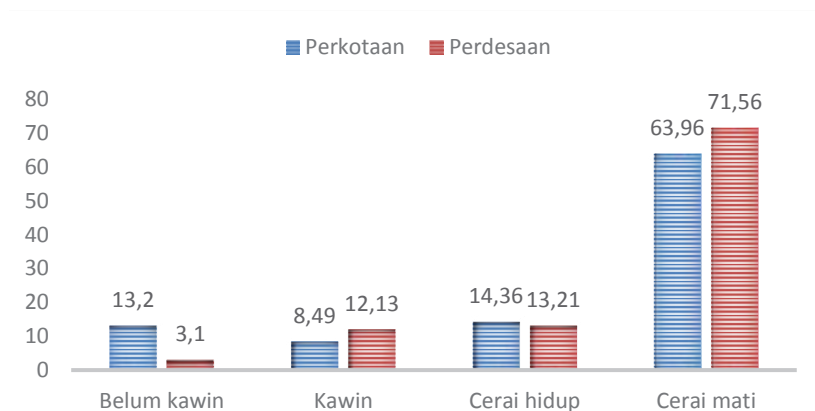
Tabel 6.1 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut status perkawinan, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal Tahun 2019

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis kelamin	Status perkawinan				Total
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Perempuan	13,2	8,49	14,36	63,96	100,00
Laki-laki	3,88	90,45	1,7	3,97	100,00
Perdesaan					
Perempuan	3,1	12,13	13,21	71,56	100,00
Laki-laki	1,24	94,37	1,16	3,23	100,00
Perkotaan +Perdesaan					
Perempuan	8,68	10,12	13,84	67,36	100,00
Laki-laki	2,72	92,17	1,46	3,65	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Mayoritas status perkawinan kepala rumah tangga perempuan adalah cerai mati, sebesar 67,36 persen dengan persentase di perkotaan sebanyak 63,96 persen dan di perdesaan sebesar 71,56 persen. Dibandingkan perkotaan, status cerai mati pada perempuan kepala rumah tangga lebih tinggi di perdesaan. Situasi yang sangat berbeda terlihat pada status perkawinan kepala rumah tangga laki-laki yang tertinggi dengan status kawin. Persentase laki-laki kepala rumah tangga ini mencapai jumlah 92,17 persen dengan proporsi lebih tinggi di perdesaan. Dibandingkan perempuan, status kawin pada

kepala rumah tangga perempuan hanya berjumlah 10,17 persen (Tabel 6.1).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6. 4 Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Daerah tempat tinggal dan Status Perkawinan Tahun 2019

Perempuan kepala rumah tangga yang berstatus belum kawin terlihat lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan dengan perbedaan yang cukup signifikan. Terdapat 13,2 persen perempuan kepala rumah tangga yang tinggal di perkotaan, sementara di perdesaan hanya sebesar 3,1 persen. Kondisi sebaliknya terlihat pada perempuan kepala rumah tangga berstatus kawin. Perempuan di perdesaan lebih banyak yang menjadi kepala rumah tangga dibandingkan perempuan kepala rumah tangga yang berada di perkotaan (Gambar 6.4).

2. Pendidikan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Berdasarkan partisipasi sekolah, persentase kepala rumah tangga perempuan yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 4 kali lebih tinggi dibandingkan persentase kepala rumah tangga laki-laki. Persentase perempuan kepala rumah tangga yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan dengan perbandingan sebesar 18,69 persen berbanding 8,37 persen. Terdapat perempuan kepala rumah tangga yang masih bersekolah dengan persentase hampir 4 kali lipat dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki

(Tabel 6.2). Empat puluh koma empat puluh satu (Sebanyak 40,41 persen kepala rumah tangga perempuan tidak memiliki ijazah. Informasi ini mengindikasikan situasi rumah tangga yang dikepalai perempuan mayoritas berada dalam situasi kehidupan yang tidak mudah. Rendahnya pendidikan kepala rumah tangga berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ekonomi keluarga, dan beresiko pada anggota rumah tangga yang akan berpendidikan rendah.

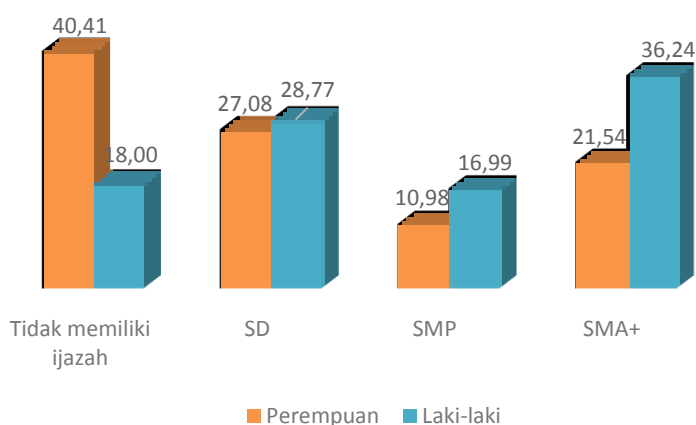
Tabel 6.2 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019

Daerah Tempat Tinggal/Jenis kelamin	Partisipasi sekolah			Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Perempuan	8,37	6,45	85,18	100,00
Laki-laki	1,58	1,61	96,82	100,00
Perdesaan				
Perempuan	18,69	0,58	80,72	100,00
Laki-laki	5,11	0,44	94,44	100,00
Perkotaan +Perdesaan				
Perempuan	12,99	3,82	83,19	100,00
Laki-laki	3,13	1,1	95,78	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga laki-laki di semua jenjang pendidikan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga perempuan terbanyak adalah SD (27,08 persen), kemudian SMA+ (21,54 persen), dan SMP (10,98 persen) (Gambar 6.5). Di perkotaan, pendidikan

tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki terbanyak adalah SMA+, namun kepala rumah tangga perempuan tamat SMA+ adalah 31,86 persen lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki sebanyak 48,07 persen. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga perempuan terbanyak ada di wilayah perdesaan dengan jumlah tamat SD sebanyak 30,22 persen, sedangkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga laki-laki yang terbanyak di jenjang tamat SMP dengan capaian sebanyak 37,26 persen.



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.5 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kepala rumah tangga perempuan di perdesaan yang tamat SMA+ hanya 8,81 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki yang mencapai 21,08 persen (Tabel 6.3). Kepala rumah tangga perempuan di perdesaan paling banyak tidak mempunyai ijazah dengan jumlah sebesar 52,73 persen. Jumlah ini menunjukkan 1 dari 2 perempuan kepala rumah tangga di perdesaan tidak memiliki ijazah. Sementara itu, perempuan perdesaan yang berstatus kepala rumah tangga dan telah menamatkan pendidikannya sampai jenjang SMA+ hanya berjumlah 8,81 persen saja. Di perkotaan, pendidikan

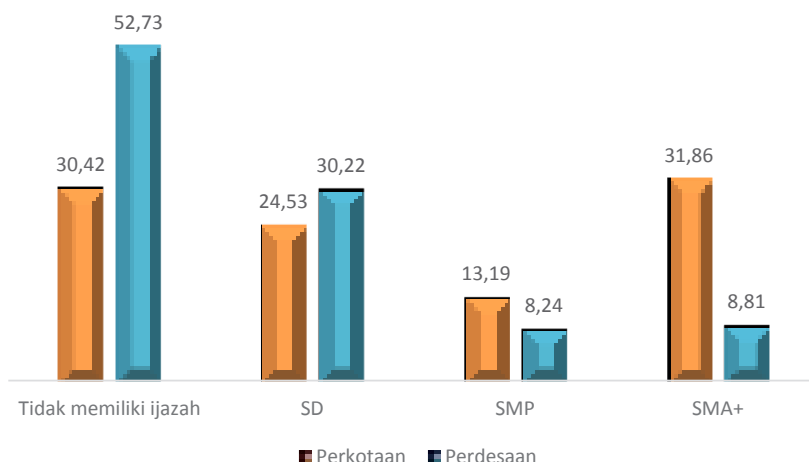
tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga perempuan paling banyak adalah SMA+ (31,86 persen), sedangkan yang tidak mempunyai ijazah sebanyak 30,42 persen.

Tabel 6.3 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2019

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis kelamin	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan				Total
	Tidak mempunyai ijazah	SD	SMP	SMA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Perempuan	30,42	24,53	13,19	31,86	100,00
Laki-laki	12,74	22,13	17,06	48,07	100,00
Perdesaan					
Perempuan	52,73	30,22	8,24	8,81	100,00
Laki-laki	42,74	37,26	16,91	21,08	100,00
Perkotaan +Perdesaan					
Perempuan	40,41	27,08	10,98	21,54	100,00
Laki-laki	18,00	28,77	16,99	36,24	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Terdapat sekitar 1 dari 3 perempuan kepala rumah tangga di perkotaan tidak memiliki ijazah (Gambar 6.6). Tingginya persentase perempuan kepala rumah tangga yang tidak memiliki ijazah atau hanya tamat sampai di jenjang pendidikan dasar mencapai total 67,48 persen. Jumlah dengan besaran yang sangat signifikan beresiko pada kualitas rumah tangga yang dikepalai perempuan. Rendahnya pendidikan perempuan kepala rumah tangga juga berdampak pada sulitnya perempuan mengakses berbagai sumber daya, terutama akses terhadap varian pilihan pada peluang kerja yang bermanfaat bagi penghidupan diri dan anggota rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.



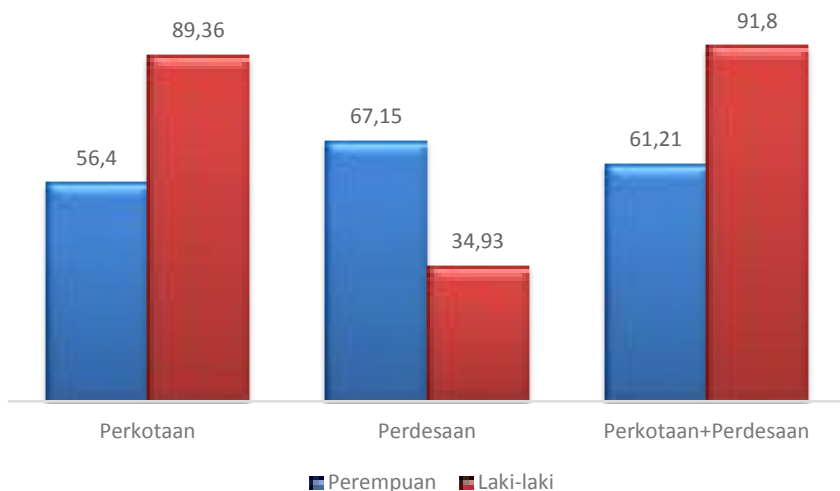
Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.6 Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2019

Berdasarkan distribusi daerah tempat tinggalnya, provinsi dengan kepala rumah tangga perempuan yang tidak memiliki ijazah terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan jumlah yang sangat signifikan, yaitu 52,36 persen dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 52,14 persen. Provinsi dengan kepala rumah tangga perempuan yang tamat SMA+ terbanyak berada DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 45,93 persen dan DI Yogyakarta sebesar 44,92 persen; sedangkan provinsi dengan kepala rumah tangga perempuan yang tamat SMA+ tersedikit di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 13,97 persen dan Jawa Timur dalam jumlah 14,03 persen. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan persentase kepala rumah tangga perempuan yang tamat SMA+ mencapai lebih dari 40 persen, atau sebesar 41,07 persen. Capaian pendidikan yang ditamatkan perempuan ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase rumah tangga yang dikepalai laki-laki, yaitu berjumlah 28,28 persen (lihat Lampiran Tabel 6.10)

3. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, pada tahun 2019 kepala rumah tangga yang bekerja lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Kesenjangan ini terlihat di perkotaan maupun di perdesaan. Secara nasional, kepala rumah tangga perempuan yang bekerja hanya sebanyak 61,21 persen, sedangkan kepala rumah tangga laki-laki yang bekerja sebanyak 91,80 persen. Itu artinya, kepala rumah tangga perempuan yang bekerja hanya berjumlah 2 dari 3 perempuan kepala rumah tangga. Di perdesaan, perempuan kepala rumah tangga yang bekerja lebih banyak dibandingkan di perkotaan, dengan perbedaan sebesar 67,15 persen berbanding 56,4 persen (Gambar 6.7).

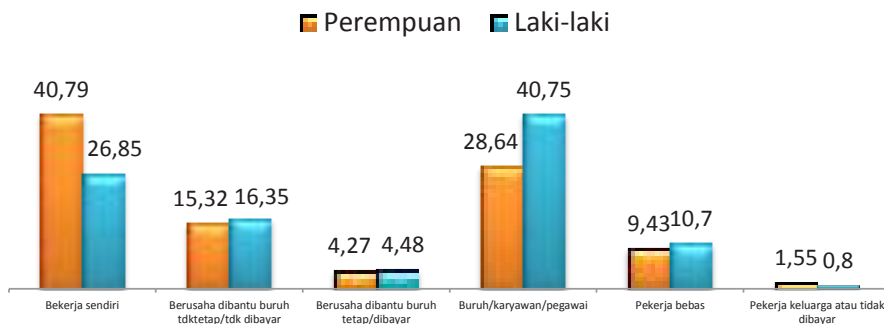


Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.7 Persentase Kepala Rumah Tangga yang bekerja menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal Tahun 2019

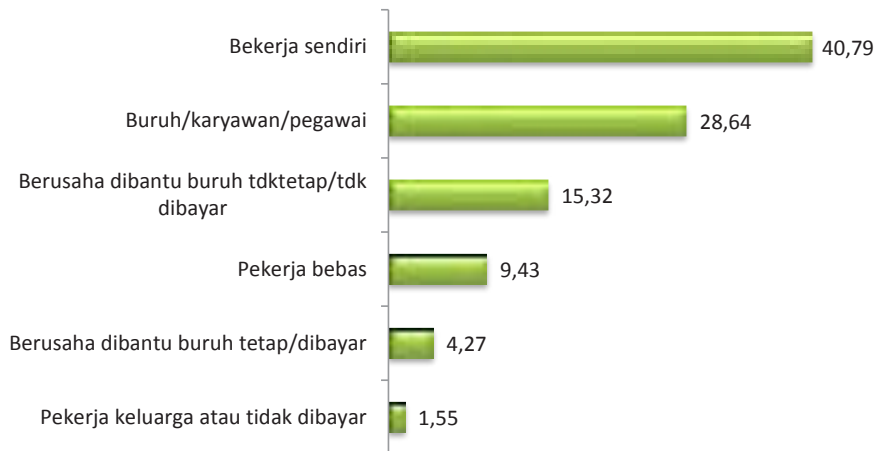
Berdasarkan status pekerjaan, 40,79 persen kepala rumah tangga perempuan yang bekerja berstatus bekerja sendiri. Dibandingkan laki-laki, perempuan yang berstatus bekerja sendiri lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki yang berjumlah 26,85 persen. Hal ini mengindikasikan pilihan pekerjaan bagi perempuan kepala rumah tangga lebih banyak

bersifat pekerjaan informal. Selain karena pekerjaan informal memiliki fleksibilitas waktu dan keleluasaan dikerjakan dari rumah, tingkat pendidikan kepala rumah tangga perempuan yang mayoritas tidak memiliki ijazah atau hanya sampai jenjang SD/ sederajat menjadikan akses terhadap pilihan pekerjaan formal lebih sulit. Persentase paling tinggi terhadap status pekerjaan kepala rumah tangga laki-laki adalah bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah sebesar 40,75 persen, lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga perempuan yang berjumlah 28,64 persen. Persentase terkecil adalah kepala rumah tangga perempuan yang status pekerjaannya sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar, yaitu sebanyak 1,55 persen, meski demikian, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki yang status pekerjaannya sebagai pekerja keluarga dan tidak dibayar, yaitu 0,8 persen (Gambar 6.8).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.8. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan dan Laki-laki yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Tahun 2019



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.9 Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja menurut Status Pekerjaan, 2019

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan menjadi tonggak utama dalam penguatan perempuan kepala rumah tangga perempuan. Terdapat 71,36 persen perempuan kepala rumah tangga yang status pekerjaannya selain buruh/karyawan/pegawai (Gambar 6.9). Persentase yang sangat signifikan besar ini berstatus bekerja sendiri, menjadi pekerja bebas, berusaha dengan atau tanpa buruh, atau bahkan pekerja yang tidak dibayar. Untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagaimana nawacita pembangunan Indonesia, maka pemberdayaan ekonomi pada perempuan kepala rumah tangga harus menjadi langkah prioritas pembangunan. Salah satu implementasi dari Permen PPPA ini terlihat pada tingginya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini dilakukan oleh perempuan serta berhasil menyerap tenaga kerja dari kelompok perempuan (kemenpppa.go.id)

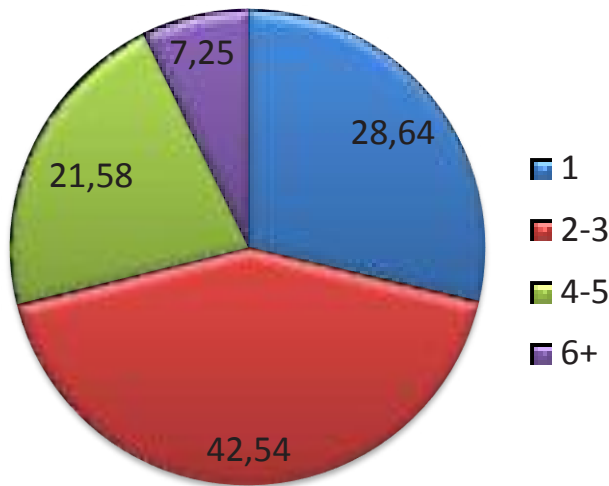
4. Jumlah Anggota Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Perempuan

Anggota rumah tangga dari perempuan kepala rumah tangga merefleksikan jumlah orang yang menjadi tanggung jawab ekonomi yang diembannya. Jumlah anggota rumah tangga terbanyak yang dimiliki oleh kepala rumah tangga perempuan adalah 2-3 orang. Hal ini terjadi di perkotaan maupun di perdesaan dengan persentase sebesar 41,96 persen di perkotaan dan 43,25 persen di perdesaan. Jumlah rata-rata ini berbeda dengan kepala rumah tangga laki-laki yang mayoritas berjumlah 4-5 orang, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Tabel 6.5). Secara total, persentase kepala rumah tangga perempuan yang memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga 2-3 orang adalah 42,54 persen dan hanya 7,25 persen yang memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga lebih dari atau sama dengan 6 orang (Gambar 6.10).

Tabel 6.4 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis kelamin	Rata-rata jumlah anggota rumah tangga				Total
	1	2-3	4-5	6+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Perempuan	28,39	41,96	21,56	8,09	100,00
Laki-laki	5,17	35,64	45,87	13,32	100,00
Perdesaan					
Perempuan	28,94	43,25	21,6	6,22	100,00
Laki-laki	2,42	38,69	45,17	13,72	100,00
Perkotaan +Perdesaan					
Perempuan	28,64	42,54	21,58	7,25	100,00
Laki-laki	3,96	36,98	45,56	13,49	100,00

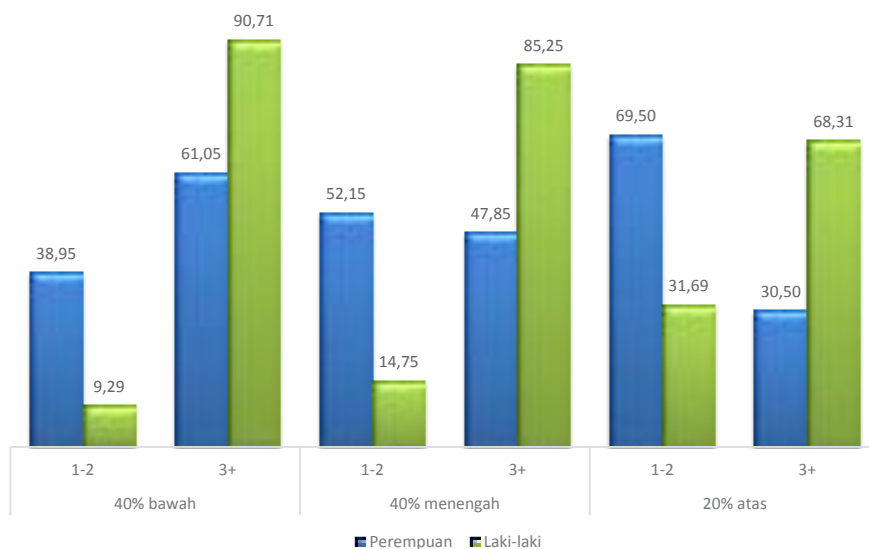
Sumber: BPS RI, Susenas 2019



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.10 Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019

Berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita sebulan dan jumlah anggota rumah tangga, kepala rumah tangga perempuan menunjukkan persentase terbanyak pada kelompok 20% atas dengan jumlah anggota rumah tangga 1-2 orang yaitu 69,5 persen dan kelompok 40% bawah dengan jumlah anggota rumah tangga lebih dari 3 yaitu 61,05 persen. Kepala rumah tangga laki-laki menunjukkan persentase terbanyak pada kelompok pengeluaran per kapita sebulan 40% bawah dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 3 yaitu 90,71 persen dan 40% menengah dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 3 yaitu 85,25 persen (Gambar 6.11).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.11 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut distribusi pengeluaran per kapita sebulan dan jumlah anggota rumah tangga, 2019

5. Kondisi Perumahan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Sebagian besar perumahan yang ditempati oleh kepala rumah tangga perempuan berdasarkan luas lantai per meter persegi per Kapita adalah yang luas lantai $\geq 10 \text{ m}^2$ per Kapita yaitu sebesar 88,95 persen. Hal ini lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki sebesar 82,09 persen. Demikian juga yang di daerah perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga dengan luas lantai per meter persegi per Kapita $\geq 10 \text{ m}^2$ lebih banyak dimiliki oleh kepala rumah tangga perempuan dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki (Tabel 6.6)

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita, 2019

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis kelamin	Luas lantai per meter persegi per Kapita		Total
	<10m ² per kapita	≥10 m ² per kapita	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Perempuan	13,23	86,77	100,00
Laki-laki	19,21	80,79	100,00
Perdesaan			
Perempuan	8,37	91,63	100,00
Laki-laki	16,25	83,75	100,00
Perkotaan +Perdesaan			
Perempuan	11,05	88,95	100,00
Laki-laki	17,91	82,09	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Berdasarkan jenis lantai terluasnya, persentase rumah tangga kepala rumah tangga perempuan sebagian besar adalah bukan tanah dengan jumlah sebesar 94,15 persen, demikian juga pada kepala rumah tangga laki-laki yaitu 95,84 persen. Di perkotaan dan di perdesaan, persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluasnya bukan tanah milik kepala rumah tangga perempuan jauh lebih banyak dari pada jenis lantai terluasnya tanah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kepala rumah tangga laki-laki (Tabel 6.7).

Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Lantai Terluas, 2019

Daerah Tempat Tinggal/Jenis kelamin	Jenis lantai terluas		Total
	Bukan tanah	Tanah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Perempuan	97,46	2,54	100,00
Laki-laki	98,41	1,58	100,00
Perdesaan			
Perempuan	90,07	9,93	100,00
Laki-laki	92,55	7,45	100,00
Perkotaan +Perdesaan			
Perempuan	94,15	5,85	100,00
Laki-laki	95,84	4,16	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2019

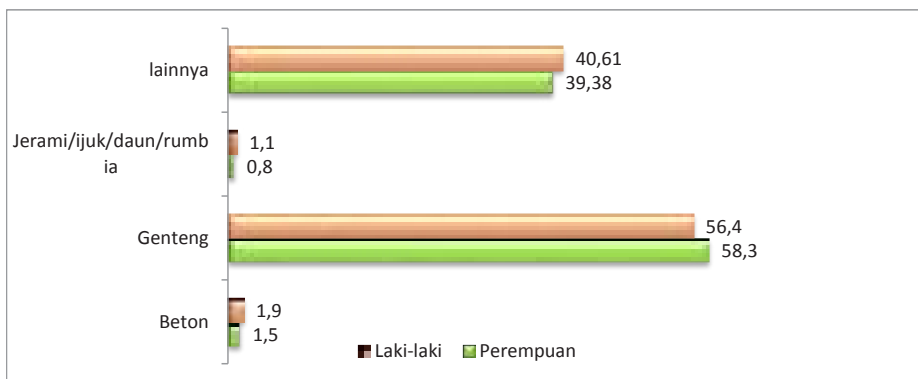
Berdasarkan jenis atap terluas, persentase rumah tangga dengan jenis atap terluasnya genteng di perkotaan hampir sama antara kepala rumah tangga perempuan yaitu sebesar 59,8 persen dengan kepala rumah tangga laki-laki sebesar 59,4 persen. Demikian juga di perdesaan, atap genteng merupakan jenis atas yang persentasenya paling banyak diantara jenis atap lainnya pada kepala rumah tangga laki-laki maupun perempuan (Tabel 6.8). Secara total, persentase terbanyak dari rumah tangga dengan kepala Rumah Tangga perempuan adalah rumah tangga dengan jenis atap terluasnya genteng sebanyak 58,3 persen, demikian juga bagi kepala rumah tangga laki-laki, persentase terbanyaknya adalah rumah tangga dengan jenis atap terluasnya genteng sebanyak 56,4 persen (Gambar 6.8).

Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Atap Terluas, 2019

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis kelamin	Jenis atap terluas				Total
	Beton	Genteng	Jerami/Ijuk/ Daun/Rumbia	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Perempuan	2,1	59,8	0,1	38,04	100,00
Laki-laki	2,6	59,4	0,2	37,79	100,00
Perdesaan					
Perempuan	0,8	56,5	1,7	41,03	100,00
Laki-laki	1	52,5	2,3	44,22	100,00
Perkotaan +Perdesaan					
Perempuan	1,5	58,3	0,8	39,38	100,00
Laki-laki	1,9	56,4	1,1	40,61	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Selain genteng, jenis atap yang mendominasi rumah tinggal kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki adalah kategori lainnya dengan komposisi sebesar 39,38 persen pada kepala rumah tangga perempuan dan 40,61 persen pada kepala rumah tangga laki-laki. Hal ini mengindikasikan kondisi rumah dan atap yang ditinggali oleh keluarga yang dikepalai perempuan dan laki-laki dalam gambaran yang kurang lebih sama. Baik pada keluarga perempuan kepala rumah tangga maupun laki-laki kepala rumah tangga, keduanya sama-sama tinggal dalam rumah dengan atap genteng dan atap jenis lainnya, yaitu sirap, seng, asbes, dan papan.



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.12 Persentase Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan berdasarkan Jenis Atap Terluas, 2019

Secara total, jenis dinding terluas dari rumah tangga kepala rumah tangga perempuan yang terbanyak adalah tembok dengan persentase sebanyak 74,9 persen. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan rumah dengan dinding tembok pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki, yaitu sebanyak 77,1 persen. Selain dinding tembok, dinding dari kayu/papan merupakan jenis dinding terbanyak setelah tembok, yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki kepala rumah tangga. jenis kayu/papan pada jenis tembok kepala rumah tangga perempuan sebesar 17,1 persen, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki, yaitu 16,6 persen.

Jika dibandingkan berdasarkan daerah tempat tinggal, jenis dinding kayu/papan di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan dengan perbandingan sebanyak 8.7 persen di perkotaan dengan 27,1 persen di perdesaan. Dinding dengan jenis kayu/papan yang masih cukup banyak dimiliki oleh keluarga dari perdesaan, baik pada kepala rumah tangga laki-laki maupun perempuan merefleksikan masih banyak penduduk yang menggunakan rumah sesuai adat dan budaya yang masih berlaku, seperti Rumah Gadang di Sumatera Barat, Rumoh Aceh di Banda Aceh, Rumah Bolon di Sumatera Utara, Rumah Kejang Lako di Jambi, dan Rumah Rakit di Bangka

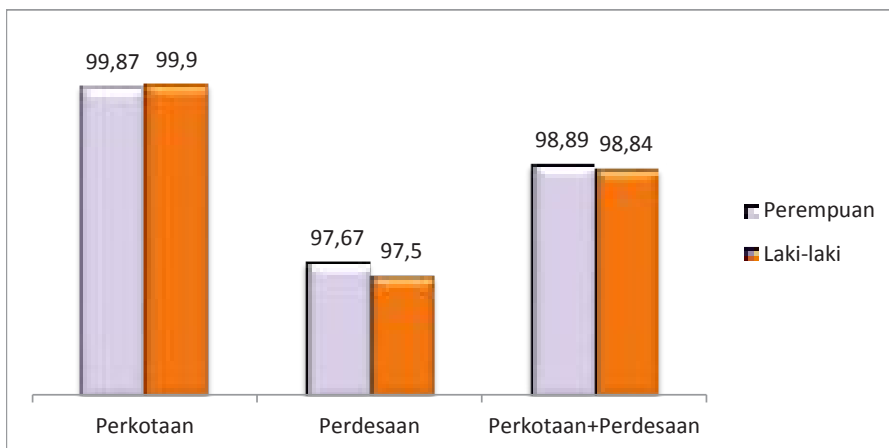
Belitung. Untuk persentase rumah tangga dengan jenis dinding terluas berbentuk tembok merupakan yang terbanyak dari kepala rumah tangga perempuan di perkotaan dengan jumlah sebanyak 86,7 persen. Jenis dinding tembok juga menjadi jenis dinding paling banyak di wilayah perdesaan dengan kepala rumah tangga perempuan, yaitu sebesar 60,4 persen. (Tabel 6.8)

Tabel 6.8 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas, 2019

Daerah Tempat Tinggal/ Jenis kelamin	Jenis dinding terluas				Total
	Tembok	Kayu/Papan	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Perempuan	86,7	9	0,2	4,16	100,00
Laki-laki	87,8	8,4	0,2	3,63	100,00
Perdesaan					
Perempuan	60,4	27,2	1,6	10,84	100,00
Laki-laki	63,4	27,1	1,1	8,37	100,00
Perkotaan +Perdesaan					
Perempuan	74,9	17,1	0,8	7,15	100,00
Laki-laki	77,1	16,6	0,6	5,71	100,00

Sumber: BPS RI, Susenas 2019

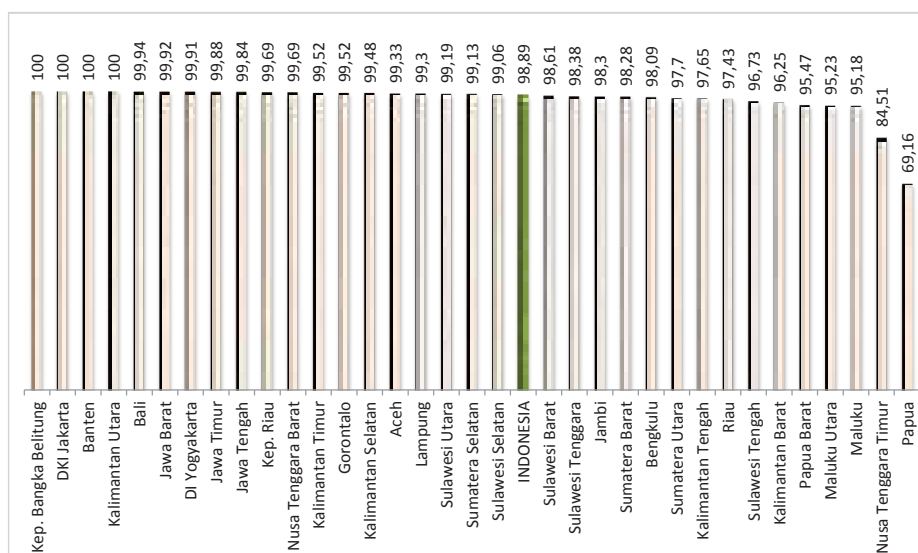
Hampir seluruh rumah tangga di perkotaan sudah menggunakan listrik, baik rumah tangga yang dikepalai perempuan maupun laki-laki. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mencapai 99,87 persen pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dan sebanyak 99,9 persen pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Di perdesaan, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sedikit lebih rendah dibandingkan di perkotaan, yaitu rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan sebesar 97,67 persen dan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki sebesar 97,5 persen (Gambar 6.13).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.13 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019

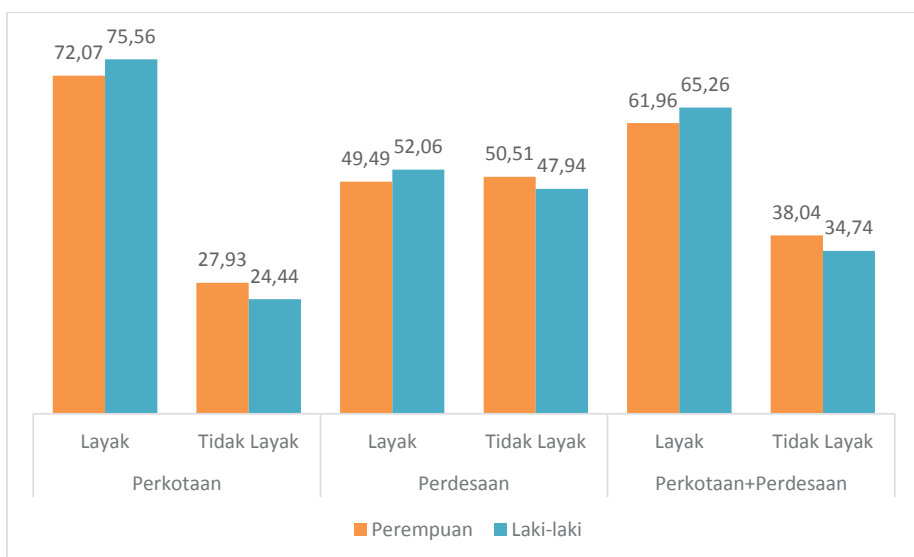
Secara total, 98,89 persen rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan sudah menggunakan listrik. Terdapat empat provinsi yang persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan sudah menggunakan listrik mencapai 100 persen yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Utara. Sedangkan Papua merupakan provinsi dengan persentase yang paling rendah yaitu 69,16 persen rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan listrik. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase terendah kedua yaitu 84,91 persen setelah Papua. Selain kedua provinsi terendah tersebut, rumah tangga yang dikepalai perempuan yang menggunakan listrik telah merata di seluruh provinsi yang ada dengan capaian lebih dari 95 persen (Gambar 6.14).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.14. Persentase Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Menggunakan Listrik menurut Provinsi, 2019

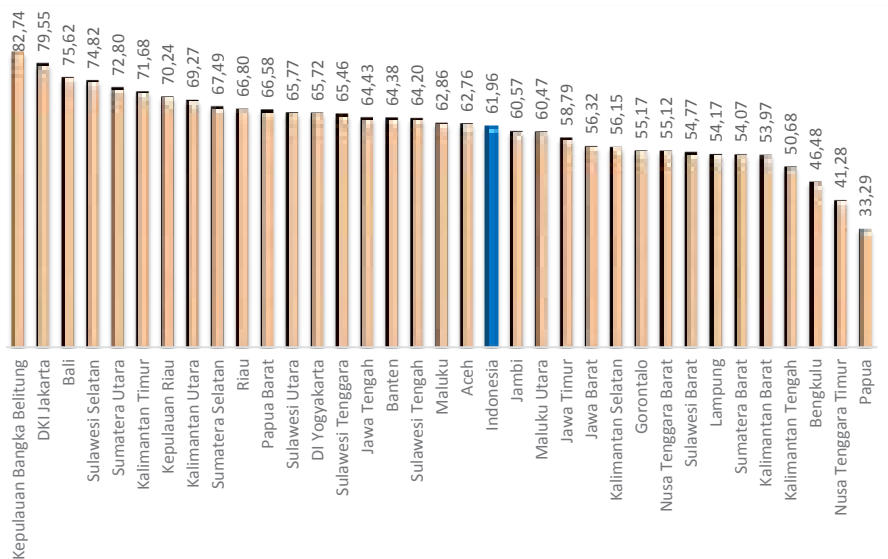
Secara umum, persentase rumah tangga di Indonesia dengan kepala rumah tangga perempuan yang mempunyai sanitasi layak sebesar 61,96 persen. Persentase ini sedikit lebih rendah dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki yang mencapai 65,26 persen. Di perdesaan, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang mempunyai sanitasi tidak layak sebesar 50,51 persen, atau sedikit lebih banyak dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki yang hanya mencapai 47,94 persen (Gambar 6.15).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.15 Persentase Rumah Tangga menurut jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Jenis Sanitasi, Tahun 2019.

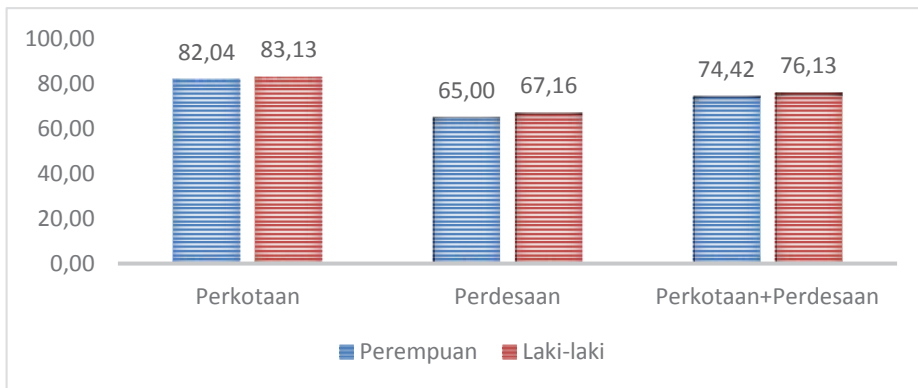
Untuk distribusi berdasarkan provinsi menunjukkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan dan mempunyai sanitasi layak tertinggi terdapat di Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 82,74 persen. Dua provinsi lain yang memiliki sanitasi layak pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan terdapat di DKI Jakarta sebanyak 79,55 persen dan di wilayah Bali dengan persentase sebanyak 75,62 persen. Tiga provinsi dengan kondisi mempunyai sanitasi layak terendah terdapat di Provinsi Papua yang mencapai 33,29 persen, Nusa Tenggara Timur sebanyak 41,28 persen dan Bengkulu sebesar 46,48 persen (Gambar 6.16).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.16 Persentase Rumah Tangga dengan kepala Rumah Tangga Perempuan yang mempunyai Sanitasi Layak, Tahun 2019

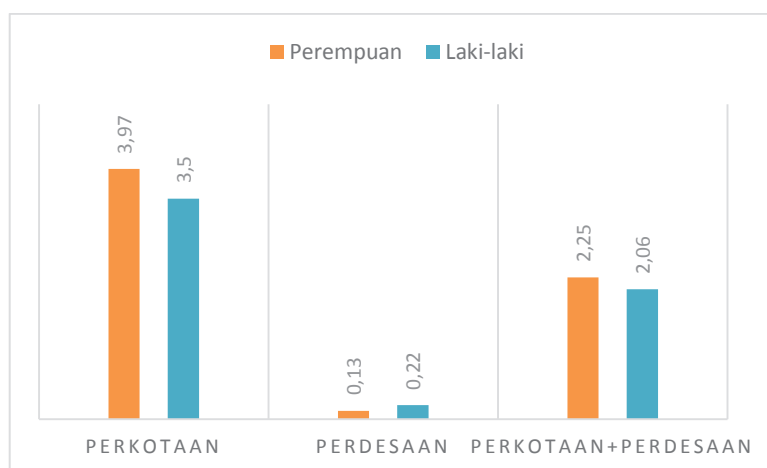
Selain situasi kepemilikan terhadap sanitasi layak di atas, Gambar 6.17 menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih. Di tahun 2019, masih terlihat kesenjangan yang signifikan pada penggunaan air minum bersih pada rumah tangga di wilayah perdesaan. Di perkotaan, terdapat 82,59 persen rumah tangga yang telah menggunakan air minum bersih, sementara di perdesaan baru mencapai 66,08 persen. Informasi ini menunjukkan resiko ketahanan kesehatan pada rumah tangga di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, baik pada rumah tangga yang dikepalai perempuan maupun laki-laki. Secara spesifik berdasarkan jenis kelamin, penggunaan air bersih pada rumah tangga yang dikepalai perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki, baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan perbandingan 76,13 persen berbanding dengan 74,42 persen (Gambar 6.17).



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.17. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019

Tahun 2019, tidak banyak rumah tangga yang memiliki telepon rumah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Secara total, di perkotaan, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang memiliki telepon rumah hanya 3,97 persen sedikit lebih banyak dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki yaitu sebanyak 3,5 persen. Di perdesaan, persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang mempunyai telepon rumah hanya 0,13 persen (Gambar 6.18). Sedikitnya rumah tangga yang memiliki telepon rumah berkorelasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi ini menawarkan banyak inovasi yang lebih komprehensif dalam mengakses informasi dan komunikasi. Kehadiran telepon selular sebagai alternatif komunikasi dan informasi yang terjangkau menjadi pilihan yang tampak mampu menggeser penggunaan telepon rumah. Hal ini dibuktikan dengan persentase kepemilikan telepon rumah yang sangat rendah pada rumah tangga, baik yang dikepalai perempuan maupun laki-laki.



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

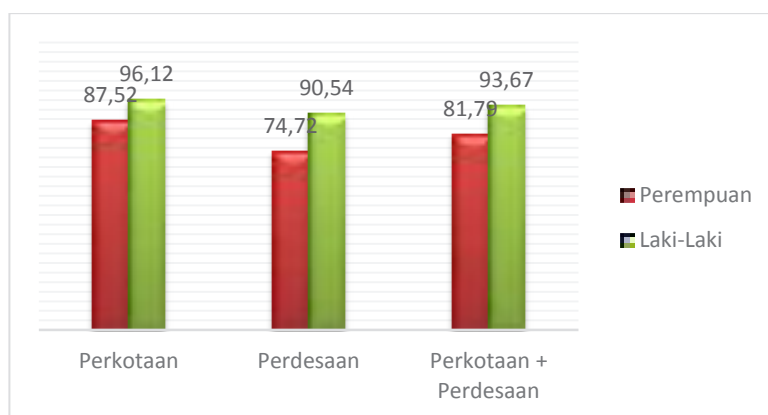
Gambar 6.18 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2019

Sejalan dengan rendahnya kepemilikan telepon rumah, kondisi sebaliknya terjadi pada banyaknya rumah tangga yang memiliki telepon seluler atau *handphone*. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler sangat signifikan berbeda dengan rumah tangga yang memiliki telepon rumah. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, rumah tangga yang dikepalai perempuan dan laki-laki sama-sama mayoritas memiliki telepon seluler. Meskipun dari segi jumlah, rumah tangga yang dikepalai laki-laki memiliki telepon seluler lebih banyak dibandingkan rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan perbandingan jumlah sebesar 11,88 persen, atau 81,79 persen berbanding 93,67 persen (Gambar 6.18).

Penggunaan telepon selular yang hampir merata di perkotaan dan perdesaan ini juga terlihat di wilayah perbatasan. Di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, misalnya, menunjukkan bahwa telepon selular sudah dominan digunakan sebagai alat komunikasi bagi masyarakat. Telepon selular yang berjenis *smartphone* dengan beragam aplikasi juga telah digunakan, meskipun masih dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat (Ginting, 2019).

Hal ini menunjukkan pilihan terhadap telepon selular sebagai media komunikasi lebih dipilih dibandingkan telepon rumah. Meskipun kesenjangan persentase kepemilikan telepon selular di wilayah perkotaan dan perdesaan masih signifikan terlihat, namun telah menunjukkan akses pada jaringan internet sudah mulai terjangkau baik pada rumah tangga yang dikepalai perempuan maupun laki-laki.

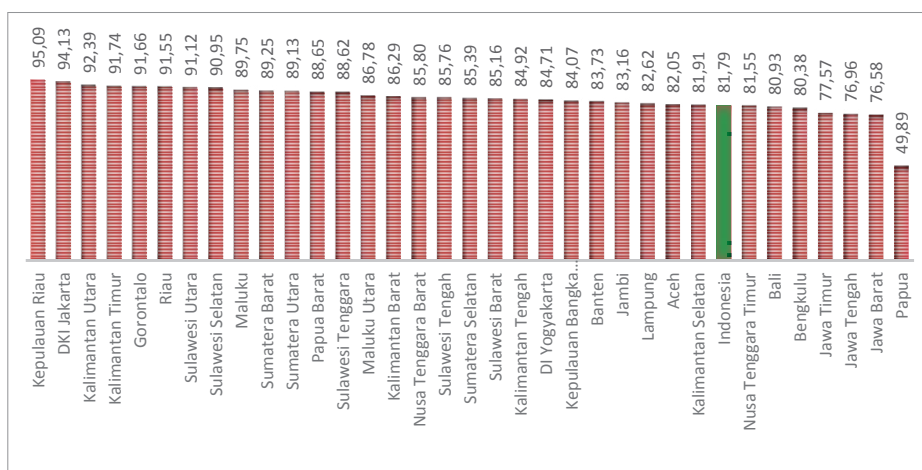
Dibandingkan antara kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki, kesenjangan kepemilikan telepon selular lebih besar terjadi di perdesaan. Di perdesaan, rumah tangga yang dikepalai laki-laki memiliki telepon selular sebanyak 90,54 persen, lebih tinggi ketimbang kepemilikan telepon selular pada rumah tangga yang dikepalai perempuan yang hanya mencapai 74,73 persen. Kesenjangan yang lebih kecil terjadi di perkotaan, dimana rumah tangga perempuan yang memiliki telepon selular sebanyak 87,52 persen lebih rendah, dengan perbandingan 96,12 persen. Jika dilihat pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, antara perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan kesenjangan dengan selisih persentase pada kepemilikan telepon selular sebesar 12,8 persen. (Gambar 6.19)



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.19 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler/ Handphone menurut Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2019

Secara nasional, Kepulauan Riau merupakan provinsi yang rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan paling banyak memiliki telepon genggam yaitu 95,09 persen. Selain Kepulauan Riau, terdapat sembilan provinsi dengan kepala rumah tangga perempuan yang memiliki telepon selular lebih dari 90 persen, di antaranya DKI Jakarta (94,13 persen), Kalimantan Utara (92,39 persen), Kalimantan Timur (91,74 persen) dan Gorontalo (91,66 persen). Provinsi dengan kepemilikan telepon selular pada rumah tangga yang dikepalai perempuan paling sedikit terjadi di Papua dengan capaian sebanyak 49,89 persen (Gambar 6.20). Persentase yang dicapai Papua jauh lebih rendah dibandingkan provinsi dengan persentase terendah lainnya yang sudah mencapai 76,58 persen, yaitu di Jawa Barat.

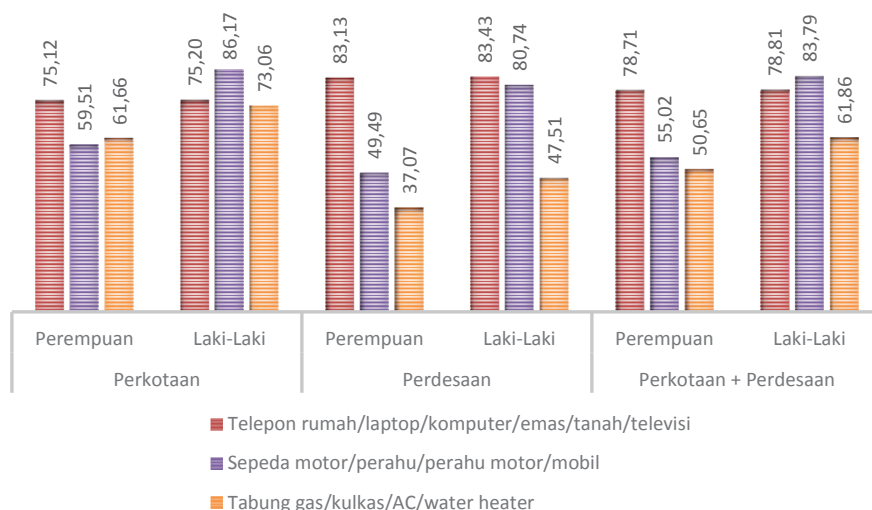


Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.20 Persentase Rumah Tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang Memiliki Telepon Seluler/Handphone menurut provinsi Tahun 2019

Persentase kepemilikan telepon selular pada rumah tangga yang dikepalai perempuan di wilayah Jawa, yaitu Jawa Timur (77,57 persen), Jawa Tengah (79,96 persen) dan Jawa Barat (76,58 persen) berada pada persentase rendah dibawah rata-rata Indonesia, yaitu 81,79 persen. Hal ini merefleksikan kepemilikan telepon selular tidak selalu bergantung pada akses

dan layanan jaringan internet, karena di wilayah Jawa yang dinilai memiliki jaringan internet baik, ternyata tidak memiliki persentase kepemilikan telepon selular di atas rata-rata nasional.



Sumber: BPS RI, Susenas 2019

Gambar 6.21. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019

Masih terdapat kesenjangan yang signifikan pada kepemilikan aset rumah tangga pada rumah tangga yang dikepalai perempuan dan laki-laki. Kesenjangan ini terjadi pada kepemilikan di dua kelompok jenis aset rumah tangga yang diidentifikasi. Kesenjangan yang cukup signifikan juga terjadi pada kepemilikan aset jenis sepeda motor, perahu, perahu motor, dan mobil. Persentase perempuan kepala rumah tangga yang memiliki aset kendaraan bermotor lebih rendah dibandingkan laki-laki kepala rumah tangga dengan selisih sebesar 28,77 persen atau 83,79 persen berbanding 55,02 persen. Kesenjangan yang sama juga terjadi pada kepemilikan terhadap aset sejenis tabung gas, kulkas, AC, dan *water heater*. Antara rumah tangga yang dikepalai perempuan dan laki-laki terlihat lebih tinggi laki-laki dengan selisih kesenjangan sebesar 11,04 persen atau 61,68 persen berbanding 50,65 persen. Kesenjangan ini juga

terlihat di perkotaan dan perdesaan, dengan kondisi perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Pada kepemilikan aset jenis telepon rumah, laptop, computer, emas, televisi dan tanah, antara rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan laki-laki tidak terlihat kesenjangan yang signifikan. Baik di perkotaan maupun perdesaan, kepemilikan aset pada kategori ini hampir sama dimiliki oleh kedua rumah tangga, yaitu rumah tangga yang dikepalai perempuan maupun laki-laki (Gambar 6.21).

BAB VII PEREMPUAN DAN KEKERASAN

A. Latar Belakang

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak asasi yang sama. Sebagai warga negara, perempuan juga berhak hidup tanpa dihantui rasa takut karena kerentanannya menjadi korban kekerasan. Rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang sejalan dengan prinsip dasar dari konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan wujud nyata pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan.

Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya, terutama perempuan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam menguatkan komitmen ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM sebagai wujud nyata penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/*Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan sejumlah instrumen HAM lain, seperti hak anak, hak disabilitas, dan hak perempuan. Selain itu, sejumlah kebijakan dan Undang-undang telah disahkan oleh pemerintah untuk pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Upaya menjamin perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindakan diskriminasi ini, merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan pemerintah yang sejalan dengan tujuan ke-16 dari SDG's. Dalam tujuan ini, harapan yang ingin dicapai adalah **mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level**. Di dalam tujuan ke-16 ini, terdapat sebelas target utama yang menjadi prioritas untuk secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun, termasuk mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Kehadiran negara untuk implementasi perlindungan hak perempuan ini dikuatkan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA Kemen PPPA). Sebagai Lembaga negara yang bersifat independen, Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 ini, melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan (<https://www.komnasperempuan.go.id/>)

Sejalan dengan kepentingan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pada lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah diamanahkan Presiden RI. Lima (5) isu prioritas KPPPA Kemen PPPA dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah 1)

peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) penurunan pekerja anak dan 5) pencegahan perkawinan anak. Sebagai Langkah kongkrit, Kemen PPPA telah menyediakan sistem informasi berbasis online untuk memfasilitasi upaya perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menjadi pangkalan data pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem ini mengkompilasi pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendata bentuk-bentuk pelayanan yang sudah diberikan kepada korban, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (www.kemenpppa.go.id). Melalui kekuatan hukum dan sistem perlindungan yang terpadu, harapan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi atau dihentikan menuju penghormatan hak asasi perempuan.

B. Definisi Konseptual

1. Kekerasan

Dalam pasal 1 Undang-undang PTPPO, kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan termasuk salah satu bentuk kekerasan. Di dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018** Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ancaman kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat

menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dapat berdasarkan jenis, tempat kejadian, dan hubungan pelaku-korban. Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Akan tetapi, dalam undang-undang yang lain dijumpai kategori jenis kekerasan selain empat varian tersebut, yaitu eksploitasi, eksploitasi seksual, dan bentuk kekerasan lainnya, seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Berdasarkan tempat kejadian, kekerasan dapat dibagi dalam dua tempat kejadian, yaitu di dalam rumah tangga dan di ruang publik. Kekerasan di ruang publik bisa terjadi di sekolah, kampus, rumah sakit, tempat perbelanjaan, terminal, pasar, kantor, dan lainnya.

Praktik kekerasan selalu melibatkan minimal dua orang, dimana satu menjadi korban dan satu menjadi pelaku, meskipun dimungkinkan pelaku atau korban berjumlah lebih dari satu. Hubungan antara pelaku dan korban dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu hubungan dalam relasi perkawinan (suami dan istri), hubungan keluarga (orang tua-anak, saudara, paman-ponakan, nenek/kakek-cucu, menantu-mertua, dan sebagainya), hubungan personal (pacar, sahabat, teman), dan hubungan lain karena pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan atau lainnya.

2. Jenis Kekerasan

Terdapat setidaknya 3 undang-undang yang dapat dirujuk dalam mengkategorikan jenis kekerasan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), **Undang-undang** Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan **Tindak Pidana Perdagangan Orang**, dan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berikut ini jenis-jenis kekerasan dan penjelasannya:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT);
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT);
- c. Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang terkait (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT).
 - 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (Pasal 285 KUHP).
 - 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP).
- d. Penelantaran adalah perbuatan yang terkait namun tidak terbatas pada penjelasan berikut:
 - 1) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).

- 2) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).
 - 3) tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).
- e. Eksploitasi adalah perbuatan yang meliputi namun tidak terbatas pada tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (pasal 1 UU PTPPO)
- f. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 UU PTPPO dan Pasal 4 UU Pornografi).
- g. Kekerasan lainnya, yaitu perbuatan yang meliputi tapi tidak terbatas pada hal berikut ini:
- 1) ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut

atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 UU PTPPO).

- 2) pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/ korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 mendefinisikan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU ini menggunakan istilah 'penghapusan' dengan maksud bahwa negara berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melakukan penindakan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi para pihak berikut ini:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam UU PKDRT, kekerasan dibagi dalam 4 kategori dengan penjelasan berikut ini:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c. Kekerasan seksual adalah:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam penjelasan tentang penelantaran, termasuk kategori penelantaran adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Perdagangan Orang

Pasal 1 UU PTPPO mendefinisikan Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

UU ini memberikan perlindungan kepada korban, pelapor, dan saksi di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Beberapa perlindungan yang dapat diberikan di antaranya adalah hak menyembunyikan identitas diri, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan korban, didampingi oleh advokat atau pendamping lainnya, dan tidak memaksa kehadirannya di ruang sidang, namun dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan audio visual (pasal 33-36 UU PTPPO).

5. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kekerasan yang dialami perempuan dengan pelaku berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, karena itulah kekerasan terhadap perempuan dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan memosisikan perempuan sebagai korban dengan batas usia minimal 18 tahun ke atas atau perempuan dewasa. Kekerasan yang terjadi atau dialami perempuan (dan laki-laki) yang masih berusia di bawah 18 tahun disebut sebagai kekerasan terhadap anak.

6. Perlindungan

UU PKDRT pasal 1 menyebutkan bahwa Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam upaya memberikan perlindungan, pemerintah telah memberikan layanan kepada korban melalui Komnas Perempuan dan KPPPA Kemen PPPA, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan

membentuk unit layanan dan penanganan kekerasan, seperti *Women Crisis Center* (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain pemerintah, upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan oleh masyarakat secara individu, LSM, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan Lembaga non pemerintah lainnya.

Pencatatan data kasus kekerasan dan jenis layanan yang terkompilasi dalam SIMPFONI PPA dengan penjelasan operasional berikut (Kemen PPPA, 2020):

- a. Penanganan Pengaduan: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- b. Pelayanan Kesehatan: upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Rehabilitasi Sosial: pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- d. Penegakkan Hukum: tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- e. Bantuan Hukum: jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
- f. Pemulangan: upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
- g. Reintegrasi Sosial: upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau

masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

7. Basis Periode dalam Simfoni PPA

Basis periode dalam Simfoni PPA dibagi menjadi dua yaitu menurut tanggal kejadian dan tanggal pelaporan. Pembagian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggal kejadian: Tanggal pada saat korban mengalami kekerasan
- b. Tanggal pelaporan: Tanggal pada saat korban menyampaikan laporannya kepada unit layanan.

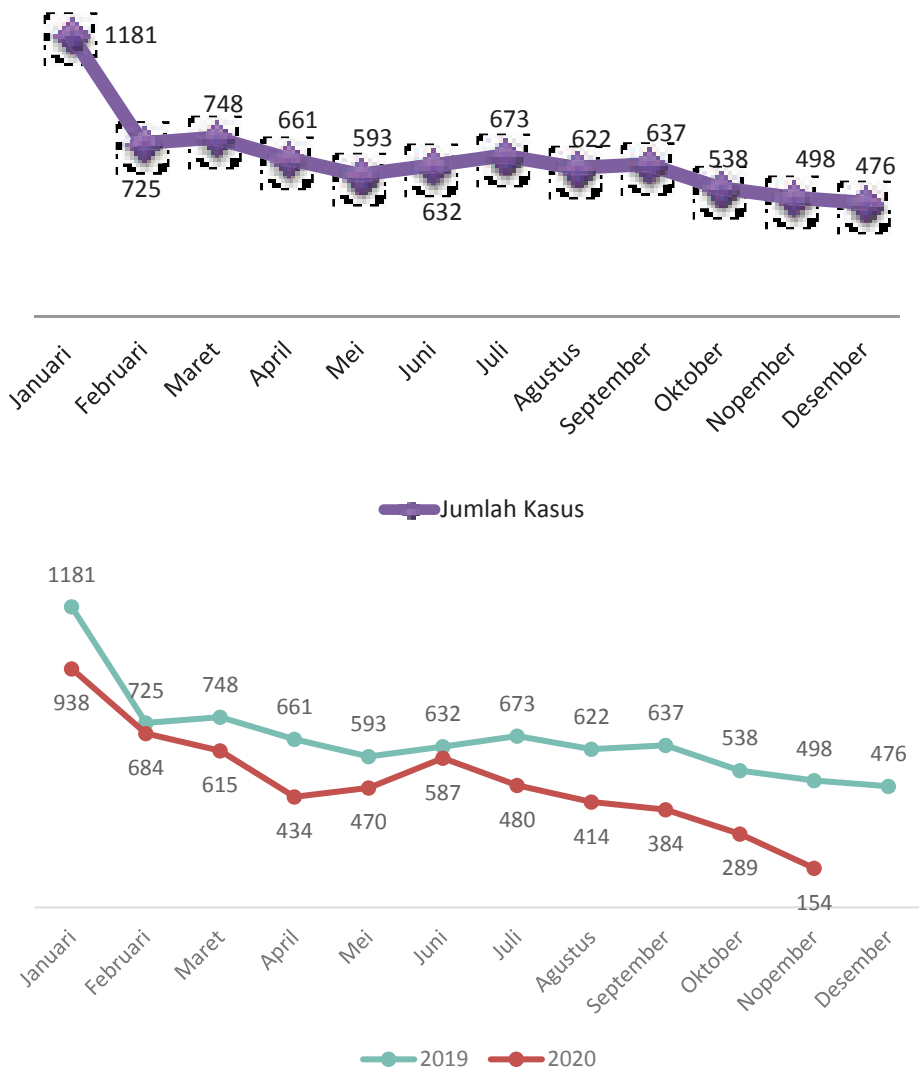
Jumlah data dengan menggunakan basis pelaporan lebih banyak dibandingkan dengan tanggal kejadian. Korban lebih cenderung melaporkan kasusnya tidak pada saat kejadian, dan ada kemungkinan beda tahun untuk pelaporannya. Sehingga tanggal pelaporan ini diperlukan oleh unit layanan untuk memperkirakan anggaran layanan terhadap korban yang dibutuhkan setiap tahunnya.

C. Pembahasan

1. Kekerasan terhadap Perempuan

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa menurut bulan dan tanggal kejadian di tahun 2019 cenderung mengalami penurunan setiap bulannya dibandingkan periode awal tahun, kecuali di bulan Juni dan Juli. Pada Januari 2019 jumlah kasus kekerasan yang terjadi sangat tinggi, yaitu sebesar 1.181 kasus dalam satu bulan. Jumlah kasus kekerasan pada bulan-bulan berikutnya cenderung mengalami penurunan. Pada Desember 2019, kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 476 kasus, sehingga antara Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 terjadi penurunan sebanyak 705 kasus. Jumlah kasus yang terjadi di bulan Januari tersebut merupakan yang

tertinggi di tahun 2019, sedangkan yang terendah terjadi di bulan Desember (Gambar 7.1).

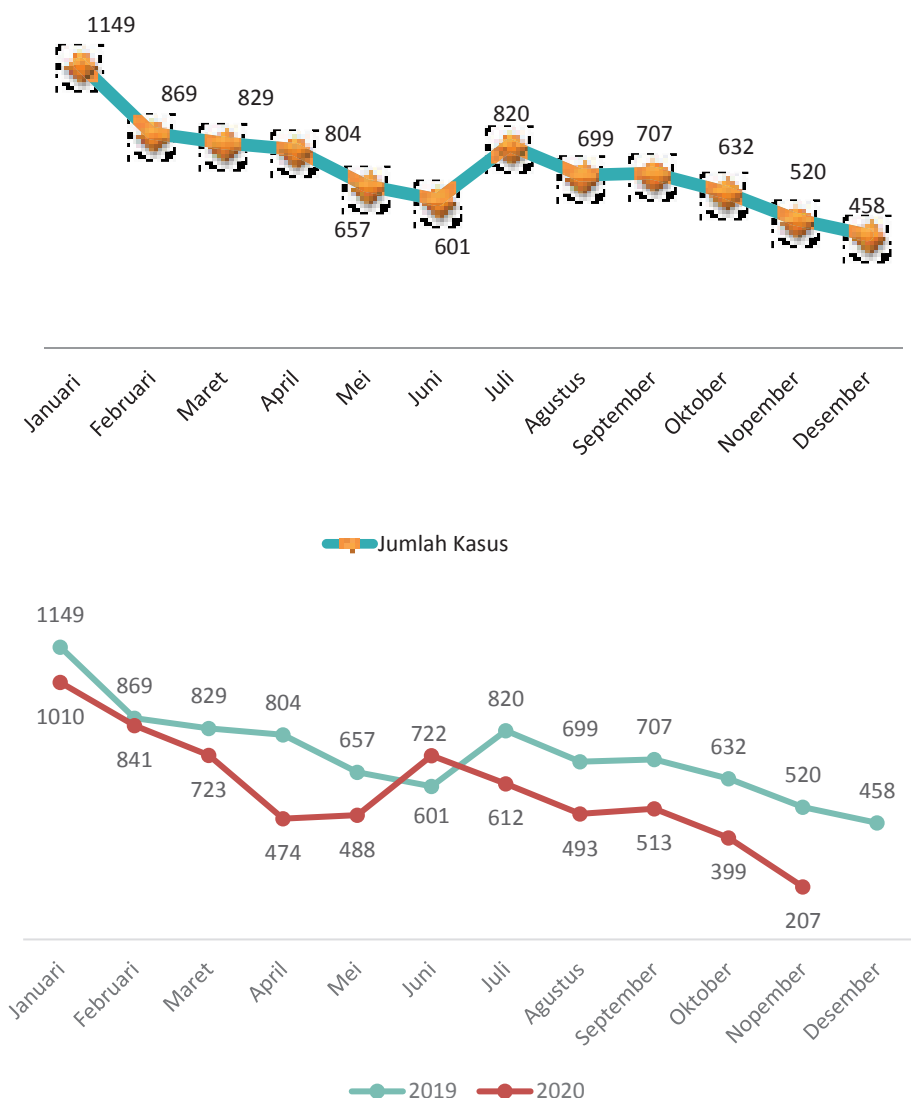


Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa per bulan Menurut Tanggal Kejadian Tahun 2019-November 2020

Berdasarkan tanggal pelaporan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa juga menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada Januari 2019 kasus kekerasan yang dilaporkan sangat tinggi, yaitu sebesar 1.149

kasus. Pada bulan-bulan berikutnya, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan cenderung mengalami penurunan. Pada Desember 2019, kekerasan yang dilaporkan sebanyak 458 kasus, jumlah yang signifikan kecil dibandingkan pelaporan kasus kekerasan di bulan Januari 2019 (Gambar 7.2).



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

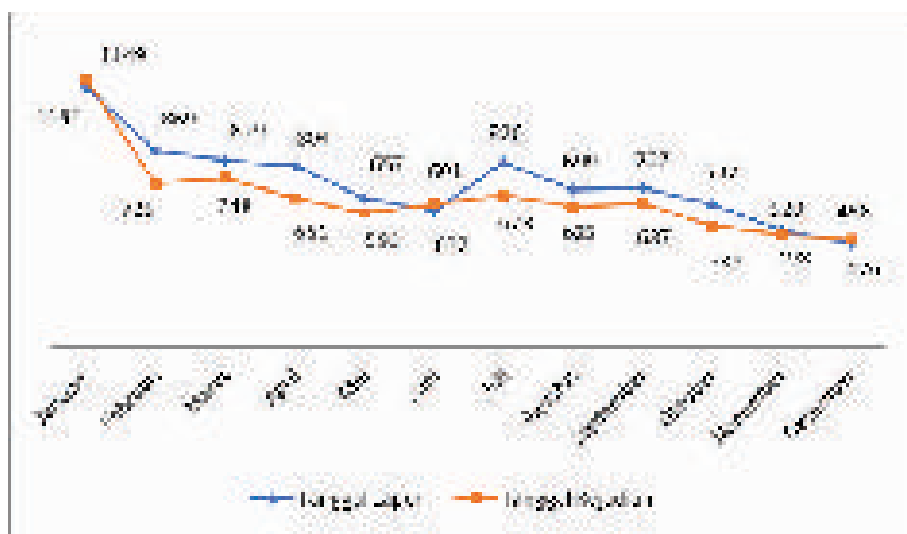
Gambar 7.2. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa per bulan Menurut Tanggal Pelaporan Tahun 2019-Nopember 2020

Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa di tahun 2019 penting direfleksikan. Menurunnya angka kasus yang dilaporkan bukan bermakna realitas kejadian kekerasan telah berkurang. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi angka pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa di tahun 2019, di antaranya karena pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia. Isolasi dan pembatasan ruang gerak masyarakat, termasuk perempuan selama pandemik mengakibatkan aktivitas pendampingan dan layanan korban kekerasan terhadap perempuan tidak semaksimal sebelumnya. Perubahan metode pelaporan dari pelaporan secara langsung menjadi secara dalam jaringan (daring) tidak mudah diadaptasi oleh masyarakat, terutama perempuan korban kekerasan.

Bukti yang menguatkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan penting direfleksikan kembali ini terlihat dari sejumlah lembaga baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah telah melaporkan kenaikan kasus kekerasan secara signifikan selama pandemik berlangsung. Jumlah kekerasan yang dominan merupakan kekerasan yang terjadi di rumah domestik atau pada jenis kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan justru cenderung meningkat selama pandemik. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di sejumlah negara termasuk negara maju. Laporan CNN menunjukkan lonjakan kasus pemerkosaan meningkat tajam di Nigeria dan Afrika Selatan, kasus perempuan hilang meningkat di Peru, dan perempuan dibunuh juga lebih tinggi di Brazil dan Meksiko. Laporan PBB di bulan September juga menginformasikan adanya peningkatan laporan kekerasan dalam rumah tangga di Argentina, Prancis dan Singapura (<https://www.cnnindonesia.com>).

Jumlah kasus yang berbasis pelaporan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus saat kejadian. Gambar 7.3. menunjukkan perbedaan tersebut, dimana kasus

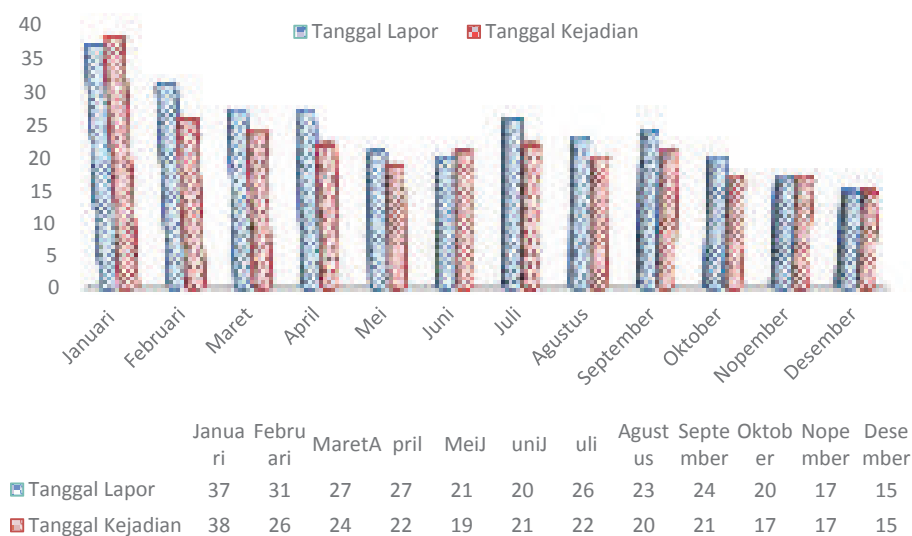
kekerasan terhadap perempuan dewasa yang dilaporkan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan yang terjadi. Hal tersebut karena adanya kecenderungan korban kekerasan baru melaporkan kasusnya ke unit layanan tidak pada saat kejadian.



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.3. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Tanggal Kejadian dan Tanggal Pelaporan Tahun 2019.

Apabila didasarkan pada rata-rata jumlah kasus perhari, maka di tahun 2019 jumlah rata-rata kasus kekerasan perhari menurut tanggal kejadian berjumlah 21-22 kasus perhari, sedangkan menurut tanggal pelaporan sebanyak 24 kasus perhari. Menurut bulan kejadian, maka bulan Januari merupakan bulan dengan rata-rata kasus kekerasan tertinggi, baik menurut tanggal laporan yaitu sebanyak 37 kasus perhari, maupun tanggal kejadian yaitu sebanyak 38 kasus perhari. Sedangkan rata-rata kasus kekerasan terendah terjadi di bulan Desember dengan 15 kasus perhari baik menurut tanggal lapor maupun tanggal kejadian (Gambar 7.4).



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.4. Rata-rata Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Perhari Menurut Tahun Kejadian dan Tahun Pelaporan Tahun 2019.

Berdasarkan jumlah korban kekerasan, data menunjukkan kondisi yang tidak berbeda dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dewasa di tahun 2019 lebih banyak dibandingkan jumlah kasus yang terdata. Hal ini terjadi pada jumlah korban yang didasarkan pada tanggal pelaporan maupun tanggal kejadian. Hal ini terjadi karena dalam satu kasus yang dilaporkan tidak selalu mengakibatkan jumlah korban yang sama. Satu kasus kekerasan bisa melahirkan jumlah korban lebih dari satu. Karena itulah, data jumlah korban selalu akan lebih besar dibandingkan jumlah kasus yang ada, baik yang dilaporkan pada tanggal kejadian maupun pada tanggal pelaporan.

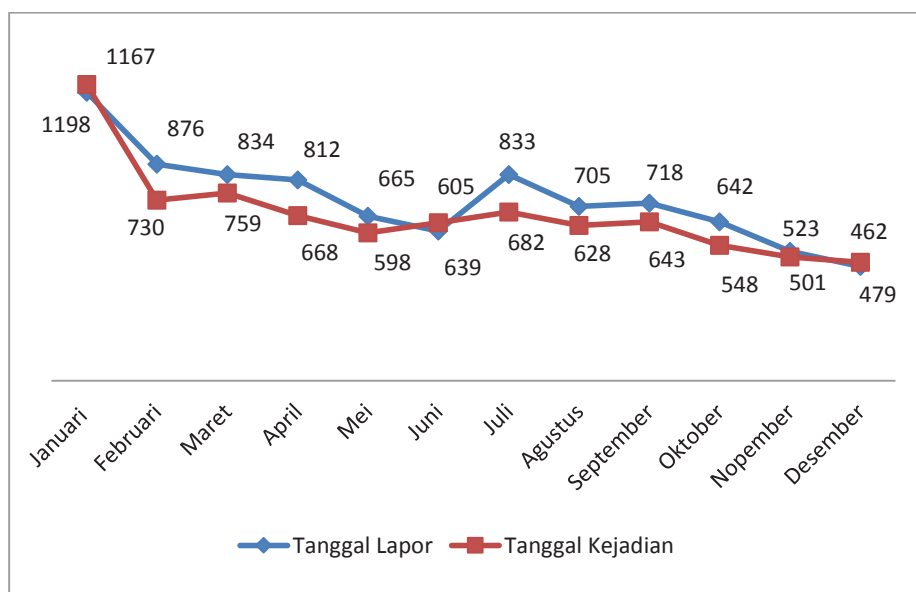
Semua bulan sepanjang tahun 2019 menunjukkan adanya jumlah korban yang lebih banyak dari jumlah kasus kekerasan yang terjadi. Berdasarkan tanggal pelaporan, bulan dengan jumlah korban terbanyak terjadi di bulan Januari

dengan menelan korban sebanyak 1.167 korban. Demikian juga pada jumlah korban terbanyak yang didasarkan pada tanggal kejadian terjadi di bulan Januari dengan jumlah korban sebanyak 1.198 korban. (Gambar 7.5.). Selisih terbesar antara jumlah kasus dengan jumlah korban berdasarkan tanggal lapor terjadi di bulan Januari, Juli, dan September, sedangkan selisih korban dengan kasus kekerasan yang didasarkan pada tanggal kejadian terjadi di bulan Januari, Maret dan Oktober (Tabel 7.1.)

Tabel 7.1. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Tanggal Kejadian dan Tanggal Pelaporan Tahun 2019.

Bulan	Tanggal Lapor			Tanggal Kejadian		
	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Selisih Jumlah kasus dengan Jumlah Korban	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Selisih Jumlah kasus dengan Jumlah Korban
Januari	1149	1167	18	1181	1198	17
Februari	869	876	7	725	730	5
Maret	829	834	5	748	759	11
April	804	812	8	661	668	7
Mei	657	665	8	593	598	5
Juni	601	605	4	632	639	7
Juli	820	833	13	673	682	9
Agustus	699	705	6	622	628	6
September	707	718	11	637	643	6
Oktober	632	642	10	538	548	10
November	520	523	3	498	501	3
Desember	458	462	4	476	479	3

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

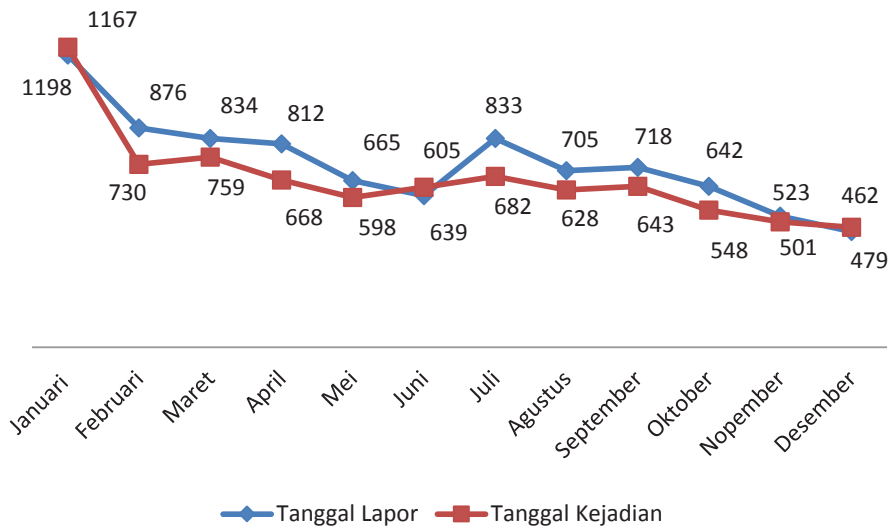


Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.5. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa Menurut Tanggal Kejadian dan Tanggal Pelaporan Tahun 2019.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

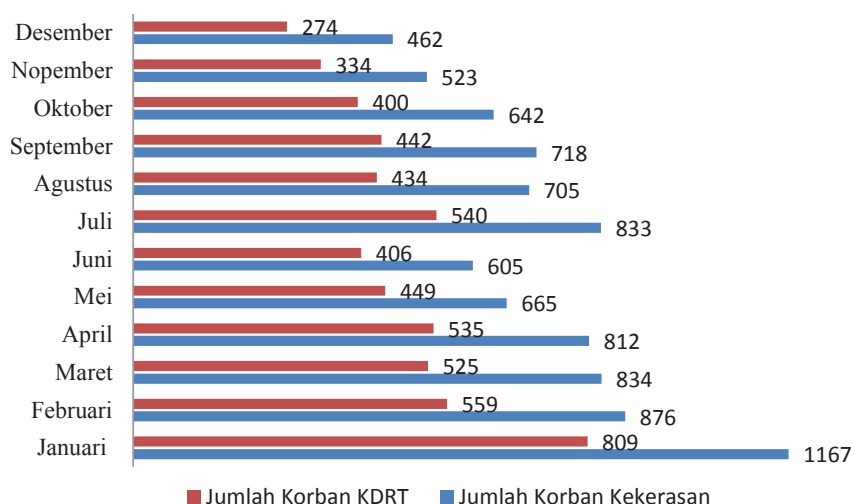
Salah satu tempat kejadian kekerasan terhadap perempuan dewasa terjadi di dalam rumah tangga. Berdasarkan data tahun 2019, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mulai Januari sampai dengan Desember cenderung berkurang jumlahnya. Menurut tanggal kejadian maupun tanggal pelaporan, bulan Januari menempati urutan tertinggi, yaitu 807 korban menurut tanggal kejadian dan 809 korban menurut tanggal pelaporan. Terjadi penurunan jumlah korban mulai Januari sampai dengan Desember, yaitu sebanyak 535 korban menurut tanggal pelaporan dan 512 korban menurut tanggal kejadian (Gambar 7.6). Menurunnya jumlah korban KDRT ini terjadi seiring dengan menurunnya jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan selama tahun 2019.



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

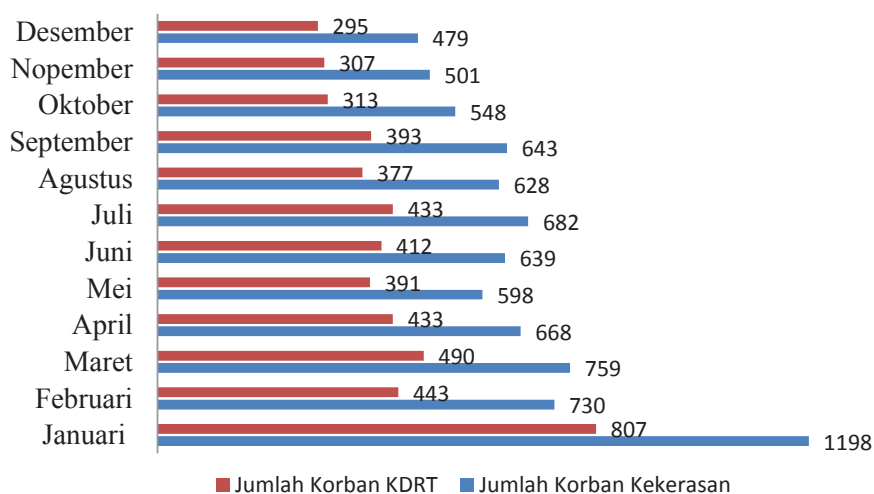
Gambar 7.6. Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Tanggal Pelaporan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019.

Jumlah korban KDRT menempati persentase lebih dari separoh dari jumlah korban kekerasan yang ada. Pada Gambar 7.7 dan Gambar 7.8 menunjukkan jumlah korban KDRT mendominasi jumlah korban kekerasan di sepanjang tahun 2019. Hal ini terlihat pada jumlah korban yang didasarkan pada tanggal pelaporan maupun pada tanggal kejadian. Jumlah korban kekerasan di bulan Januari berdasarkan tanggal laporan sebesar 1.167 jiwa, sedangkan dari jumlah tersebut, yang menjadi korban KDRT sebanyak 809 jiwa, atau mencapai 69,32 persen. Kondisi yang sama terlihat pada bulan-bulan lainnya, baik di bulan Februari hingga bulan Desember.



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.7. Jumlah Korban Kekerasan dan KDRT Menurut Tanggal Pelaporan Tahun 2019.



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.8. Jumlah Korban Kekerasan dan KDRT Menurut Tanggal Kejadian Tahun 2019.

Persentase korban KDRT tertinggi menurut tanggal laporan terjadi di bulan Januari, yaitu sebanyak 69,32 persen. Bulan lain yang menelan menunjukkan korban KDRT paling tinggi

setelah Januari terjadi pada bulan Mei sebesar 67,52 persen dan Bulan Juni sebanyak 67,11 persen. Sedangkan menurut tanggal kejadian, persentase korban KDRT tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 67,36 persen, kemudian Mei sebesar 65,38 persen dan April sebanyak 64,82 persen (Tabel 7.2.)

Tabel 7.2. Persentase Korban KDRT Menurut Tanggal Laporan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019.

Bulan	Tanggal Laporan				Tanggal Kejadian			
	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban KDRT	Persentase Korban KDRT	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban KDRT	Persentase Korban KDRT
Januari	1149	1167	809	69.32	1181	1198	807	67.36
Februari	869	876	559	63.81	725	730	443	60.68
Maret	829	834	525	62.95	748	759	490	64.56
April	804	812	535	65.89	661	668	433	64.82
Mei	657	665	449	67.52	593	598	391	65.38
Juni	601	605	406	67.11	632	639	412	64.48
Juli	820	833	540	64.83	673	682	433	63.49
Agustus	699	705	434	61.56	622	628	377	60.03
September	707	718	442	61.56	637	643	393	61.12
Oktober	632	642	400	62.31	538	548	313	57.12
November	520	523	334	63.86	498	501	307	61.28
Desember	458	462	274	59.31	476	479	295	61.59

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

3. Jenis Kekerasan terhadap Perempuan

Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking* dan penelantaran. Jumlah korban dengan jenis kekerasan tersebut menurut tanggal kejadian terlihat pada Tabel 7.3. Hampir semua jenis kekerasan dialami perempuan di setiap bulan sepanjang tahun 2019. Jenis kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling dominan dialami perempuan korban kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 4.864

jiwa. Sedangkan jenis kekerasan yang paling sedikit dialami perempuan korban kekerasan adalah eksploitasi dengan jumlah korban sebanyak 16 jiwa (Tabel 7.3). Jumlah kekerasan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami perempuan ini memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kekerasan yang ada. Hal ini dikarenakan satu orang korban kekerasan memungkinkan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Seorang korban dalam satu kasus yang dialaminya, dapat diidentifikasi dan dicatat sebagai korban kekerasan fisik sekaligus kekerasan seksual dan kekerasan eksploitasi.

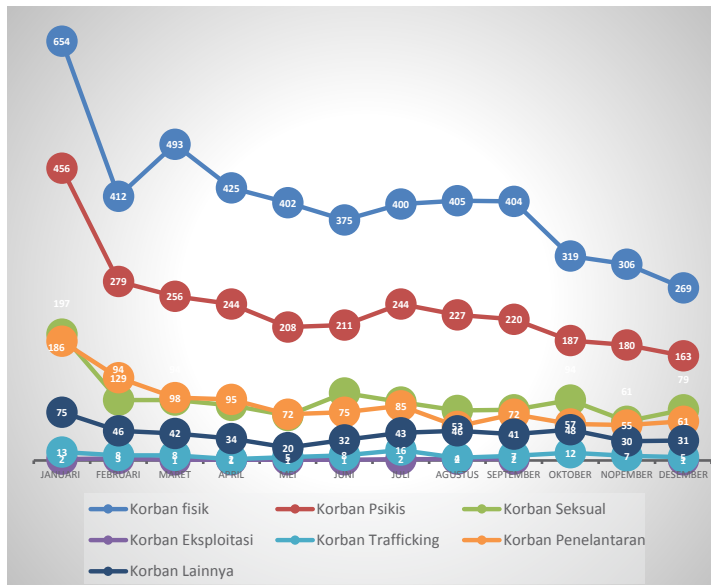
Berdasarkan bulan kejadian, Bulan Januari merupakan bulan dengan jumlah varian kekerasan yang terbanyak sepanjang tahun 2019. Di Bulan Januari, korban fisik sebesar 654 jiwa, korban psikis sebesar 456 jiwa, korban seksual sebesar 197 jiwa, korban penelantaran 186 jiwa dan korban lainnya sebesar 75 jiwa. Sedangkan korban eksploitasi ada 2 jiwa dan korban trafficking 13 jiwa. Jumlah korban kekerasan jenis eksploitasi tertinggi terjadi di bulan Februari sebesar 3 jiwa, sedangkan korban *trafficking* terbanyak terjadi di bulan Juli sebesar 16 jiwa (Tabel 7.3).

Tabel 7.3. Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019

Bulan	Korban fisik	Korban Psikis	Korban Seksual	Korban Eksploitasi	Korban Trafficking	Korban Penelantaran	Korban Lainnya
Januari	654	456	197	2	13	186	75
Februari	412	279	94	3	8	129	46
Maret	493	256	94	1	8	98	42
April	425	244	86	1	2	95	34
Mei	402	208	70	1	5	72	20
Juni	375	211	105	1	8	75	32
Juli	400	244	91	2	16	85	43
Agustus	405	227	78	2	4	53	46
September	404	220	79	2	7	72	41
Oktober	319	187	94	0	12	57	48
Nopember	306	180	61	0	7	55	30
Desember	269	163	79	1	5	61	31
JUMLAH	4.864	2.875	1.128	16	95	1.038	488

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.9. menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik, yaitu korban dari perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, merupakan korban terbanyak di antara korban kekerasan lainnya. Selama tahun 2019 terdapat korban sebanyak 4.864 jiwa. Korban terbanyak berikutnya adalah korban karena kekerasan psikis, yaitu korban karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dengan jumlah korban sebanyak 2.875 jiwa. Jenis kekerasan dengan jumlah korban yang paling sedikit terjadi pada kategori kekerasan eksploitasi dengan jumlah korban sebanyak 16 jiwa.



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.9. Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019

Sebagaimana data berdasarkan tanggal kejadian, tanggal pelaporan juga menunjukkan jumlah korban kekerasan yang berbasis jenis kekerasan berjumlah lebih banyak dibandingkan jumlah kasus kekerasan yang ada. Jumlah jenis kekerasan

pada perempuan juga menggambarkan situasi yang tidak berbeda dengan jenis kekerasan berdasarkan tanggal kejadian. Perbedaan hanya terjadi pada jumlah korban *trafficking* yang sedikit lebih rendah dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Berdasarkan jumlahnya, korban dengan jumlah tertinggi di tahun 2019 adalah korban kekerasan fisik, psikis dan penelantaran. Perempuan korban kekerasan fisik yang melapor sebanyak 5.158 jiwa, kekerasan psikis 3.415 jiwa dan korban penelantaran sebanyak 1.344 jiwa (Tabel 7.4).

Tabel 7.4. Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan dan Tanggal Pelaporan Tahun 2019.

Bulan	Korban fisik	Korban Psikis	Korban Seksual	Korban Eksploitasi	Korban Trafficking	Korban Penelantaran	Korban Lainnya
Januari	661	467	189	3	10	203	75
Februari	471	359	127	1	6	158	56
Maret	504	303	114	5	6	136	49
April	497	326	128	2	10	110	49
Mei	425	252	69	0	6	96	33
Juni	365	197	94	1	3	88	27
Juli	462	338	122	5	18	143	59
Agustus	436	289	91	2	4	86	44
September	422	259	95	3	4	92	64
Oktober	352	233	94	0	17	83	65
November	311	210	71	0	3	77	37
Desember	252	182	71	0	7	72	32
JUMLAH	5,158	3,415	1,265	22	94	1,344	590

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

4. Layanan Korban Kekerasan

Layanan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dilakukan sesuai kebutuhan korban yang terdiri dari penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi

sosial, pemulangan dan pendampingan. Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan terbanyak selama tahun 2019 terjadi di bulan Januari. Sebanyak 1.561 korban terlayani dengan layanan tertinggi berupa penanganan pengaduan. Pelayanan lanjutan setelah pengaduan dilakukan adalah bantuan hukum diberikan kepada 561 korban, layanan kesehatan kepada 353 korban, layanan pendampingan hukum kepada 109 korban, rehabilitasi social kepada 203 korban, reintegrasi social kepada 31 korban, pemulangan 30 orang dan pendampingan dari tokoh agama diberikan kepada 1 korban (Tabel 7.5). Terjadi perbedaan pada jumlah total layanan dengan jumlah korban kekerasan. Hal ini terjadi karena satu orang korban dapat menerima layanan lebih dari satu jenis, sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan korban. Dengan demikian, satu orang korban memungkinkan mendapat layanan kesehatan, pendampingan hukum dan pemulangan sekaligus dalam satu kasus yang dijumpai.

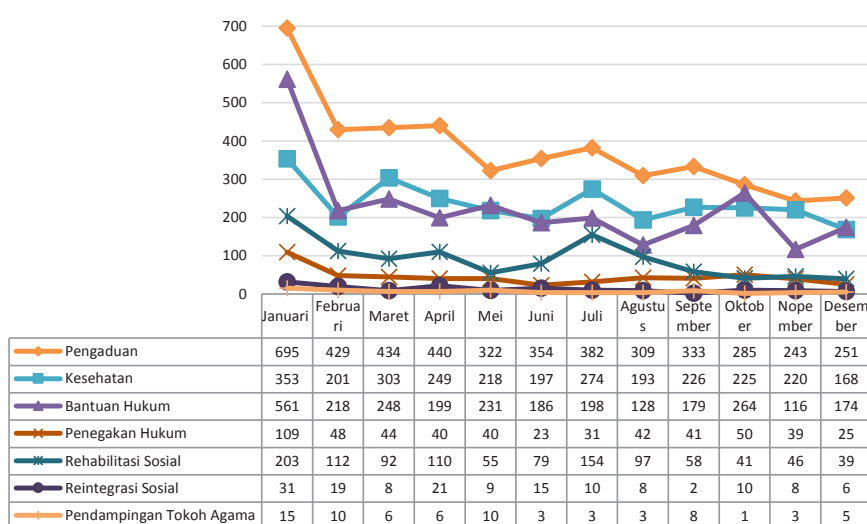
Tabel 7.5. Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian Tahun 2019

Bulan	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
Januari	695	353	561	109	203	31	30	15
Februari	429	201	218	48	112	19	30	10
Maret	434	303	248	44	92	8	7	6
April	440	249	199	40	110	21	7	6
Mei	322	218	231	40	55	9	6	10
Juni	354	197	186	23	79	15	3	3
Juli	382	274	198	31	154	10	13	3
Agustus	309	193	128	42	97	8	6	3
September	333	226	179	41	58	2	8	8
Oktober	285	225	264	50	41	10	10	1
Nopember	243	220	116	39	46	8	3	3
Desember	251	168	174	25	39	6	5	5

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Layanan terhadap perempuan korban kekerasan selama tahun 2019 terbanyak berupa penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum. Jumlah korban yang mendapatkan layanan ini sebesar 4.447 korban untuk

penanganan pengaduan, 2.827 korban untuk pelayanan Kesehatan, dan layanan bantuan hukum diberikan kepada 2.702 korban. Bentuk layanan yang paling sedikit diberikan karena korban yang membutuhkan juga sedikit adalah layanan pendampingan tokoh agama yang diberikan kepada 73 korban (Gambar 7.10). Tingginya layanan berbentuk bantuan hukum dan penegakan hukum pada korban kekerasan merefleksikan kesadaran hukum sudah cukup baik diputuskan korban dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami. Karena itu, penguatan pengetahuan tentang hukum dan hak korban tetap penting dilakukan kepada korban dan kelompok rentan korban kekerasan berbasis gender.

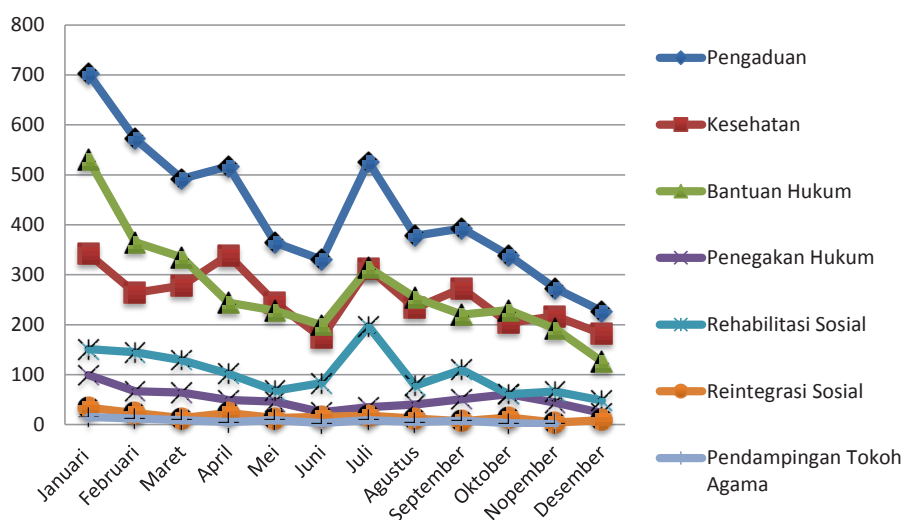


Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.10. Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian Tahun 2019.

Menurut tanggal pelaporan, jumlah korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan terbanyak selama tahun 2019 terjadi di bulan Januari. Korban yang mendapatkan layanan sebanyak 1.900 korban, dengan layanan tertinggi berupa penanganan pengaduan sebanyak 703 korban dan bantuan hukum sebanyak 531 korban. Bulan Desember merupakan bulan dengan jumlah pelayanan paling sedikit yaitu 623 korban (Tabel 7.6). Sedikit

banyaknya layanan berkorelasi dengan jumlah kasus yang dilaporkan dan jenis layanan yang dibutuhkan korban. Semakin banyak jumlah kasus yang dilaporkan, semakin banyak juga layanan yang diberikan. Semakin banyak jenis layanan yang dibutuhkan seorang korban maka semakin banyak jumlah layanan yang difasilitasi.



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.11. Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Pelaporan Tahun 2019.

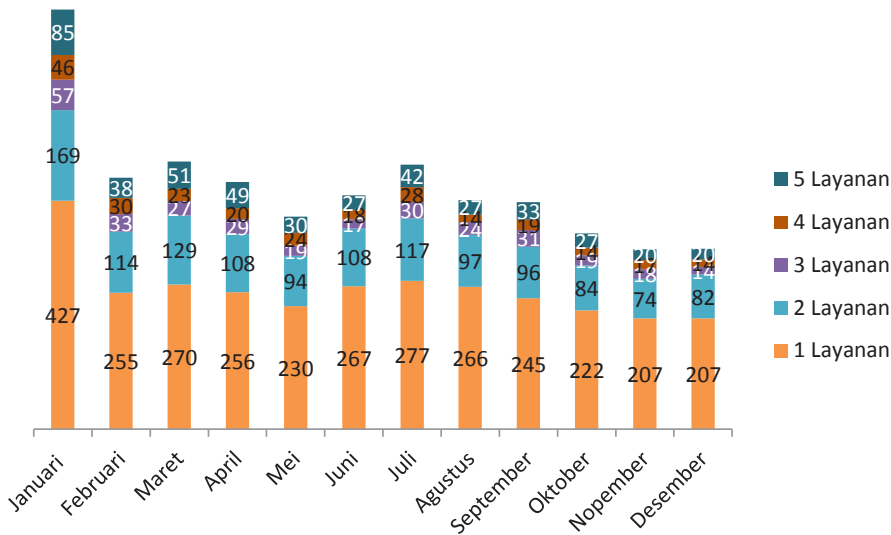
Berdasarkan tanggal kejadian maupun tanggal pelaporan, mayoritas perempuan korban kekerasan selama tahun 2019 mendapat satu jenis layanan. Terdapat 3.189 korban yang mendapat satu jenis layanan berdasarkan tanggal pelaporan atau 3.129 orang berdasarkan tanggal kejadian. Pada bulan Januari, satu jenis layanan diberikan kepada 427 korban. Pada bulan Februari sampai dengan Mei korban yang mendapat satu layanan jumlahnya menurun, akan tetapi mengalami kenaikan di bulan Juni. Sejak bulan Juli sampai Desember, korban yang mendapat satu jenis layanan cenderung menurun. Pada bulan Desember korban yang mendapat satu layanan hanya sebanyak 207 korban (Tabel 7.7).

Tabel 7.6. Jumlah Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian Tahun 2019.

Bulan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	5 Layanan
Januari	427	169	57	46	85
Februari	255	114	33	30	38
Maret	270	129	27	23	51
April	256	108	29	20	49
Mei	230	94	19	24	30
Juni	267	108	17	18	27
Juli	277	117	30	28	42
Agustus	266	97	24	14	27
September	245	96	31	19	33
Oktober	222	84	19	14	27
Nopember	207	74	18	17	20
Desember	207	82	14	14	20
JUMLAH	3,129	1,272	318	267	449

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

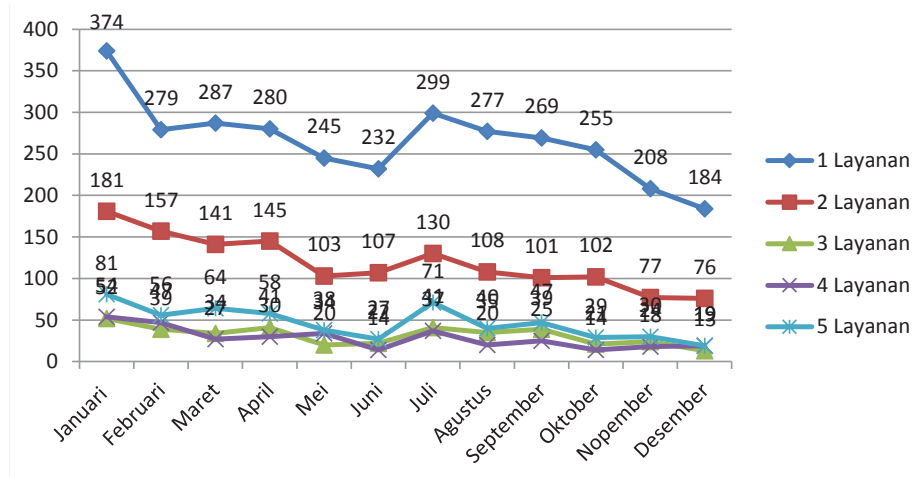
Meskipun mayoritas korban mendapat satu jenis layanan, namun ternyata terdapat korban yang mendapatkan layanan hingga mencapai 5 jenis layanan. Jumlah korban yang mendapat layanan hingga mencapai 5 jenis layanan terjadi di seluruh bulan sepanjang tahun 2019. Dibandingkan dengan korban yang mendapatkan 3 atau 4 layanan, korban yang mendapat 5 jenis layanan berjumlah lebih banyak dibandingkan korban yang mendapat 3 atau 4 layanan. Selama tahun 2019, korban yang mendapat 5 layanan mencapai jumlah 449 korban, sementara korban yang mendapat 3 jenis layanan sebanyak 318 korban dan yang mendapat 4 jenis layanan sebanyak 267 korban (Gambar 7.12)



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.12. Jumlah Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Kejadian Tahun 2019.

Berdasarkan tanggal pelaporan, banyaknya layanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan menunjukkan kecenderungan yang sama dengan banyaknya layanan yang diberikan berdasarkan tanggal kejadian. Sebagaimana layanan yang diterima korban berdasarkan tanggal kejadian, mayoritas perempuan korban kekerasan mendapatkan satu layanan dan layanan paling sedikit diterima korban dengan 4 jenis layanan (Gambar 7.13).



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA (diolah 3 Desember 2020)

Gambar 7.13. Jumlah Layanan Korban Kekerasan Menurut Tanggal Pelaporan Tahun 2019.

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL PROFIL PEREMPUAN INDONESIA 2019

A. Data Kependudukan

Tabel 1. Persentase Penduduk Perkotaan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	51.01%	48.99%	104.11%
Sumatera Utara	50.52%	49.48%	102.12%
Sumatera Barat	50.42%	49.58%	101.68%
Riau	51.93%	48.07%	108.01%
Jambi	51.11%	48.89%	104.53%
Sumatera Selatan	50.96%	49.04%	103.90%
Bengkulu	51.55%	48.45%	106.39%
Lampung	51.39%	48.61%	105.73%
Kep. Babel	52.69%	47.31%	111.36%
Kep. Riau	50.79%	49.21%	103.21%
DKI Jakarta	50.10%	49.90%	100.41%
Jabar	51.53%	48.47%	106.31%
Jateng	50.50%	49.50%	102.04%
DIY	50.27%	49.73%	101.10%
Jatim	50.31%	49.69%	101.27%
Banten	51.57%	48.43%	106.48%
Bali	51.33%	48.67%	105.48%
NTB	49.40%	50.60%	97.62%
NTT	50.40%	49.60%	101.60%

Tabel 1. Persentase Penduduk Perkotaan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalbar	51.31%	48.69%	105.38%
Kalteng	52.94%	47.06%	112.48%
Kalsel	51.29%	48.71%	105.28%
Kaltim	52.57%	47.43%	110.82%
Kalut	51.78%	48.22%	107.36%
Sulut	51.49%	48.51%	106.13%
Sulteng	51.58%	48.42%	106.53%
Sulsel	49.72%	50.28%	98.89%
Sultra	50.92%	49.08%	103.77%
Gorontalo	50.44%	49.56%	101.76%
Sulbar	50.62%	49.38%	102.51%
Maluku	51.25%	48.75%	105.12%
Malut	51.84%	48.16%	107.65%
Papbar	52.82%	47.18%	111.94%
Papua	53.92%	46.08%	117.01%
Indonesia	50.96	49.04	103.90%

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR 2019, BPS

Tabel 2. Persentase Penduduk Perdesaan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	49.39%	50.61%	97.59%
Sumatera Utara	49.19%	50.81%	96.83%
Sumatera Barat	49.28%	50.72%	97.15%
Riau	50.78%	49.22%	103.19%
Jambi	50.89%	49.11%	103.61%
Sumatera Selatan	50.67%	49.33%	102.70%
Bengkulu	50.87%	49.13%	103.53%
Lampung	51.09%	48.91%	104.48%
Kep. Babel	51.09%	48.91%	104.45%
Kep. Riau	52.54%	47.46%	110.70%
DKI Jakarta	-	-	-
Jabar	48.42%	51.58%	93.86%
Jateng	48.63%	51.37%	94.68%
DIY	47.79%	52.21%	91.53%
Jatim	48.29%	51.71%	93.38%
Banten	49.63%	50.37%	98.54%
Bali	48.53%	51.47%	94.28%
NTB	47.78%	52.22%	91.51%
NTT	49.22%	50.78%	96.94%
Kalbar	50.63%	49.37%	102.57%
Kalteng	51.78%	48.22%	107.40%
Kalsel	50.20%	49.80%	100.79%
Kaltim	52.09%	47.91%	108.73%
Kalut	54.41%	45.59%	119.36%
Sulut	50.55%	49.45%	102.21%
Sulteng	50.82%	49.18%	103.34%
Sulsel	48.22%	51.78%	93.14%

Tabel 2. Persentase Penduduk Perdesaan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio
(1)	(5)	(6)	(7)
Sultra	49.83%	50.17%	99.31%
Gorontalo	49.83%	50.17%	99.32%
Sulbar	49.97%	50.03%	99.90%
Maluku	50.02%	49.98%	100.09%
Malut	50.68%	49.32%	102.75%
Papbar	52.29%	47.71%	109.60%
Papua	52.13%	47.87%	108.89%
Indonesia	49.40	50.60	97.65%

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR 2019, BPS

Tabel 3. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	49.92%	50.08%	99.67%
Sumatera Utara	49.92%	50.08%	99.67%
Sumatera Barat	49.81%	50.19%	99.25%
Riau	51.25%	48.75%	105.11%
Jambi	50.96%	49.04%	103.91%
Sumatera Selatan	50.77%	49.23%	103.14%
Bengkulu	51.09%	48.91%	104.46%
Lampung	51.19%	48.81%	104.86%
Kep. Babel	51.97%	48.03%	108.21%
Kep. Riau	50.97%	49.03%	103.94%
DKI Jakarta	50.10%	49.90%	100.41%

Tabel 3. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Sex ratio
(1)	(8)	(9)	(10)
Jabar	50.80%	49.20%	103.25%
Jateng	49.59%	50.41%	98.38%
DIY	49.60%	50.40%	98.42%
Jatim	49.37%	50.63%	97.52%
Banten	51.01%	48.99%	104.14%
Bali	50.46%	49.54%	101.86%
NTB	48.56%	51.44%	94.42%
NTT	49.50%	50.50%	98.03%
Kalbar	50.87%	49.13%	103.55%
Kalteng	52.25%	47.75%	109.41%
Kalsel	50.71%	49.29%	102.89%
Kaltim	52.41%	47.59%	110.13%
Kalut	52.80%	47.20%	111.88%
Sulut	51.04%	48.96%	104.24%
Sulteng	51.05%	48.95%	104.28%
Sulsel	48.87%	51.13%	95.59%
Sultra	50.26%	49.74%	101.03%
Gorontalo	50.08%	49.92%	100.34%
Sulbar	50.13%	49.87%	100.51%
Maluku	50.56%	49.44%	102.25%
Malut	51.01%	48.99%	104.13%
Papbar	52.51%	47.49%	110.58%
Papua	52.64%	47.36%	111.15%
Indonesia	50.27	49.73	101.09%

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR 2019, BPS

Tabel 4. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kelompok Umur	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Perempuan	Laki-Laki	Total	Perempuan	Laki-Laki	Total	Perempuan	Laki-Laki	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0-4	48.11	51.89	100.00	49.55	50.45	100.00	48.76	51.24	100.00
5-9	48.31	51.69	100.00	49.92	50.08	100.00	49.05	50.95	100.00
10-14	47.93	52.07	100.00	49.46	50.54	100.00	48.64	51.36	100.00
15-19	48.58	51.42	100.00	49.04	50.96	100.00	48.78	51.22	100.00
20-24	48.47	51.53	100.00	49.68	50.32	100.00	48.97	51.03	100.00
25-29	48.94	51.06	100.00	50.53	49.47	100.00	49.61	50.39	100.00
30-34	49.19	50.81	100.00	50.92	49.08	100.00	49.92	50.08	100.00
35-39	49.56	50.44	100.00	51.32	48.68	100.00	50.31	49.69	100.00
40-44	48.90	51.10	100.00	50.88	49.12	100.00	49.76	50.24	100.00
45-49	49.30	50.70	100.00	50.82	49.18	100.00	49.97	50.03	100.00
50-54	49.40	50.60	100.00	51.22	48.78	100.00	50.20	49.80	100.00
55-59	49.54	50.46	100.00	51.54	48.46	100.00	50.44	49.56	100.00
60-64	49.29	50.71	100.00	50.99	49.01	100.00	50.08	49.92	100.00
65-69	49.47	50.53	100.00	51.30	48.70	100.00	50.33	49.67	100.00
70-74	53.46	46.54	100.00	54.76	45.24	100.00	54.08	45.92	100.00
75-79	56.43	43.57	100.00	55.85	44.15	100.00	56.15	43.85	100.00
Total	49.04	50.96	100.00	50.60	49.40	100.00	49.73	50.27	100.00

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR 2019, BPS

Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Provinsi, Kelompok Umur Produktif/Tidak Produktif, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Umur 0-14 thn		Umur 15-64 thn		65 Tahun ke Atas	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	49.17%	50.83%	50.22%	49.78%	54.56%	45.44%
Sumatera Utara	48.96%	51.04%	50.21%	49.79%	55.97%	44.03%
Sumatera Barat	48.76%	51.24%	50.28%	49.72%	56.32%	43.68%
Riau	48.98%	51.02%	48.56%	51.44%	50.69%	49.31%
Jambi	49.04%	50.96%	48.93%	51.07%	50.76%	49.24%
Sumatera Selatan	48.98%	51.02%	49.07%	50.93%	52.92%	47.08%
Bengkulu	49.11%	50.89%	48.63%	51.37%	51.85%	48.15%
Lampung	48.53%	51.47%	48.72%	51.28%	51.39%	48.61%
Kep. Babel	49.03%	50.97%	47.44%	52.56%	51.10%	48.90%
Kep. Riau	49.49%	50.51%	48.79%	51.21%	49.87%	50.13%
DKI Jakarta	48.89%	51.11%	50.08%	49.92%	52.52%	47.48%
Jabar	48.63%	51.37%	49.14%	50.86%	52.53%	47.47%
Jateng	48.67%	51.33%	50.50%	49.50%	54.44%	45.56%
DIY	48.49%	51.51%	50.31%	49.69%	55.27%	44.73%
Jatim	48.93%	51.07%	50.63%	49.37%	55.23%	44.77%
Banten	48.73%	51.27%	48.94%	51.06%	51.84%	48.16%
Bali	48.84%	51.16%	49.35%	50.65%	53.58%	46.42%
NTB	48.98%	51.02%	52.35%	47.65%	53.70%	46.30%
NTT	49.37%	50.63%	50.91%	49.09%	53.15%	46.85%
Kalbar	48.78%	51.22%	49.15%	50.85%	51.03%	48.97%
Kalteng	49.28%	50.72%	47.12%	52.88%	48.18%	51.82%
Kalsel	48.81%	51.19%	49.16%	50.84%	54.27%	45.73%
Kaltim	48.63%	51.37%	47.21%	52.79%	47.00%	53.00%
Kalut	48.66%	51.34%	46.70%	53.30%	44.29%	55.71%
Sulut	49.09%	50.91%	48.49%	51.51%	53.21%	46.79%
Sulteng	48.70%	51.30%	48.90%	51.10%	51.16%	48.84%
Sulsel	48.83%	51.17%	51.51%	48.49%	57.37%	42.63%
Sultra	48.85%	51.15%	50.00%	50.00%	52.86%	47.14%
Gorontalo	49.48%	50.52%	49.66%	50.34%	55.71%	44.29%

Tabel 5. Persentase Penduduk menurut Provinsi, Kelompok Umur Produktif/Tidak Produktif, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Umur 0-14 thn		Umur 15-64 thn		65 Tahun ke Atas	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulbar	49.16%	50.84%	49.94%	50.06%	54.14%	45.86%
Maluku	48.74%	51.26%	49.70%	50.30%	51.04%	48.96%
Malut	48.40%	51.60%	49.22%	50.78%	50.13%	49.87%
Papbar	48.83%	51.17%	46.91%	53.09%	46.48%	53.52%
Papua	48.29%	51.71%	47.08%	52.92%	42.23%	57.77%
Indonesia	48.82%	51.18%	49.73%	50.27%	53.74%	46.26%

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR 2019, BPS

Tabel 6. Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	50.58	50.61	54.35	55.72	53.13	53.99
Sumatera Utara	50.26	51.21	61.08	61.99	55.09	55.88
Sumatera Barat	50.50	51.48	58.28	58.63	54.57	55.15
Riau	48.57	47.45	52.55	51.40	50.94	49.76
Jambi	43.42	46.32	47.58	45.20	46.21	45.57
Sumatera Selatan	46.71	45.81	51.52	50.59	49.69	48.76
Bengkulu	46.44	44.03	49.77	48.58	48.66	47.03
Lampung	45.99	47.66	51.25	49.69	49.60	49.05
Kep. Babel	46.65	43.54	48.59	44.73	47.53	44.06
Kep. Riau	50.13	48.55	51.59	51.29	50.27	48.83
DKI Jakarta	40.52	41.57	-	-	40.52	41.57
Jabar	45.93	45.61	49.98	49.89	46.91	46.55
Jateng	46.01	46.67	48.80	49.26	47.38	47.90
DIY	42.86	42.48	51.28	51.13	45.12	44.64
Jatim	42.56	42.71	45.00	44.94	43.71	43.72
Banten	43.05	42.94	52.58	52.45	45.72	45.46
Bali	42.72	41.61	48.08	47.52	44.42	43.33
NTB	48.24	53.62	51.31	57.15	49.84	55.40

Tabel 6. Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NTT	52.14	55.07	67.09	69.91	63.34	66.07
Kalbar	47.88	48.27	50.99	50.98	49.89	50.01
Kalteng	44.47	41.61	48.16	44.00	46.68	43.02
Kalsel	46.00	45.96	49.84	48.49	48.02	47.27
Kaltim	44.50	42.53	48.06	45.35	45.64	43.43
Kalut	50.32	48.12	54.09	49.62	51.72	48.72
Sulut	45.65	42.65	50.79	48.38	48.08	45.31
Sulteng	43.87	45.41	52.65	51.50	49.95	49.61
Sulsel	47.56	49.78	53.28	55.86	50.79	53.12
Sultra	53.51	54.02	61.64	64.29	58.40	60.05
Gorontalo	47.27	45.05	50.19	49.25	48.95	47.43
Sulbar	53.79	55.47	55.36	55.35	54.99	55.38
Maluku	50.73	52.27	63.61	65.61	57.82	59.45
Malut	48.47	49.98	60.19	61.84	56.70	58.19
Papbar	49.13	44.60	53.17	50.56	51.45	47.98
Papua	46.67	41.62	48.34	48.22	47.87	46.23
Indonesia	45.43	45.57	51.24	51.31	47.98	48.00

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR 2019, BPS

Tabel 7. Persentase penduduk berumur 15-49 tahun menurut Provinsi, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	40.29	59.71	54.64	45.36	80.88	19.12	90.42	9.58
Sumatera Utara	42.20	57.80	53.39	46.61	69.66	30.34	85.11	14.89
Sumatera Barat	41.02	58.98	54.13	45.87	68.99	31.01	86.62	13.38
Riau	38.32	61.68	53.37	46.63	65.76	34.24	82.17	17.83
Jambi	37.03	62.97	53.79	46.21	65.66	34.34	76.79	23.21

Tabel 7. Persentase penduduk berumur 15-49 tahun menurut Provinsi, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sumatera Selatan	37.88	62.12	53.26	46.74	56.64	43.36	79.43	20.57
Bengkulu	37.18	62.82	53.19	46.81	56.18	43.82	78.36	21.64
Lampung	35.80	64.20	53.87	46.13	54.90	45.10	71.31	28.69
Kep. Babel	34.38	65.62	52.76	47.24	48.52	51.48	66.71	33.29
Kep. Riau	42.42	57.58	52.12	47.88	49.62	50.38	72.43	27.57
DKI Jakarta	43.56	56.44	52.71	47.29	61.39	38.61	80.65	19.35
Jabar	38.21	61.79	53.75	46.25	57.61	42.39	76.11	23.89
Jateng	37.34	62.66	55.51	44.49	64.47	35.53	81.14	18.86
DIY	40.94	59.06	54.11	45.89	67.02	32.98	85.49	14.51
Jatim	37.64	62.36	55.22	44.78	60.41	39.59	83.69	16.31
Banten	38.33	61.67	53.66	46.34	62.13	37.87	77.70	22.30
Bali	40.00	60.00	52.93	47.07	57.79	42.21	83.26	16.74
NTB	40.55	59.45	55.89	44.11	73.39	26.61	84.08	15.92
NTT	41.82	58.18	55.18	44.82	83.24	16.76	76.04	23.96
Kalbar	37.90	62.10	53.96	46.04	62.60	37.40	76.78	23.22
Kalteng	33.69	66.31	52.86	47.14	45.71	54.29	76.52	23.48
Kalsel	36.40	63.60	53.94	46.06	56.91	43.09	76.97	23.03
Kaltim	36.02	63.98	53.21	46.79	48.22	51.78	71.34	28.66
Kalut	34.33	65.67	52.80	47.20	57.36	42.64	76.65	23.35
Sulut	36.63	63.37	53.45	46.55	60.41	39.59	75.33	24.67
Sulteng	38.99	61.01	53.55	46.45	52.43	47.57	63.30	36.70
Sulsel	43.13	56.87	54.53	45.47	66.83	33.17	84.52	15.48
Sultra	39.83	60.17	54.25	45.75	62.87	37.13	77.03	22.97
Gorontalo	40.47	59.53	52.99	47.01	63.66	36.34	79.94	20.06
Sulbar	40.59	59.41	53.64	46.36	64.83	35.17	79.22	20.78
Maluku	42.25	57.75	52.95	47.05	69.07	30.93	73.09	26.91
Malut	40.40	59.60	52.64	47.36	68.93	31.07	70.32	29.68
Papbar	37.95	62.05	51.47	48.53	64.77	35.23	61.87	38.13
Papua	36.89	63.11	52.49	47.51	52.61	47.39	59.82	40.18
Indonesia	38.87	61.13	54.13	45.87	61.57	38.43	79.33	20.67

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR 2019, BPS

B. Lampiran Bab I. Perempuan dan Pendidikan

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-4	12 044,8	11 560,1	23 604,9
5-9	12 234,2	11 739,7	23 973,8
10-14	11 824,8	11 232,4	23 057,1
15-19	11 406,2	10 888,0	22 294,2
20-24	11 167,6	10 750,0	21 917,6
25-29	10 690,9	10 537,1	21 228,0
30-34	10 320,4	10 261,8	20 582,2
35-39	10 058,2	10 207,6	20 265,8
40-44	9 679,1	9 687,6	19 366,7
45-49	8 876,6	8 817,8	17 694,3
50-54	7 699,2	7 739,0	15 438,1
55-59	6 314,8	6 435,0	12 749,8
60-64	4 895,1	4 923,1	9 818,2
65-69	3 337,5	3 394,3	6 731,8
70-74	2 027,6	2 357,3	4 384,9
75+	2 080,7	2 886,4	4 967,0
Indonesia	134 657,6	133 416,9	268 074,6

Sumber: BPS, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010u20132035/BPS-Statistics Indonesia, 2010 Population Census and Indonesia Population Projection 2010u20132035*

Tabel 1.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	98.98	99.78	96.68	98.65	97.41	99.03
Sumatera Utara	99.43	99.86	97.81	99.26	98.70	99.60
Sumatera Barat	99.28	99.63	98.51	99.35	98.87	99.48
Riau	99.34	99.75	98.56	99.37	98.88	99.53
Jambi	98.31	99.81	96.67	98.85	97.21	99.16
Sumatera Selatan	99.44	99.72	97.59	98.92	98.29	99.22
Bengkulu	98.74	99.63	95.94	98.84	96.86	99.11
Lampung	97.52	99.17	94.90	98.13	95.72	98.45
Kep. Babel	97.81	99.54	96.27	98.28	97.11	98.99
Kep. Riau	99.08	99.49	96.48	96.59	98.82	99.18
DKI Jakarta	99.57	99.91	-	-	99.57	99.91
Jabar	98.22	99.25	96.90	98.76	97.90	99.14
Jateng	93.28	97.36	88.49	95.11	90.90	96.29
DIY	94.76	98.73	85.52	95.45	92.16	97.87
Jatim	93.78	97.30	84.86	92.75	89.53	95.23
Banten	97.08	99.18	94.40	98.02	96.32	98.87
Bali	95.46	98.55	83.75	94.65	91.66	97.38
NTB	86.31	93.77	80.89	90.49	83.49	92.12
NTT	97.25	98.59	90.12	93.32	91.87	94.66
Kalbar	94.46	97.72	87.87	95.26	90.20	96.14
Kalteng	99.12	99.77	98.70	99.38	98.86	99.54
Kalsel	98.84	99.29	96.79	99.17	97.76	99.23
Kaltim	98.94	99.57	98.35	98.67	98.75	99.28
Kalut	96.70	98.57	92.73	95.68	95.22	97.41

Tabel 1.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulut	99.91	99.87	99.75	99.64	99.83	99.76
Sulteng	99.28	99.88	97.27	97.95	97.88	98.54
Sulsel	95.96	97.82	87.04	91.23	90.87	94.16
Sultra	96.48	98.44	90.67	95.81	92.96	96.88
Gorontalo	99.69	99.33	97.79	98.59	98.60	98.91
Sulbar	95.24	96.91	91.58	94.07	92.45	94.75
Maluku	99.64	99.81	99.00	99.24	99.28	99.50
Malut	99.24	99.91	97.90	98.98	98.30	99.26
Papbar	99.32	99.49	94.77	97.97	96.70	98.63
Papua	98.17	99.07	63.06	74.98	73.07	82.36
Indonesia	96.71	98.70	91.34	95.86	94.33	97.48

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perkotaan+ Perdesaan			
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	99.93	100.00	100.00	99.97	99.97	99.98
Sumatera Utara	99.91	99.89	99.82	99.88	99.87	99.89
Sumatera Barat	100.00	99.96	99.85	99.73	99.92	99.85
Riau	99.94	99.95	99.86	99.86	99.89	99.90

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perkotaan+ Perdesaan		
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jambi	99.93	100.00	100.00	99.91	99.98	99.94
Sumatera Selatan	99.87	100.00	99.88	99.93	99.87	99.96
Bengkulu	100.00	99.83	100.00	99.83	100.00	99.83
Lampung	100.00	99.79	100.00	99.83	100.00	99.81
Kep. Babel	100.00	99.82	100.00	99.61	100.00	99.72
Kep. Riau	99.90	100.00	100.00	100.00	99.91	100.00
DKI Jakarta	100.00	99.91	-	-	100.00	99.91
Jabar	99.96	100.00	100.00	99.96	99.97	99.99
Jateng	99.96	99.94	99.90	99.89	99.93	99.92
DIY	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jatim	99.96	99.91	99.90	99.88	99.93	99.90
Banten	100.00	99.95	99.90	100.00	99.97	99.96
Bali	99.95	100.00	99.77	99.88	99.90	99.97
NTB	99.86	99.98	99.95	99.89	99.90	99.94
NTT	99.71	99.65	98.71	98.21	98.99	98.61
Kalbar	99.98	99.91	99.66	99.92	99.77	99.92
Kalteng	99.87	100.00	99.56	99.95	99.69	99.97
Kalsel	100.00	99.74	99.87	99.86	99.93	99.80
Kaltim	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Kalut	99.72	99.89	99.86	99.13	99.77	99.59
Sulut	99.92	100.00	99.88	100.00	99.90	100.00
Sulteng	99.81	100.00	99.90	99.63	99.87	99.75
Sulsel	99.96	99.79	99.44	99.57	99.68	99.68
Sultra	99.87	100.00	99.94	99.88	99.91	99.93
Gorontalo	100.00	99.70	99.89	99.85	99.94	99.79
Sulbar	100.00	99.59	99.74	99.06	99.80	99.20
Maluku	100.00	100.00	99.84	99.79	99.91	99.89

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perkotaan+ Perdesaan		
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Malut	99.97	100.00	99.98	99.86	99.98	99.91
Papbar	100.00	99.61	98.87	99.65	99.34	99.63
Papua	99.79	99.79	83.29	89.24	87.99	92.48
Indonesia	99.95	99.94	99.48	99.56	99.75	99.78

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.4. Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	91.27	98.57	75.83	89.83	80.34	92.56
Sumatera Utara	95.45	99.00	90.19	96.30	92.92	97.77
Sumatera Barat	96.16	97.92	92.37	96.12	94.01	96.92
Riau	92.41	96.99	84.18	93.81	87.39	95.07
Jambi	84.79	98.42	72.54	90.97	76.55	93.40
Sumatera Selatan	96.40	98.19	85.64	92.96	89.59	94.84
Bengkulu	86.23	96.82	68.83	91.35	73.80	92.92
Lampung	83.79	96.39	69.46	88.98	73.58	91.08
Kepulauan Bangka Belitung	85.91	97.27	80.53	91.59	83.55	94.85
Kepulauan Riau	89.52	94.70	84.86	86.07	88.71	93.10

Tabel 1.4. Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	96.74	99.30	-	-	96.74	99.30
Jawa Barat	86.20	94.30	82.11	92.64	84.97	93.84
Jawa Tengah	71.37	87.84	56.45	80.89	63.64	84.34
DI Yogyakarta	74.01	93.98	54.30	85.47	66.85	91.01
Jawa Timur	73.39	88.29	49.20	73.35	61.01	80.99
Banten	78.61	94.81	72.84	90.15	76.53	93.26
Bali	73.69	90.29	47.68	77.53	63.38	85.53
Nusa Tenggara Barat	42.76	66.47	35.04	64.92	38.66	65.66
Nusa Tenggara Timur	86.65	94.56	64.44	78.88	69.06	82.16
Kalimantan Barat	71.51	89.00	48.08	77.98	56.79	82.02
Kalimantan Tengah	89.60	97.42	86.45	93.53	87.65	95.07
Kalimantan Selatan	92.71	96.33	74.13	93.81	82.30	94.97
Kalimantan Timur	90.67	96.95	83.62	88.02	88.23	93.84
Kalimantan Utara	81.24	96.73	50.59	73.97	68.73	87.00
Sulawesi Utara	99.84	99.42	99.15	98.87	99.49	99.14
Sulawesi Tengah	94.19	98.83	82.20	88.73	85.53	91.47
Sulawesi Selatan	81.98	92.28	54.71	69.53	65.13	78.40
Sulawesi Tenggara	74.45	92.26	54.47	81.96	61.21	85.55
Gorontalo	98.64	96.50	88.51	94.93	92.85	95.58
Sulawesi Barat	76.90	86.46	61.57	75.45	65.61	78.19
Maluku	97.51	98.70	97.85	98.19	97.71	98.40

Tabel 1.4. Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maluku Utara	93.05	98.94	81.05	92.17	84.38	93.93
Papua Barat	96.26	96.28	75.19	86.19	84.00	90.31
Papua	96.02	96.96	56.76	64.52	73.70	77.52
Total	81.27	92.50	64.87	83.41	73.40	88.29

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.5. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	12.81	22.88	24.02	25.49	14.50	0.30
Sumatera Utara	11.22	19.67	23.38	35.05	10.46	0.23
Sumatera Barat	18.99	18.27	21.25	26.80	14.25	0.44
Riau	11.57	23.69	25.00	28.73	10.76	0.25
Jambi	14.84	26.69	23.67	24.85	9.67	0.28
Sumatera Selatan	15.77	29.18	21.25	24.92	8.48	0.40
Bengkulu	15.14	23.29	22.12	26.56	12.18	0.71
Lampung	17.96	25.68	27.02	22.18	6.96	0.20
Kepulauan Bangka Belitung	18.47	26.54	20.79	25.47	8.48	0.25
Kepulauan Riau	10.45	15.88	18.50	41.80	13.06	0.32
DKI Jakarta	4.53	15.11	20.80	42.56	16.16	0.84

Tabel 1.5. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa Barat	12.31	31.93	23.92	23.42	8.17	0.25
Jawa Tengah	17.41	30.04	25.49	19.44	7.36	0.26
DI Yogyakarta	12.78	16.92	20.43	33.16	15.42	1.29
Jawa Timur	17.58	29.50	23.75	20.52	8.32	0.34
Banten	13.34	26.76	23.10	27.19	9.30	0.32
Bali	14.62	23.77	20.81	27.24	12.96	0.60
Nusa Tenggara Barat	21.99	21.82	23.04	23.44	9.61	0.09
Nusa Tenggara Timur	20.29	32.19	18.72	19.10	9.45	0.26
Kalimantan Barat	20.79	27.09	21.63	21.80	8.42	0.27
Kalimantan Tengah	14.20	29.04	24.38	21.93	10.15	0.30
Kalimantan Selatan	20.28	26.58	20.44	22.90	9.31	0.48
Kalimantan Timur	9.76	22.89	22.67	32.22	12.17	0.29
Kalimantan Utara	14.57	21.72	23.51	27.28	12.62	0.30
Sulawesi Utara	14.98	17.98	20.64	33.84	12.08	0.49
Sulawesi Tengah	11.54	31.18	23.28	22.83	10.74	0.44
Sulawesi Selatan	16.13	23.65	22.11	24.69	12.76	0.66
Sulawesi Tenggara	15.30	20.74	22.09	26.58	14.55	0.73
Gorontalo	25.84	21.18	17.82	22.98	11.38	0.79
Sulawesi Barat	17.43	28.10	22.72	20.50	10.89	0.37
Maluku	9.21	20.70	22.15	33.26	14.36	0.31
Maluku Utara	14.01	25.22	22.37	26.15	11.90	0.34
Papua Barat	9.96	20.41	23.51	31.32	14.41	0.39
Papua	10.83	26.19	24.89	27.49	10.00	0.61
Total	14.81	26.81	23.33	24.98	9.71	0.36

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.6. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15-59 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6.84	19.57	26.75	36.12	10.08	0.64
Sumatera Utara	6.25	18.18	26.25	40.57	8.41	0.35
Sumatera Barat	13.08	20.04	25.13	31.79	9.13	0.83
Riau	7.15	22.18	25.40	36.19	8.65	0.43
Jambi	7.63	25.71	25.68	31.65	8.77	0.56
Sumatera Selatan	10.98	27.11	23.90	30.06	7.48	0.47
Bengkulu	10.12	23.59	24.11	31.15	10.21	0.82
Lampung	9.75	26.24	28.70	29.11	5.86	0.34
Kepulauan Bangka Belitung	14.61	26.93	19.82	29.73	8.46	0.45
Kepulauan Riau	7.69	14.99	18.80	45.68	12.39	0.44
DKI Jakarta	1.21	9.93	21.70	51.28	14.76	1.13
Jawa Barat	6.69	27.71	24.91	31.51	8.64	0.54
Jawa Tengah	8.26	28.67	27.77	28.08	6.81	0.41
DI Yogyakarta	7.54	12.40	21.46	43.21	13.78	1.61
Jawa Timur	9.59	26.14	25.46	30.10	8.19	0.51
Banten	7.81	22.42	24.61	35.66	8.76	0.73
Bali	6.72	16.08	20.91	40.86	14.61	0.82
Nusa Tenggara Barat	13.80	19.30	25.15	31.77	9.48	0.49
Nusa Tenggara Timur	17.85	27.27	21.13	24.20	9.23	0.33
Kalimantan Barat	16.19	26.01	23.12	26.68	7.65	0.34
Kalimantan Tengah	9.76	26.72	25.35	29.50	8.24	0.44
Kalimantan Selatan	12.01	25.15	22.60	30.51	9.04	0.69
Kalimantan Timur	5.54	16.90	21.82	44.36	10.70	0.68
Kalimantan Utara	8.86	21.90	21.84	35.24	11.06	1.09
Sulawesi Utara	11.74	18.25	23.13	37.14	9.06	0.68

Tabel 1.6. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15-59 Tahun menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tengah	8.97	28.09	23.14	29.65	9.34	0.81
Sulawesi Selatan	13.31	21.68	21.97	31.22	11.06	0.76
Sulawesi Tenggara	11.07	19.32	22.08	32.31	14.00	1.22
Gorontalo	28.36	20.48	18.69	24.45	7.16	0.87
Sulawesi Barat	14.68	27.62	23.43	24.96	8.85	0.45
Maluku	6.38	17.33	23.10	41.86	10.52	0.80
Maluku Utara	9.57	21.23	23.78	33.45	11.39	0.58
Papua Barat	6.92	17.33	22.24	37.44	15.14	0.92
Papua	9.60	21.28	25.22	33.14	10.26	0.50
Total	8.71	23.98	24.82	32.94	8.97	0.58

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.7. Persentase Penduduk Perempuan Usia 60 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	40.92	42.57	8.62	3.02	4.87	0.00
Sumatera Utara	37.84	34.24	12.23	12.05	3.43	0.21
Sumatera Barat	52.80	24.94	10.46	7.19	4.51	0.10
Riau	43.54	33.39	10.70	8.61	3.76	0.00
Jambi	50.29	32.13	5.57	8.28	3.74	0.00
Sumatera Selatan	49.67	35.47	6.71	4.67	3.00	0.48
Bengkulu	58.72	25.49	7.11	5.99	2.51	0.19

Tabel 1.7. Persentase Penduduk Perempuan Usia 60 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung	63.62	26.41	3.56	4.33	2.08	0.00
Kepulauan Bangka Belitung	57.32	27.21	6.05	8.07	1.35	0.00
Kepulauan Riau	40.47	41.57	10.79	2.61	4.57	0.00
DKI Jakarta	14.25	32.98	18.86	23.50	9.64	0.77
Jawa Barat	39.94	44.30	6.22	5.86	3.33	0.35
Jawa Tengah	53.05	32.00	6.14	5.99	2.77	0.06
DI Yogyakarta	39.27	35.63	10.21	6.74	7.16	0.99
Jawa Timur	49.83	36.25	7.08	3.88	2.77	0.18
Banten	44.01	34.25	7.40	9.63	4.37	0.33
Bali	44.67	39.86	4.94	5.88	4.37	0.27
Nusa Tenggara Barat	65.06	23.00	4.91	3.57	3.41	0.05
Nusa Tenggara Timur	50.05	36.70	4.47	6.30	2.49	0.00
Kalimantan Barat	57.72	26.57	4.82	8.70	2.19	0.00
Kalimantan Tengah	41.29	40.07	8.10	6.98	3.55	0.00
Kalimantan Selatan	55.96	28.18	5.29	7.00	3.39	0.18
Kalimantan Timur	37.27	37.87	9.44	9.03	6.38	0.00
Kalimantan Utara	42.38	32.50	13.14	10.72	1.26	0.00
Sulawesi Utara	36.10	28.90	13.04	16.46	5.39	0.11
Sulawesi Tengah	28.79	51.45	7.42	9.47	2.48	0.39
Sulawesi Selatan	46.33	31.95	8.17	8.43	4.97	0.15
Sulawesi Tenggara	48.60	28.96	8.03	9.66	4.35	0.39
Gorontalo	48.67	30.82	6.40	10.41	3.21	0.50
Sulawesi Barat	48.61	36.44	4.73	5.13	4.50	0.59
Maluku	25.45	41.64	11.05	15.19	6.66	0.00
Maluku Utara	43.38	39.88	6.92	7.06	2.77	0.00

Tabel 1.7. Persentase Penduduk Perempuan Usia 60 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Papua Barat	26.10	45.37	10.28	14.34	3.66	0.25
Papua	23.38	42.33	13.25	16.45	4.27	0.34
Total	45.60	35.75	7.67	7.14	3.62	0.22

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.8. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 60 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	25.86	41.49	14.37	11.59	6.28	0.40
Sumatera Utara	23.45	32.11	18.50	20.12	5.18	0.64
Sumatera Barat	38.30	27.39	11.30	17.28	5.10	0.63
Riau	33.71	37.95	12.06	12.47	3.70	0.11
Jambi	35.21	37.35	9.02	12.03	6.33	0.05
Sumatera Selatan	33.62	39.08	9.69	12.96	4.41	0.23
Bengkulu	38.03	31.65	10.36	13.89	5.90	0.17
Lampung	45.98	35.38	6.76	8.88	2.26	0.75
Kepulauan Bangka Belitung	35.19	35.63	14.26	13.12	1.45	0.35
Kepulauan Riau	35.70	28.15	15.32	11.98	8.85	0.00
DKI Jakarta	8.04	23.57	16.89	31.73	18.07	1.70
Jawa Barat	28.60	44.90	8.48	11.18	6.00	0.85
Jawa Tengah	39.03	37.76	8.90	9.13	4.73	0.46
DI Yogyakarta	30.31	30.88	13.79	12.41	9.62	2.99

Tabel 1.8. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 60 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan					
	Tidak memiliki ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1-D4/ S1	S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa Timur	37.92	39.45	9.38	7.64	5.17	0.45
Banten	32.67	37.71	9.37	13.41	6.09	0.75
Bali	32.48	38.25	10.18	10.98	7.56	0.54
Nusa Tenggara Barat	49.08	27.47	6.08	9.15	7.53	0.69
Nusa Tenggara Timur	38.89	34.51	7.04	12.39	6.03	1.15
Kalimantan Barat	42.06	31.59	8.24	12.40	5.63	0.08
Kalimantan Tengah	27.62	40.79	9.26	13.45	8.63	0.25
Kalimantan Selatan	35.95	30.85	11.20	12.99	7.97	1.05
Kalimantan Timur	24.84	34.75	13.04	18.61	7.77	0.98
Kalimantan Utara	31.88	27.58	16.66	18.16	5.53	0.18
Sulawesi Utara	30.21	26.51	15.58	20.22	6.38	1.10
Sulawesi Tengah	23.99	43.44	12.63	13.10	6.40	0.43
Sulawesi Selatan	33.26	28.48	10.50	17.17	8.81	1.78
Sulawesi Tenggara	34.86	29.58	8.90	16.94	8.84	0.89
Gorontalo	49.32	27.10	6.73	11.31	3.93	1.61
Sulawesi Barat	35.43	34.44	10.03	10.09	9.45	0.55
Maluku	21.71	38.06	14.53	18.10	7.35	0.25
Maluku Utara	32.21	36.89	9.47	14.60	6.24	0.59
Papua Barat	22.62	33.85	13.56	24.65	4.87	0.46
Papua	23.27	31.59	11.29	24.05	8.49	1.30
Total	33.49	37.33	10.20	12.17	6.10	0.71

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.9. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk berumur 15 tahun Ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10.88	11.17	8.69	9.09	9.40	9.79
Sumatera Utara	10.47	10.65	8.42	8.88	9.55	9.88
Sumatera Barat	10.46	10.42	8.17	8.03	9.25	9.19
Riau	10.60	10.95	8.20	8.51	9.17	9.52
Jambi	10.26	10.78	7.69	8.39	8.54	9.17
Sumatera Selatan	10.09	10.34	7.36	7.87	8.39	8.81
Bengkulu	11.11	11.18	7.77	8.32	8.87	9.28
Lampung	9.55	10.03	7.45	7.97	8.10	8.61
Kepulauan Bangka Belitung	9.21	9.60	6.83	7.18	8.14	8.54
Kepulauan Riau	10.34	10.56	6.96	7.63	10.00	10.25
DKI Jakarta	10.82	11.40	-	-	10.82	11.40
Jawa Barat	9.00	9.62	6.82	7.40	8.46	9.12
Jawa Tengah	8.54	9.29	6.71	7.53	7.63	8.45
DI Yogyakarta	10.30	10.92	7.25	8.29	9.44	10.23
Jawa Timur	8.68	9.50	6.55	7.47	7.67	8.58
Banten	9.47	10.14	6.78	7.51	8.71	9.43
Bali	9.38	10.47	6.67	8.46	8.50	9.87
Nusa Tenggara Barat	8.17	9.27	6.75	7.90	7.43	8.58
Nusa Tenggara Timur	10.06	10.61	7.01	7.38	7.76	8.20
Kalimantan Barat	9.40	9.82	6.40	7.19	7.46	8.13
Kalimantan Tengah	9.91	10.32	7.67	8.20	8.57	9.07
Kalimantan Selatan	9.44	10.13	7.13	7.88	8.22	8.96
Kalimantan Timur	10.17	10.77	8.29	8.91	9.56	10.17
Kalimantan Utara	9.88	10.34	7.40	8.24	8.96	9.50
Sulawesi Utara	10.50	10.46	8.81	8.57	9.69	9.58
Sulawesi Tengah	10.56	10.82	8.09	8.36	8.84	9.11
Sulawesi Selatan	10.17	10.56	7.34	7.58	8.56	8.91

Tabel 1.9. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk berumur 15 tahun Ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tenggara	10.69	11.04	7.85	8.51	8.97	9.54
Gorontalo	9.53	8.94	7.61	6.94	8.43	7.80
Sulawesi Barat	9.48	9.62	7.64	7.98	8.08	8.37
Maluku	11.19	11.27	8.95	9.12	9.95	10.11
Maluku Utara	11.10	11.61	8.17	8.71	9.04	9.59
Papua Barat	10.75	11.05	8.62	9.67	9.52	10.26
Papua	10.55	10.86	4.43	5.95	6.18	7.45
Total	9.43	10.02	7.16	7.82	8.42	9.08

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	110.21	95.17	98.62	63.89	109.24	95.70	88.55	27.21	109.55	95.55	91.65	40.33
Sumatera Utara	106.73	90.18	101.21	35.59	111.25	87.31	97.44	17.69	108.98	88.73	99.44	28.33
Sumatera Barat	106.58	95.00	102.66	55.44	108.02	92.79	88.02	18.75	107.39	93.77	95.29	38.31
Riau	105.40	92.26	96.08	47.65	106.51	94.09	87.16	16.35	106.09	93.39	90.63	30.06
Jambi	111.67	82.07	90.32	43.69	110.16	90.14	74.04	20.30	110.64	87.59	79.37	27.96
Sumatera Selatan	112.55	86.63	97.16	38.04	113.74	86.49	75.97	10.76	113.31	86.54	83.74	21.89
Bengkulu	111.84	89.75	88.06	54.67	109.96	87.30	94.17	29.25	110.55	88.07	92.05	38.33
Lampung	107.75	88.45	112.56	34.79	107.37	98.00	74.45	12.17	107.48	95.31	86.62	20.03
Kep. Babel	107.28	86.32	107.99	14.69	106.97	89.02	78.11	8.76	107.14	87.64	94.57	11.97
Kep. Riau	105.58	86.89	98.04	20.74	103.01	94.33	94.10	9.99	105.32	87.69	97.47	20.22
DKI Jakarta	105.95	91.12	73.49	32.69	-	-	-	-	105.95	91.12	73.49	32.69
Jabar	106.45	89.35	83.24	26.55	104.76	89.39	66.99	7.07	106.03	89.36	79.46	22.31
Jateng	105.42	93.08	88.67	24.75	108.98	93.57	86.61	9.88	107.17	93.33	87.70	17.68
DIY	105.64	95.66	92.36	68.69	104.88	104.17	82.12	22.09	105.42	98.42	90.01	60.51

Tabel 1.10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jatim	104.54	94.46	97.57	33.02	106.47	91.44	74.20	14.24	105.49	93.07	86.63	24.57
Banten	107.79	95.19	79.49	32.96	109.77	85.25	66.29	17.84	108.41	91.75	75.70	28.72
Bali	104.68	98.32	82.67	35.54	102.55	97.63	86.90	14.91	104.01	98.08	83.95	29.83
NTB	104.92	91.74	96.48	34.76	111.07	90.88	83.59	13.66	108.14	91.29	89.74	24.40
NTT	107.53	96.16	103.11	56.48	115.83	89.98	83.04	13.26	114.08	91.15	88.96	26.00
Kalbar	109.46	87.14	92.55	45.72	112.45	82.04	77.09	9.10	111.50	83.73	82.90	22.03
Kalteng	107.73	92.50	84.99	30.41	110.96	88.65	80.13	11.30	109.66	90.08	82.23	19.26
Kalsel	107.87	87.36	78.91	39.27	110.40	81.55	75.92	10.61	109.30	84.12	77.35	25.38
Kaltim	105.04	89.66	99.08	43.71	108.69	89.57	96.19	16.05	106.23	89.63	98.17	34.43
Kalut	97.26	96.46	113.45	29.21	99.27	108.07	69.17	12.33	98.04	100.94	96.45	23.10
Sulut	106.21	91.89	89.59	37.99	109.88	91.04	87.32	19.14	108.05	91.47	88.51	30.00
Sulteng	105.66	89.80	110.77	57.12	103.03	90.59	87.82	19.35	103.70	90.36	96.21	32.46
Sulsel	106.40	86.83	95.00	52.92	110.35	81.11	85.82	25.27	108.71	83.49	89.85	38.85
Sultra	107.64	88.77	101.78	64.76	108.95	83.29	81.75	19.50	108.47	85.34	89.99	40.79
Gorontalo	107.94	86.46	104.99	48.81	111.53	75.24	95.29	17.24	110.08	79.64	99.27	32.55
Sulbar	108.34	86.21	100.40	33.76	106.43	80.44	91.91	22.51	106.84	81.71	94.64	24.90
Maluku	104.30	90.16	120.08	54.10	113.29	90.24	90.79	30.26	109.65	90.20	103.66	41.87
Malut	104.89	88.04	106.85	67.45	111.63	84.89	95.88	25.92	109.94	85.78	98.89	40.75
Papbar	99.90	97.50	120.28	36.60	114.25	83.44	92.40	22.22	108.48	89.20	104.21	28.37
Papua	102.08	101.34	106.22	34.97	88.60	71.61	54.12	9.05	91.91	78.63	68.19	16.87
Indonesia	106.33	91.43	90.42	34.54	108.42	89.47	80.55	14.54	107.31	90.50	86.06	26.24

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 1.11. Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	108.85	103.23	97.26	57.72	110.98	97.60	83.88	20.00	110.29	99.26	88.66	33.29
Sumatera Utara	107.71	95.10	86.98	29.25	112.49	88.64	91.68	14.49	110.00	91.95	89.04	23.13
Sumatera Barat	109.22	91.66	97.94	48.02	112.90	87.23	68.09	13.82	111.16	89.23	82.49	32.11
Riau	105.93	96.65	91.87	41.87	108.55	93.26	68.30	12.31	107.50	94.52	78.32	25.43
Jambi	110.41	87.57	115.88	37.22	112.10	86.76	73.11	16.61	111.55	87.02	85.45	23.58
Sumatera Selatan	111.96	91.06	92.68	34.03	114.04	85.19	68.54	10.68	113.28	87.36	78.23	20.10
Bengkulu	107.04	96.49	113.69	39.77	110.57	88.44	84.63	15.67	109.42	90.90	95.44	25.02
Lampung	105.57	88.63	104.64	31.15	107.99	86.85	75.86	9.78	107.24	87.38	84.81	16.64

Tabel 1.11. Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kep. Babel	111.89	84.30	88.49	14.76	106.96	81.77	69.30	7.01	109.66	83.19	79.93	11.16
Kep. Riau	109.38	99.14	77.68	22.41	114.84	89.87	80.38	9.85	109.93	97.86	78.04	21.38
DKI Jakarta	103.78	90.92	76.14	31.81	-	-	-	-	103.78	90.92	76.14	31.81
Jabar	105.03	91.67	80.31	23.33	105.02	93.57	62.28	6.80	105.03	92.10	76.38	19.97
Jateng	108.31	91.11	89.13	24.89	108.21	89.13	82.31	9.70	108.26	90.17	85.85	18.03
DIY	107.80	88.41	93.25	72.08	104.32	101.44	71.74	23.26	106.86	91.90	88.13	63.85
Jatim	104.80	98.01	92.15	31.70	106.61	92.16	72.58	13.06	105.63	95.39	83.05	23.67
Banten	106.54	94.96	71.52	30.21	109.72	85.18	67.57	16.14	107.49	91.48	70.31	26.68
Bali	102.41	95.95	90.99	35.00	104.55	97.39	94.31	15.27	103.07	96.46	91.88	29.86
NTB	109.78	95.84	94.20	34.86	108.04	89.87	89.81	17.66	108.86	92.78	91.94	26.97
NTT	110.96	87.25	111.77	51.20	117.10	83.91	69.25	13.06	115.80	84.69	80.55	24.41
Kalbar	113.85	84.96	97.71	37.99	113.48	81.44	72.85	8.87	113.60	82.78	82.08	19.26
Kalteng	106.02	91.88	97.26	35.64	113.53	84.89	72.00	13.08	110.43	87.50	82.30	22.93
Kalsel	105.68	85.71	91.35	29.54	110.33	81.76	70.39	9.99	108.15	83.58	80.35	20.06
Kaltim	106.10	88.89	96.07	35.14	110.16	99.08	82.94	14.70	107.43	92.30	92.09	28.96
Kalut	103.58	90.07	124.06	17.87	105.17	106.10	73.38	12.84	104.26	95.77	99.31	15.99
Sulut	106.12	94.61	84.48	34.91	110.67	80.30	85.36	14.47	108.28	87.10	84.87	26.23
Sulteng	104.82	100.55	95.61	57.46	107.20	86.85	71.59	17.07	106.51	90.91	79.10	31.68
Sulsel	106.48	89.34	90.25	47.70	109.50	81.51	76.31	15.88	108.21	84.93	82.39	31.85
Sultra	110.40	88.45	97.36	61.71	109.76	83.23	74.59	16.93	109.99	85.34	83.73	38.16
Gorontalo	111.27	80.77	83.30	43.26	112.07	76.77	75.84	16.85	111.74	78.34	79.19	28.87
Sulbar	105.69	91.45	93.49	39.89	108.49	81.02	68.92	19.80	107.80	83.62	74.62	25.24
Maluku	113.01	97.23	93.85	53.39	115.80	86.06	83.05	23.02	114.72	90.58	88.08	38.59
Malut	102.70	89.85	98.30	52.72	112.11	86.36	83.76	21.74	109.54	87.28	87.64	33.13
Papbar	114.43	85.58	103.39	36.62	113.72	89.52	78.26	25.23	114.00	87.84	89.62	30.29
Papua	104.19	95.63	138.15	31.21	88.26	71.18	64.53	11.99	91.98	77.65	84.06	18.49
Indonesia	106.47	92.77	87.45	31.80	108.99	88.10	75.02	12.75	107.61	90.64	82.03	24.05

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.12. Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99.45	87.61	78.27	51.03	98.74	85.13	70.22	18.69	98.96	85.84	72.70	30.26
Sumatera Utara	96.17	78.49	69.39	24.94	98.93	80.60	72.04	13.35	97.54	79.56	70.63	20.24
Sumatera Barat	98.61	84.21	80.42	46.25	98.48	79.48	69.48	12.95	98.54	81.57	74.91	30.70
Riau	96.57	82.10	72.53	39.76	97.69	79.70	61.46	12.45	97.27	80.62	65.77	24.41
Jambi	99.06	77.28	63.37	30.76	99.53	82.06	57.90	14.05	99.38	80.55	59.69	19.53
Sumatera Selatan	95.47	70.25	63.77	27.13	98.82	78.57	59.52	6.36	97.61	75.68	61.08	14.83
Bengkulu	99.09	79.62	66.31	38.05	98.39	78.11	67.11	19.48	98.61	78.58	66.83	26.12
Lampung	99.80	81.59	70.67	26.03	99.30	84.02	58.04	6.33	99.44	83.33	62.08	13.18
Kep. Babel	97.43	74.82	62.25	12.37	96.40	74.22	58.67	7.73	96.96	74.53	60.64	10.24
Kep. Riau	99.29	83.86	76.71	18.20	97.60	87.01	84.71	2.71	99.12	84.19	77.88	17.44
DKI Jakarta	97.94	82.09	60.29	23.22	-	-	-	-	97.94	82.09	60.29	23.22
Jabar	98.67	82.07	61.06	22.17	97.99	78.52	48.67	5.22	98.50	81.19	58.18	18.48
Jateng	97.88	83.44	64.82	20.41	97.24	80.64	57.81	7.90	97.57	82.02	61.53	14.47
DIY	99.50	87.97	75.95	52.83	99.49	93.59	71.12	17.10	99.49	89.79	74.84	46.56
Jatim	98.37	85.86	68.83	25.12	97.63	78.16	55.57	10.00	98.01	82.32	62.62	18.31
Banten	98.57	86.17	63.46	23.11	97.04	77.54	50.47	13.71	98.10	83.19	59.74	20.47
Bali	96.75	88.45	72.03	28.51	96.17	86.22	72.91	12.88	96.57	87.66	72.30	24.19
NTB	99.72	86.49	69.57	25.85	98.26	80.29	62.52	6.23	98.95	83.22	65.88	16.22
NTT	93.66	73.14	66.81	40.25	97.02	73.13	53.45	7.75	96.31	73.13	57.39	17.33
Kalbar	97.58	70.70	59.30	31.70	96.64	65.25	47.39	5.11	96.94	67.06	51.87	14.50
Kalteng	99.25	79.04	55.44	21.43	98.89	77.70	54.04	6.69	99.03	78.20	54.64	12.83
Kalsel	98.47	80.84	63.46	32.58	98.80	71.66	53.52	8.58	98.65	75.72	58.29	20.95
Kaltim	98.68	79.13	70.31	31.38	98.73	80.47	65.70	13.27	98.70	79.61	68.86	25.30
Kalut	93.41	82.38	75.66	17.20	87.53	78.34	52.28	8.21	91.14	80.83	66.68	13.94
Sulut	92.74	75.42	63.13	29.64	96.27	76.50	63.06	11.86	94.52	75.95	63.10	22.10
Sulteng	92.28	75.58	78.07	44.00	92.98	72.14	63.03	13.04	92.80	73.16	68.53	23.78
Sulsel	98.50	79.36	62.54	43.38	98.87	73.83	61.46	18.93	98.72	76.13	61.94	30.94
Sultra	97.25	80.35	72.10	49.00	97.95	74.48	60.00	10.08	97.69	76.67	64.98	28.39
Gorontalo	99.07	75.62	63.84	40.17	98.85	68.77	63.40	10.85	98.94	71.45	63.58	25.07
Sulbar	95.24	69.61	66.42	24.39	97.18	70.91	62.96	13.94	96.76	70.62	64.08	16.16
Maluku	92.35	70.21	71.86	45.73	98.23	76.81	60.89	23.25	95.85	73.98	65.71	34.19
Malut	95.25	78.39	66.06	46.08	97.59	75.42	64.00	15.50	97.00	76.26	64.57	26.42
Papbar	90.12	74.40	72.09	26.96	95.00	65.05	59.75	17.68	93.04	68.88	64.97	21.65
Papua	92.82	76.91	71.10	21.98	74.37	50.66	32.92	6.45	78.89	56.86	43.23	11.14
Indonesia	97.95	82.10	65.68	26.78	97.31	77.58	58.20	10.17	97.65	79.96	62.38	19.89

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

Tabel 1.13. Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan dan Perdesaan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	99.80	92.62	72.54	41.11	99.03	84.81	65.77	15.53	99.28	87.11	68.19	24.54
Sumatera Utara	97.00	82.12	66.09	22.26	98.67	79.65	62.83	10.32	97.80	80.91	64.66	17.31
Sumatera Barat	98.88	76.38	69.28	40.09	98.73	73.71	55.53	10.11	98.80	74.91	62.16	26.14
Riau	96.48	77.91	70.16	34.55	97.96	80.02	55.16	9.81	97.37	79.24	61.54	20.79
Jambi	98.45	81.97	72.20	24.56	98.92	76.61	57.97	11.93	98.77	78.34	62.08	16.20
Sumatera Selatan	97.00	79.80	64.71	23.85	98.91	78.99	54.94	6.97	98.21	79.29	58.86	13.78
Bengkulu	98.90	86.60	73.17	28.24	98.62	75.69	59.01	12.80	98.71	79.02	64.28	18.79
Lampung	99.51	80.72	61.59	21.55	98.83	76.55	54.45	6.55	99.04	77.79	56.67	11.36
Kep. Babel	99.47	75.73	62.63	12.10	97.23	71.23	48.33	4.69	98.46	73.75	56.25	8.66
Kep. Riau	99.19	87.56	69.80	14.27	98.81	82.54	64.07	8.02	99.15	86.87	69.04	13.76
DKI Jakarta	98.28	81.29	60.18	22.15	-	-	-	-	98.28	81.29	60.18	22.15
Jabar	98.23	82.32	58.98	18.80	97.41	77.89	49.70	4.23	98.04	81.33	56.96	15.83
Jateng	98.37	80.36	62.52	18.77	97.52	74.89	51.60	7.49	97.96	77.78	57.26	13.67
DIY	99.60	75.42	67.50	54.28	99.49	88.15	61.71	19.77	99.57	78.83	66.12	48.46
Jatim	98.10	86.78	64.93	23.35	97.92	79.16	56.36	9.34	98.02	83.36	60.95	17.31
Banten	98.28	84.17	59.09	19.81	96.91	74.37	55.27	11.23	97.87	80.67	57.92	17.66
Bali	97.17	86.52	74.86	28.59	96.73	84.63	70.50	11.54	97.04	85.85	73.70	24.15
NTB	99.74	88.26	68.79	26.05	97.93	81.03	63.74	11.31	98.78	84.55	66.19	19.29
NTT	94.78	74.36	67.17	33.67	96.35	62.81	44.03	9.35	96.02	65.49	50.18	16.58
Kalbar	96.63	70.72	62.10	25.94	97.52	63.52	43.73	5.76	97.23	66.27	50.55	12.96
Kalteng	99.04	83.17	63.95	27.29	99.40	73.73	45.56	7.73	99.25	77.26	53.05	16.27
Kalsel	98.69	76.31	61.69	26.19	99.18	72.14	53.41	8.23	98.95	74.06	57.34	17.48
Kaltim	98.76	81.12	71.49	25.21	96.85	81.22	60.88	9.74	98.14	81.15	68.28	20.54
Kalut	96.10	79.88	71.58	12.75	93.87	69.51	52.36	9.17	95.14	76.19	62.19	11.42
Sulut	94.20	75.33	65.91	26.77	96.74	70.40	59.21	9.48	95.40	72.74	62.88	19.43
Sulteng	92.52	83.60	68.64	41.10	93.95	70.65	57.61	11.03	93.53	74.48	61.06	21.91
Sulsel	97.51	80.00	62.51	38.74	97.37	72.06	55.16	11.46	97.43	75.53	58.37	25.15
Sultra	96.72	80.75	66.56	41.95	97.75	74.79	57.13	8.96	97.37	77.20	60.91	24.60
Gorontalo	96.83	70.82	55.19	32.79	98.56	68.24	49.63	13.13	97.85	69.25	52.13	22.08
Sulbar	95.53	72.56	53.47	30.20	94.76	66.77	51.36	12.66	94.95	68.21	51.85	17.41
Maluku	93.96	79.59	69.91	43.75	98.23	72.45	56.90	18.11	96.58	75.34	62.96	31.25
Malut	96.65	80.00	68.71	37.46	97.35	74.78	61.42	13.95	97.16	76.15	63.36	22.59
Papbar	94.77	71.47	69.20	26.03	94.30	70.42	55.27	19.39	94.48	70.86	61.57	22.34
Papua	93.15	79.22	67.30	18.05	75.30	49.68	37.43	6.37	79.47	57.49	45.35	10.32
Indonesia	97.99	82.00	63.26	23.88	97.20	75.15	54.42	9.03	97.63	78.87	59.40	17.84

Sumber: BPS RI Susenas, 2019

C. Lampiran Bab II. Perempuan dan Kesehatan

Tabel 2.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perempuan			Laki-Laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29.70%	32.22%	31.42%	26.97%	27.37%	27.24%
Sumatera Utara	28.42%	27.59%	28.03%	24.25%	24.86%	24.52%
Sumatera Barat	33.81%	29.98%	31.75%	28.73%	27.15%	27.90%
Riau	29.81%	26.49%	27.81%	25.03%	25.20%	25.13%
Jambi	22.32%	22.22%	22.26%	19.66%	21.06%	20.61%
Sumatera Selatan	35.32%	29.95%	31.95%	33.14%	27.95%	29.89%
Bengkulu	32.66%	30.14%	30.96%	29.99%	27.81%	28.53%
Lampung	33.83%	38.42%	37.01%	29.74%	35.49%	33.71%
Kep. Babel	37.69%	31.41%	34.83%	33.43%	27.57%	30.85%
Kep. Riau	23.16%	25.21%	23.36%	19.11%	22.42%	19.45%
DKI Jakarta	31.15%	0.00%	31.15%	27.43%	0.00%	27.43%
Jabar	33.90%	39.16%	35.20%	30.10%	34.33%	31.05%
Jateng	36.67%	41.13%	38.89%	32.07%	37.66%	34.75%
DIY	37.30%	38.55%	37.65%	32.36%	37.38%	33.66%
Jatim	36.23%	37.61%	36.89%	33.40%	35.28%	34.26%
Banten	34.77%	39.31%	36.11%	31.34%	35.69%	32.55%
Bali	27.34%	32.13%	28.89%	26.43%	32.23%	28.17%
NTB	41.61%	47.66%	44.78%	40.76%	47.10%	43.98%
NTT	41.36%	42.65%	42.35%	37.93%	38.55%	38.40%
Kalbar	27.98%	29.09%	28.71%	24.51%	27.39%	26.37%
Kalteng	30.61%	27.14%	28.52%	27.21%	24.96%	25.88%
Kalsel	36.72%	37.65%	37.21%	32.71%	33.25%	32.99%
Kaltim	31.86%	25.91%	29.91%	26.41%	21.68%	24.88%
Kalut	29.29%	30.01%	29.56%	26.53%	25.97%	26.31%
Sulut	27.89%	31.91%	29.83%	26.25%	29.75%	27.91%
Sulteng	38.72%	32.25%	34.16%	32.76%	29.61%	30.56%
Sulsel	33.28%	30.41%	31.64%	29.99%	27.36%	28.52%
Sultra	31.26%	29.08%	29.92%	29.06%	25.75%	27.06%
Gorontalo	38.91%	38.09%	38.44%	39.50%	32.57%	35.51%
Sulbar	25.73%	27.96%	27.44%	25.90%	26.16%	26.10%
Maluku	21.59%	19.97%	20.67%	19.14%	17.26%	18.09%

Tabel 2.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perempuan			Laki-Laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Malut	20.69%	18.81%	19.34%	18.85%	15.82%	16.70%
Papbar	25.34%	27.29%	26.48%	22.29%	25.03%	23.87%
Papua	18.70%	14.29%	15.52%	16.74%	14.17%	14.92%
Indonesia	33.58%	34.70%	34.08%	29.95%	31.60%	30.66%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan, Sakit, dan Tidak Berobat Jalan Karena Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	66.84	63.16	56.41	56.55	59.61	58.60
Sumatera Utara	66.27	71.43	65.81	64.99	66.02	67.93
Sumatera Barat	65.89	66.91	47.38	51.29	55.58	58.25
Riau	65.07	66.98	58.76	53.98	60.65	58.14
Jambi	46.42	58.53	52.74	56.09	51.32	56.67
Sumatera Selatan	66.73	75.35	62.79	65.43	63.89	68.36
Bengkulu	74.88	73.54	49.11	52.68	56.11	58.29
Lampung	66.58	61.39	61.68	60.92	62.85	61.02
Kepulauan Bangka Belitung	73.09	81.23	66.87	74.32	70.20	78.33
Kepulauan Riau	44.62	57.48	46.83	56.68	44.88	57.37
DKI Jakarta	59.60	67.45	-	-	59.60	67.45
Jawa Barat	61.67	62.91	55.79	55.62	59.44	60.46
Jawa Tengah	67.35	69.24	65.08	68.24	66.02	68.66
DI Yogyakarta	77.44	70.98	53.78	57.48	67.56	66.05
Jawa Timur	65.26	67.77	64.10	62.25	64.67	65.13
Banten	72.15	62.75	40.15	38.91	60.04	54.29
Bali	66.05	64.85	55.90	62.34	62.62	64.01
Nusa Tenggara Barat	67.17	70.91	62.93	63.30	64.74	66.33

Tabel 2.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan, Sakit, dan Tidak Berobat Jalan Karena Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nusa Tenggara Timur	73.13	71.78	71.80	73.77	72.06	73.30
Kalimantan Barat	52.62	55.74	49.96	51.94	50.58	52.78
Kalimantan Tengah	75.74	77.21	68.54	71.13	71.35	73.50
Kalimantan Selatan	79.29	74.64	79.55	79.38	79.44	77.33
Kalimantan Timur	62.55	63.03	54.36	62.28	60.11	62.82
Kalimantan Utara	69.80	62.12	52.88	40.14	61.67	50.34
Sulawesi Utara	50.07	57.98	62.95	67.50	56.76	62.84
Sulawesi Tengah	77.77	75.26	62.89	65.55	67.58	68.36
Sulawesi Selatan	70.21	64.82	64.71	65.88	66.78	65.44
Sulawesi Tenggara	70.08	72.07	64.91	65.10	66.57	67.32
Gorontalo	70.30	72.16	91.46	86.62	83.94	81.51
Sulawesi Barat	64.01	72.30	60.49	57.35	61.14	60.54
Maluku	69.04	60.74	57.81	63.74	61.90	62.64
Maluku Utara	66.32	53.74	61.15	61.97	62.61	59.55
Papua Barat	62.54	59.27	39.73	46.78	49.89	52.25
Papua	37.60	41.68	58.71	54.21	52.39	50.73
Total	65.54	66.25	61.14	61.76	63.19	63.94

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.3. Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan			Laki-Laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	57.98%	67.54%	64.67%	57.29%	65.24%	62.63%
Sumatera Utara	46.86%	48.43%	47.58%	45.22%	46.24%	45.68%
Sumatera Barat	60.78%	65.96%	63.40%	54.75%	61.29%	58.09%
Riau	51.60%	40.69%	45.35%	46.85%	39.77%	42.66%

Tabel 2.3. Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan			Laki-Laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jambi	53.73%	42.45%	46.12%	49.41%	40.52%	43.29%
Sumatera Selatan	46.66%	41.06%	43.37%	45.64%	39.80%	42.23%
Bengkulu	46.89%	44.71%	45.46%	44.03%	46.04%	45.33%
Lampung	53.71%	48.69%	50.10%	50.84%	42.07%	44.46%
Kep. Babel	52.42%	50.93%	51.81%	49.18%	49.26%	49.21%
Kep. Riau	52.44%	62.40%	53.49%	45.10%	59.05%	46.77%
DKI Jakarta	59.51%	0.00%	59.51%	56.94%	0.00%	56.94%
Jabar	55.02%	47.82%	53.05%	50.99%	44.00%	49.26%
Jateng	56.46%	53.74%	55.03%	52.28%	49.70%	50.94%
DIY	53.08%	60.85%	55.31%	49.30%	57.07%	51.54%
Jatim	52.54%	52.22%	52.38%	50.39%	50.45%	50.42%
Banten	54.09%	43.96%	50.85%	46.69%	39.80%	44.59%
Bali	64.42%	76.36%	68.72%	63.80%	72.14%	66.66%
NTB	49.24%	51.77%	50.65%	47.51%	49.60%	48.65%
NTT	42.27%	57.68%	54.17%	40.95%	55.23%	51.82%
Kalbar	46.80%	44.71%	45.42%	47.04%	41.33%	43.21%
Kalteng	34.65%	34.01%	34.28%	31.72%	31.41%	31.55%
Kalsel	38.60%	36.46%	37.45%	34.17%	34.01%	34.08%
Kaltim	50.32%	57.45%	52.34%	48.01%	54.36%	49.80%
Kalut	58.89%	56.66%	58.04%	58.08%	51.16%	55.34%
Sulut	53.46%	62.13%	57.94%	52.70%	59.10%	55.92%
Sulteng	39.47%	42.43%	41.44%	37.81%	39.60%	39.02%
Sulsel	44.01%	45.00%	44.55%	42.00%	43.15%	42.61%
Sultra	36.04%	41.49%	39.29%	36.15%	40.02%	38.37%
Gorontalo	55.02%	53.61%	54.21%	53.25%	45.60%	49.22%
Sulbar	54.71%	48.33%	49.73%	50.41%	44.39%	45.82%
Maluku	37.51%	40.03%	38.90%	43.45%	41.32%	42.31%
Malut	41.48%	49.88%	47.34%	43.00%	49.71%	47.50%
Papbar	46.53%	46.96%	46.79%	43.95%	44.49%	44.28%
Papua	57.86%	56.35%	56.86%	58.64%	53.77%	55.37%
Indonesia	53.21%	50.55%	51.99%	49.89%	47.46%	48.80%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan Tahun 2019.

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Pusk-esmas/Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	17.51%	3.15%	32.31%	9.41%	51.45%	6.17%	2.13%	1.08%
Sumatera Utara	5.22%	9.32%	51.22%	15.16%	20.86%	2.89%	3.39%	0.96%
Sumatera Barat	9.20%	5.14%	44.05%	8.16%	33.37%	5.12%	3.15%	0.09%
Riau	8.71%	10.02%	34.91%	23.19%	26.41%	2.79%	2.65%	0.75%
Jambi	9.10%	4.94%	42.65%	10.93%	34.37%	1.80%	2.15%	1.11%
Sumatera Selatan	6.81%	5.85%	51.21%	9.26%	27.26%	4.10%	2.65%	1.05%
Bengkulu	8.20%	4.47%	53.15%	9.08%	25.70%	3.04%	2.69%	1.10%
Lampung	2.44%	6.20%	52.94%	10.73%	29.26%	3.09%	2.20%	1.58%
Kep. Babel	8.32%	9.25%	40.71%	12.18%	31.25%	5.67%	1.49%	1.51%
Kep. Riau	8.53%	13.12%	26.32%	24.29%	31.96%	3.43%	1.05%	1.81%
DKI Jakarta	12.16%	11.13%	9.58%	29.04%	43.74%	0.26%	0.93%	0.41%
Jabar	6.49%	8.68%	33.93%	24.26%	31.78%	1.46%	1.21%	0.81%
Jateng	6.06%	6.92%	50.33%	11.75%	28.25%	2.65%	1.27%	0.91%
DIY	7.37%	17.26%	32.61%	14.84%	33.82%	1.30%	0.98%	0.85%
Jatim	5.74%	6.75%	52.67%	10.81%	24.47%	4.99%	1.79%	1.14%
Banten	4.02%	9.19%	30.76%	35.85%	26.72%	1.39%	1.16%	1.10%
Bali	7.27%	7.08%	58.98%	8.80%	24.39%	0.29%	1.02%	0.39%
NTB	4.42%	1.62%	40.79%	11.38%	41.62%	7.32%	4.14%	3.20%
NTT	4.76%	2.89%	15.36%	6.05%	66.57%	10.18%	0.57%	0.53%
Kalbar	6.81%	4.57%	32.26%	8.29%	43.14%	10.53%	2.19%	1.37%
Kalteng	13.56%	3.45%	33.68%	9.80%	43.34%	4.12%	1.17%	0.84%
Kalsel	9.86%	2.55%	33.13%	9.84%	43.19%	6.33%	2.68%	1.53%
Kaltim	11.69%	13.36%	16.38%	18.47%	42.25%	1.31%	0.81%	0.57%
Kalut	9.69%	2.17%	37.24%	10.62%	45.99%	1.35%	1.13%	0.07%
Sulut	9.15%	7.18%	37.64%	8.78%	42.09%	2.40%	0.56%	1.17%
Sulteng	11.74%	1.40%	22.45%	5.70%	49.70%	13.61%	1.45%	1.10%
Sulsel	10.11%	5.02%	25.16%	9.48%	54.05%	2.72%	0.94%	0.88%
Sultra	8.64%	3.02%	22.41%	6.51%	55.94%	4.22%	3.09%	1.75%
Gorontalo	7.10%	0.67%	38.71%	10.45%	48.89%	1.79%	1.11%	0.12%
Sulbar	8.10%	1.53%	22.52%	4.19%	66.29%	2.88%	1.32%	1.41%
Maluku	10.54%	1.45%	25.53%	7.01%	55.43%	4.91%	0.89%	0.57%
Malut	13.12%	0.91%	22.68%	5.51%	56.92%	4.01%	0.87%	0.97%

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Perempuan yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan Tahun 2019.

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Pusk-esmas/Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Papbar	12.21%	6.60%	10.94%	6.83%	66.09%	1.52%	0.43%	1.36%
Papua	17.30%	1.14%	6.57%	7.92%	69.51%	1.49%	0.76%	0.28%
Indonesia	7.03%	7.16%	39.80%	15.62%	33.28%	3.37%	1.64%	0.98%

*) UKBM=Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Laki-Laki yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan Tahun 2019.

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Pusk-esmas/Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	16.85%	3.79%	33.00%	11.12%	47.82%	5.16%	2.98%	1.32%
Sumatera Utara	6.26%	9.91%	50.44%	16.80%	17.08%	2.56%	4.26%	1.07%
Sumatera Barat	10.55%	5.00%	46.46%	8.13%	28.60%	5.18%	3.63%	0.24%
Riau	8.03%	8.34%	37.16%	23.54%	26.76%	1.67%	2.46%	0.41%
Jambi	9.34%	4.34%	41.00%	11.58%	36.00%	2.02%	2.49%	1.59%
Sumatera Selatan	7.57%	5.67%	52.35%	9.39%	26.07%	3.91%	2.74%	0.88%
Bengkulu	7.37%	4.84%	56.36%	11.19%	21.37%	2.35%	2.20%	1.42%
Lampung	2.80%	5.46%	53.88%	9.77%	27.36%	2.90%	2.47%	1.99%
Kep. Babel	6.90%	9.78%	41.31%	15.80%	28.54%	5.08%	1.43%	1.26%
Kep. Riau	8.47%	12.96%	24.97%	29.20%	23.47%	2.33%	3.58%	2.19%
DKI Jakarta	12.33%	9.53%	8.57%	34.23%	42.10%	0.22%	0.82%	0.49%
Jabar	6.28%	9.73%	32.32%	27.21%	28.57%	1.73%	1.41%	0.94%
Jateng	5.94%	6.69%	53.41%	12.20%	24.48%	2.04%	1.38%	0.96%
DIY	7.54%	18.60%	34.20%	16.10%	30.12%	0.22%	0.57%	1.41%
Jatim	5.65%	6.84%	54.41%	11.46%	22.59%	4.21%	1.76%	1.32%
Banten	5.19%	10.43%	28.43%	38.42%	23.78%	1.02%	1.13%	1.11%
Bali	9.14%	5.99%	56.89%	9.85%	23.88%	0.45%	1.03%	0.44%

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Laki-Laki yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan Tahun 2019.

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama	Pusk-esmas/Pustu	UKBM*	Praktik Pengobatan Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NTB	5.26%	1.61%	43.55%	10.52%	39.44%	5.92%	4.12%	3.31%
NTT	5.28%	3.13%	16.24%	7.00%	64.17%	9.62%	0.88%	0.65%
Kalbar	7.58%	4.59%	33.53%	8.27%	40.46%	9.02%	2.12%	1.63%
Kalteng	13.19%	1.42%	31.92%	10.13%	45.62%	3.24%	1.69%	1.85%
Kalsel	12.88%	2.69%	34.66%	11.81%	39.45%	5.25%	2.48%	1.59%
Kaltim	9.39%	11.54%	17.77%	21.26%	44.03%	0.70%	0.36%	0.55%
Kalut	12.99%	1.05%	34.05%	11.29%	45.32%	2.80%	1.59%	0.26%
Sulut	11.65%	6.10%	39.04%	8.03%	39.78%	1.71%	0.82%	1.33%
Sulteng	11.53%	1.96%	26.31%	4.17%	46.01%	13.34%	1.92%	1.57%
Sulsel	9.72%	5.36%	25.87%	13.05%	48.77%	2.16%	1.19%	1.26%
Sultra	10.68%	1.88%	24.34%	6.67%	53.82%	4.16%	2.82%	1.09%
Gorontalo	7.03%	0.76%	44.39%	8.24%	44.25%	0.81%	2.06%	0.21%
Sulbar	9.38%	2.06%	18.79%	4.82%	65.32%	2.20%	1.12%	1.49%
Maluku	9.42%	1.50%	27.92%	7.52%	53.25%	3.47%	1.11%	1.16%
Malut	17.32%	1.08%	19.29%	7.41%	52.23%	5.70%	1.85%	1.06%
Papbar	13.32%	8.44%	13.28%	8.48%	58.55%	1.35%	0.82%	1.86%
Papua	17.27%	1.64%	6.71%	7.33%	69.99%	0.81%	0.49%	0.59%
Indonesia	7.25%	7.25%	40.47%	16.91%	30.62%	2.97%	1.79%	1.12%

*) UKBM=Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.6. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan			Laki-Laki		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9.54%	7.63%	8.24%	6.14%	5.66%	5.82%
Sumatera Utara	5.96%	4.10%	5.10%	3.37%	2.73%	3.08%
Sumatera Barat	7.74%	5.65%	6.62%	3.82%	2.82%	3.30%
Riau	7.85%	4.50%	5.83%	3.37%	2.77%	3.02%
Jambi	6.52%	4.00%	4.82%	3.66%	3.33%	3.44%
Sumatera Selatan	6.09%	3.73%	4.61%	4.01%	2.62%	3.14%
Bengkulu	8.40%	4.97%	6.09%	5.67%	3.91%	4.50%
Lampung	7.40%	5.54%	6.11%	4.13%	3.28%	3.55%
Kep. Babel	6.53%	5.93%	6.26%	4.55%	2.81%	3.78%
Kep. Riau	5.47%	4.68%	5.39%	3.57%	2.59%	3.47%
DKI Jakarta	6.14%	0.00%	6.14%	4.01%	0.00%	4.01%
Jabar	5.87%	5.51%	5.78%	3.88%	3.80%	3.86%
Jateng	7.19%	7.14%	7.17%	5.26%	4.87%	5.07%
DIY	8.62%	6.75%	8.10%	5.10%	6.35%	5.43%
Jatim	6.53%	5.34%	5.96%	4.60%	4.35%	4.48%
Banten	5.89%	4.06%	5.36%	3.56%	1.88%	3.09%
Bali	5.20%	5.42%	5.27%	3.29%	3.18%	3.25%
NTB	8.03%	7.28%	7.64%	4.91%	5.73%	5.33%
NTT	8.38%	5.28%	6.01%	4.78%	2.89%	3.34%
Kalbar	6.78%	4.03%	4.99%	3.88%	2.20%	2.80%
Kalteng	5.71%	3.34%	4.28%	3.40%	2.79%	3.04%
Kalsel	6.15%	4.89%	5.48%	4.33%	3.18%	3.73%
Kaltim	8.06%	5.81%	7.32%	4.55%	3.67%	4.26%
Kalut	7.38%	7.52%	7.44%	3.89%	5.36%	4.48%
Sulut	7.89%	7.28%	7.59%	5.13%	5.24%	5.19%
Sulteng	10.28%	6.74%	7.79%	6.87%	3.96%	4.84%
Sulsel	8.84%	6.86%	7.70%	5.41%	4.25%	4.76%
Sultra	6.43%	4.60%	5.30%	3.91%	2.62%	3.13%
Gorontalo	9.69%	7.59%	8.47%	6.93%	3.19%	4.78%
Sulbar	6.56%	5.44%	5.70%	6.08%	3.80%	4.34%
Maluku	6.10%	1.98%	3.75%	2.96%	1.56%	2.18%
Malut	7.37%	3.40%	4.52%	3.74%	2.20%	2.65%
Papbar	7.20%	4.88%	5.85%	4.10%	3.18%	3.57%
Papua	6.44%	1.67%	3.00%	4.05%	1.37%	2.16%
Indonesia	6.61%	5.46%	6.09%	4.26%	3.70%	4.02%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.7. Angka Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Provinsi, Status Pemakaian Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Yang sedang menggunakan			Tidak menggunakan lagi			Tidak pernah menggunakan		
	Perko-taan	Perde-saan	Perko-taan dan Perde-saan	Perko-taan	Perde-saan	Perko-taan dan Perde-saan	Perko-taan	Perde-saan	Perko-taan dan Perde-saan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	43.38%	47.40%	46.12%	17.59%	15.48%	16.15%	39.04%	37.12%	37.73%
Sumatera Utara	42.49%	44.63%	43.48%	13.59%	12.34%	13.01%	43.92%	43.03%	43.51%
Sumatera Barat	41.51%	52.63%	47.62%	18.93%	17.32%	18.05%	39.56%	30.05%	34.34%
Riau	40.65%	57.29%	50.82%	20.01%	11.63%	14.88%	39.35%	31.08%	34.29%
Jambi	52.82%	66.47%	62.29%	12.53%	9.08%	10.14%	34.66%	24.45%	27.58%
Sumatera Selatan	49.36%	70.94%	63.71%	13.73%	9.04%	10.61%	36.90%	20.02%	25.68%
Bengkulu	55.45%	69.62%	65.27%	11.44%	9.03%	9.77%	33.11%	21.36%	24.96%
Lampung	58.49%	66.19%	63.96%	14.05%	12.71%	13.10%	27.46%	21.10%	22.95%
Kep. Babel	57.84%	68.89%	62.98%	11.05%	11.01%	11.03%	31.10%	20.10%	25.99%
Kep. Riau	38.79%	55.26%	40.39%	14.44%	16.05%	14.60%	46.77%	28.69%	45.01%
DKI Jakarta	50.10%	0.00%	50.10%	11.56%	0.00%	11.56%	38.34%	0.00%	38.34%
Jabar	58.10%	61.06%	58.83%	12.25%	12.74%	12.37%	29.65%	26.20%	28.80%
Jateng	52.76%	62.78%	57.86%	16.38%	13.91%	15.12%	30.87%	23.32%	27.02%
DIY	54.18%	60.66%	56.03%	10.03%	11.28%	10.39%	35.79%	28.06%	33.58%
Jatim	57.28%	64.17%	60.59%	11.14%	12.07%	11.59%	31.58%	23.76%	27.82%
Banten	54.15%	63.43%	56.82%	12.07%	11.92%	12.03%	33.78%	24.65%	31.15%
Bali	51.78%	66.58%	56.44%	11.54%	10.06%	11.08%	36.68%	23.35%	32.49%
NTB	53.21%	54.35%	53.83%	19.51%	20.67%	20.13%	27.28%	24.98%	26.04%
NTT	42.57%	43.16%	43.03%	14.49%	18.04%	17.27%	42.94%	38.80%	39.69%
Kalbar	52.98%	66.32%	62.02%	14.24%	11.38%	12.30%	32.78%	22.30%	25.67%
Kalteng	57.51%	69.71%	65.06%	14.29%	9.23%	11.16%	28.20%	21.05%	23.78%
Kalsel	63.21%	71.39%	67.67%	14.76%	12.57%	13.57%	22.02%	16.04%	18.76%
Kaltim	50.28%	59.47%	53.31%	12.96%	12.68%	12.87%	36.76%	27.85%	33.82%
Kalut	48.20%	49.14%	48.57%	11.40%	15.92%	13.19%	40.40%	34.94%	38.24%
Sulut	59.68%	65.19%	62.45%	11.40%	11.25%	11.32%	28.93%	23.56%	26.22%
Sulteng	46.10%	59.31%	55.72%	16.40%	12.76%	13.75%	37.50%	27.94%	30.54%
Sulsel	44.55%	49.67%	47.55%	17.29%	16.24%	16.68%	38.15%	34.09%	35.77%
Sultra	40.75%	52.09%	47.80%	20.50%	16.53%	18.03%	38.75%	31.38%	34.17%
Gorontalo	52.30%	67.54%	61.52%	16.58%	9.27%	12.15%	31.13%	23.19%	26.33%
Sulbar	38.21%	49.21%	46.83%	18.56%	15.45%	16.12%	43.24%	35.34%	37.05%
Maluku	36.51%	43.72%	40.66%	18.35%	15.41%	16.66%	45.13%	40.87%	42.68%

Tabel 2.7. Angka Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Provinsi, Status Pemakaian Alat/Cara KB dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Yang sedang menggunakan			Tidak menggunakan lagi			Tidak pernah menggunakan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Malut	47.43%	51.11%	50.11%	20.03%	16.81%	17.69%	32.54%	32.08%	32.20%
Papbar	39.07%	37.87%	38.34%	15.05%	13.39%	14.05%	45.88%	48.74%	47.61%
Papua	35.40%	18.05%	22.44%	14.86%	5.96%	8.21%	49.74%	75.99%	69.35%
Indonesia	53.15%	59.33%	55.96%	13.41%	12.87%	13.17%	33.44%	27.80%	30.87%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Table 2.8. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan Tahun 2019.

Provinsi	MOW/ Tubektomi	MOP/ Vasektomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Intra- vag/ kon- dom wani- ta/ di- afrag- ma	Meny- usui Alami	Pan- tang Ber- kala	Lainn- ya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	2.40%	0.14%	5.09%	64.40%	3.13%	20.99%	1.37%	0.03%	0.23%	1.51%	0.71%
Sumatera Utara	11.06%	0.60%	3.97%	45.19%	11.67%	18.96%	2.06%	0.20%	0.71%	4.26%	1.32%
Sumatera Barat	6.33%	0.68%	10.69%	50.06%	10.92%	14.91%	3.21%	0.32%	0.27%	1.80%	0.82%
Riau	3.88%	0.12%	4.41%	55.51%	7.43%	23.53%	1.88%	0.00%	0.68%	1.98%	0.58%
Jambi	1.58%	0.26%	3.91%	60.07%	9.63%	22.98%	0.49%	0.12%	0.04%	0.63%	0.28%
Sumatera Selatan	1.79%	0.20%	2.16%	68.47%	12.92%	12.67%	0.59%	0.04%	0.20%	0.64%	0.33%
Bengkulu	4.03%	0.22%	6.03%	55.54%	15.32%	13.00%	2.75%	0.09%	0.46%	1.82%	0.74%
Lampung	2.14%	0.19%	4.34%	62.98%	10.76%	16.32%	1.56%	0.11%	0.17%	1.13%	0.30%
Kep. Babel	3.99%	0.08%	4.17%	48.80%	5.72%	32.30%	1.68%	0.28%	0.24%	2.27%	0.47%
Kep. Riau	8.49%	1.21%	12.38%	36.12%	5.10%	25.84%	2.29%	1.52%	0.14%	4.70%	2.21%
DKI Jakarta	4.90%	0.46%	17.91%	51.22%	4.70%	15.40%	1.98%	0.08%	0.38%	2.95%	0.00%
Jabar	3.47%	0.43%	10.13%	57.44%	4.12%	22.43%	1.06%	0.15%	0.09%	0.60%	0.07%
Jateng	6.06%	0.31%	10.69%	54.92%	10.78%	12.82%	1.84%	0.14%	0.20%	2.03%	0.21%

Table 2.8. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan Tahun 2019.

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Intra- vag/ kon- dom- wani- ta/ di- afrag- ma	Meny- usui Alami	Pan- tang Ber- kala	Lainn- ya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DIY	7.00%	0.79%	27.97%	29.98%	6.94%	9.08%	8.46%	0.14%	0.20%	8.37%	1.07%
Jatim	5.26%	0.37%	8.35%	54.17%	7.46%	20.16%	1.15%	0.08%	0.13%	2.50%	0.38%
Banten	2.48%	0.39%	4.97%	68.44%	4.84%	17.01%	0.89%	0.05%	0.03%	0.89%	0.01%
Bali	9.92%	0.48%	30.17%	38.46%	3.12%	12.18%	1.42%	0.13%	0.46%	2.13%	1.54%
NTB	2.55%	0.38%	8.87%	61.86%	16.94%	7.25%	0.94%	0.00%	0.12%	0.65%	0.45%
NTT	7.88%	0.62%	7.22%	47.43%	20.25%	8.04%	0.13%	0.08%	1.61%	5.96%	0.77%
Kalbar	2.48%	0.28%	3.63%	58.67%	4.07%	28.70%	0.79%	0.06%	0.13%	1.05%	0.16%
Kalteng	1.51%	0.31%	1.74%	62.86%	5.21%	26.50%	0.72%	0.01%	0.25%	0.58%	0.32%
Kalsel	1.63%	0.14%	2.33%	46.91%	5.83%	41.10%	1.15%	0.03%	0.03%	0.62%	0.22%
Kaltim	4.74%	0.64%	10.77%	40.29%	6.42%	31.81%	2.20%	0.01%	0.09%	2.59%	0.46%
Kalut	3.00%	0.32%	9.16%	51.65%	6.12%	24.95%	1.12%	0.22%	0.05%	1.66%	1.73%
Sulut	2.53%	0.12%	8.03%	47.10%	17.20%	22.71%	0.28%	0.01%	0.07%	1.79%	0.14%
Sulteng	3.27%	0.16%	6.24%	44.16%	10.71%	32.49%	0.12%	0.05%	0.39%	1.97%	0.45%
Sulsel	2.55%	0.27%	5.14%	56.58%	11.43%	20.88%	0.64%	0.04%	0.38%	1.41%	0.67%
Sultra	2.74%	0.13%	3.46%	48.19%	13.79%	27.59%	0.82%	0.00%	0.13%	2.48%	0.66%
Gorontalo	4.78%	0.22%	6.50%	41.52%	24.33%	20.39%	0.35%	0.00%	0.47%	1.43%	0.00%
Sulbar	0.96%	0.08%	2.70%	49.67%	13.69%	30.30%	0.63%	0.00%	0.09%	1.40%	0.48%
Maluku	1.27%	0.00%	1.71%	66.49%	13.92%	10.34%	0.05%	0.00%	0.73%	4.60%	0.87%
Malut	1.37%	0.26%	1.70%	67.49%	19.18%	9.22%	0.05%	0.00%	0.27%	0.13%	0.32%
Papbar	3.82%	0.26%	4.32%	56.87%	9.37%	20.27%	0.31%	0.00%	0.81%	1.59%	2.39%
Papua	2.08%	0.28%	2.95%	45.91%	9.98%	11.73%	0.36%	0.07%	3.91%	1.32%	21.41%
Indonesia	4.38%	0.36%	8.48%	55.33%	8.17%	19.29%	1.36%	0.11%	0.24%	1.80%	0.48%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.9. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perkotaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan Tahun 2019.

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Intra- vag/ kon- dom wani- ta/ di- afrag- ma	Meny- usui Alami	Pan- tang Ber- kala	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	5.70%	0.24%	9.77%	48.10%	3.68%	26.55%	1.94%	0.07%	0.34%	2.92%	0.68%
Sumatera Utara	12.58%	0.76%	5.25%	39.96%	10.73%	19.62%	2.82%	0.02%	1.07%	5.57%	1.62%
Sumatera Barat	8.66%	1.31%	16.08%	40.91%	8.94%	14.52%	4.98%	0.74%	0.36%	2.35%	1.14%
Riau	8.08%	0.05%	8.97%	44.66%	6.98%	22.37%	3.12%	0.00%	1.50%	3.55%	0.72%
Jambi	3.20%	0.61%	6.94%	53.94%	5.05%	27.19%	0.94%	0.12%	0.14%	1.05%	0.82%
Sumatera Selatan	3.90%	0.38%	4.82%	59.74%	8.67%	18.28%	1.06%	0.00%	0.39%	1.60%	1.15%
Bengkulu	8.16%	0.35%	10.12%	46.18%	12.28%	10.98%	6.68%	0.00%	0.24%	3.10%	1.92%
Lampung	4.67%	0.17%	8.00%	60.05%	7.08%	14.31%	3.22%	0.00%	0.18%	2.28%	0.03%
Kep. Babel	5.68%	0.15%	5.41%	45.37%	4.92%	31.82%	2.25%	0.25%	0.34%	3.28%	0.52%
Kep. Riau	9.21%	1.38%	14.08%	32.40%	4.96%	25.76%	2.46%	1.75%	0.14%	5.35%	2.51%
DKI Jakarta	4.90%	0.46%	17.91%	51.22%	4.70%	15.40%	1.98%	0.08%	0.38%	2.95%	0.00%
Jabar	3.74%	0.54%	12.19%	56.11%	3.58%	21.33%	1.32%	0.20%	0.13%	0.79%	0.06%
Jateng	7.55%	0.37%	12.92%	51.38%	8.11%	13.15%	2.59%	0.22%	0.32%	3.05%	0.34%
DIY	7.92%	0.95%	32.38%	27.80%	2.77%	7.12%	10.17%	0.21%	0.03%	9.57%	1.08%
Jatim	6.86%	0.39%	10.75%	47.96%	6.17%	21.45%	1.58%	0.11%	0.14%	4.08%	0.51%
Banten	3.46%	0.35%	6.57%	64.28%	3.00%	19.75%	1.17%	0.07%	0.04%	1.29%	0.01%
Bali	11.83%	0.47%	32.13%	33.73%	2.33%	12.58%	2.04%	0.03%	0.35%	2.67%	1.83%
NTB	3.71%	0.52%	12.51%	55.35%	15.57%	8.82%	1.62%	0.00%	0.08%	0.84%	0.99%
NTT	12.79%	0.18%	13.15%	35.89%	16.54%	6.31%	0.17%	0.00%	3.77%	9.17%	2.04%
Kalbar	5.51%	0.62%	9.10%	46.49%	2.78%	30.09%	1.83%	0.21%	0.38%	2.46%	0.52%
Kalteng	2.09%	0.50%	3.38%	57.18%	3.09%	31.27%	1.10%	0.00%	0.00%	1.07%	0.32%
Kalsel	2.54%	0.34%	3.62%	44.18%	4.70%	41.55%	1.73%	0.08%	0.07%	1.13%	0.06%
Kaltim	5.79%	0.85%	14.05%	37.05%	4.97%	30.38%	2.44%	0.00%	0.07%	3.68%	0.72%
Kalut	3.62%	0.37%	12.54%	49.75%	5.34%	21.37%	1.66%	0.37%	0.00%	2.10%	2.86%
Sulut	3.07%	0.19%	11.17%	49.05%	11.31%	21.68%	0.51%	0.01%	0.00%	2.71%	0.30%
Sulteng	5.42%	0.00%	13.55%	38.20%	9.27%	28.50%	0.00%	0.21%	0.88%	3.50%	0.47%
Sulsel	4.24%	0.35%	8.99%	49.54%	9.11%	22.92%	1.30%	0.02%	0.73%	1.65%	1.15%
Sultra	3.67%	0.22%	7.74%	41.01%	10.49%	31.72%	1.65%	0.00%	0.02%	2.96%	0.53%
Gorontalo	8.91%	0.43%	11.06%	37.33%	19.30%	20.14%	0.59%	0.00%	0.00%	2.24%	0.00%

Tabel 2.9. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perkotaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan Tahun 2019.

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Intra- vag/ kon- dom wani- ta/ di- afrag- ma	Meny- usui Alami	Pan- tang Ber- kala	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sulbar	1.94%	0.14%	2.57%	50.30%	7.30%	33.63%	0.81%	0.00%	0.49%	2.81%	0.00%
Maluku	1.99%	0.00%	1.85%	61.18%	12.07%	12.68%	0.13%	0.00%	0.75%	7.73%	1.62%
Malut	3.13%	0.26%	5.14%	61.46%	16.70%	12.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.73%
Papbar	5.57%	0.21%	5.56%	52.32%	7.64%	24.68%	0.25%	0.00%	1.31%	1.24%	1.21%
Papua	2.69%	0.67%	6.49%	56.32%	14.28%	14.89%	0.69%	0.00%	0.95%	2.54%	0.49%
Indonesia	5.62%	0.47%	11.83%	51.16%	5.83%	19.77%	1.91%	0.15%	0.27%	2.53%	0.45%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.10. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perdesaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan Tahun 2019.

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Intra- vag/ kon- dom wani- ta/ di- afrag- ma	Meny- usui Alami	Pan- tang Ber- kala	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	0.99%	0.10%	3.10%	71.34%	2.90%	18.62%	1.13%	0.01%	0.18%	0.91%	0.72%
Sumatera Utara	9.38%	0.42%	2.56%	50.98%	12.71%	18.24%	1.23%	0.39%	0.31%	2.81%	0.99%
Sumatera Barat	4.82%	0.27%	7.19%	55.99%	12.19%	15.16%	2.06%	0.05%	0.22%	1.44%	0.62%
Riau	1.98%	0.14%	2.35%	60.40%	7.64%	24.05%	1.33%	0.00%	0.31%	1.28%	0.52%
Jambi	1.01%	0.14%	2.84%	62.23%	11.24%	21.51%	0.34%	0.12%	0.00%	0.48%	0.09%
Sumatera Selatan	1.05%	0.13%	1.23%	71.53%	14.40%	10.70%	0.42%	0.05%	0.13%	0.31%	0.04%
Bengkulu	2.58%	0.18%	4.58%	58.83%	16.40%	13.72%	1.36%	0.12%	0.54%	1.37%	0.32%
Lampung	1.22%	0.20%	3.01%	64.03%	12.09%	17.05%	0.97%	0.15%	0.17%	0.72%	0.40%
Kep. Babel	2.35%	0.00%	2.98%	52.12%	6.49%	32.77%	1.12%	0.31%	0.15%	1.29%	0.43%
Kep. Riau	3.80%	0.14%	1.28%	60.40%	6.01%	26.41%	1.17%	0.00%	0.11%	0.46%	0.20%

Tabel 2.10. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin di Perdesaan menurut Provinsi dan Alat/Cara KB yang sedang Digunakan Tahun 2019.

Provinsi	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Intra- vag/ kon- dom wani- ta/ di- afrag- ma	Meny- usui Alami	Pan- tang Ber- kala	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DKI Jakarta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jabar	2.68%	0.11%	4.11%	61.32%	5.68%	25.64%	0.31%	0.00%	0.00%	0.05%	0.09%
Jateng	4.86%	0.27%	8.89%	57.79%	12.94%	12.54%	1.23%	0.07%	0.10%	1.20%	0.11%
DIY	4.94%	0.42%	18.15%	34.82%	16.24%	13.44%	4.65%	0.00%	0.58%	5.71%	1.05%
Jatim	3.72%	0.34%	6.04%	60.13%	8.70%	18.92%	0.74%	0.04%	0.12%	0.98%	0.27%
Banten	0.41%	0.48%	1.61%	77.21%	8.70%	11.25%	0.29%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%
Bali	6.67%	0.51%	26.86%	46.46%	4.45%	11.50%	0.37%	0.30%	0.64%	1.21%	1.04%
NTB	1.57%	0.26%	5.81%	67.32%	18.09%	5.94%	0.36%	0.00%	0.16%	0.49%	0.00%
NTT	6.55%	0.74%	5.61%	50.56%	21.26%	8.51%	0.12%	0.11%	1.02%	5.09%	0.42%
Kalbar	1.33%	0.15%	1.55%	63.29%	4.55%	28.17%	0.39%	0.00%	0.04%	0.51%	0.02%
Kalteng	1.21%	0.21%	0.92%	65.74%	6.28%	24.07%	0.53%	0.01%	0.37%	0.33%	0.32%
Kalsel	0.95%	0.00%	1.38%	48.93%	6.66%	40.77%	0.73%	0.00%	0.00%	0.24%	0.33%
Kaltim	2.93%	0.27%	5.11%	45.86%	8.90%	34.26%	1.79%	0.03%	0.12%	0.71%	0.01%
Kalut	2.08%	0.25%	4.10%	54.50%	7.28%	30.30%	0.31%	0.00%	0.12%	1.01%	0.04%
Sulut	2.03%	0.07%	5.20%	45.35%	22.51%	23.65%	0.07%	0.01%	0.14%	0.97%	0.00%
Sulteng	2.65%	0.21%	4.11%	45.89%	11.13%	33.64%	0.15%	0.00%	0.24%	1.52%	0.45%
Sulsel	1.48%	0.22%	2.69%	61.05%	12.91%	19.59%	0.23%	0.05%	0.15%	1.26%	0.36%
Sultra	2.30%	0.10%	1.43%	51.61%	15.36%	25.63%	0.43%	0.00%	0.18%	2.26%	0.71%
Gorontalo	2.69%	0.11%	4.20%	43.64%	26.87%	20.52%	0.23%	0.00%	0.71%	1.02%	0.00%
Sulbar	0.75%	0.07%	2.72%	49.53%	15.06%	29.59%	0.59%	0.00%	0.00%	1.10%	0.59%
Maluku	0.83%	0.00%	1.62%	69.76%	15.07%	8.90%	0.00%	0.00%	0.72%	2.68%	0.41%
Malut	0.77%	0.26%	0.51%	69.58%	20.04%	8.14%	0.07%	0.00%	0.36%	0.08%	0.18%
Papbar	2.63%	0.29%	3.47%	59.95%	10.55%	17.29%	0.34%	0.00%	0.47%	1.82%	3.19%
Papua	1.67%	0.02%	0.60%	39.00%	7.13%	9.64%	0.14%	0.11%	5.87%	0.51%	35.30%
Indonesia	3.04%	0.24%	4.88%	59.81%	10.68%	18.77%	0.77%	0.06%	0.20%	1.02%	0.52%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 2.11. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan Pertama Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	<=16	17-18	19-20	21+	Total	<=16	17-18	19-20	21+	Total	<=16	17-18	19-20	21+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	7.24	13.97	20.24	58.55	100.00	11.31	19.15	24.78	44.76	100.00	10.05	17.54	23.37	49.03	100.00
Sumatera Utara	4.95	11.89	22.93	60.23	100.00	7.00	17.38	25.69	49.94	100.00	5.90	14.44	24.22	55.44	100.00
Sumatera Barat	5.18	14.19	18.73	61.90	100.00	10.52	22.73	24.51	42.24	100.00	8.13	18.90	21.92	51.05	100.00
Riau	6.15	13.84	19.16	60.85	100.00	12.71	22.56	26.62	38.12	100.00	10.15	19.16	23.71	46.98	100.00
Jambi	9.17	16.08	22.94	51.82	100.00	21.23	25.43	24.81	28.54	100.00	17.47	22.51	24.22	35.80	100.00
Sumatera Selatan	9.82	15.66	21.57	52.96	100.00	16.12	25.26	25.93	32.69	100.00	13.88	21.86	24.38	39.87	100.00
Bengkulu	10.08	15.29	19.48	55.16	100.00	20.46	25.86	24.72	28.95	100.00	17.24	22.58	23.10	37.08	100.00
Lampung	11.09	16.53	22.15	50.23	100.00	17.71	23.37	27.14	31.78	100.00	15.76	21.36	25.67	37.21	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	9.03	16.79	25.23	48.95	100.00	15.95	25.90	26.11	32.03	100.00	12.18	20.94	25.63	41.24	100.00
Kepulauan Riau	4.32	9.25	15.34	71.09	100.00	11.86	23.91	21.24	42.99	100.00	5.15	10.87	15.99	67.99	100.00
DKI Jakarta	7.62	12.71	20.36	59.32	100.00	-	-	-	-	-	7.62	12.71	20.36	59.32	100.00
Jawa Barat	16.16	22.02	22.36	39.46	100.00	30.68	30.41	21.36	17.55	100.00	19.96	24.21	22.10	33.73	100.00
Jawa Tengah	12.28	18.97	21.65	47.10	100.00	21.11	25.43	22.81	30.65	100.00	16.79	22.27	22.24	38.69	100.00
DI Yogyakarta	5.08	10.98	19.82	64.12	100.00	14.07	21.52	20.52	43.88	100.00	7.89	14.28	20.04	57.78	100.00

Tabel 2.11. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan Pertama Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	<=16	17-18	19-20	21+	Total	<=16	17-18	19-20	21+	Total	<=16	17-18	19-20	21+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jawa Timur	15.72	18.25	21.14	44.89	100.00	25.77	25.80	22.73	25.70	100.00	20.64	21.95	21.92	35.48	100.00
Banten	11.13	17.55	21.79	49.53	100.00	24.68	25.40	23.83	26.08	100.00	15.20	19.91	22.40	42.48	100.00
Bali	5.13	12.35	21.11	61.41	100.00	7.88	19.42	26.19	46.52	100.00	6.06	14.74	22.83	56.37	100.00
Nusa Tenggara Barat	12.63	21.98	24.49	40.89	100.00	15.62	25.44	24.40	34.54	100.00	14.24	23.84	24.44	37.48	100.00
Nusa Tenggara Timur	4.96	12.75	17.29	65.01	100.00	5.94	14.54	24.18	55.34	100.00	5.72	14.15	22.68	57.45	100.00
Kalimantan Barat	9.16	16.72	23.35	50.78	100.00	15.31	24.17	24.82	35.70	100.00	13.26	21.68	24.33	40.74	100.00
Kalimantan Tengah	14.16	18.41	21.51	45.92	100.00	21.09	25.13	24.47	29.31	100.00	18.42	22.55	23.34	35.69	100.00
Kalimantan Selatan	16.29	19.93	22.70	41.08	100.00	27.05	26.15	22.62	24.18	100.00	22.15	23.32	22.66	31.87	100.00
Kalimantan Timur	12.00	16.17	22.15	49.68	100.00	17.41	25.63	23.03	33.93	100.00	13.78	19.27	22.44	44.51	100.00
Kalimantan Utara	10.85	17.02	20.57	51.56	100.00	20.85	20.48	24.50	34.16	100.00	14.75	18.37	22.10	44.77	100.00
Sulawesi Utara	6.13	15.58	24.56	53.73	100.00	8.93	21.23	27.34	42.49	100.00	7.52	18.39	25.95	48.14	100.00
Sulawesi Tengah	9.69	18.04	21.43	50.84	100.00	16.10	23.06	23.57	37.26	100.00	14.32	21.67	22.98	41.03	100.00

Tabel 2.11. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Usia Perkawinan Pertama Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan dan Perdesaan				
	<=16	17-18	19-20	21+	Total	<=16	17-18	19-20	21+	Total	<=16	17-18	19-20	21+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sulawesi Selatan	11.81	16.38	19.31	52.50	100.00	17.69	21.43	21.14	39.75	100.00	15.30	19.37	20.40	44.93	100.00
Sulawesi Tenggara	10.07	18.06	21.89	49.99	100.00	17.18	24.79	23.99	34.04	100.00	14.54	22.29	23.21	39.96	100.00
Gorontalo	8.89	14.50	19.85	56.75	100.00	15.17	22.52	25.07	37.24	100.00	12.62	19.26	22.95	45.17	100.00
Sulawesi Barat	13.78	20.43	18.65	47.14	100.00	17.48	23.75	21.93	36.84	100.00	16.65	23.00	21.19	39.16	100.00
Maluku	5.97	12.36	20.25	61.43	100.00	8.40	16.73	24.97	49.90	100.00	7.36	14.85	22.93	54.86	100.00
Maluku Utara	6.41	15.63	25.90	52.06	100.00	11.80	20.98	26.48	40.73	100.00	10.32	19.51	26.32	43.85	100.00
Papua Barat	7.99	15.55	24.65	51.80	100.00	12.96	18.98	24.86	43.20	100.00	10.94	17.59	24.78	46.69	100.00
Papua	8.14	14.11	23.78	53.97	100.00	9.90	19.91	28.37	41.83	100.00	9.42	18.32	27.12	45.14	100.00
Total	12.09	17.74	21.56	48.60	100.00	19.47	24.25	23.76	32.51	100.00	15.48	20.74	22.57	41.21	100.00

Sumber, BPS, Susenas 2019

D. Lampiran Bab III Perempuan dan Dunia Kerja

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019.

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	42,58%	3,46%	10,03%	40,74%	3,19%	100%
Sumatera Utara	53,64%	3,16%	9,23%	31,18%	2,80%	100%
Sumatera Barat	50,72%	3,29%	10,64%	32,04%	3,31%	100%
Riau	42,19%	3,27%	9,21%	42,79%	2,55%	100%
Jambi	44,62%	2,41%	8,90%	40,86%	3,20%	100%
Sumatera Selatan	49,72%	2,22%	8,53%	36,67%	2,86%	100%
Bengkulu	52,66%	2,51%	9,38%	32,84%	2,61%	100%
Lampung	48,81%	2,39%	7,47%	39,14%	2,19%	100%
Kep. Babel	46,32%	1,93%	8,03%	41,63%	2,09%	100%
Kep. Riau	42,17%	2,70%	8,88%	44,49%	1,77%	100%
DKI Jakarta	45,01%	3,01%	8,42%	40,87%	2,69%	100%
Jabar	42,66%	3,80%	7,49%	43,27%	2,79%	100%
Jateng	53,10%	2,23%	7,05%	33,88%	3,74%	100%
DIY	62,29%	1,98%	8,23%	24,97%	2,52%	100%
Jatim	53,21%	2,01%	7,03%	34,35%	3,40%	100%
Banten	42,29%	3,61%	8,64%	43,02%	2,44%	100%
Bali	65,12%	0,74%	7,92%	23,66%	2,56%	100%
NTB	54,52%	1,94%	7,62%	32,99%	2,94%	100%
NTT	56,39%	2,13%	11,93%	26,36%	3,18%	100%
Kalbar	50,85%	2,02%	8,51%	35,53%	3,09%	100%
Kalteng	49,08%	2,53%	8,75%	38,08%	1,57%	100%
Kalsel	52,77%	1,91%	7,88%	34,94%	2,50%	100%
Kaltim	44,62%	2,79%	9,26%	40,92%	2,40%	100%
Kalut	43,02%	2,68%	9,34%	41,92%	3,04%	100%
Sulut	41,48%	3,78%	8,63%	42,41%	3,69%	100%
Sulteng	48,21%	2,11%	8,77%	37,84%	3,07%	100%
Sulsel	44,32%	2,38%	8,60%	41,22%	3,47%	100%
Sultra	53,06%	2,07%	9,01%	33,78%	2,08%	100%
Gorontalo	47,09%	2,64%	9,51%	38,51%	2,26%	100%
Sulbar	50,57%	2,09%	8,34%	36,45%	2,56%	100%
Maluku	46,01%	4,13%	12,56%	33,64%	3,67%	100%

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019.

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Malut	44,48%	3,11%	10,33%	39,28%	2,79%	100%
Papbar	49,32%	3,94%	11,38%	33,23%	2,14%	100%
Papua	64,29%	2,41%	7,66%	23,77%	1,87%	100%
Indonesia	49,18%	2,71%	8,08%	37,04%	2,99%	100%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019.

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	76.62%	4.40%	9.59%	2.36%	7.03%	100%
Sumatera Utara	79.44%	4.46%	8.58%	2.81%	4.70%	100%
Sumatera Barat	77.46%	3.91%	9.77%	3.18%	5.68%	100%
Riau	79.26%	4.47%	8.54%	3.33%	4.41%	100%
Jambi	81.23%	3.11%	8.35%	2.47%	4.84%	100%
Sumatera Selatan	79.52%	3.83%	8.27%	3.13%	5.26%	100%
Bengkulu	81.88%	2.24%	8.47%	2.52%	4.90%	100%
Lampung	82.96%	3.16%	7.06%	3.21%	3.60%	100%
Kep. Babel	82.47%	2.92%	7.00%	3.21%	4.40%	100%
Kep. Riau	77.74%	6.19%	9.70%	2.56%	3.81%	100%
DKI Jakarta	76.72%	5.07%	8.40%	3.37%	6.44%	100%
Jabar	76.80%	6.58%	7.85%	3.38%	5.40%	100%
Jateng	78.47%	3.96%	7.37%	4.39%	5.82%	100%
DIY	79.34%	2.61%	9.39%	4.64%	4.03%	100%
Jatim	80.84%	3.47%	7.44%	3.36%	4.89%	100%
Banten	75.69%	6.80%	8.45%	3.47%	5.58%	100%
Bali	80.33%	1.51%	8.78%	5.68%	3.70%	100%
NTB	79.30%	2.80%	8.54%	3.46%	5.91%	100%
NTT	76.45%	2.47%	11.70%	4.31%	5.07%	100%
Kalbar	79.22%	4.02%	7.86%	2.82%	6.07%	100%
Kalteng	82.68%	3.15%	7.73%	3.25%	3.17%	100%

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019.

Provinsi	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalsel	79.72%	4.05%	8.13%	4.03%	4.06%	100%
Kaltim	78.26%	5.17%	8.73%	3.49%	4.36%	100%
Kalut	80.85%	3.13%	8.50%	3.00%	4.52%	100%
Sulut	77.57%	4.20%	7.51%	4.15%	6.58%	100%
Sulteng	82.07%	2.14%	7.77%	3.08%	4.93%	100%
Sulsel	76.48%	3.93%	8.83%	4.39%	6.37%	100%
Sultra	80.17%	2.89%	8.28%	4.63%	4.04%	100%
Gorontalo	81.28%	2.80%	7.24%	3.47%	5.21%	100%
Sulbar	83.69%	2.31%	6.58%	3.06%	4.36%	100%
Maluku	71.12%	4.80%	10.98%	5.85%	7.24%	100%
Malut	77.47%	3.30%	9.69%	4.00%	5.54%	100%
Papbar	76.90%	4.54%	9.80%	4.22%	4.54%	100%
Papua	82.84%	3.16%	8.05%	2.07%	3.88%	100%
Indonesia	78.72%	4.41%	8.10%	3.55%	5.22%	100%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	47,79	78,87	45,19	82,10	46,04	81,02
Sumatera Utara	53,17	82,41	61,43	85,78	56,80	83,90
Sumatera Barat	51,85	78,75	56,05	83,84	54,01	81,37
Riau	49,46	80,86	42,68	85,64	45,45	83,73
Jambi	51,56	82,48	44,75	85,24	47,03	84,34
Sumatera Selatan	48,39	79,03	54,17	85,88	51,94	83,35
Bengkulu	56,18	80,63	54,64	85,81	55,17	84,12

Tabel 3.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung	51,15	82,49	51,22	87,72	51,20	86,13
Kep. Babel	47,44	83,90	49,31	87,20	48,25	85,39
Kep. Riau	45,44	84,04	39,19	82,88	44,86	83,92
DKI Jakarta	48,02	81,79			48,02	81,79
Jabar	46,64	82,73	45,85	85,53	46,45	83,38
Jateng	56,36	80,86	54,25	84,04	55,33	82,43
DIY	62,75	79,85	68,15	88,08	64,28	81,95
Jatim	53,58	82,91	57,09	85,97	55,22	84,31
Banten	46,62	81,91	44,02	83,99	45,90	82,49
Bali	63,28	80,99	71,43	83,80	65,86	81,84
NTB	55,47	80,07	57,41	84,02	56,46	82,09
NTT	51,75	71,17	60,71	81,56	58,52	78,92
Kalbar	46,90	79,64	56,30	85,18	52,87	83,24
Kalteng	53,87	84,30	49,98	86,85	51,60	85,84
Kalsel	52,67	80,30	56,51	86,94	54,68	83,77
Kaltim	47,75	82,28	46,63	85,80	47,41	83,43
Kalut	44,31	83,11	48,07	85,29	45,70	83,98
Sulut	45,96	79,16	44,44	84,61	45,27	81,76
Sulteng	54,25	78,22	48,52	86,76	50,32	84,22
Sulsel	45,85	75,85	47,37	84,08	46,71	80,41
Sultra	55,19	78,83	55,10	85,38	55,13	83,06
Gorontalo	52,31	81,00	47,67	86,30	49,72	84,08
Sulbar	57,00	81,53	51,52	87,11	52,66	86,01
Maluku	47,21	71,10	52,65	79,93	50,14	75,92
Malut	44,31	75,47	48,99	82,95	47,59	80,76
Papbar	46,44	77,24	58,39	84,55	53,26	81,45
Papua	47,64	78,99	74,25	89,11	66,70	86,00
Indonesia	50,75	81,53	53,38	85,21	51,89	83,13

Tabel 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,54	6,49	7,50	4,92	7,51	5,43
Sumatera Utara	7,37	6,56	3,55	3,81	5,56	5,32
Sumatera Barat	6,61	6,59	5,63	3,23	6,09	4,81
Riau	7,92	8,02	6,60	3,65	7,19	5,34
Jambi	5,48	4,57	4,91	3,28	5,12	3,69
Sumatera Selatan	5,95	7,35	3,34	3,11	4,28	4,60
Bengkulu	4,22	3,44	4,73	2,31	4,55	2,66
Lampung	5,57	5,53	4,25	2,91	4,68	3,67
Kep. Babel	4,43	4,13	3,46	2,60	4,00	3,42
Kep. Riau	6,10	7,80	5,01	3,48	6,02	7,37
DKI Jakarta	6,26	6,20			6,26	6,20
Jabar	8,42	7,82	7,34	8,10	8,17	7,89
Jateng	4,63	5,51	3,38	4,11	4,03	4,81
DIY	3,75	3,81	1,54	1,51	3,09	3,18
Jatim	4,21	4,86	3,04	3,27	3,64	4,12
Banten	7,03	7,88	10,11	9,16	7,86	8,24
Bali	1,25	2,19	0,89	1,06	1,12	1,84
NTB	4,01	4,09	2,90	2,79	3,44	3,41
NTT	6,92	6,74	2,74	2,05	3,64	3,12
Kalbar	6,38	7,75	2,60	3,37	3,82	4,83
Kalteng	5,57	4,56	4,38	3,11	4,90	3,67
Kalsel	4,67	6,83	2,48	3,15	3,49	4,83
Kaltim	5,66	7,40	6,41	3,81	5,88	6,20
Kalut	6,31	4,04	5,15	3,26	5,86	3,72
Sulut	9,70	6,71	6,71	3,51	8,36	5,13
Sulteng	5,15	4,51	3,70	1,79	4,20	2,54
Sulsel	7,19	8,06	3,53	2,58	5,10	4,89
Sultra	4,53	4,82	3,32	2,79	3,75	3,48
Gorontalo	6,57	5,06	4,20	2,15	5,30	3,32

Tabel 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulbar	5,60	3,32	3,49	2,54	3,97	2,69
Maluku	11,36	9,01	5,83	4,35	8,23	6,33
Malut	7,29	6,05	6,23	3,34	6,53	4,08
Papbar	11,17	7,88	5,13	4,03	7,39	5,58
Papua	11,27	7,76	1,67	2,06	3,61	3,67
Indonesia	6,14	6,42	4,09	3,93	5,23	5,31

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan			
	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	16,59%	13,39%	70,02%	100,00%	36,10%	18,83%	45,08%	100,00%	29,50%	16,99%	53,51%	100,00%
Sumatera Utara	20,31%	15,72%	63,97%	100,00%	40,29%	20,46%	39,25%	100,00%	30,00%	18,02%	51,99%	100,00%
Sumatera Barat	22,95%	13,40%	63,64%	100,00%	43,33%	16,94%	39,74%	100,00%	33,88%	15,30%	50,82%	100,00%
Riau	19,57%	14,01%	66,41%	100,00%	42,87%	17,20%	39,93%	100,00%	32,59%	15,79%	51,62%	100,00%
Jambi	27,64%	14,38%	57,98%	100,00%	50,58%	18,60%	30,82%	100,00%	42,18%	17,06%	40,76%	100,00%
Sumatera Selatan	27,83%	13,16%	59,00%	100,00%	56,09%	17,31%	26,60%	100,00%	46,13%	15,85%	38,03%	100,00%
Bengkulu	18,99%	12,68%	68,33%	100,00%	48,94%	17,52%	33,55%	100,00%	38,38%	15,81%	45,81%	100,00%
Lampung	30,89%	17,31%	51,80%	100,00%	49,42%	22,48%	28,10%	100,00%	43,57%	20,85%	35,59%	100,00%
Kep. Babel	30,57%	12,45%	56,98%	100,00%	57,00%	12,83%	30,17%	100,00%	42,33%	12,62%	45,05%	100,00%
Kep. Riau	15,87%	12,07%	72,06%	100,00%	52,35%	11,84%	35,81%	100,00%	18,82%	12,05%	69,13%	100,00%
DKI Jakarta	19,97%	14,98%	65,04%	100,00%	-	-	-	-	19,97%	14,98%	65,04%	100,00%
Jabar	34,45%	17,49%	48,07%	100,00%	64,13%	16,44%	19,42%	100,00%	41,37%	17,24%	41,39%	100,00%
Jateng	38,62%	17,76%	43,62%	100,00%	57,59%	19,30%	23,11%	100,00%	47,78%	18,51%	33,72%	100,00%
DIY	23,79%	15,42%	60,79%	100,00%	50,97%	16,88%	32,15%	100,00%	32,07%	15,87%	52,06%	100,00%
Jatim	36,39%	16,39%	47,21%	100,00%	62,46%	16,92%	20,63%	100,00%	49,07%	16,65%	34,28%	100,00%
Banten	24,95%	16,71%	58,34%	100,00%	61,13%	18,85%	20,02%	100,00%	34,40%	17,27%	48,33%	100,00%
Bali	31,80%	12,59%	55,61%	100,00%	56,19%	14,01%	29,80%	100,00%	40,20%	13,08%	46,72%	100,00%
NTB	43,46%	15,23%	41,31%	100,00%	55,79%	15,97%	28,24%	100,00%	49,87%	15,62%	34,51%	100,00%

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan			
	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NTT	24,82%	13,29%	61,89%	100,00%	62,58%	11,97%	25,45%	100,00%	54,70%	12,25%	33,05%	100,00%
Kalbar	33,05%	14,03%	52,92%	100,00%	63,96%	15,58%	20,46%	100,00%	54,22%	15,09%	30,69%	100,00%
Kalteng	28,40%	12,53%	59,07%	100,00%	50,57%	19,74%	29,68%	100,00%	40,99%	16,63%	42,39%	100,00%
Kalsel	32,02%	17,12%	50,86%	100,00%	55,88%	17,26%	26,86%	100,00%	45,07%	17,20%	37,73%	100,00%
Kaltim	22,55%	15,15%	62,30%	100,00%	45,91%	16,13%	37,96%	100,00%	29,48%	15,44%	55,09%	100,00%
Kalut	25,06%	14,63%	60,31%	100,00%	44,18%	15,07%	40,74%	100,00%	32,55%	14,81%	52,65%	100,00%
Sulut	18,40%	14,04%	67,56%	100,00%	34,38%	18,28%	47,34%	100,00%	25,69%	15,97%	58,34%	100,00%
Sulteng	21,93%	11,99%	66,08%	100,00%	49,48%	16,99%	33,54%	100,00%	40,22%	15,31%	44,48%	100,00%
Sulsel	23,31%	12,47%	64,22%	100,00%	49,65%	15,50%	34,85%	100,00%	38,57%	14,23%	47,20%	100,00%
Sultra	19,47%	12,75%	67,78%	100,00%	46,97%	18,17%	34,86%	100,00%	37,22%	16,25%	46,53%	100,00%
Gorontalo	32,51%	10,56%	56,94%	100,00%	55,72%	9,66%	34,61%	100,00%	45,08%	10,07%	44,85%	100,00%
Sulbar	35,11%	12,07%	52,83%	100,00%	53,70%	13,08%	33,22%	100,00%	49,58%	12,85%	37,57%	100,00%
Maluku	16,30%	10,80%	72,90%	100,00%	43,72%	17,35%	38,92%	100,00%	32,21%	14,60%	53,19%	100,00%
Malut	20,95%	16,74%	62,30%	100,00%	46,87%	15,79%	37,34%	100,00%	39,71%	16,06%	44,23%	100,00%
Papbar	17,02%	12,62%	70,36%	100,00%	46,14%	13,53%	40,33%	100,00%	35,67%	13,20%	51,13%	100,00%
Papua	22,88%	12,22%	64,90%	100,00%	80,79%	7,88%	11,33%	100,00%	69,99%	8,69%	21,32%	100,00%
Indonesia	30,62%	15,96%	53,43%	100,00%	55,75%	17,22%	27,03%	100,00%	42,00%	16,53%	41,47%	100,00%

Tabel 3.76 Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan			
	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	16.86%	13.86%	69.28%	100.00%	32.52%	22.81%	44.67%	100.00%	27.49%	19.93%	52.58%	100.00%
Sumatera Utara	20.72%	18.90%	60.39%	100.00%	35.58%	24.85%	39.58%	100.00%	27.55%	21.63%	50.82%	100.00%
Sumatera Barat	25.17%	17.68%	57.15%	100.00%	46.59%	20.17%	33.24%	100.00%	36.72%	19.02%	44.26%	100.00%
Riau	18.79%	18.46%	62.75%	100.00%	41.51%	22.49%	36.00%	100.00%	32.97%	20.98%	46.05%	100.00%
Jambi	24.03%	19.26%	56.72%	100.00%	43.67%	22.46%	33.87%	100.00%	37.48%	21.45%	41.07%	100.00%
Sumatera Selatan	27.87%	15.10%	57.03%	100.00%	49.95%	20.18%	29.87%	100.00%	42.44%	18.45%	39.11%	100.00%
Bengkulu	19.46%	16.02%	64.53%	100.00%	44.71%	20.32%	34.97%	100.00%	36.88%	18.98%	44.13%	100.00%
Lampung	29.35%	18.23%	52.43%	100.00%	46.15%	25.59%	28.25%	100.00%	41.34%	23.48%	35.17%	100.00%
Kep. Babel	35.22%	16.86%	47.92%	100.00%	58.16%	15.46%	26.38%	100.00%	45.90%	16.21%	37.89%	100.00%
Kep. Riau	18.32%	13.05%	68.63%	100.00%	56.39%	12.26%	31.35%	100.00%	22.22%	12.97%	64.82%	100.00%
DKI Jakarta	13.37%	17.27%	69.36%	100.00%	-	-	-	-	13.37%	17.27%	69.36%	100.00%
Jabar	32.97%	17.70%	49.33%	100.00%	60.96%	18.65%	20.39%	100.00%	39.61%	17.92%	42.47%	100.00%
Jateng	36.10%	20.44%	43.46%	100.00%	53.33%	21.34%	25.33%	100.00%	44.82%	20.90%	34.29%	100.00%
DIY	17.96%	15.86%	66.18%	100.00%	42.37%	21.58%	36.06%	100.00%	24.75%	17.45%	57.80%	100.00%
Jatim	31.83%	17.99%	50.18%	100.00%	53.03%	21.09%	25.87%	100.00%	41.85%	19.46%	38.69%	100.00%
Banten	22.77%	18.87%	58.35%	100.00%	57.39%	18.69%	23.92%	100.00%	32.50%	18.82%	48.68%	100.00%
Bali	22.08%	13.07%	64.86%	100.00%	41.96%	16.77%	41.28%	100.00%	28.28%	14.22%	57.50%	100.00%
NTB	38.92%	14.58%	46.50%	100.00%	48.39%	15.49%	36.12%	100.00%	43.92%	15.06%	41.02%	100.00%

Tabel 3.76 Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan			
	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total	Tamat SD ke bawah	SMP	Tamat SMA ke atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NTT	24.83%	13.49%	61.68%	100.00%	58.46%	13.06%	28.48%	100.00%	51.05%	13.15%	35.80%	100.00%
Kalbar	31.37%	15.82%	52.80%	100.00%	55.94%	18.49%	25.57%	100.00%	47.99%	17.63%	34.38%	100.00%
Kalteng	25.87%	17.52%	56.60%	100.00%	46.33%	22.88%	30.79%	100.00%	38.43%	20.81%	40.76%	100.00%
Kalsel	31.04%	17.99%	50.97%	100.00%	50.42%	19.49%	30.09%	100.00%	41.74%	18.82%	39.44%	100.00%
Kaltim	19.29%	15.64%	65.07%	100.00%	39.85%	18.67%	41.49%	100.00%	26.35%	16.68%	56.96%	100.00%
Kalut	29.38%	17.36%	53.25%	100.00%	43.43%	13.75%	42.82%	100.00%	35.12%	15.89%	48.99%	100.00%
Sulut	25.68%	16.39%	57.93%	100.00%	42.47%	21.45%	36.09%	100.00%	34.12%	18.93%	46.95%	100.00%
Sulteng	25.39%	15.57%	59.04%	100.00%	48.41%	19.30%	32.29%	100.00%	42.17%	18.29%	39.53%	100.00%
Sulsel	27.20%	14.37%	58.43%	100.00%	51.95%	16.17%	31.87%	100.00%	41.88%	15.44%	42.68%	100.00%
Sultra	18.48%	12.48%	69.04%	100.00%	44.27%	17.58%	38.15%	100.00%	35.72%	15.89%	48.39%	100.00%
Gorontalo	39.65%	14.58%	45.77%	100.00%	66.20%	10.41%	23.38%	100.00%	55.68%	12.07%	32.26%	100.00%
Sulbar	37.04%	12.99%	49.97%	100.00%	52.37%	14.72%	32.91%	100.00%	49.52%	14.40%	36.08%	100.00%
Maluku	13.22%	12.21%	74.57%	100.00%	37.50%	19.77%	42.73%	100.00%	27.48%	16.65%	55.86%	100.00%
Malut	16.30%	14.01%	69.69%	100.00%	39.32%	19.19%	41.49%	100.00%	33.17%	17.80%	49.03%	100.00%
Papbar	16.31%	16.16%	67.53%	100.00%	33.89%	16.13%	49.98%	100.00%	26.99%	16.14%	56.87%	100.00%
Papua	16.42%	15.49%	68.10%	100.00%	62.71%	12.82%	24.47%	100.00%	50.20%	13.54%	36.26%	100.00%
Indonesia	28.10%	17.57%	54.33%	100.00%	50.39%	20.11%	29.50%	100.00%	38.19%	18.72%	43.08%	100.00%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	24.05%	62.09%	3.12%	10.75%	100.00%	18.51%	63.69%	3.92%	13.88%	100.00%	20.38%	63.15%	3.65%	12.82%	100.00%
Sumatera Utara	25.80%	60.38%	3.69%	10.14%	100.00%	16.47%	68.73%	2.14%	12.66%	100.00%	21.28%	64.42%	2.94%	11.36%	100.00%
Sumatera Barat	19.72%	63.92%	6.22%	10.14%	100.00%	11.14%	72.61%	5.15%	11.11%	100.00%	15.12%	68.58%	5.65%	10.66%	100.00%
Riau	26.29%	62.16%	4.09%	7.45%	100.00%	14.98%	73.71%	2.93%	8.38%	100.00%	19.97%	68.61%	3.44%	7.97%	100.00%
Jambi	18.80%	70.19%	3.54%	7.47%	100.00%	10.78%	76.58%	2.90%	9.73%	100.00%	13.71%	74.24%	3.14%	8.91%	100.00%
Sumatera Selatan	22.89%	64.83%	3.85%	8.43%	100.00%	8.81%	81.46%	2.60%	7.13%	100.00%	13.77%	75.60%	3.04%	7.59%	100.00%
Bengkulu	18.76%	70.03%	3.57%	7.64%	100.00%	8.09%	80.41%	4.00%	7.49%	100.00%	11.85%	76.75%	3.85%	7.54%	100.00%
Lampung	17.54%	68.61%	4.03%	9.83%	100.00%	9.16%	80.51%	2.29%	8.04%	100.00%	11.80%	76.75%	2.84%	8.61%	100.00%
Kep. Babel	17.77%	69.14%	6.42%	6.66%	100.00%	14.68%	74.86%	2.27%	8.19%	100.00%	16.40%	71.69%	4.58%	7.34%	100.00%
Kep. Riau	25.69%	66.12%	3.74%	4.45%	100.00%	10.11%	77.56%	4.93%	7.39%	100.00%	24.43%	67.05%	3.84%	4.69%	100.00%
DKI Jakarta	28.80%	57.28%	5.52%	8.39%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.80%	57.28%	5.52%	8.39%	100.00%
Jabar	19.76%	65.57%	5.01%	9.66%	100.00%	8.30%	74.24%	5.40%	12.06%	100.00%	17.09%	67.59%	5.10%	10.22%	100.00%
Jateng	15.93%	69.70%	3.65%	10.72%	100.00%	8.85%	77.52%	3.04%	10.59%	100.00%	12.51%	73.48%	3.35%	10.66%	100.00%
DIY	20.36%	66.87%	3.01%	9.75%	100.00%	7.53%	77.64%	3.94%	10.89%	100.00%	16.45%	70.16%	3.29%	10.10%	100.00%
Jatim	15.42%	68.84%	4.12%	11.62%	100.00%	7.90%	74.99%	3.48%	13.63%	100.00%	11.76%	71.84%	3.81%	12.60%	100.00%
Banten	24.77%	63.30%	4.19%	7.75%	100.00%	11.42%	73.31%	5.75%	9.51%	100.00%	21.28%	65.91%	4.60%	8.21%	100.00%
Bali	18.68%	73.17%	1.84%	6.30%	100.00%	12.07%	78.01%	1.54%	8.39%	100.00%	16.41%	74.84%	1.74%	7.02%	100.00%

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NTB	16.60%	68.56%	6.39%	8.44%	100.00%	10.44%	73.22%	6.59%	9.75%	100.00%	13.40%	70.99%	6.50%	9.12%	100.00%
NTT	30.00%	59.26%	2.72%	8.02%	100.00%	16.00%	72.34%	2.31%	9.35%	100.00%	18.92%	69.61%	2.40%	9.07%	100.00%
Kalbar	24.09%	63.81%	4.01%	8.09%	100.00%	10.99%	77.40%	2.69%	8.93%	100.00%	15.12%	73.12%	3.10%	8.66%	100.00%
Kalteng	20.07%	67.62%	3.45%	8.87%	100.00%	8.99%	79.65%	2.74%	8.63%	100.00%	13.78%	74.45%	3.04%	8.73%	100.00%
Kalsel	18.95%	64.53%	6.50%	10.03%	100.00%	11.83%	72.56%	3.81%	11.80%	100.00%	15.06%	68.92%	5.03%	11.00%	100.00%
Kaltim	21.70%	66.55%	4.57%	7.18%	100.00%	13.88%	73.93%	4.53%	7.66%	100.00%	19.38%	68.74%	4.56%	7.32%	100.00%
Kalut	21.66%	65.64%	6.69%	6.01%	100.00%	13.19%	76.34%	3.82%	6.65%	100.00%	18.35%	69.83%	5.56%	6.26%	100.00%
Sulut	17.49%	68.47%	4.76%	9.28%	100.00%	10.49%	77.75%	2.83%	8.94%	100.00%	14.29%	72.70%	3.88%	9.13%	100.00%
Sulteng	20.24%	68.39%	4.77%	6.61%	100.00%	11.67%	74.92%	3.89%	9.52%	100.00%	14.55%	72.73%	4.19%	8.54%	100.00%
Sulsel	28.17%	59.06%	5.02%	7.75%	100.00%	17.84%	68.47%	4.17%	9.53%	100.00%	22.18%	64.51%	4.53%	8.78%	100.00%
Sultra	22.23%	64.02%	5.53%	8.23%	100.00%	12.63%	73.93%	3.45%	9.98%	100.00%	16.03%	70.42%	4.19%	9.36%	100.00%
Gorontalo	17.64%	67.64%	6.87%	7.85%	100.00%	11.83%	76.21%	2.92%	9.04%	100.00%	14.49%	72.28%	4.73%	8.49%	100.00%
Sulbar	23.75%	60.58%	6.26%	9.40%	100.00%	14.23%	72.36%	4.08%	9.32%	100.00%	16.34%	69.75%	4.57%	9.34%	100.00%
Maluku	23.31%	61.75%	4.19%	10.75%	100.00%	14.59%	73.88%	2.93%	8.60%	100.00%	18.25%	68.79%	3.46%	9.50%	100.00%
Malut	19.80%	67.18%	3.32%	9.71%	100.00%	12.53%	77.84%	2.77%	6.86%	100.00%	14.53%	74.90%	2.92%	7.65%	100.00%
Papbar	22.89%	65.26%	3.49%	8.36%	100.00%	14.37%	72.87%	2.84%	9.92%	100.00%	17.43%	70.13%	3.07%	9.36%	100.00%
Papua	17.24%	68.22%	3.97%	10.57%	100.00%	11.00%	80.06%	1.15%	7.79%	100.00%	12.16%	77.86%	1.68%	8.31%	100.00%
Indonesia	20.23%	65.83%	4.38%	9.56%	100.00%	10.83%	75.06%	3.42%	10.69%	100.00%	15.97%	70.02%	3.94%	10.07%	100.00%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.8. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	29.19%	68.46%	1.14%	1.21%	100.00%	27.36%	70.32%	.95%	1.37%	100.00%	27.95%	69.72%	1.01%	1.32%	100.00%
Sumatera Utara	27.13%	69.55%	1.67%	1.65%	100.00%	24.60%	72.12%	1.12%	2.16%	100.00%	25.96%	70.73%	1.42%	1.89%	100.00%
Sumatera Barat	23.56%	74.16%	1.09%	1.19%	100.00%	22.66%	74.28%	1.46%	1.59%	100.00%	23.08%	74.23%	1.29%	1.40%	100.00%
Riau	24.10%	73.82%	1.37%	.70%	100.00%	21.13%	76.75%	.99%	1.13%	100.00%	22.25%	75.65%	1.13%	.97%	100.00%
Jambi	25.00%	72.47%	1.02%	1.51%	100.00%	19.84%	76.99%	1.36%	1.81%	100.00%	21.46%	75.57%	1.25%	1.72%	100.00%
Sumatera Selatan	26.17%	70.66%	1.76%	1.42%	100.00%	20.59%	76.81%	1.01%	1.60%	100.00%	22.49%	74.71%	1.27%	1.54%	100.00%
Bengkulu	22.79%	74.28%	1.51%	1.41%	100.00%	18.99%	77.77%	1.41%	1.83%	100.00%	20.17%	76.69%	1.44%	1.70%	100.00%
Lampung	24.25%	72.20%	2.15%	1.40%	100.00%	21.00%	75.48%	1.59%	1.93%	100.00%	21.93%	74.54%	1.75%	1.78%	100.00%
Kep. Babel	23.94%	71.08%	3.15%	1.83%	100.00%	22.33%	74.12%	2.10%	1.45%	100.00%	23.19%	72.49%	2.66%	1.65%	100.00%
Kep. Riau	19.44%	77.46%	1.58%	1.53%	100.00%	16.45%	80.29%	1.67%	1.59%	100.00%	19.13%	77.75%	1.59%	1.54%	100.00%
DKI Jakarta	24.45%	71.76%	2.16%	1.63%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.45%	71.76%	2.16%	1.63%	100.00%
Jabar	21.14%	75.10%	1.92%	1.84%	100.00%	13.96%	81.52%	2.44%	2.08%	100.00%	19.44%	76.62%	2.04%	1.90%	100.00%
Jateng	21.98%	74.26%	1.37%	2.39%	100.00%	17.21%	79.07%	1.40%	2.32%	100.00%	19.57%	76.69%	1.39%	2.35%	100.00%
DIY	24.73%	70.69%	2.23%	2.35%	100.00%	14.92%	81.21%	1.19%	2.68%	100.00%	22.00%	73.62%	1.94%	2.44%	100.00%
Jatim	21.35%	74.07%	1.89%	2.69%	100.00%	17.19%	78.03%	2.03%	2.75%	100.00%	19.38%	75.94%	1.96%	2.71%	100.00%
Banten	23.97%	72.97%	1.71%	1.36%	100.00%	17.94%	78.69%	1.87%	1.51%	100.00%	22.27%	74.58%	1.75%	1.40%	100.00%
Bali	21.24%	75.20%	1.64%	1.92%	100.00%	17.97%	77.59%	1.29%	3.15%	100.00%	20.22%	75.95%	1.53%	2.30%	100.00%
NTB	21.93%	73.01%	2.94%	2.13%	100.00%	16.51%	78.74%	2.73%	2.01%	100.00%	19.07%	76.04%	2.83%	2.07%	100.00%

Tabel 3.8. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NTT	29.80%	67.53%	.94%	1.73%	100.00%	26.50%	70.03%	.86%	2.61%	100.00%	27.23%	69.48%	.88%	2.41%	100.00%
Kalbar	25.58%	71.28%	1.72%	1.41%	100.00%	22.80%	73.78%	1.23%	2.20%	100.00%	23.70%	72.97%	1.39%	1.94%	100.00%
Kalteng	20.86%	75.31%	2.18%	1.65%	100.00%	20.09%	77.15%	1.34%	1.43%	100.00%	20.39%	76.44%	1.66%	1.51%	100.00%
Kalsel	20.58%	74.24%	3.09%	2.10%	100.00%	19.78%	75.32%	2.68%	2.22%	100.00%	20.14%	74.83%	2.86%	2.16%	100.00%
Kaltim	20.02%	76.08%	2.03%	1.87%	100.00%	21.46%	75.31%	1.35%	1.89%	100.00%	20.51%	75.81%	1.80%	1.88%	100.00%
Kalut	23.24%	73.79%	2.29%	.68%	100.00%	22.36%	74.57%	1.90%	1.17%	100.00%	22.88%	74.11%	2.13%	.88%	100.00%
Sulut	22.53%	72.07%	3.14%	2.26%	100.00%	20.25%	75.33%	1.71%	2.70%	100.00%	21.39%	73.71%	2.42%	2.48%	100.00%
Sulteng	22.47%	73.86%	1.93%	1.75%	100.00%	22.55%	72.60%	2.32%	2.53%	100.00%	22.53%	72.94%	2.21%	2.32%	100.00%
Sulsel	24.72%	71.39%	2.21%	1.67%	100.00%	23.01%	72.34%	2.18%	2.48%	100.00%	23.70%	71.95%	2.19%	2.15%	100.00%
Sultra	26.08%	71.16%	1.28%	1.49%	100.00%	21.88%	74.77%	1.55%	1.80%	100.00%	23.27%	73.58%	1.46%	1.69%	100.00%
Gorontalo	23.28%	72.44%	2.19%	2.09%	100.00%	19.17%	75.51%	2.14%	3.18%	100.00%	20.80%	74.29%	2.16%	2.75%	100.00%
Sulbar	27.94%	68.68%	2.15%	1.24%	100.00%	24.57%	71.13%	1.78%	2.52%	100.00%	25.20%	70.67%	1.85%	2.28%	100.00%
Maluku	22.64%	74.03%	1.60%	1.73%	100.00%	20.21%	76.13%	1.24%	2.42%	100.00%	21.21%	75.26%	1.39%	2.14%	100.00%
Malut	21.04%	74.46%	2.40%	2.10%	100.00%	19.53%	76.74%	1.49%	2.24%	100.00%	19.93%	76.13%	1.74%	2.20%	100.00%
Papbar	22.76%	73.87%	1.36%	2.01%	100.00%	20.74%	75.27%	1.24%	2.75%	100.00%	21.53%	74.72%	1.29%	2.46%	100.00%
Papua	21.77%	75.65%	1.16%	1.42%	100.00%	17.20%	77.25%	1.31%	4.24%	100.00%	18.43%	76.82%	1.27%	3.48%	100.00%
Indonesia	22.68%	73.56%	1.84%	1.92%	100.00%	19.43%	76.69%	1.66%	2.22%	100.00%	21.21%	74.98%	1.76%	2.06%	100.00%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.9. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	4.61%	56.04%	15.28%	24.07%	100.00%	2.77%	38.77%	17.78%	40.68%	100.00%
Sumatera Utara	2.37%	44.39%	15.76%	37.48%	100.00%	1.89%	29.82%	14.39%	53.90%	100.00%
Sumatera Barat	2.88%	46.57%	17.12%	33.43%	100.00%	2.89%	36.00%	16.15%	44.95%	100.00%
Riau	1.98%	42.68%	17.18%	38.16%	100.00%	1.93%	32.71%	17.15%	48.20%	100.00%
Jambi	2.11%	51.45%	15.72%	30.72%	100.00%	1.41%	37.43%	17.99%	43.17%	100.00%
Sumatera Selatan	2.31%	48.30%	15.60%	33.79%	100.00%	2.14%	35.49%	15.87%	46.49%	100.00%
Bengkulu	3.16%	49.36%	17.56%	29.91%	100.00%	3.40%	37.72%	17.24%	41.63%	100.00%
Lampung	2.73%	52.73%	13.44%	31.09%	100.00%	2.24%	41.80%	15.21%	40.75%	100.00%
Kep. Babel	3.32%	42.79%	17.77%	36.12%	100.00%	3.84%	28.90%	16.94%	50.32%	100.00%
Kep. Riau	1.56%	21.03%	21.78%	55.63%	100.00%	2.41%	11.62%	18.92%	67.05%	100.00%
DKI Jakarta	0.67%	18.27%	25.87%	55.19%	100.00%	0.55%	8.27%	21.46%	69.71%	100.00%
Jabar	1.88%	33.44%	18.16%	46.51%	100.00%	2.27%	19.35%	19.38%	59.00%	100.00%
Jateng	2.54%	38.05%	15.60%	43.81%	100.00%	2.68%	25.74%	14.87%	56.70%	100.00%
DIY	3.00%	41.25%	15.80%	39.94%	100.00%	2.03%	31.08%	17.27%	49.62%	100.00%
Jatim	2.17%	44.72%	13.52%	39.59%	100.00%	2.05%	29.52%	15.11%	53.32%	100.00%
Banten	1.50%	26.44%	23.49%	48.58%	100.00%	1.40%	15.29%	22.34%	60.98%	100.00%
Bali	1.90%	36.29%	16.20%	45.61%	100.00%	1.62%	25.74%	18.58%	54.06%	100.00%
NTB	2.63%	51.71%	13.25%	32.40%	100.00%	3.22%	39.88%	16.40%	40.51%	100.00%

Tabel 3.9. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NTT	2.90%	60.57%	13.90%	22.63%	100.00%	3.20%	43.91%	16.39%	36.51%	100.00%
Kalbar	2.94%	56.33%	13.30%	27.44%	100.00%	2.42%	38.87%	14.64%	44.07%	100.00%
Kalteng	2.20%	44.15%	17.17%	36.48%	100.00%	2.91%	26.42%	17.71%	52.95%	100.00%
Kalsel	2.80%	49.68%	14.95%	32.57%	100.00%	2.65%	33.67%	16.16%	47.53%	100.00%
Kaltim	2.28%	34.95%	17.42%	45.35%	100.00%	3.26%	20.16%	16.78%	59.79%	100.00%
Kalut	2.29%	41.47%	18.98%	37.26%	100.00%	3.77%	29.79%	16.20%	50.24%	100.00%
Sulut	2.55%	32.65%	21.44%	43.36%	100.00%	2.65%	22.73%	17.92%	56.71%	100.00%
Sulteng	3.42%	51.49%	15.16%	29.93%	100.00%	3.14%	36.78%	18.04%	42.04%	100.00%
Sulsel	2.64%	45.74%	16.35%	35.27%	100.00%	3.37%	37.33%	15.43%	43.87%	100.00%
Sultra	3.35%	51.86%	15.20%	29.58%	100.00%	4.05%	35.52%	16.81%	43.61%	100.00%
Gorontalo	2.03%	40.66%	20.30%	37.01%	100.00%	3.89%	26.71%	15.42%	53.98%	100.00%
Sulbar	4.76%	57.56%	13.62%	24.07%	100.00%	4.88%	51.02%	15.80%	28.30%	100.00%
Maluku	3.25%	46.78%	16.98%	32.98%	100.00%	3.90%	30.97%	18.44%	46.69%	100.00%
Malut	4.36%	47.04%	17.19%	31.41%	100.00%	2.67%	29.22%	18.41%	49.71%	100.00%
Papbar	3.31%	42.26%	18.52%	35.90%	100.00%	4.01%	25.34%	19.72%	50.94%	100.00%
Papua	1.15%	55.41%	23.06%	20.38%	100.00%	1.47%	41.23%	25.72%	31.57%	100.00%
Indonesia	2.31%	41.40%	16.54%	39.75%	100.00%	2.32%	27.72%	17.14%	52.82%	100.00%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.10. Persentase Penduduk Perkotaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	3.92%	48.16%	20.27%	27.65%	100.00%	2.95%	29.57%	19.55%	47.94%	100.00%
Sumatera Utara	2.20%	31.91%	16.49%	49.41%	100.00%	1.96%	18.07%	12.85%	67.12%	100.00%
Sumatera Barat	3.26%	36.78%	20.55%	39.41%	100.00%	3.16%	25.38%	17.59%	53.87%	100.00%
Riau	2.10%	27.99%	20.54%	49.37%	100.00%	2.30%	18.05%	19.62%	60.02%	100.00%
Jambi	2.30%	38.97%	18.64%	40.10%	100.00%	1.90%	21.55%	16.99%	59.55%	100.00%
Sumatera Selatan	2.38%	30.49%	16.94%	50.19%	100.00%	1.78%	17.36%	15.07%	65.78%	100.00%
Bengkulu	3.08%	35.23%	20.14%	41.55%	100.00%	3.76%	24.38%	17.03%	54.83%	100.00%
Lampung	2.51%	36.20%	17.35%	43.94%	100.00%	1.73%	25.27%	16.92%	56.08%	100.00%
Kep. Babel	2.20%	36.06%	20.50%	41.23%	100.00%	4.08%	21.72%	17.25%	56.96%	100.00%
Kep. Riau	1.43%	19.21%	22.16%	57.20%	100.00%	1.99%	9.92%	19.19%	68.90%	100.00%
DKI Jakarta	0.67%	18.27%	25.87%	55.19%	100.00%	0.55%	8.27%	21.46%	69.71%	100.00%
Jabar	1.62%	28.86%	19.33%	50.18%	100.00%	2.00%	15.92%	20.48%	61.60%	100.00%
Jateng	2.43%	29.97%	17.03%	50.57%	100.00%	2.79%	21.40%	15.89%	59.92%	100.00%
DIY	2.94%	34.54%	18.00%	44.52%	100.00%	1.98%	26.16%	17.78%	54.08%	100.00%
Jatim	2.21%	34.60%	15.08%	48.11%	100.00%	2.13%	23.26%	15.86%	58.76%	100.00%
Banten	1.11%	20.49%	26.71%	51.70%	100.00%	0.93%	10.72%	23.98%	64.37%	100.00%
Bali	2.04%	29.73%	16.98%	51.25%	100.00%	1.60%	20.09%	18.82%	59.49%	100.00%
NTB	2.64%	46.96%	15.40%	34.99%	100.00%	2.70%	35.28%	18.58%	43.44%	100.00%

Tabel 3.10. Persentase Penduduk Perkotaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NTT	3.54%	32.08%	19.39%	45.00%	100.00%	4.65%	21.37%	17.13%	56.85%	100.00%
Kalbar	2.75%	36.08%	16.66%	44.50%	100.00%	2.42%	21.51%	15.35%	60.72%	100.00%
Kalteng	2.27%	35.87%	20.97%	40.90%	100.00%	3.15%	21.31%	20.86%	54.68%	100.00%
Kalsel	2.06%	39.64%	17.10%	41.20%	100.00%	2.11%	23.15%	16.44%	58.30%	100.00%
Kaltim	2.20%	30.80%	18.80%	48.20%	100.00%	2.98%	16.83%	16.97%	63.22%	100.00%
Kalut	2.07%	32.66%	19.95%	45.33%	100.00%	3.22%	22.58%	15.60%	58.60%	100.00%
Sulut	2.39%	24.41%	23.95%	49.25%	100.00%	3.00%	15.46%	18.27%	63.27%	100.00%
Sulteng	4.08%	35.48%	20.66%	39.79%	100.00%	4.19%	22.88%	21.06%	51.88%	100.00%
Sulsel	2.71%	30.71%	19.72%	46.86%	100.00%	3.82%	22.35%	17.40%	56.43%	100.00%
Sultra	3.76%	36.24%	19.84%	40.15%	100.00%	4.39%	25.38%	18.88%	51.35%	100.00%
Gorontalo	1.35%	31.38%	21.00%	46.27%	100.00%	3.57%	17.90%	15.28%	63.25%	100.00%
Sulbar	4.89%	38.34%	18.98%	37.80%	100.00%	7.17%	33.78%	17.18%	41.87%	100.00%
Maluku	3.66%	31.03%	21.14%	44.17%	100.00%	3.84%	21.61%	19.85%	54.71%	100.00%
Malut	5.22%	31.79%	20.26%	42.73%	100.00%	3.31%	19.67%	19.42%	57.61%	100.00%
Papbar	2.61%	26.28%	18.28%	52.83%	100.00%	3.74%	14.33%	18.68%	63.25%	100.00%
Papua	2.31%	31.46%	24.37%	41.85%	100.00%	2.83%	18.26%	21.83%	57.08%	100.00%
Indonesia	2.07%	30.45%	18.89%	48.59%	100.00%	2.15%	18.67%	18.37%	60.80%	100.00%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.11. Persentase Penduduk Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	4.97%	60.06%	12.72%	22.25%	100.00%	2.69%	43.12%	16.94%	37.25%	100.00%
Sumatera Utara	2.55%	57.67%	14.98%	24.80%	100.00%	1.80%	43.62%	16.20%	38.38%	100.00%
Sumatera Barat	2.55%	55.02%	14.16%	28.26%	100.00%	2.67%	45.08%	14.92%	37.33%	100.00%
Riau	1.88%	54.29%	14.53%	29.30%	100.00%	1.71%	41.53%	15.66%	41.09%	100.00%
Jambi	2.01%	58.65%	14.04%	25.30%	100.00%	1.18%	44.74%	18.45%	35.63%	100.00%
Sumatera Selatan	2.27%	58.00%	14.87%	24.86%	100.00%	2.33%	44.85%	16.29%	36.54%	100.00%
Bengkulu	3.21%	57.06%	16.16%	23.58%	100.00%	3.24%	43.72%	17.34%	35.70%	100.00%
Lampung	2.84%	60.36%	11.64%	25.16%	100.00%	2.44%	48.42%	14.53%	34.61%	100.00%
Kep. Babel	4.71%	51.18%	14.36%	29.75%	100.00%	3.58%	37.14%	16.59%	42.69%	100.00%
Kep. Riau	3.07%	41.79%	17.45%	37.69%	100.00%	6.09%	26.52%	16.54%	50.85%	100.00%
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabar	2.74%	48.52%	14.32%	34.42%	100.00%	3.14%	30.37%	15.83%	50.66%	100.00%
Jateng	2.67%	46.70%	14.06%	36.57%	100.00%	2.57%	29.99%	13.88%	53.56%	100.00%
DIY	3.14%	56.58%	10.78%	29.50%	100.00%	2.15%	43.85%	15.95%	38.04%	100.00%
Jatim	2.14%	55.39%	11.87%	30.60%	100.00%	1.96%	36.52%	14.26%	47.26%	100.00%
Banten	2.61%	43.27%	14.38%	39.74%	100.00%	2.58%	26.99%	18.12%	52.31%	100.00%
Bali	1.63%	48.76%	14.72%	34.89%	100.00%	1.65%	38.21%	18.07%	42.07%	100.00%
NTB	2.63%	56.09%	11.27%	30.01%	100.00%	3.68%	43.99%	14.44%	37.89%	100.00%

Tabel 3.11. Persentase Penduduk Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NTT	2.73%	68.09%	12.45%	16.73%	100.00%	2.78%	50.28%	16.18%	30.75%	100.00%
Kalbar	3.03%	65.63%	11.75%	19.59%	100.00%	2.41%	47.17%	14.30%	36.11%	100.00%
Kalteng	2.14%	50.46%	14.28%	33.12%	100.00%	2.76%	29.64%	15.73%	51.87%	100.00%
Kalsel	3.42%	57.99%	13.17%	25.42%	100.00%	3.08%	42.20%	15.93%	38.79%	100.00%
Kaltim	2.47%	44.79%	14.15%	38.58%	100.00%	3.81%	26.52%	16.42%	53.25%	100.00%
Kalut	2.62%	55.18%	17.49%	24.71%	100.00%	4.56%	40.22%	17.08%	38.14%	100.00%
Sulut	2.73%	42.48%	18.45%	36.35%	100.00%	2.30%	29.92%	17.57%	50.21%	100.00%
Sulteng	3.09%	59.59%	12.38%	24.94%	100.00%	2.75%	41.95%	16.92%	38.38%	100.00%
Sulsel	2.59%	56.64%	13.91%	26.86%	100.00%	3.06%	47.62%	14.08%	35.24%	100.00%
Sultra	3.12%	60.44%	12.65%	23.78%	100.00%	3.89%	40.55%	15.79%	39.77%	100.00%
Gorontalo	2.60%	48.51%	19.72%	29.18%	100.00%	4.10%	32.49%	15.51%	47.89%	100.00%
Sulbar	4.72%	63.03%	12.09%	20.16%	100.00%	4.35%	54.96%	15.49%	25.20%	100.00%
Maluku	2.95%	58.18%	13.98%	24.89%	100.00%	3.95%	37.54%	17.46%	41.06%	100.00%
Malut	4.03%	52.86%	16.02%	27.09%	100.00%	2.43%	32.70%	18.04%	46.83%	100.00%
Papbar	3.71%	51.23%	18.66%	26.41%	100.00%	4.17%	32.46%	20.39%	42.97%	100.00%
Papua	0.88%	60.90%	22.76%	15.46%	100.00%	0.97%	49.74%	27.17%	22.12%	100.00%
Indonesia	2.60%	54.61%	13.70%	29.09%	100.00%	2.52%	38.66%	15.64%	43.18%	100.00%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.12. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perkotaan										
15-19	0.87%	29.06%	11.35%	58.72%	100.00%	1.40%	29.82%	10.45%	58.32%	100.00%
20-24	1.41%	16.21%	20.09%	62.29%	100.00%	1.72%	13.11%	15.53%	69.65%	100.00%
25-29	2.22%	21.29%	22.91%	53.58%	100.00%	1.38%	9.92%	18.12%	70.57%	100.00%
30-34	1.96%	25.86%	21.27%	50.91%	100.00%	1.78%	9.31%	18.28%	70.63%	100.00%
35-39	1.96%	26.77%	20.73%	50.54%	100.00%	1.72%	9.94%	17.83%	70.50%	100.00%
40-44	2.13%	27.39%	18.83%	51.65%	100.00%	1.73%	10.94%	17.88%	69.45%	100.00%
45-49	1.81%	28.63%	18.04%	51.51%	100.00%	2.21%	12.85%	18.77%	66.16%	100.00%
50-54	1.92%	29.74%	18.80%	49.54%	100.00%	2.73%	14.55%	19.70%	63.02%	100.00%
55-59	2.65%	31.86%	19.91%	45.58%	100.00%	3.43%	20.72%	19.62%	56.24%	100.00%
60+	3.63%	42.36%	12.98%	41.02%	100.00%	4.12%	34.44%	13.59%	47.86%	100.00%
Total	2.07%	27.06%	19.19%	51.68%	100.00%	2.15%	14.52%	17.51%	65.81%	100.00%
Perdesaan										
15-19	1.22%	52.74%	9.62%	36.42%	100.00%	1.25%	51.85%	9.46%	37.45%	100.00%
20-24	2.27%	39.20%	17.11%	41.43%	100.00%	2.14%	28.77%	14.31%	54.78%	100.00%
25-29	2.54%	45.30%	17.16%	35.00%	100.00%	1.90%	25.20%	15.78%	57.13%	100.00%
30-34	2.40%	46.40%	16.67%	34.54%	100.00%	2.13%	23.57%	15.74%	58.57%	100.00%

Tabel 3.12. Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	0	1-34	35-40	>40	Total	0	1-34	35-40	>40	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35-39	2.31%	44.34%	16.30%	37.05%	100.00%	2.16%	22.91%	16.18%	58.75%	100.00%
40-44	2.21%	46.88%	15.49%	35.41%	100.00%	2.18%	24.36%	16.00%	57.46%	100.00%
45-49	2.53%	46.73%	15.55%	35.19%	100.00%	2.42%	26.08%	16.85%	54.64%	100.00%
50-54	2.34%	48.90%	16.72%	32.05%	100.00%	2.70%	28.54%	17.71%	51.04%	100.00%
55-59	2.69%	51.31%	15.63%	30.37%	100.00%	3.34%	34.08%	17.12%	45.45%	100.00%
60+	4.40%	57.94%	13.18%	24.48%	100.00%	4.34%	45.67%	15.14%	34.84%	100.00%
Total	2.60%	47.83%	15.67%	33.91%	100.00%	2.52%	29.67%	15.75%	52.06%	100.00%
Perkotaan+Perdesaan										
15-19	1.02%	39.28%	10.60%	49.10%	100.00%	1.32%	41.78%	9.91%	46.99%	100.00%
20-24	1.73%	24.87%	18.96%	54.43%	100.00%	1.91%	20.13%	14.98%	62.98%	100.00%
25-29	2.35%	30.89%	20.61%	46.15%	100.00%	1.60%	16.47%	17.12%	64.81%	100.00%
30-34	2.15%	34.75%	19.28%	43.83%	100.00%	1.93%	15.39%	17.20%	65.49%	100.00%
35-39	2.11%	34.68%	18.74%	44.47%	100.00%	1.91%	15.51%	17.12%	65.46%	100.00%
40-44	2.17%	36.30%	17.31%	44.22%	100.00%	1.93%	16.77%	17.06%	64.24%	100.00%
45-49	2.15%	37.08%	16.88%	43.89%	100.00%	2.31%	18.72%	17.92%	61.05%	100.00%
50-54	2.12%	38.91%	17.80%	41.17%	100.00%	2.72%	20.87%	18.80%	57.61%	100.00%
55-59	2.67%	41.49%	17.79%	38.04%	100.00%	3.39%	27.06%	18.44%	51.12%	100.00%
60+	4.05%	50.89%	13.09%	31.97%	100.00%	4.24%	40.43%	14.41%	40.92%	100.00%
Total	2.31%	36.47%	17.59%	43.63%	100.00%	2.32%	21.38%	16.72%	59.58%	100.00%

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.13. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama Tahun 2019.

1	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	19.37	11.77	1.81	39.15	3.70	2.07	22.12	100.00
Sumatera Utara	21.26	12.81	1.63	35.50	2.62	2.00	24.18	100.00
Sumatera Barat	18.99	16.06	1.96	32.31	5.75	2.16	22.77	100.00
Riau	23.38	8.82	2.09	40.84	2.71	1.58	20.58	100.00
Jambi	21.11	8.43	1.83	36.34	5.13	0.65	26.52	100.00
Sumatera Selatan	20.84	9.66	1.24	32.49	2.15	1.07	32.55	100.00
Bengkulu	16.47	12.39	2.04	30.71	3.68	1.57	33.13	100.00
Lampung	19.18	15.21	1.79	26.85	3.59	1.89	31.50	100.00
Kep. Babel	19.63	7.45	3.06	46.57	3.68	1.21	18.40	100.00
Kep. Riau	21.72	5.62	2.58	62.04	0.13	0.83	7.09	100.00
DKI Jakarta	18.70	5.01	2.55	64.83	0.00	1.81	7.09	100.00
Jabar	22.57	10.98	1.82	42.91	3.85	3.60	14.27	100.00
Jateng	20.92	12.96	2.10	36.93	4.03	2.96	20.10	100.00
DIY	18.36	14.50	2.77	40.79	1.90	2.12	19.55	100.00
Jatim	19.45	13.99	1.93	32.07	5.71	2.14	24.72	100.00
Banten	20.86	8.49	1.14	53.33	2.10	2.88	11.20	100.00

Tabel 3.13. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama Tahun 2019.

1	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bali	17.48	14.22	2.28	41.86	2.83	2.83	18.50	100.00
NTB	23.22	16.42	1.31	23.16	9.01	4.78	22.10	100.00
NTT	20.69	18.48	0.77	21.88	1.61	0.47	36.10	100.00
Kalbar	23.09	12.00	1.55	28.55	0.98	0.81	33.01	100.00
Kalteng	21.48	10.19	2.10	39.42	1.05	1.06	24.70	100.00
Kalsel	24.32	11.72	1.41	34.22	1.58	1.34	25.42	100.00
Kaltim	25.67	8.19	3.08	45.40	0.54	1.42	15.70	100.00
Kalut	17.29	9.24	1.70	48.67	3.82	0.93	18.34	100.00
Sulut	25.93	7.73	2.25	46.09	3.15	2.08	12.78	100.00
Sulteng	20.01	14.42	1.66	32.57	3.16	0.86	27.33	100.00
Sulsel	19.57	13.10	1.78	36.58	3.73	1.17	24.08	100.00
Sultra	18.13	14.80	1.49	31.79	1.34	0.75	31.70	100.00
Gorontalo	19.33	12.34	2.23	44.13	3.24	1.61	17.12	100.00
Sulbar	18.40	17.03	0.96	25.23	3.35	1.62	33.42	100.00
Maluku	25.92	11.65	0.85	35.53	0.56	0.63	24.87	100.00

Tabel 3.13. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama Tahun 2019.

1	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Malut	19.51	13.60	0.88	33.90	1.69	0.95	29.47	100.00
Papbar	21.10	12.43	0.98	36.58	0.17	0.73	28.02	100.00
Papua	13.60	12.70	0.24	13.25	0.32	0.10	59.79	100.00
Indonesia	20.68	12.26	1.83	37.47	3.56	2.28	21.91	100.00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Keterangan:

1 = Berusaha Sendiri

2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

3 = Berusaha dibantu buruh tetap

4 = Buruh/Karyawan/Pegawai

5 = Pekerja Bebas di Pertanian

6 = Pekerja Bebas di Non Pertanian

7 = Pekerja Keluarga

Tabel 3.14. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama Tahun 2019.

Provinsi	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22.83	16.49	5.33	38.99	5.13	5.23	6.01	100.00
Sumatera Utara	18.84	15.26	4.46	45.72	4.90	3.97	6.86	100.00
Sumatera Barat	22.30	18.16	5.62	33.80	7.18	6.58	6.36	100.00
Riau	22.03	10.22	6.04	44.70	8.83	3.69	4.48	100.00
Jambi	24.13	14.66	5.29	41.04	6.24	3.43	5.22	100.00
Sumatera Selatan	23.17	20.32	3.86	39.05	3.36	3.76	6.47	100.00
Bengkulu	20.17	23.74	5.65	31.87	6.39	6.92	5.27	100.00
Lampung	21.21	22.98	3.71	29.44	5.76	8.70	8.20	100.00
Kep. Babel	24.54	9.67	7.35	48.60	2.99	4.26	2.60	100.00
Kep. Riau	19.41	4.43	5.12	66.50	0.60	2.82	1.11	100.00
DKI Jakarta	23.32	4.12	4.52	64.56	0.01	2.18	1.29	100.00
Jabar	20.97	10.35	4.48	48.12	4.62	9.15	2.30	100.00
Jateng	17.61	18.12	4.39	39.35	4.43	11.25	4.84	100.00
DIY	17.16	15.90	5.15	47.09	2.08	7.63	4.99	100.00
Jatim	16.56	19.28	4.68	38.46	6.67	8.77	5.59	100.00
Banten	19.91	7.24	3.43	57.61	2.36	6.98	2.47	100.00
Bali	15.86	15.78	4.95	50.15	2.34	5.77	5.16	100.00
NTB	17.02	23.30	3.81	28.60	6.08	14.11	7.08	100.00

Tabel 3.14. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama Tahun 2019.

Provinsi	Status Pekerjaan Utama							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NTT	19.49	31.83	3.46	27.68	1.55	3.98	12.01	100.00
Kalbar	21.13	19.10	4.08	42.11	2.97	4.38	6.24	100.00
Kalteng	19.70	14.26	4.35	50.21	2.87	3.32	5.29	100.00
Kalsel	22.22	16.58	4.23	45.27	2.19	4.28	5.24	100.00
Kaltim	18.61	9.01	4.93	59.69	1.37	3.05	3.35	100.00
Kalut	20.47	11.81	5.86	49.54	2.26	4.36	5.69	100.00
Sulut	27.22	8.26	4.36	39.69	9.64	7.11	3.71	100.00
Sulteng	21.88	20.29	5.23	33.51	5.94	5.38	7.77	100.00
Sulsel	23.81	20.13	4.56	36.26	2.35	4.11	8.80	100.00
Sultra	20.31	23.16	5.70	34.40	1.59	5.54	9.30	100.00
Gorontalo	24.86	18.95	4.42	34.96	6.30	5.45	5.05	100.00
Sulbar	22.75	26.73	2.39	27.49	4.64	5.83	10.18	100.00
Maluku	28.84	17.06	2.61	37.01	1.77	4.73	7.98	100.00
Malut	24.02	19.70	3.77	36.92	4.10	3.49	8.00	100.00
Papbar	20.65	15.68	4.03	50.02	0.37	3.78	5.48	100.00
Papua	19.94	41.70	1.13	25.69	0.49	1.12	9.93	100.00
Indonesia	19.93	15.98	4.46	42.93	4.44	7.22	5.03	100.00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.15. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	54.98	45.02	100.00	33.80	66.20	100.00	40.97	59.03	100.00
Sumatera Utara	51.07	48.93	100.00	22.31	77.69	100.00	37.13	62.87	100.00
Sumatera Barat	44.64	55.36	100.00	25.30	74.70	100.00	34.26	65.74	100.00
Riau	53.58	46.42	100.00	34.50	65.50	100.00	42.92	57.08	100.00
Jambi	50.20	49.80	100.00	31.22	68.78	100.00	38.17	61.83	100.00
Sumatera Selatan	53.31	46.69	100.00	23.06	76.94	100.00	33.73	66.27	100.00
Bengkulu	50.82	49.18	100.00	22.92	77.08	100.00	32.75	67.25	100.00
Lampung	43.97	56.03	100.00	21.56	78.44	100.00	28.64	71.36	100.00
Kep. Babel	58.97	41.03	100.00	37.99	62.01	100.00	49.63	50.37	100.00
Kep. Riau	66.11	33.89	100.00	47.68	52.32	100.00	64.62	35.38	100.00
DKI Jakarta	67.38	32.62	100.00	0.00	0.00	0.00	67.38	32.62	100.00
Jabar	51.06	48.94	100.00	23.90	76.10	100.00	44.73	55.27	100.00
Jateng	48.37	51.63	100.00	29.03	70.97	100.00	39.03	60.97	100.00
DIY	50.88	49.12	100.00	26.88	73.12	100.00	43.57	56.43	100.00
Jatim	46.24	53.76	100.00	21.09	78.91	100.00	34.00	66.00	100.00

Tabel 3.15. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Banten	63.09	36.91	100.00	30.10	69.90	100.00	54.47	45.53	100.00
Bali	51.47	48.53	100.00	30.20	69.80	100.00	44.14	55.86	100.00
NTB	31.35	68.65	100.00	18.11	81.89	100.00	24.47	75.53	100.00
NTT	48.73	51.27	100.00	15.77	84.23	100.00	22.65	77.35	100.00
Kalbar	51.05	48.95	100.00	20.46	79.54	100.00	30.10	69.90	100.00
Kalteng	52.15	47.85	100.00	33.43	66.57	100.00	41.52	58.48	100.00
Kalsel	49.46	50.54	100.00	24.16	75.84	100.00	35.63	64.37	100.00
Kaltim	53.61	46.39	100.00	36.30	63.70	100.00	48.48	51.52	100.00
Kalut	59.48	40.52	100.00	36.20	63.80	100.00	50.37	49.63	100.00
Sulut	57.89	42.11	100.00	36.95	63.05	100.00	48.34	51.66	100.00
Sulteng	50.27	49.73	100.00	26.11	73.89	100.00	34.23	65.77	100.00
Sulsel	54.42	45.58	100.00	26.71	73.29	100.00	38.36	61.64	100.00
Sultra	51.81	48.19	100.00	23.10	76.90	100.00	33.28	66.72	100.00
Gorontalo	56.75	43.25	100.00	37.57	62.43	100.00	46.36	53.64	100.00

Tabel 3.15. Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sulbar	40.29	59.71	100.00	22.18	77.82	100.00	26.20	73.80	100.00
Maluku	54.28	45.72	100.00	23.42	76.58	100.00	36.38	63.62	100.00
Malut	49.95	50.05	100.00	28.99	71.01	100.00	34.78	65.22	100.00
Papbar	56.68	43.32	100.00	26.83	73.17	100.00	37.56	62.44	100.00
Papua	49.35	50.65	100.00	5.27	94.73	100.00	13.49	86.51	100.00
Indonesia	51.56	48.44	100.00	24.52	75.48	100.00	39.31	60.69	100.00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.16. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	57.28	42.72	100.00	38.17	61.83	100.00	44.32	55.68	100.00
Sumatera Utara	61.75	38.25	100.00	36.59	63.41	100.00	50.18	49.82	100.00
Sumatera Barat	51.32	48.68	100.00	29.25	70.75	100.00	39.42	60.58	100.00
Riau	64.24	35.76	100.00	42.63	57.37	100.00	50.75	49.25	100.00
Jambi	59.25	40.75	100.00	40.38	59.62	100.00	46.32	53.68	100.00
Sumatera Selatan	59.09	40.91	100.00	34.57	65.43	100.00	42.91	57.09	100.00
Bengkulu	52.18	47.82	100.00	30.92	69.08	100.00	37.51	62.49	100.00
Lampung	48.94	51.06	100.00	26.82	73.18	100.00	33.15	66.85	100.00
Kep. Babel	63.35	36.65	100.00	47.46	52.54	100.00	55.95	44.05	100.00
Kep. Riau	74.38	25.62	100.00	47.46	52.54	100.00	71.62	28.38	100.00
DKI Jakarta	69.09	30.91	100.00	0.00	0.00	0.00	69.09	30.91	100.00
Jabar	58.73	41.27	100.00	32.90	67.10	100.00	52.61	47.39	100.00
Jateng	52.33	47.67	100.00	35.35	64.65	100.00	43.74	56.26	100.00
DIY	57.52	42.48	100.00	38.55	61.45	100.00	52.24	47.76	100.00
Jatim	53.84	46.16	100.00	31.19	68.81	100.00	43.13	56.87	100.00
Banten	69.03	30.97	100.00	40.61	59.39	100.00	61.04	38.96	100.00
Bali	60.64	39.36	100.00	42.87	57.13	100.00	55.10	44.90	100.00
NTB	39.93	60.07	100.00	25.70	74.30	100.00	32.41	67.59	100.00

Tabel 3.16. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NTT	58.57	41.43	100.00	23.38	76.62	100.00	31.14	68.86	100.00
Kalbar	62.41	37.59	100.00	38.42	61.58	100.00	46.18	53.82	100.00
Kalteng	63.99	36.01	100.00	48.62	51.38	100.00	54.56	45.44	100.00
Kalsel	62.05	37.95	100.00	39.32	60.68	100.00	49.50	50.50	100.00
Kaltim	69.41	30.59	100.00	55.47	44.53	100.00	64.62	35.38	100.00
Kalut	61.75	38.25	100.00	46.20	53.80	100.00	55.40	44.60	100.00
Sulut	53.20	46.80	100.00	35.00	65.00	100.00	44.05	55.95	100.00
Sulteng	60.01	39.99	100.00	30.83	69.17	100.00	38.74	61.26	100.00
Sulsel	59.34	40.66	100.00	28.10	71.90	100.00	40.81	59.19	100.00
Sultra	58.48	41.52	100.00	30.99	69.01	100.00	40.10	59.90	100.00
Gorontalo	49.86	50.14	100.00	32.51	67.49	100.00	39.38	60.62	100.00
Sulbar	52.70	47.30	100.00	24.67	75.33	100.00	29.89	70.11	100.00
Maluku	57.46	42.54	100.00	27.09	72.91	100.00	39.62	60.38	100.00
Malut	58.68	41.32	100.00	34.13	65.87	100.00	40.69	59.31	100.00
Papbar	67.44	32.56	100.00	45.38	54.62	100.00	54.05	45.95	100.00
Papua	59.23	40.77	100.00	14.82	85.18	100.00	26.82	73.18	100.00
Indonesia	58.76	41.24	100.00	33.67	66.33	100.00	47.39	52.61	100.00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.17. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,400,558	3,013,165	1,680,737	2,235,905	2,010,523	2,562,387
Sumatera Utara	2,219,973	2,851,483	1,781,925	2,333,319	2,093,712	2,679,346
Sumatera Barat	2,613,393	3,163,980	2,035,047	2,423,183	2,384,719	2,872,687
Riau	2,655,095	3,426,410	1,901,196	2,658,079	2,314,720	3,023,904
Jambi	2,263,705	2,950,550	1,603,234	2,207,590	1,918,738	2,509,104
Sumatera Selatan	2,226,824	2,976,375	1,424,192	2,120,241	1,873,688	2,529,428
Bengkulu	2,504,558	3,143,025	1,743,778	2,352,364	2,159,539	2,696,952
Lampung	2,068,958	2,848,291	1,660,604	2,233,417	1,859,522	2,497,297
Kep. Babel	2,640,655	3,347,790	2,197,630	2,857,063	2,487,315	3,157,453
Kep. Riau	3,655,724	4,711,496	2,715,839	3,132,940	3,602,023	4,605,267
DKI Jakarta	3,956,385	4,765,401	-	-	3,956,385	4,765,401
Jabar	2,955,253	3,758,961	1,915,408	2,560,770	2,827,341	3,586,094
Jateng	1,960,506	2,549,463	1,571,080	2,266,623	1,820,342	2,434,422
DIY	2,035,853	2,682,048	1,627,577	2,099,096	1,958,307	2,561,512
Jatim	2,307,693	2,981,962	1,503,424	2,179,599	2,067,293	2,716,611
Banten	3,598,167	4,318,383	2,607,525	2,783,974	3,455,517	4,036,119
Bali	2,823,112	3,402,532	2,005,355	2,699,576	2,628,328	3,231,292
NTB	2,115,719	2,818,115	1,440,159	2,384,788	1,854,032	2,638,272
NTT	2,271,643	2,754,423	1,585,476	1,890,567	1,890,678	2,247,807

Tabel 3.17. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalbar	2,200,162	2,994,280	1,819,690	2,546,375	2,021,022	2,742,531
Kalteng	2,603,081	3,521,374	2,185,972	3,025,880	2,409,447	3,245,156
Kalsel	2,319,861	3,293,424	1,907,233	3,048,431	2,166,138	3,184,711
Kaltim	3,015,826	4,573,447	2,379,873	3,669,629	2,874,734	4,305,858
Kalut	2,717,505	3,668,533	2,654,957	3,694,914	2,699,682	3,677,777
Sulut	3,546,459	3,681,396	2,588,482	2,876,631	3,214,269	3,375,255
Sulteng	2,538,093	3,056,008	1,821,883	2,282,690	2,175,894	2,610,703
Sulsel	2,858,294	3,626,217	1,800,052	2,381,452	2,428,219	3,124,995
Sultra	2,578,993	3,316,941	1,630,512	2,519,821	2,154,163	2,913,582
Gorontalo	2,462,202	2,924,835	1,812,602	2,207,770	2,173,166	2,573,311
Sulbar	2,042,652	2,847,588	1,518,642	2,221,955	1,695,154	2,421,830
Maluku	3,113,063	3,445,359	2,189,826	2,451,327	2,765,954	3,050,150
Malut	2,779,281	3,460,193	1,978,730	2,827,922	2,295,952	3,075,022
Papbar	3,002,218	3,611,777	2,974,599	3,423,872	2,989,474	3,516,133
Papua	3,609,561	4,524,184	3,142,886	3,713,341	3,461,682	4,191,014
Indonesia	2,722,531	3,503,050	1,758,562	2,438,482	2,451,057	3,167,092

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.18. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan Tahun 2019.

Tingkat Pendidikan	Laki-laki			Perempuan		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tamat SD Ke bawah	27.57	72.43	100.00	16.53	83.47	100.00
SMP	42.59	57.41	100.00	30.93	69.07	100.00
SMA ke atas	67.06	32.94	100.00	65.72	34.28	100.00
Total	47.39	52.61	100.00	39.31	60.69	100.00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.19. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Sektor Pekerjaan Tahun 2019.

Kelompok Umur	Laki-laki			Laki-laki		
	Formal	Informal	Total	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	42.69	57.31	100.00	55.54	44.46	100.00
20-24	61.53	38.47	100.00	69.86	30.14	100.00
35-29	60.76	39.24	100.00	58.63	41.37	100.00
30-34	56.36	43.64	100.00	46.67	53.33	100.00
35-39	52.60	47.40	100.00	40.27	59.73	100.00
40-44	48.06	51.94	100.00	34.44	65.56	100.00
45-49	44.98	55.02	100.00	30.08	69.92	100.00
50-54	42.21	57.79	100.00	27.83	72.17	100.00
55-59	33.51	66.49	100.00	22.73	77.27	100.00
60+	18.64	81.36	100.00	10.90	89.10	100.00
Total	47.39	52.61	100.00	39.31	60.69	100.00

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.20. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2019.

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,003,475	1,581,461	63.45
Tidak/Belum Tamat SD	1,122,198	1,893,238	59.27
Sekolah Dasar	1,319,185	2,097,272	62.90
S L T P	1,656,431	2,319,566	71.41
SMTA Umum	2,156,473	3,157,244	68.30
SMTA Kejuruan	2,341,434	3,092,503	75.71
Diploma I/II/III/ Akademi	3,100,120	4,588,239	67.57
Universitas	3,664,400	5,493,946	66.70
Total	2,451,097	3,167,133	77.39

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.21. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2019.

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
A - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,437,325	2,169,562	66.25
B - Pertambangan dan Penggalian	4,203,774	4,807,813	87.44
C - Industri Pengolahan	2,338,092	3,131,721	74.66
D - Pengadaan Listrik dan Gas	4,068,005	4,042,040	100.64
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,865,838	2,618,243	71.26
F - Konstruksi	3,863,034	2,757,877	140.07
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,152,828	2,628,600	81.90

Tabel 3.21. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/ Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2019.

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
H - Transportasi dan Pergudangan	3,746,388	3,581,861	104.59
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,904,633	2,681,500	71.03
J - Informasi dan Komunikasi	3,564,076	4,606,791	77.37
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	4,108,619	4,321,528	95.07
L - Real Estat	4,555,134	3,827,604	119.01
M,N - Jasa Perusahaan	3,420,280	3,457,031	98.94
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,453,680	4,198,409	82.26
P - Jasa Pendidikan	2,470,326	3,156,431	78.26
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,268,753	3,784,202	86.38
R,S,T,U - Jasa Lainnya	1,340,502	2,442,069	54.89
Total	2,451,097	3,167,133	77.39

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.22. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/ Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	2,296,594	2,405,474	95.47
Kawin	2,574,661	3,491,895	73.73
Cerai Hidup	2,281,505	2,590,719	88.06
Cerai Mati	2,116,146	2,535,995	83.44
Total	2,451,097	3,167,133	77.39

Sumber: BPS RI - Sakernas, 2019

Tabel 3.23. Jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2018.

Provinsi	2015		2016		2017		2018	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	553	233	584	182	527	153	703	222
Sumatera Utara	10,405	1,649	12,063	2,074	15,436	1,673	14,964	2,939
Sumatera Barat	650	139	690	122	763	182	905	176
Riau	229	332	373	244	404	233	705	312
Jambi	329	199	231	143	165	96	208	131
Sumatera Selatan	971	439	1,252	328	1,738	368	1,621	265
Bengkulu	78	216	64	156	163	131	252	154
Lampung	11,255	4,854	11,266	4,783	11,785	3,586	13,810	5,033
Kepulauan Bangka Belitung	4	18	6	19	11	6	9	14
Kepulauan Riau	318	486	452	616	398	1,485	322	902
DKI Jakarta	457	755	419	392	580	321	557	289
Jawa Barat	50,344	12,720	40,891	10,156	42,224	8,620	47,775	9,455
Jawa Tengah	40,068	17,010	35,606	13,906	42,925	12,107	46,580	14,854
DI Yogyakarta	1,102	754	846	582	1,141	393	1,003	431
Jawa Timur	31,417	16,896	27,652	15,483	51,712	12,372	54,245	16,136
Banten	2,539	1,731	1,543	1,141	1,423	897	1,432	948
Bali	1,648	3,221	1,184	2,074	1,788	3,084	1,931	2,250
Nusa Tenggara Barat	9,643	42,100	6,588	33,827	6,842	28,152	6,877	25,680

Tabel 3.23. Jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2018.

Provinsi	2015		2016		2017		2018	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nusa Tenggara Timur	2,135	1,172	1,904	453	1,696	264	1,836	241
Kalimantan Barat	735	1,496	636	1,198	559	766	647	1,167
Kalimantan Tengah	10	14	6	9	28	11	32	16
Kalimantan Selatan	326	96	153	70	98	34	127	44
Kalimantan Timur	28	151	91	337	659	2,102	456	1,272
Kalimantan Utara	-	-	-	-	3	6	148	413
Sulawesi Utara	226	203	155	30	379	83	441	70
Sulawesi Tengah	474	68	255	39	462	30	579	223
Sulawesi Selatan	673	1,675	337	567	398	728	406	691
Sulawesi Tenggara	87	93	91	35	173	124	268	92
Gorontalo	2	2	3	1	43	-	26	1
Sulawesi Barat	46	86	39	75	68	168	75	207
Maluku	11	67	7	7	44	60	33	9
Maluku Utara	1	84	1	7	1	7	5	10
Papua Barat	1	5	3	-	1	7	1	3
Papua	2	6	1	3	4	9	2	9
Total	166,767	108,970	145,392	89,059	184,641	78,258	198,981	84,659

Sumber: Data penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019, BP2MI, 2020

Tabel 3.24. Jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	2019	
	Perempuan	Laki-laki
Aceh	421	244
Sumatera Utara	12.056	3.908
Sumatera Barat	742	372
Riau	643	380
Jambi	223	148
Sumatera Selatan	1.193	442
Bengkulu	192	114
Lampung	16.249	5.216
Kepulauan Bangka Belitung	9	10
Kepulauan Riau	206	837
DKI Jakarta	540	337
Jawa Barat	47.613	10.344
Jawa Tengah	45.194	15.238
DI Yogyakarta	866	448
Jawa Timur	51.437	17.303
Banten	1.447	989
Bali	1.692	1.631
Nusa Tenggara Barat	6.823	23.883
Nusa Tenggara Timur	1.052	95
Kalimantan Barat	525	1.080
Kalimantan Tengah	22	8
Kalimantan Selatan	132	34
Kalimantan Timur	39	69
Kalimantan Utara	253	836
Sulawesi Utara	512	92
Sulawesi Tengah	522	60
Sulawesi Selatan	339	806
Sulawesi Tenggara	159	102
Gorontalo	3	5

Tabel 3.24. Jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	2019	
	Perempuan	Laki-laki
Sulawesi Barat	64	189
Maluku	46	46
Maluku Utara	10	9
Papua Barat	13	37
Papua	-	4
Total	191.237	85.316

E. Lampiran Bab IV. Perempuan dan IP-TIK

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Aceh	77.58%	82.74%	59.58%	69.76%	65.31%	74.08%
Sumatera Utara	83.19%	84.68%	73.38%	77.57%	78.67%	81.50%
Sumatera Barat	85.20%	85.80%	72.28%	75.93%	78.30%	80.65%
Riau	85.94%	89.96%	72.99%	80.65%	78.16%	84.46%
Jambi	83.16%	86.63%	68.51%	78.02%	73.27%	80.82%
Sumatera Selatan	79.02%	86.07%	66.51%	76.53%	71.19%	80.11%
Bengkulu	86.03%	89.60%	64.90%	74.14%	71.83%	79.32%
Lampung	80.73%	85.91%	74.43%	81.05%	76.36%	82.55%
Kep. Babel	83.15%	85.96%	68.10%	78.60%	76.30%	82.73%
Kep. Riau	85.84%	87.71%	75.17%	79.99%	84.78%	86.90%
DKI Jakarta	82.02%	86.63%	0.00%	0.00%	82.02%	86.63%
Jabar	73.40%	80.45%	62.04%	71.46%	70.59%	78.43%
Jateng	72.97%	80.14%	64.75%	73.38%	68.89%	76.91%
DIY	78.09%	83.96%	64.38%	71.54%	74.22%	80.71%
Jatim	74.60%	81.59%	63.67%	74.50%	69.40%	78.36%

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Banten	72.88%	81.32%	57.19%	67.91%	68.27%	77.60%
Bali	78.14%	85.19%	66.44%	77.78%	74.34%	82.96%
NTB	80.56%	85.10%	72.02%	78.89%	76.09%	81.95%
NTT	83.84%	86.21%	63.15%	66.19%	68.05%	71.08%
Kalbar	83.16%	86.14%	57.17%	67.47%	66.21%	74.08%
Kalteng	85.33%	88.61%	70.97%	79.80%	76.67%	83.40%
Kalsel	85.58%	89.66%	70.57%	79.91%	77.58%	84.58%
Kaltim	87.39%	90.14%	80.21%	84.84%	85.05%	88.43%
Kalut	87.44%	90.67%	73.87%	79.07%	82.33%	86.00%
Sulut	83.51%	82.82%	74.87%	72.59%	79.35%	77.98%
Sulteng	83.04%	84.91%	66.91%	69.41%	71.71%	74.11%
Sulsel	84.16%	87.00%	76.92%	78.51%	80.00%	82.27%
Sultra	87.27%	87.07%	75.75%	78.23%	80.21%	81.77%
Gorontalo	79.30%	81.28%	77.44%	78.38%	78.22%	79.61%

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Sulbar	78.78%	77.13%	68.64%	72.42%	71.03%	73.55%
Maluku	79.51%	80.58%	63.65%	65.15%	70.57%	72.02%
Malut	81.07%	83.73%	55.21%	58.65%	62.62%	66.00%
Papbar	81.09%	83.65%	62.48%	70.45%	70.29%	76.06%
Papua	78.02%	82.42%	23.32%	32.46%	38.28%	47.01%
Indonesia	77.36%	83.02%	65.81%	73.56%	72.18%	78.92%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Aceh	65.27%	72.67%	44.54%	60.30%	51.14%	64.41%
Sumatera Utara	64.67%	70.45%	45.90%	59.01%	56.03%	65.34%
Sumatera Barat	69.64%	72.87%	50.01%	59.96%	59.16%	66.13%

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Riau	71.54%	77.95%	54.91%	69.16%	61.55%	72.76%
Jambi	71.41%	78.94%	50.84%	68.21%	57.51%	71.71%
Sumatera Selatan	66.17%	76.27%	43.77%	64.71%	52.14%	69.04%
Bengkulu	71.45%	78.04%	44.80%	63.72%	53.54%	68.52%
Lampung	66.45%	75.85%	48.15%	65.90%	53.78%	68.97%
Kep. Babel	70.33%	75.25%	53.80%	68.62%	62.81%	72.33%
Kep. Riau	75.62%	79.75%	60.37%	69.04%	74.10%	78.62%
DKI Jakarta	75.94%	80.90%	0.00%	0.00%	75.94%	80.90%
Jabar	64.82%	73.21%	50.80%	63.29%	61.36%	70.98%
Jateng	61.33%	70.68%	51.49%	62.97%	56.44%	67.00%
DIY	68.51%	74.91%	52.27%	61.79%	63.93%	71.48%
Jatim	63.57%	73.37%	47.34%	63.07%	55.85%	68.68%
Banten	65.60%	75.12%	44.74%	59.27%	59.48%	70.72%
Bali	69.60%	78.96%	50.25%	68.49%	63.31%	75.81%
NTB	58.67%	67.36%	44.26%	59.72%	51.13%	63.48%
NTT	64.08%	69.74%	32.80%	43.55%	40.20%	49.95%
Kalbar	71.54%	76.83%	42.01%	57.97%	52.29%	64.65%

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Kalteng	77.04%	82.27%	55.84%	71.22%	64.26%	75.74%
Kalsel	73.82%	82.27%	52.69%	68.70%	62.56%	75.20%
Kaltim	76.87%	81.46%	68.06%	75.31%	74.00%	79.48%
Kalut	76.89%	81.55%	61.79%	70.45%	71.20%	77.08%
Sulut	75.03%	74.43%	62.09%	58.82%	68.79%	67.05%
Sulteng	68.19%	74.19%	48.75%	54.82%	54.53%	60.70%
Sulsel	71.45%	76.12%	56.30%	60.67%	62.76%	67.51%
Sultra	71.75%	73.17%	53.51%	59.20%	60.57%	64.79%
Gorontalo	69.04%	67.31%	55.11%	54.07%	60.99%	59.71%
Sulbar	61.05%	62.93%	43.14%	55.10%	47.36%	56.99%
Maluku	68.02%	71.76%	43.99%	49.48%	54.47%	59.41%
Malut	72.21%	75.37%	42.70%	48.13%	51.16%	56.11%
Papbar	75.18%	78.24%	53.99%	63.44%	62.88%	69.73%
Papua	72.07%	77.75%	18.62%	28.99%	33.24%	43.19%
Indonesia	66.57%	74.31%	48.23%	61.29%	58.35%	68.68%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Aceh	21.58%	21.51%	6.88%	6.85%	11.57%	11.72%
Sumatera Utara	18.11%	19.08%	8.98%	8.68%	13.91%	14.43%
Sumatera Barat	26.70%	23.86%	10.70%	8.46%	18.16%	15.83%
Riau	21.54%	24.03%	9.30%	8.39%	14.18%	14.80%
Jambi	19.18%	20.65%	9.02%	7.96%	12.32%	12.09%
Sumatera Selatan	18.24%	19.96%	6.55%	6.07%	10.92%	11.27%
Bengkulu	27.80%	27.70%	9.25%	7.80%	15.33%	14.47%
Lampung	17.14%	17.17%	6.68%	6.77%	9.90%	9.98%
Kep. Babel	15.55%	16.14%	7.44%	7.04%	11.86%	12.14%
Kep. Riau	19.73%	23.86%	10.65%	11.54%	18.83%	22.56%
DKI Jakarta	22.29%	24.72%	0.00%	0.00%	22.29%	24.72%
Jabar	15.26%	18.43%	6.68%	6.94%	13.14%	15.85%
Jateng	16.62%	17.95%	8.72%	8.99%	12.69%	13.66%
DIY	27.05%	30.01%	8.67%	10.34%	21.87%	24.86%
Jatim	18.04%	20.13%	8.39%	8.92%	13.45%	15.02%

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Banten	17.14%	20.54%	5.78%	6.64%	13.80%	16.68%
Bali	20.71%	22.40%	11.28%	13.06%	17.65%	19.59%
NTB	15.27%	17.81%	6.84%	8.89%	10.86%	13.29%
NTT	25.88%	29.25%	6.13%	6.42%	10.80%	12.00%
Kalbar	17.59%	20.46%	5.41%	6.15%	9.65%	11.22%
Kalteng	21.06%	22.64%	7.80%	8.11%	13.06%	14.04%
Kalsel	24.07%	25.74%	10.10%	11.00%	16.62%	18.05%
Kaltim	21.64%	24.10%	12.61%	11.59%	18.69%	20.07%
Kalut	22.85%	22.13%	9.10%	12.70%	17.67%	18.33%
Sulut	18.78%	18.73%	10.13%	8.61%	14.61%	13.95%
Sulteng	26.65%	25.54%	8.43%	8.08%	13.85%	13.38%
Sulsel	21.61%	23.25%	10.77%	9.21%	15.39%	15.42%
Sultra	25.21%	28.42%	8.30%	8.96%	14.84%	16.75%
Gorontalo	22.32%	22.44%	13.08%	11.09%	16.98%	15.92%

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Sulbar	18.28%	17.23%	10.25%	10.94%	12.14%	12.46%
Maluku	23.25%	23.26%	6.42%	6.21%	13.76%	13.80%
Malut	23.03%	26.21%	5.58%	5.99%	10.58%	11.91%
Papbar	15.09%	18.28%	10.17%	13.73%	12.24%	15.67%
Papua	18.66%	21.42%	2.87%	4.03%	7.19%	9.09%
Indonesia	18.40%	20.52%	8.06%	8.14%	13.77%	15.17%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Aceh	46.91%	51.87%	25.05%	32.93%	32.01%	39.23%
Sumatera Utara	50.25%	51.34%	28.08%	32.08%	40.04%	42.73%
Sumatera Barat	52.19%	53.56%	29.26%	32.09%	39.94%	42.36%
Riau	54.89%	59.93%	34.13%	38.71%	42.41%	47.40%
Jambi	56.46%	58.11%	32.57%	38.57%	40.33%	44.93%
Sumatera Selatan	50.09%	55.49%	26.07%	32.58%	35.05%	41.16%
Bengkulu	60.23%	62.12%	28.39%	32.68%	38.83%	42.54%
Lampung	52.42%	58.55%	30.08%	36.40%	36.95%	43.24%
Kep. Babel	53.79%	53.77%	33.50%	38.45%	44.56%	47.04%
Kep. Riau	66.01%	70.07%	36.00%	40.63%	63.02%	66.96%
DKI Jakarta	70.74%	76.17%	0.00%	0.00%	70.74%	76.17%
Jabar	56.27%	61.68%	34.94%	39.92%	50.99%	56.79%
Jateng	51.45%	57.73%	37.02%	44.25%	44.28%	51.28%
DIY	64.91%	71.16%	41.06%	49.03%	58.19%	65.37%
Jatim	52.99%	59.07%	32.92%	41.09%	43.44%	50.88%
Banten	61.57%	67.65%	32.13%	38.04%	52.94%	59.43%
Bali	57.05%	65.27%	33.11%	43.78%	49.27%	58.80%
NTB	44.15%	52.63%	27.44%	33.99%	35.40%	43.17%
NTT	50.05%	53.63%	16.35%	20.13%	24.33%	28.31%
Kalbar	57.93%	60.07%	24.91%	29.44%	36.40%	40.29%

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Kalteng	59.83%	62.43%	32.62%	40.94%	43.42%	49.72%
Kalsel	60.36%	65.52%	35.49%	42.55%	47.11%	53.55%
Kaltim	62.33%	66.51%	45.09%	50.29%	56.71%	61.29%
Kalut	63.43%	63.85%	35.61%	43.08%	52.95%	55.49%
Sulut	56.83%	54.37%	38.47%	35.69%	47.98%	45.53%
Sulteng	55.98%	55.86%	26.60%	26.88%	35.34%	35.68%
Sulsel	56.02%	59.53%	32.13%	34.52%	42.31%	45.59%
Sultra	56.15%	59.09%	30.81%	32.64%	40.61%	43.22%
Gorontalo	52.62%	50.85%	35.90%	32.99%	42.96%	40.60%
Sulbar	41.32%	42.18%	26.05%	29.90%	29.66%	32.85%
Maluku	52.14%	52.10%	19.19%	19.83%	33.56%	34.21%
Malut	53.43%	57.27%	18.41%	18.38%	28.45%	29.78%
Papbar	56.00%	60.25%	30.47%	34.62%	41.19%	45.51%
Papua	51.95%	57.74%	7.40%	9.56%	19.59%	23.59%
Indonesia	56.02%	61.08%	31.13%	36.62%	44.86%	50.50%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

F. Lampiran Bab V. Kepemimpinan Perempuan

Tabel 5.1. Anggota DPR Menurut Jenis Kelamin Tahun 1955-2019.

Tahun Pemilu	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1955	256	94.12	16	5.88	272	100,00
1971	429	93.26	31	6.74	460	100,00
1977	423	91.96	37	8.04	460	100,00
1982	418	90.87	42	9.13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88.18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82.14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82.68	97	17,32	560	100,00
2019	455	79.13	120	20,87	575	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2019.

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4	-	4
Sumatera Utara	3	1	4
Sumatera Barat	3	1	4
Riau	2	2	4
Jambi	2	2	4
Sumatera Selatan	-	4	4
Bengkulu	2	2	4
Lampung	3	1	4
Kepulauan Bangka Belitung	4	-	4

Tabel 5.2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2019.

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Riau	4	-	4
DKI Jakarta	2	2	4
Jawa Barat	3	1	4
Jawa Tengah	2	2	4
DI Yogyakarta	3	1	4
Jawa Timur	2	2	4
Banten	3	1	4
Bali	4	-	4
Nusa Tenggara Barat	3	1	4
Nusa Tenggara Timur	2	2	4
Kalimantan Barat	2	2	4
Kalimantan Tengah	3	1	4
Kalimantan Selatan	4	-	4
Kalimantan Timur	3	1	4
Kalimantan Utara	3	1	4
Sulawesi Utara	2	2	4
Sulawesi Tengah	4	-	4
Sulawesi Selatan	3	1	4
Sulawesi Tenggara	2	2	4
Gorontalo	2	2	4
Sulawesi Barat	4	-	4
Maluku	1	3	4
Maluku Utara	3	1	4
Papua Barat	4	-	4
Papua	3	1	4
Indonesia	94	42	136

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Bulan Desember 2018 dan Desember 2019.

Provinsi	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	70,013	93,530	163,543	69,722	95,499	165,221
Sumatera Utara	94,144	136,813	230,957	92,682	139,418	232,100
Sumatera Barat	48,268	79,943	128,211	47,860	81,735	129,595
Riau	45,415	56,952	102,367	45,126	58,244	103,370
Jambi	37,039	39,600	76,639	36,292	40,382	76,674
Sumatera Selatan	57,719	74,325	132,044	56,757	75,349	132,106
Bengkulu	28,141	30,340	58,481	27,880	31,296	59,176
Lampung	56,257	61,977	118,234	55,592	63,952	119,544
Kepulauan Bangka Belitung	14,750	16,238	30,988	15,079	17,284	32,363
Kepulauan Riau	19,976	17,389	37,365	20,455	18,583	39,038
DKI Jakarta	147,255	121,425	268,680	146,603	125,018	271,621
Jawa Barat	209,351	191,945	401,296	201,856	191,862	393,718
Jawa Tengah	203,117	198,166	401,283	195,250	201,865	397,115
DI Yogyakarta	38,548	36,727	75,275	37,004	37,754	74,758
Jawa Timur	230,983	209,646	440,629	225,144	213,858	439,002
Banten	47,852	45,650	93,502	47,266	46,591	93,857
Bali	48,968	39,264	88,232	46,348	39,663	86,011
Nusa Tenggara Barat	51,583	37,626	89,209	49,525	38,241	87,766
Nusa Tenggara Timur	63,242	57,847	121,089	62,664	60,166	122,830

Tabel 5.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Bulan Desember 2018 dan Desember 2019.

Provinsi	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalimantan Barat	46,466	42,078	88,544	45,978	42,783	88,761
Kalimantan Tengah	36,464	36,632	73,096	36,654	38,127	74,781
Kalimantan Selatan	43,558	45,490	89,048	43,212	46,271	9,483
Kalimantan Timur	41,962	37,254	79,216	41,614	38,007	79,621
Kalimantan Utara	11,938	9,403	21,341	12,269	10,162	22,431
Sulawesi Utara	29,903	42,459	72,362	30,425	43,729	74,154
Sulawesi Tengah	41,951	45,955	87,906	42,008	47,233	89,241
Sulawesi Selatan	87,839	109,223	197,062	86,243	110,866	197,109
Sulawesi Tenggara	42,722	40,313	83,035	42,894	42,107	85,001
Gorontalo	13,921	20,300	34,221	14,091	20,897	34,988
Sulawesi Barat	18,247	17,963	36,210	18,436	18,801	37,237
Maluku	29,984	36,234	66,218	30,183	37,311	67,494
Maluku Utara	22,321	23,499	45,820	22,801	24,594	47,395
Papua Barat	24,911	19,062	43,973	24,793	19,079	43,872
Papua	60,888	41,027	101,915	60,536	41,083	101,619
Luar Negeri	56	17	73	52	17	69
Indonesia	2,065,752	2,112,312	4,178,064	2,031,294	2,157,827	4,189,121

Tabel 5.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Desember 2018 dan Desember 2019.

Jabatan	2018			2019		
Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Tertentu	839,801	1,343,627	2,183,428	800,733	1,310,613	2,111,346
Fungsional Umum/Staf	911,288	612,539	1,523,827	922,383	688,675	1,611,058
Struktural	314,663	156,146	470,809	308,178	158,539	466,717
Eselon V	10,290	4,489	14,779	10,356	4,533	14,889
Eselon IV	208,670	125,149	333,819	204,104	126,999	331,103
Eselon III	77,536	23,745	101,281	76,469	24,286	100,755
Eselon II	17,649	2,660	20,309	16,737	2,608	19,345
Eselon I	518	103	621	512	113	625
Jumlah/Total	2,065,752	2,112,312	4,178,064	2,031,294	2,157,827	4,189,121

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tabel 5.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2018 dan Desember 2019

Tingkat Pendidikan	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sampai dengan SD	27,266	2,226	29,492	23,459	1,988	25,447
SMP/Sederajat	46,937	5,957	52,894	42,003	5,277	47,280
SMA/Sederajat	538,089	309,977	848,066	499,354	279,278	778,632
Diploma I, II/ Akta I, II	90,367	119,024	209,391	77,030	97,870	174,900
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	116,098	272,271	388,369	118,482	288,891	407,373
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1,246,995	1,402,857	2,649,852	1,270,966	1,484,523	2,755,489
Jumlah/Total	2,065,752	2,112,312	4,178,064	2,031,294	2,157,827	4,189,121

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tabel 5.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2018 dan Desember 2019

Pangkat/Golongan/Ruang		2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	I/A (Juru Muda)	1,876	231	2,107	1,387	198	1,585
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	5,603	601	6,204	5,463	588	6,051
3	I/C (Juru)	16,244	2,132	18,376	12,838	1,614	14,452
4	I/D (Juru Tingkat I)	17,204	1,826	19,030	17,601	1,964	19,565
Golongan I		40,927	4,790	45,717	37,289	4,364	41,653
5	II/A (Pengatur Muda)	78,222	31,764	109,986	67,637	25,200	92,837
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	98,740	48,760	147,500	96,804	48,181	144,985
7	II/C (Pengatur)	163,937	116,345	280,282	156,388	127,313	283,701
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	125,880	99,009	224,889	128,106	94,142	222,248
Golongan II		466,779	295,878	762,657	448,935	294,836	743,771
9	III/A (Penata Muda)	193,148	246,815	439,963	227,821	301,189	529,010
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	287,249	360,816	648,065	282,702	367,847	650,549
11	III/C (Penata)	267,834	323,649	591,483	265,739	332,869	598,608
12	III/D (Penata Tingkat I)	292,360	311,518	603,878	286,501	318,690	605,191

Pangkat/Golongan/Ruang		2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Golongan III	1,040,591	1,242,798	2,283,389	1,062,763	1,320,595	2,383,358
13	IV/A (Pembina)	311,273	346,854	658,127	280,422	312,949	593,371
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	170,246	208,213	378,459	167,166	210,974	378,140
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	25,600	10,625	36,225	24,358	10,790	35,148
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	7,031	2,296	9,327	7,051	2,388	9,439
17	IV/E (Pembina Utama)	3,305	858	4,163	3,310	931	4,241
	Golongan IV	517,455	568,846	1,086,301	482,307	538,032	1,020,339
	Jumlah	2,065,752	2,112,312	4,178,064	2,031,294	2,157,827	4,189,121

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tabel 5.7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Desember 2018 dan Desember 2019

Kelompok Umur	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18-20	5,398	3,859	9,257	2,394	2,267	4,661
21-25	27,497	16,600	44,097	38,664	45,467	84,131
26-30	62,468	85,243	147,711	84,065	109,604	193,669
31-35	202,117	299,726	501,843	187,050	289,442	476,492
36-40	297,876	362,688	660,564	291,866	368,872	660,738
41-45	295,796	303,615	599,411	295,781	314,917	610,698
46-50	388,294	370,929	759,223	354,263	343,489	697,752
51-55	485,798	414,816	900,614	468,455	410,461	878,916
56-60	291,140	251,372	542,512	297,510	268,684	566,194
61-65	8,517	3,259	11,776	10,385	4,383	14,768
66+	851	205	1,056	861	241	1,102
Jumlah	2,065,752	2,112,312	4,178,064	2,031,294	2,157,827	4,189,121

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tabel 5.8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2018 dan Desember 2019

Masa Kerja	2018			2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-04	166,198	162,246	328,444	134,522	160,095	294,617
05-09	380,566	506,423	886,989	233,260	328,449	561,709
10-14	573,062	580,525	1,153,587	433,326	536,315	969,641
15-19	455,029	436,072	891,101	403,631	364,362	767,993
20-24	291,929	252,784	544,713	332,456	301,594	634,050
25-29	134,655	119,891	254,546	305,844	268,974	574,818
30-34	39,852	32,376	72,228	146,802	164,301	311,103
35+	24,461	21,995	46,456	41,453	33,737	75,190
Jumlah/Total	2,065,752	2,112,312	4,178,064	2,031,294	2,157,827	4,189,121

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tabel 5.9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kepegawaian dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2018 dan Desember 2019

Jenis Kepegawaian			2018			2019		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pusat		553,880	385,765	939,645	556,207	401,722	957,929
	Total Central Civil Servants							
	a.	Pegawai Negeri Sipil Pusat	553,267	385,440	938,707	555,495	401,365	956,860
		Central Civil Servants						
	b	PNS Pusat diperbantukan pada instansi lain	139	164	303	135	158	293
		Central Civil Servants working to assist other institutions						
	c	PNS Pusat dipekerjakan pada instansi lain	429	147	576	535	188	723
		Central Civil Servants who were employed at other institutions						
	d	PNS Pusat dipebantukan pada BUMN/Badan lain	1	2	3	1	2	3
		Central civil servants working to assist state-owned companies/ other						
	e	PNS Pusat dipekerjakan pada BUMN/Badan lain	44	12	56	41	9	50

Tabel 5.9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kepegawaian dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2018 dan Desember 2019

Jenis Kepegawaian			2018			2019		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Central Civil Servant who were employed at State-Owned Companies/Other						
2		Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi	280,003	276,699	556,702	274,305	279,906	554,211
		Total Provincial Civil Servants						
	a	Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi	279,555	276,318	555,873	273,882	279,547	553,429
	b	PNS Pusat diperbantukan pada Pemda Provinsi	54	88	142	53	81	134
	c	PNS Pusat dipekerjakan pada Pemda Provinsi	72	93	165	72	87	159
	d	PNS Provinsi diperbantukan pada instansi lain	45	34	79	42	32	74
	e	PNS Provinsi dipekerjakan pada instansi lain	271	164	435	252	157	409
	f	PNS Provinsi diberbantukan pada BUMN/Bidang Lain	3	2	5	1	2	3
	g	PNS Provinsi dipekerjakan pada BUMN/Badan lain	3	-	3	3	-	3

Tabel 5.9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kepegawaian dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2018 dan Desember 2019

Jenis Kepegawaian			2018			2019		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3		Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota	1,231,869	1,449,848	2,681,717	1,200,782	1,476,199	2,676,981
	a	Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota	1,230,999	1,449,060	2,680,059	1,199,964	1,475,443	2,675,407
	b	PNS Pusat diperbantukan pada Pemda Kabupaten/Kota	186	161	347	175	157	332
	c	PNS Pusat dipekerjakan pada Pemda Kabupaten/Kota	311	341	652	297	326	623
	d	PNS Kabupaten Kota diperbantukan pada Instansi Lain	97	98	195	98	95	193
	e	PNS Kabupaten/Kota dipekerjakan pada Instansi Lain	256	167	423	234	158	392
	f	PNS Kabupaten/Kota diperbantukan pada BUMN/Badan lain	10	15	25	7	14	21
	g	PNS Kabupaten/Kota dipekerjakan pada BUMN/Badan Lain	10	6	16	7	6	13
		Jumlah	2,065,752	2,112,312	4,178,064	2,031,294	2,157,827	4,189,121

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

G. Lampiran Bab VI. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Tabel 6.1. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	17.64%	82.36%	20.90%	79.10%	19.84%	80.16%
Sumatera Utara	16.81%	83.19%	17.72%	82.28%	17.23%	82.77%
Sumatera Barat	18.21%	81.79%	16.85%	83.15%	17.48%	82.52%
Riau	12.01%	87.99%	10.92%	89.08%	11.36%	88.64%
Jambi	12.41%	87.59%	11.46%	88.54%	11.76%	88.24%
Sumatera Selatan	13.60%	86.40%	10.83%	89.17%	11.81%	88.19%
Bengkulu	13.91%	86.09%	10.35%	89.65%	11.53%	88.47%
Lampung	11.53%	88.47%	10.53%	89.47%	10.83%	89.17%
Kep. Babel	10.62%	89.38%	11.74%	88.26%	11.12%	88.88%
Kep. Riau	11.19%	88.81%	11.60%	88.40%	11.23%	88.77%
DKI Jakarta	17.44%	82.56%	-	-	17.44%	82.56%
Jabar	13.56%	86.44%	17.57%	82.43%	14.56%	85.44%
Jateng	16.71%	83.29%	16.98%	83.02%	16.84%	83.16%
DIY	22.18%	77.82%	14.90%	85.10%	20.37%	79.63%

Tabel 6.1. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jatim	16.35%	83.65%	18.52%	81.48%	17.36%	82.64%
Banten	12.23%	87.77%	15.30%	84.70%	13.08%	86.92%
Bali	10.37%	89.63%	10.78%	89.22%	10.49%	89.51%
NTB	21.69%	78.31%	22.26%	77.74%	21.99%	78.01%
NTT	17.88%	82.12%	18.43%	81.57%	18.29%	81.71%
Kalbar	14.90%	85.10%	11.26%	88.74%	12.53%	87.47%
Kalteng	10.56%	89.44%	10.24%	89.76%	10.36%	89.64%
Kalsel	16.86%	83.14%	15.93%	84.07%	16.37%	83.63%
Kaltim	11.88%	88.12%	11.24%	88.76%	11.67%	88.33%
Kalut	10.53%	89.47%	6.16%	93.84%	8.87%	91.13%
Sulut	15.72%	84.28%	12.76%	87.24%	14.31%	85.69%
Sulteng	15.05%	84.95%	11.35%	88.65%	12.44%	87.56%
Sulsel	20.27%	79.73%	19.63%	80.37%	19.91%	80.09%
Sultra	17.70%	82.30%	15.86%	84.14%	16.56%	83.44%
Gorontalo	17.22%	82.78%	13.24%	86.76%	14.95%	85.05%

Tabel 6.1. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulbar	16.46%	83.54%	13.48%	86.52%	14.17%	85.83%
Maluku	16.75%	83.25%	12.55%	87.45%	14.44%	85.56%
Malut	16.99%	83.01%	10.43%	89.57%	12.37%	87.63%
Papbar	13.81%	86.19%	9.96%	90.04%	11.55%	88.45%
Papua	9.41%	90.59%	8.43%	91.57%	8.69%	91.31%
Indonesia	15.24%	84.76%	15.74%	84.26%	15.46%	84.54%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.2. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	15.71%	4.74%	13.15%	66.39%	100.00%	5.65%	90.85%	0.91%	2.59%	100.00%
Sumatera Utara	10.25%	5.97%	13.42%	70.36%	100.00%	2.53%	91.68%	1.56%	4.22%	100.00%
Sumatera Barat	21.15%	4.43%	17.46%	56.96%	100.00%	4.46%	90.63%	1.50%	3.40%	100.00%
Riau	20.15%	5.01%	17.33%	57.51%	100.00%	5.16%	90.86%	1.50%	2.49%	100.00%
Jambi	11.38%	9.93%	18.02%	60.67%	100.00%	2.83%	92.74%	0.93%	3.50%	100.00%
Sumatera Selatan	13.12%	4.90%	12.41%	69.58%	100.00%	2.35%	92.60%	1.40%	3.66%	100.00%
Bengkulu	24.69%	4.67%	14.87%	55.77%	100.00%	4.20%	91.29%	1.61%	2.91%	100.00%
Lampung	10.18%	10.12%	13.48%	66.23%	100.00%	2.74%	92.66%	1.34%	3.25%	100.00%
Kep. Babel	6.44%	5.11%	22.22%	66.23%	100.00%	3.87%	88.92%	3.13%	4.08%	100.00%
Kep. Riau	32.52%	13.89%	17.57%	36.02%	100.00%	5.77%	89.84%	2.44%	1.95%	100.00%
DKI Jakarta	14.70%	8.26%	14.01%	63.03%	100.00%	5.30%	88.78%	2.20%	3.71%	100.00%
Jabar	9.19%	6.26%	16.79%	67.76%	100.00%	2.82%	91.31%	1.83%	4.04%	100.00%
Jateng	10.20%	9.90%	11.88%	68.02%	100.00%	2.76%	90.89%	1.44%	4.91%	100.00%
DIY	39.72%	5.95%	9.21%	45.12%	100.00%	13.33%	81.91%	1.05%	3.71%	100.00%
Jatim	9.53%	10.56%	13.26%	66.66%	100.00%	3.92%	90.12%	1.68%	4.29%	100.00%

Tabel 6.2. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Banten	6.63%	6.22%	16.04%	71.11%	100.00%	2.70%	92.18%	1.36%	3.75%	100.00%
Bali	35.40%	13.17%	11.94%	39.49%	100.00%	7.29%	88.44%	1.58%	2.70%	100.00%
NTB	11.50%	28.55%	16.29%	43.66%	100.00%	2.86%	92.84%	1.93%	2.37%	100.00%
NTT	34.07%	8.30%	10.30%	47.33%	100.00%	9.47%	86.86%	0.73%	2.94%	100.00%
Kalbar	12.54%	8.76%	9.53%	69.16%	100.00%	5.02%	89.34%	1.20%	4.45%	100.00%
Kalteng	18.65%	5.93%	17.02%	58.40%	100.00%	4.19%	90.01%	1.78%	4.02%	100.00%
Kalsel	17.45%	5.26%	14.76%	62.53%	100.00%	5.30%	89.02%	2.10%	3.58%	100.00%
Kaltim	12.33%	6.11%	17.62%	63.94%	100.00%	4.51%	89.15%	2.31%	4.03%	100.00%
Kalut	13.52%	10.08%	18.41%	58.00%	100.00%	4.89%	90.40%	2.47%	2.24%	100.00%
Sulut	15.73%	10.51%	13.80%	59.96%	100.00%	4.78%	88.65%	2.01%	4.55%	100.00%
Sulteng	28.35%	5.30%	12.89%	53.46%	100.00%	7.00%	87.35%	1.79%	3.87%	100.00%
Sulsel	17.96%	8.13%	15.09%	58.82%	100.00%	4.66%	88.90%	1.84%	4.60%	100.00%
Sultra	22.99%	16.49%	9.42%	51.11%	100.00%	5.44%	90.56%	1.57%	2.43%	100.00%
Gorontalo	30.15%	9.17%	11.81%	48.87%	100.00%	4.15%	90.02%	1.62%	4.22%	100.00%
Sulbar	21.42%	6.70%	15.45%	56.43%	100.00%	4.57%	88.59%	1.13%	5.71%	100.00%

Tabel 6.2. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Maluku	14.69%	9.21%	15.71%	60.39%	100.00%	5.27%	86.27%	2.28%	6.18%	100.00%
Malut	28.16%	6.87%	13.07%	51.91%	100.00%	7.90%	85.76%	2.16%	4.19%	100.00%
Papbar	7.86%	10.00%	22.64%	59.50%	100.00%	4.02%	89.99%	1.61%	4.39%	100.00%
Papua	15.15%	8.49%	13.15%	63.21%	100.00%	5.72%	89.22%	1.77%	3.29%	100.00%
Indonesia	13.20%	8.49%	14.36%	63.96%	100.00%	3.88%	90.45%	1.70%	3.97%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.3. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	3.12%	5.64%	15.24%	76.00%	100.00%	1.48%	95.29%	0.87%	2.36%	100.00%
Sumatera Utara	1.57%	7.72%	9.28%	81.44%	100.00%	0.91%	95.29%	0.60%	3.20%	100.00%
Sumatera Barat	2.40%	5.06%	19.36%	73.17%	100.00%	0.88%	95.93%	0.91%	2.27%	100.00%
Riau	3.09%	7.26%	16.84%	72.81%	100.00%	1.07%	95.19%	1.05%	2.69%	100.00%
Jambi	2.79%	6.58%	15.28%	75.34%	100.00%	1.01%	95.18%	1.01%	2.80%	100.00%
Sumatera Selatan	3.63%	7.31%	11.96%	77.10%	100.00%	1.18%	94.95%	1.00%	2.86%	100.00%
Bengkulu	5.84%	5.54%	19.39%	69.23%	100.00%	1.46%	95.30%	0.99%	2.24%	100.00%
Lampung	1.01%	10.93%	12.61%	75.45%	100.00%	1.09%	95.34%	0.99%	2.57%	100.00%
Kep. Babel	5.87%	1.20%	15.95%	76.98%	100.00%	1.69%	93.07%	2.27%	2.97%	100.00%
Kep. Riau	0.44%	8.90%	8.28%	82.38%	100.00%	2.09%	92.10%	2.22%	3.60%	100.00%
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabar	1.35%	6.50%	17.40%	74.74%	100.00%	0.69%	95.04%	1.60%	2.68%	100.00%
Jateng	1.61%	14.75%	12.41%	71.23%	100.00%	0.67%	95.26%	0.86%	3.20%	100.00%

Tabel 6.3. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DIY	4.36%	9.28%	12.16%	74.20%	100.00%	1.47%	94.15%	1.21%	3.17%	100.00%
Jatim	2.30%	15.56%	10.85%	71.29%	100.00%	1.14%	93.71%	1.37%	3.78%	100.00%
Banten	2.10%	2.54%	14.97%	80.39%	100.00%	0.45%	96.80%	0.66%	2.09%	100.00%
Bali	8.13%	5.51%	5.13%	81.24%	100.00%	1.13%	95.75%	0.81%	2.31%	100.00%
NTB	2.83%	38.89%	15.65%	42.63%	100.00%	1.27%	95.04%	1.28%	2.41%	100.00%
NTT	8.38%	23.89%	7.63%	60.10%	100.00%	2.21%	92.02%	0.81%	4.97%	100.00%
Kalbar	4.13%	13.52%	12.74%	69.61%	100.00%	2.26%	93.08%	0.88%	3.78%	100.00%
Kalteng	4.12%	5.79%	15.17%	74.92%	100.00%	3.14%	92.05%	1.53%	3.28%	100.00%
Kalsel	4.79%	6.35%	18.63%	70.23%	100.00%	2.80%	92.23%	1.73%	3.23%	100.00%
Kaltim	3.13%	7.04%	17.07%	72.76%	100.00%	1.98%	91.74%	2.15%	4.12%	100.00%
Kalut	6.60%	9.28%	19.05%	65.08%	100.00%	2.03%	92.61%	2.05%	3.31%	100.00%
Sulut	4.56%	13.03%	11.82%	70.59%	100.00%	1.80%	93.12%	1.35%	3.73%	100.00%
Sulteng	5.27%	7.29%	13.93%	73.51%	100.00%	1.74%	93.27%	1.64%	3.36%	100.00%

Tabel 6.3. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sulsel	10.45%	12.54%	12.35%	64.65%	100.00%	1.49%	93.16%	1.27%	4.08%	100.00%
Sultra	2.81%	16.87%	15.62%	64.69%	100.00%	1.43%	93.53%	1.90%	3.15%	100.00%
Gorontalo	5.55%	16.19%	13.64%	64.62%	100.00%	0.68%	95.29%	1.08%	2.95%	100.00%
Sulbar	8.60%	8.61%	17.10%	65.69%	100.00%	2.57%	93.38%	0.92%	3.13%	100.00%
Maluku	6.47%	14.39%	9.98%	69.17%	100.00%	1.44%	92.64%	1.44%	4.48%	100.00%
Malut	7.10%	8.51%	7.78%	76.61%	100.00%	1.20%	93.52%	0.74%	4.54%	100.00%
Papbar	9.32%	10.49%	12.71%	67.48%	100.00%	4.28%	89.80%	1.73%	4.20%	100.00%
Papua	3.62%	7.92%	11.54%	76.93%	100.00%	3.08%	90.52%	1.27%	5.13%	100.00%
Indonesia	3.10%	12.13%	13.21%	71.56%	100.00%	1.24%	94.37%	1.16%	3.23%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.4. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan dan Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	6.77%	5.38%	14.64%	73.22%	100.00%	2.88%	93.81%	0.88%	2.43%	100.00%
Sumatera Utara	6.12%	6.80%	11.45%	75.63%	100.00%	1.78%	93.34%	1.12%	3.75%	100.00%
Sumatera Barat	11.51%	4.75%	18.44%	65.30%	100.00%	2.54%	93.48%	1.19%	2.80%	100.00%
Riau	10.42%	6.29%	17.05%	66.23%	100.00%	2.72%	93.44%	1.23%	2.61%	100.00%
Jambi	5.68%	7.71%	16.20%	70.41%	100.00%	1.59%	94.41%	0.98%	3.02%	100.00%
Sumatera Selatan	7.49%	6.33%	12.15%	74.04%	100.00%	1.59%	94.14%	1.14%	3.13%	100.00%
Bengkulu	13.34%	5.19%	17.59%	63.87%	100.00%	2.34%	94.02%	1.19%	2.45%	100.00%
Lampung	3.89%	10.67%	12.88%	72.55%	100.00%	1.58%	94.56%	1.10%	2.77%	100.00%
Kep. Babel	6.17%	3.27%	19.27%	71.29%	100.00%	2.90%	90.76%	2.75%	3.59%	100.00%
Kep. Riau	29.14%	13.37%	16.59%	40.90%	100.00%	5.39%	90.07%	2.42%	2.12%	100.00%
DKI Jakarta	14.70%	8.26%	14.01%	63.03%	100.00%	5.30%	88.78%	2.20%	3.71%	100.00%
Jabar	6.83%	6.33%	16.98%	69.86%	100.00%	2.31%	92.21%	1.78%	3.71%	100.00%
Jateng	5.91%	12.32%	12.15%	69.62%	100.00%	1.73%	93.05%	1.15%	4.07%	100.00%

Tabel 6.4. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan dan Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DIY	33.30%	6.55%	9.74%	50.40%	100.00%	10.18%	85.16%	1.09%	3.57%	100.00%
Jatim	5.93%	13.05%	12.06%	68.97%	100.00%	2.64%	91.77%	1.54%	4.06%	100.00%
Banten	5.16%	5.03%	15.69%	74.12%	100.00%	2.09%	93.42%	1.17%	3.31%	100.00%
Bali	26.79%	10.75%	9.79%	52.67%	100.00%	5.40%	90.68%	1.34%	2.58%	100.00%
NTB	6.90%	34.04%	15.95%	43.11%	100.00%	2.03%	93.99%	1.59%	2.39%	100.00%
NTT	14.45%	20.21%	8.26%	57.09%	100.00%	3.97%	90.77%	0.79%	4.48%	100.00%
Kalbar	7.61%	11.55%	11.41%	69.43%	100.00%	3.19%	91.81%	0.99%	4.01%	100.00%
Kalteng	9.91%	5.85%	15.91%	68.33%	100.00%	3.55%	91.25%	1.63%	3.57%	100.00%
Kalsel	10.96%	5.82%	16.74%	66.48%	100.00%	3.98%	90.72%	1.90%	3.40%	100.00%
Kaltim	9.47%	6.40%	17.45%	66.68%	100.00%	3.69%	89.99%	2.26%	4.06%	100.00%
Kalut	11.69%	9.86%	18.58%	59.86%	100.00%	3.77%	91.27%	2.30%	2.66%	100.00%
Sulut	10.98%	11.58%	12.96%	64.48%	100.00%	3.33%	90.82%	1.69%	4.15%	100.00%
Sulteng	13.50%	6.58%	13.56%	66.36%	100.00%	3.24%	91.57%	1.68%	3.50%	100.00%

Tabel 6.4. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan dan Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sulsel	13.71%	10.63%	13.54%	62.12%	100.00%	2.84%	91.35%	1.51%	4.30%	100.00%
Sultra	11.05%	16.72%	13.09%	59.14%	100.00%	2.94%	92.41%	1.78%	2.88%	100.00%
Gorontalo	17.73%	12.72%	12.73%	56.82%	100.00%	2.13%	93.09%	1.31%	3.48%	100.00%
Sulbar	12.04%	8.10%	16.66%	63.21%	100.00%	3.02%	92.30%	0.97%	3.71%	100.00%
Maluku	10.76%	11.68%	12.97%	64.59%	100.00%	3.12%	89.85%	1.81%	5.22%	100.00%
Malut	15.64%	7.84%	9.93%	66.59%	100.00%	3.08%	91.35%	1.13%	4.44%	100.00%
Papbar	8.60%	10.25%	17.60%	63.55%	100.00%	4.18%	89.87%	1.68%	4.27%	100.00%
Papua	6.94%	8.08%	12.00%	72.97%	100.00%	3.78%	90.17%	1.40%	4.65%	100.00%
Indonesia	8.68%	10.12%	13.84%	67.36%	100.00%	2.72%	92.17%	1.46%	3.65%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.5. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	3.07%	9.80%	87.13%	100.00%	0.39%	2.96%	96.65%	100.00%
Sumatera Utara	1.70%	5.80%	92.50%	100.00%	0.32%	1.03%	98.65%	100.00%
Sumatera Barat	2.72%	14.56%	82.72%	100.00%	0.71%	3.18%	96.11%	100.00%
Riau	3.73%	11.68%	84.59%	100.00%	0.35%	3.35%	96.30%	100.00%
Jambi	7.92%	3.13%	88.95%	100.00%	0.57%	2.08%	97.35%	100.00%
Sumatera Selatan	3.95%	6.64%	89.40%	100.00%	0.54%	1.54%	97.92%	100.00%
Bengkulu	3.92%	15.84%	80.23%	100.00%	0.36%	2.42%	97.22%	100.00%
Lampung	8.86%	5.72%	85.42%	100.00%	0.85%	1.23%	97.92%	100.00%
Kep. Babel	4.94%	1.39%	93.68%	100.00%	1.07%	0.37%	98.57%	100.00%
Kep. Riau	6.32%	2.47%	91.22%	100.00%	0.66%	0.61%	98.73%	100.00%
DKI Jakarta	3.90%	2.37%	93.73%	100.00%	0.84%	0.59%	98.57%	100.00%

Tabel 6.5. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jabar	7.74%	4.35%	87.91%	100.00%	1.37%	1.00%	97.63%	100.00%
Jateng	13.03%	5.56%	81.40%	100.00%	2.67%	1.15%	96.18%	100.00%
DIY	9.73%	29.72%	60.56%	100.00%	1.21%	9.72%	89.08%	100.00%
Jatim	11.06%	5.14%	83.79%	100.00%	2.37%	1.47%	96.17%	100.00%
Banten	11.95%	0.20%	87.85%	100.00%	1.58%	1.15%	97.28%	100.00%
Bali	10.60%	9.98%	79.42%	100.00%	1.57%	1.64%	96.79%	100.00%
NTB	21.17%	6.45%	72.39%	100.00%	5.68%	2.74%	91.58%	100.00%
NTT	3.36%	21.89%	74.75%	100.00%	1.70%	6.58%	91.72%	100.00%
Kalbar	16.24%	8.14%	75.62%	100.00%	2.63%	2.19%	95.18%	100.00%
Kalteng	3.48%	11.39%	85.13%	100.00%	1.01%	2.00%	97.00%	100.00%
Kalsel	2.05%	11.66%	86.30%	100.00%	1.05%	2.92%	96.03%	100.00%
Kaltim	6.17%	6.04%	87.78%	100.00%	1.20%	1.42%	97.38%	100.00%

Tabel 6.5. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kalut	5.31%	4.62%	90.07%	100.00%	1.44%	0.95%	97.62%	100.00%
Sulut	0.01%	10.60%	89.39%	100.00%	0.15%	1.81%	98.04%	100.00%
Sulteng	2.62%	18.71%	78.67%	100.00%	0.22%	4.14%	95.63%	100.00%
Sulsel	6.82%	5.71%	87.47%	100.00%	1.77%	2.42%	95.81%	100.00%
Sultra	10.14%	16.85%	73.02%	100.00%	1.79%	4.84%	93.37%	100.00%
Gorontalo	0.00%	22.67%	77.33%	100.00%	0.40%	2.93%	96.67%	100.00%
Sulbar	8.72%	0.99%	90.28%	100.00%	3.26%	3.17%	93.57%	100.00%
Maluku	0.75%	8.49%	90.76%	100.00%	0.41%	3.84%	95.75%	100.00%
Malut	1.99%	21.84%	76.17%	100.00%	0.22%	5.80%	93.97%	100.00%
Papbar	1.72%	1.06%	97.22%	100.00%	1.22%	0.99%	97.79%	100.00%
Papua	4.27%	3.11%	92.63%	100.00%	2.12%	1.24%	96.64%	100.00%
Indonesia	8.37%	6.45%	85.18%	100.00%	1.58%	1.61%	96.82%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.6. Persentase Kepala Rumah Tangga di Pedesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	8.61%	0.12%	91.27%	100.00%	1.80%	0.53%	97.67%	100.00%
Sumatera Utara	7.50%	0.11%	92.39%	100.00%	1.71%	0.75%	97.53%	100.00%
Sumatera Barat	6.37%	1.04%	92.60%	100.00%	0.99%	0.30%	98.70%	100.00%
Riau	10.73%	0.80%	88.47%	100.00%	2.24%	0.48%	97.27%	100.00%
Jambi	14.61%	2.96%	82.43%	100.00%	2.35%	0.41%	97.24%	100.00%
Sumatera Selatan	10.13%	0.88%	88.99%	100.00%	2.03%	0.27%	97.70%	100.00%
Bengkulu	22.88%	4.51%	72.61%	100.00%	2.05%	0.59%	97.36%	100.00%
Lampung	12.19%	0.61%	87.21%	100.00%	1.44%	0.45%	98.11%	100.00%
Kep. Babel	23.68%	0.82%	75.51%	100.00%	5.29%	0.37%	94.34%	100.00%
Kep. Riau	33.45%	0.00%	66.55%	100.00%	6.18%	0.11%	93.71%	100.00%
DKI Jakarta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jabar	12.73%	0.05%	87.22%	100.00%	2.94%	0.33%	96.73%	100.00%

Tabel 6.6. Persentase Kepala Rumah Tangga di Pedesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jateng	22.29%	0.36%	77.35%	100.00%	4.36%	0.36%	95.28%	100.00%
DIY	25.31%	0.00%	74.69%	100.00%	4.45%	0.11%	95.45%	100.00%
Jatim	28.61%	0.31%	71.09%	100.00%	8.22%	0.33%	91.45%	100.00%
Banten	12.96%	0.07%	86.96%	100.00%	2.97%	0.26%	96.77%	100.00%
Bali	34.49%	0.00%	65.51%	100.00%	5.84%	0.20%	93.96%	100.00%
NTB	26.99%	1.13%	71.88%	100.00%	7.74%	1.00%	91.26%	100.00%
NTT	16.89%	2.50%	80.61%	100.00%	6.23%	0.70%	93.07%	100.00%
Kalbar	26.41%	0.00%	73.59%	100.00%	7.20%	0.47%	92.34%	100.00%
Kalteng	8.91%	0.83%	90.26%	100.00%	1.96%	0.66%	97.38%	100.00%
Kalsel	9.61%	0.74%	89.65%	100.00%	1.77%	0.65%	97.58%	100.00%
Kaltim	8.02%	0.33%	91.66%	100.00%	2.66%	0.29%	97.05%	100.00%
Kalut	21.17%	0.00%	78.83%	100.00%	7.11%	0.17%	92.72%	100.00%

Tabel 6.6. Persentase Kepala Rumah Tangga di Pedesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sulut	1.79%	0.32%	97.89%	100.00%	0.40%	0.19%	99.41%	100.00%
Sulteng	6.22%	1.23%	92.56%	100.00%	2.81%	0.38%	96.81%	100.00%
Sulsel	22.06%	0.92%	77.03%	100.00%	9.24%	0.44%	90.33%	100.00%
Sultra	21.88%	1.21%	76.91%	100.00%	4.48%	0.54%	94.98%	100.00%
Gorontalo	3.55%	1.10%	95.36%	100.00%	1.25%	0.33%	98.42%	100.00%
Sulbar	18.11%	0.73%	81.15%	100.00%	6.05%	0.82%	93.13%	100.00%
Maluku	7.54%	0.57%	91.89%	100.00%	1.78%	0.24%	97.98%	100.00%
Malut	9.34%	4.44%	86.23%	100.00%	1.71%	1.07%	97.22%	100.00%
Papbar	22.42%	2.90%	74.69%	100.00%	4.82%	1.70%	93.47%	100.00%
Papua	53.49%	0.80%	45.70%	100.00%	39.62%	0.99%	59.39%	100.00%
Indonesia	18.69%	0.58%	80.72%	100.00%	5.11%	0.44%	94.44%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.7. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Pedesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	7.01%	2.92%	90.07%	100.00%	1.33%	1.34%	97.33%	100.00%
Sumatera Utara	4.46%	3.09%	92.45%	100.00%	0.96%	0.91%	98.13%	100.00%
Sumatera Barat	4.59%	7.61%	87.80%	100.00%	0.86%	1.63%	97.51%	100.00%
Riau	7.72%	5.48%	86.81%	100.00%	1.48%	1.64%	96.88%	100.00%
Jambi	12.36%	3.02%	84.62%	100.00%	1.78%	0.94%	97.28%	100.00%
Sumatera Selatan	7.62%	3.22%	89.16%	100.00%	1.51%	0.71%	97.78%	100.00%
Bengkulu	15.34%	9.02%	75.64%	100.00%	1.51%	1.18%	97.32%	100.00%
Lampung	11.14%	2.21%	86.64%	100.00%	1.27%	0.68%	98.05%	100.00%
Kep. Babel	13.76%	1.12%	85.12%	100.00%	2.94%	0.37%	96.69%	100.00%
Kep. Riau	9.17%	2.21%	88.62%	100.00%	1.22%	0.56%	98.22%	100.00%
DKI Jakarta	3.90%	2.37%	93.73%	100.00%	0.84%	0.59%	98.57%	100.00%
Jabar	9.24%	3.06%	87.70%	100.00%	1.75%	0.84%	97.41%	100.00%

Tabel 6.7. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Pedesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jateng	17.65%	2.97%	79.38%	100.00%	3.50%	0.76%	95.74%	100.00%
DIY	12.56%	24.32%	63.12%	100.00%	2.07%	7.17%	90.77%	100.00%
Jatim	19.80%	2.73%	77.47%	100.00%	5.06%	0.94%	94.00%	100.00%
Banten	12.28%	0.16%	87.57%	100.00%	1.95%	0.91%	97.14%	100.00%
Bali	18.14%	6.83%	75.03%	100.00%	2.88%	1.20%	95.93%	100.00%
NTB	24.26%	3.62%	72.12%	100.00%	6.75%	1.83%	91.41%	100.00%
NTT	13.70%	7.07%	79.23%	100.00%	5.13%	2.13%	92.74%	100.00%
Kalbar	22.20%	3.37%	74.43%	100.00%	5.65%	1.05%	93.30%	100.00%
Kalteng	6.74%	5.04%	88.22%	100.00%	1.59%	1.18%	97.23%	100.00%
Kalsel	5.93%	6.06%	88.02%	100.00%	1.43%	1.72%	96.85%	100.00%
Kaltim	6.75%	4.27%	88.99%	100.00%	1.67%	1.05%	97.28%	100.00%
Kalut	9.49%	3.40%	87.11%	100.00%	3.65%	0.64%	95.70%	100.00%
Sulut	0.77%	6.22%	93.01%	100.00%	0.27%	1.02%	98.70%	100.00%

Tabel 6.7. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Pedesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan				Laki-Laki			
	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sulteng	4.93%	7.46%	87.60%	100.00%	2.07%	1.46%	96.48%	100.00%
Sulsel	15.45%	3.00%	81.55%	100.00%	6.07%	1.28%	92.65%	100.00%
Sultra	17.09%	7.59%	75.32%	100.00%	3.47%	2.16%	94.37%	100.00%
Gorontalo	1.79%	11.78%	86.43%	100.00%	0.89%	1.42%	97.69%	100.00%
Sulbar	15.60%	0.80%	83.60%	100.00%	5.42%	1.34%	93.23%	100.00%
Maluku	4.00%	4.70%	91.30%	100.00%	1.18%	1.82%	97.00%	100.00%
Malut	6.36%	11.50%	82.15%	100.00%	1.30%	2.39%	96.31%	100.00%
Papbar	12.22%	1.99%	85.78%	100.00%	3.38%	1.42%	95.21%	100.00%
Papua	39.28%	1.47%	59.25%	100.00%	29.71%	1.05%	69.24%	100.00%
Indonesia	12.99%	3.82%	83.19%	100.00%	3.13%	1.10%	95.78%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.8. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	25.75	24.14	14.94	35.16	100.00	8.69	16.43	16.58	58.30	100.00
Sumatera Utara	16.33	22.07	15.97	45.63	100.00	6.52	16.69	18.63	58.16	100.00
Sumatera Barat	30.51	15.78	16.34	37.37	100.00	10.90	17.01	17.24	54.86	100.00
Riau	19.12	17.68	20.10	43.09	100.00	5.63	15.29	17.74	61.34	100.00
Jambi	25.97	21.42	14.02	38.59	100.00	8.14	18.59	15.57	57.70	100.00
Sumatera Selatan	23.94	28.63	13.60	33.83	100.00	9.32	19.86	16.74	54.08	100.00
Bengkulu	21.00	18.30	14.58	46.13	100.00	7.04	14.32	14.00	64.64	100.00
Lampung	31.76	24.18	11.39	32.68	100.00	13.48	20.78	18.04	47.70	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	33.50	24.11	13.62	28.76	100.00	13.29	24.13	17.10	45.48	100.00
Kepulauan Riau	19.16	21.63	12.91	46.30	100.00	10.51	12.90	14.71	61.89	100.00
DKI Jakarta	14.36	23.30	16.41	45.93	100.00	3.03	12.12	20.60	64.25	100.00
Jawa Barat	31.92	30.80	12.67	24.61	100.00	12.30	28.40	16.98	42.33	100.00
Jawa Tengah	39.94	25.55	12.59	21.91	100.00	17.05	27.58	17.46	37.91	100.00
DI Yogyakarta	22.60	13.36	10.98	53.05	100.00	15.66	12.70	14.11	57.53	100.00
Jawa Timur	38.71	26.80	12.50	21.99	100.00	18.79	24.63	17.20	39.37	100.00

Tabel 6.8. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditatamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Banten	35.34	24.16	9.95	30.55	100.00	12.40	19.50	18.12	49.99	100.00
Bali	26.13	11.80	18.19	43.87	100.00	10.74	16.73	13.71	58.82	100.00
Nusa Tenggara Barat	47.88	15.36	11.60	25.16	100.00	23.26	17.44	15.89	43.42	100.00
Nusa Tenggara Timur	21.95	14.99	11.14	51.93	100.00	13.29	14.94	12.52	59.25	100.00
Kalimantan Barat	37.10	18.21	10.01	34.68	100.00	16.66	18.91	14.58	49.86	100.00
Kalimantan Tengah	21.15	24.63	12.71	41.51	100.00	9.82	21.68	18.51	49.98	100.00
Kalimantan Selatan	31.91	21.80	11.54	34.74	100.00	12.62	19.26	16.67	51.45	100.00
Kalimantan Timur	25.20	25.66	15.31	33.83	100.00	8.11	16.21	15.57	60.10	100.00
Kalimantan Utara	24.80	28.87	13.12	33.21	100.00	10.64	21.41	16.57	51.38	100.00
Sulawesi Utara	18.05	13.96	15.10	52.89	100.00	11.50	15.17	18.44	54.88	100.00
Sulawesi Tengah	20.17	14.45	18.75	46.63	100.00	7.01	21.02	13.40	58.56	100.00
Sulawesi Selatan	24.95	19.10	11.47	44.48	100.00	14.13	16.75	13.49	55.63	100.00
Sulawesi Tenggara	30.08	10.29	12.89	46.74	100.00	11.85	12.53	13.79	61.83	100.00
Gorontalo	19.38	14.55	5.02	61.06	100.00	30.51	15.82	11.91	41.76	100.00
Sulawesi Barat	38.66	18.93	11.00	31.41	100.00	18.02	18.18	17.33	46.47	100.00

Tabel 6.8. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Maluku	10.92	22.24	8.95	57.89	100.00	6.97	13.82	11.54	67.67	100.00
Maluku Utara	10.00	18.35	15.73	55.93	100.00	5.28	11.86	14.12	68.73	100.00
Papua Barat	14.29	27.52	17.31	40.88	100.00	5.64	14.81	13.89	65.66	100.00
Papua	15.37	19.64	16.03	48.95	100.00	6.16	12.28	13.66	67.91	100.00
Total	30.42	24.53	13.19	31.86	100.00	12.74	22.13	17.06	48.07	100.00

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.9. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditatamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan						Laki-Laki			
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	39.86	37.44	12.47	10.23	100.00	17.40	31.62	21.31	29.68	100.00
Sumatera Utara	43.55	28.69	12.04	15.72	100.00	16.33	27.33	23.21	33.13	100.00
Sumatera Barat	52.89	21.65	10.45	15.00	100.00	27.89	27.43	19.46	25.23	100.00
Riau	46.85	30.69	13.07	9.39	100.00	18.35	33.52	20.15	27.98	100.00
Jambi	55.76	24.82	6.51	12.91	100.00	18.62	36.98	19.60	24.80	100.00
Sumatera Selatan	53.24	34.57	5.68	6.51	100.00	21.46	39.83	18.25	20.47	100.00
Bengkulu	63.37	17.86	6.37	12.41	100.00	21.30	31.65	18.46	28.59	100.00
Lampung	59.65	21.43	9.91	9.01	100.00	21.82	34.43	22.47	21.29	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	68.96	17.71	4.15	9.19	100.00	31.00	35.37	13.19	20.44	100.00
Kepulauan Riau	68.53	22.94	3.97	4.55	100.00	31.06	35.57	10.48	22.89	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	45.23	41.58	8.23	4.96	100.00	18.61	52.29	15.20	13.90	100.00
Jawa Tengah	55.81	31.08	7.12	5.98	100.00	25.06	42.38	16.46	16.10	100.00

Tabel 6.9. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan						Laki-Laki			
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DI Yogyakarta	54.20	22.75	14.78	8.27	100.00	23.34	31.70	21.62	23.34	100.00
Jawa Timur	58.33	28.63	7.03	6.01	100.00	28.59	39.92	15.62	15.87	100.00
Banten	58.45	34.25	3.93	3.37	100.00	25.45	46.69	13.70	14.16	100.00
Bali	71.69	12.81	6.74	8.76	100.00	24.71	29.07	15.82	30.40	100.00
Nusa Tenggara Barat	55.92	19.81	10.93	13.34	100.00	32.67	23.71	15.25	28.37	100.00
Nusa Tenggara Timur	49.40	33.83	6.21	10.56	100.00	33.78	34.75	11.01	20.45	100.00
Kalimantan Barat	63.14	21.70	7.23	7.93	100.00	32.70	31.72	15.54	20.05	100.00
Kalimantan Tengah	45.71	35.87	9.91	8.51	100.00	18.49	36.16	20.29	25.06	100.00
Kalimantan Selatan	57.27	26.81	6.50	9.43	100.00	24.08	34.50	17.94	23.48	100.00
Kalimantan Timur	38.11	36.65	10.26	14.98	100.00	16.64	31.94	15.69	35.73	100.00
Kalimantan Utara	47.76	30.60	5.15	16.50	100.00	26.67	28.80	14.77	29.76	100.00
Sulawesi Utara	33.53	24.48	13.71	28.28	100.00	23.26	29.20	17.99	29.56	100.00
Sulawesi Tengah	33.10	44.19	8.86	13.85	100.00	17.19	39.52	17.38	25.91	100.00
Sulawesi Selatan	53.92	24.99	8.71	12.38	100.00	34.48	29.19	13.23	23.10	100.00

Tabel 6.9. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan						Laki-Laki			
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sulawesi Tenggara	52.83	23.88	8.90	14.39	100.00	25.72	26.92	15.49	31.87	100.00
Gorontalo	46.71	23.47	8.34	21.47	100.00	44.48	28.20	8.74	18.59	100.00
Sulawesi Barat	51.01	31.40	5.71	11.88	100.00	25.54	33.74	13.50	27.22	100.00
Maluku	31.08	36.84	9.83	22.25	100.00	15.71	33.53	17.85	32.91	100.00
Maluku Utara	41.50	36.84	7.62	14.03	100.00	19.41	34.40	17.14	29.06	100.00
Papua Barat	43.50	19.98	9.10	27.42	100.00	15.96	22.91	15.86	45.27	100.00
Papua	64.57	17.04	5.29	13.11	100.00	47.89	17.00	12.74	22.37	100.00
Total	52.73	30.22	8.24	8.81	100.00	24.74	37.26	16.91	21.08	100.00

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.10. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan + Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	35.78	33.59	13.19	17.45	100.00	14.48	26.54	19.73	39.25	100.00
Sumatera Utara	29.28	25.22	14.10	31.39	100.00	11.03	21.58	20.74	46.64	100.00
Sumatera Barat	42.02	18.80	13.31	25.87	100.00	20.03	22.61	18.43	38.93	100.00
Riau	34.94	25.10	16.09	23.87	100.00	13.21	26.16	19.18	41.45	100.00
Jambi	45.74	23.68	9.04	21.55	100.00	15.30	31.16	18.33	35.21	100.00
Sumatera Selatan	41.32	32.16	8.90	17.62	100.00	17.26	32.92	17.73	32.09	100.00
Bengkulu	46.51	18.03	9.63	25.82	100.00	16.73	26.09	17.03	40.15	100.00
Lampung	50.88	22.30	10.37	16.45	100.00	19.38	30.43	21.17	29.02	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	50.20	21.10	9.16	19.55	100.00	21.13	29.11	15.37	34.39	100.00
Kepulauan Riau	24.36	21.77	11.97	41.91	100.00	12.60	15.20	14.28	57.93	100.00
DKI Jakarta	14.36	23.30	16.41	45.93	100.00	3.03	12.12	20.60	64.25	100.00
Jawa Barat	35.92	34.04	11.34	18.70	100.00	13.82	34.14	16.55	35.50	100.00
Jawa Tengah	47.86	28.31	9.87	13.97	100.00	21.01	34.90	16.97	27.13	100.00
DI Yogyakarta	28.34	15.07	11.67	44.92	100.00	17.70	17.74	16.10	48.46	100.00
Jawa Timur	48.49	27.71	9.77	14.03	100.00	23.31	31.67	16.47	28.55	100.00

Tabel 6.10. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan + Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Banten	42.82	27.43	8.00	21.75	100.00	15.92	26.82	16.93	40.33	100.00
Bali	40.51	12.12	14.58	32.79	100.00	15.02	20.51	14.36	50.12	100.00
Nusa Tenggara Barat	52.14	17.72	11.25	18.89	100.00	28.18	20.71	15.55	35.56	100.00
Nusa Tenggara Timur	42.92	29.39	7.37	20.32	100.00	28.81	29.94	11.38	29.87	100.00
Kalimantan Barat	52.36	20.25	8.38	19.00	100.00	27.26	27.38	15.21	30.15	100.00
Kalimantan Tengah	35.92	31.39	11.03	21.66	100.00	15.11	30.51	19.60	34.78	100.00
Kalimantan Selatan	44.91	24.37	8.96	21.76	100.00	18.69	27.33	17.34	36.64	100.00
Kalimantan Timur	29.21	29.07	13.74	27.98	100.00	10.88	21.31	15.61	52.20	100.00
Kalimantan Utara	30.85	29.32	11.02	28.81	100.00	16.90	24.30	15.87	42.93	100.00
Sulawesi Utara	24.64	18.44	14.51	42.41	100.00	17.21	21.99	18.22	42.58	100.00
Sulawesi Tengah	28.49	33.58	12.39	25.54	100.00	14.28	34.22	16.24	35.26	100.00
Sulawesi Selatan	41.36	22.44	9.91	26.30	100.00	25.86	23.92	13.34	36.88	100.00
Sulawesi Tenggara	43.54	18.33	10.53	27.60	100.00	20.50	21.50	14.85	43.16	100.00
Gorontalo	33.18	19.05	6.70	41.07	100.00	38.63	23.02	10.06	28.28	100.00
Sulawesi Barat	47.70	28.06	7.12	17.11	100.00	23.85	30.24	14.36	31.54	100.00
Maluku	20.56	29.22	9.37	40.84	100.00	11.89	24.91	15.09	48.12	100.00

Tabel 6.10. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan + Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total	Tidak memiliki ijazah	SD	SMP	SMA+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Maluku Utara	28.73	29.34	10.91	31.02	100.00	15.46	28.10	16.29	40.15	100.00
Papua Barat	29.11	23.69	13.15	34.05	100.00	11.82	19.66	15.07	53.45	100.00
Papua	50.36	17.79	8.39	23.46	100.00	36.85	15.75	12.99	34.41	100.00
Total	40.41	27.08	10.98	21.54	100.00	18.00	28.77	16.99	36.24	100.00

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.11. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	53.59%	88.99%	66.34%	93.98%	62.65%	92.31%
Sumatera Utara	59.18%	90.66%	76.83%	95.97%	67.57%	93.10%
Sumatera Barat	53.45%	86.61%	70.43%	94.08%	62.19%	90.63%
Riau	54.03%	90.35%	65.21%	96.28%	60.40%	93.89%
Jambi	57.19%	90.95%	63.47%	95.86%	61.35%	94.31%
Sumatera Selatan	55.15%	87.90%	72.77%	95.95%	65.61%	93.16%
Bengkulu	59.07%	92.99%	71.49%	97.45%	66.55%	96.02%
Lampung	58.15%	91.22%	69.32%	96.11%	65.81%	94.68%
Kep. Babel	52.77%	91.62%	65.44%	95.57%	58.73%	93.37%
Kep. Riau	63.38%	92.75%	49.83%	93.98%	61.95%	92.88%
DKI Jakarta	55.34%	89.13%	-	-	55.34%	89.13%
Jabar	53.83%	90.52%	59.21%	94.77%	55.44%	91.54%
Jateng	56.18%	86.35%	63.88%	93.50%	60.02%	89.89%
DIY	51.69%	83.06%	71.93%	94.12%	55.37%	85.99%
Jatim	61.35%	89.79%	70.86%	94.69%	66.09%	92.04%
Banten	54.82%	90.33%	48.93%	94.42%	52.91%	91.43%

Tabel 6.11. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bali	74.04%	92.41%	74.95%	94.17%	74.33%	92.95%
NTB	62.19%	88.54%	67.37%	93.93%	64.94%	91.35%
NTT	55.26%	84.13%	83.33%	96.25%	76.71%	93.31%
Kalbar	44.48%	85.92%	75.11%	96.22%	62.43%	92.73%
Kalteng	64.19%	92.04%	69.75%	95.98%	67.53%	94.44%
Kalsel	54.39%	88.95%	71.64%	95.84%	63.23%	92.60%
Kaltim	57.74%	90.08%	55.69%	94.42%	57.10%	91.49%
Kalut	65.25%	90.94%	64.49%	94.90%	65.05%	92.49%
Sulut	44.70%	86.14%	64.68%	93.58%	53.20%	89.75%
Sulteng	55.62%	89.02%	69.31%	95.48%	64.42%	93.63%
Sulsel	48.77%	87.30%	52.64%	92.97%	50.96%	90.57%
Sultra	54.97%	88.76%	68.10%	94.57%	62.74%	92.38%
Gorontalo	56.20%	89.85%	70.52%	97.16%	63.43%	94.11%
Sulbar	65.20%	89.58%	70.61%	94.65%	69.16%	93.51%
Maluku	65.73%	87.03%	76.15%	95.14%	70.72%	91.59%
Malut	46.04%	88.20%	68.48%	95.18%	59.38%	93.23%

Tabel 6.11. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Papbar	71.72%	92.26%	79.27%	94.80%	75.56%	93.78%
Papua	66.93%	91.23%	87.51%	98.17%	81.56%	96.33%
Indonesia	56.40%	89.36%	67.15%	94.93%	61.21%	91.80%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.12. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/karyawan/pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga atau tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	41.45%	19.71%	5.41%	24.30%	8.20%	0.93%	100.00%
Sumatera Utara	43.45%	18.63%	5.22%	25.14%	5.97%	1.58%	100.00%
Sumatera Barat	44.00%	14.77%	3.12%	23.92%	12.12%	2.06%	100.00%
Riau	45.77%	13.33%	7.05%	27.33%	5.38%	1.14%	100.00%
Jambi	50.55%	10.66%	4.68%	27.64%	4.95%	1.52%	100.00%
Sumatera Selatan	48.21%	14.91%	2.58%	27.98%	3.25%	3.08%	100.00%
Bengkulu	45.39%	14.11%	4.83%	23.61%	10.43%	1.62%	100.00%
Lampung	43.15%	17.47%	7.22%	20.01%	10.92%	1.22%	100.00%
Kep. Babel	44.60%	6.66%	5.96%	35.75%	5.46%	1.57%	100.00%
Kep. Riau	25.95%	3.98%	1.83%	63.17%	4.77%	0.30%	100.00%
DKI Jakarta	36.76%	2.86%	3.99%	50.59%	5.21%	0.58%	100.00%
Jabar	39.21%	9.32%	4.61%	33.29%	12.86%	0.71%	100.00%
Jateng	38.34%	15.31%	3.93%	29.00%	11.88%	1.54%	100.00%
DIY	35.56%	16.31%	3.99%	37.02%	4.98%	2.15%	100.00%

Tabel 6.12. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga atau tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jatim	37.51%	18.77%	5.27%	24.69%	11.94%	1.83%	100.00%
Banten	42.59%	5.84%	1.55%	39.50%	8.11%	2.42%	100.00%
Bali	32.69%	8.75%	5.22%	46.84%	5.04%	1.45%	100.00%
NTB	40.20%	17.43%	6.14%	15.52%	18.24%	2.47%	100.00%
NTT	39.97%	40.14%	1.60%	13.26%	2.34%	2.69%	100.00%
Kalbar	50.39%	20.37%	2.34%	21.25%	4.43%	1.23%	100.00%
Kalteng	52.73%	10.44%	3.22%	28.92%	3.43%	1.26%	100.00%
Kalsel	50.29%	16.04%	2.16%	23.43%	7.38%	0.70%	100.00%
Kaltim	48.31%	9.34%	1.52%	32.98%	5.94%	1.91%	100.00%
Kalut	34.69%	17.97%	2.38%	38.46%	5.02%	1.48%	100.00%
Sulut	48.14%	4.88%	4.74%	33.99%	6.37%	1.88%	100.00%
Sulteng	45.65%	20.18%	5.24%	21.60%	5.23%	2.10%	100.00%
Sulsel	43.74%	21.19%	2.93%	25.06%	4.88%	2.20%	100.00%
Sultra	48.61%	24.04%	1.26%	21.57%	3.39%	1.13%	100.00%
Gorontalo	36.42%	11.85%	4.97%	37.09%	9.27%	0.40%	100.00%

Tabel 6.12. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/karyawan/pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga atau tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sulbar	51.43%	24.34%	2.97%	14.57%	4.45%	2.24%	100.00%
Maluku	60.23%	12.70%	0.33%	23.53%	0.97%	2.24%	100.00%
Malut	51.09%	20.83%	3.04%	21.85%	2.04%	1.15%	100.00%
Papbar	46.78%	17.07%	1.98%	28.78%	3.29%	2.09%	100.00%
Papua	45.75%	31.77%	1.16%	17.68%	0.42%	3.22%	100.00%
Indonesia	40.79%	15.32%	4.27%	28.64%	9.43%	1.55%	100.00%

Sumber: BPS RI -

Susenar, 2019

Tabel 6.13. Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga atau tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	33.36%	16.73%	5.97%	36.46%	6.73%	0.75%	100.00%
Sumatera Utara	26.46%	16.08%	4.97%	43.92%	7.77%	0.81%	100.00%
Sumatera Barat	31.83%	16.14%	5.56%	31.47%	13.77%	1.23%	100.00%
Riau	28.11%	10.91%	7.14%	43.42%	9.95%	0.47%	100.00%
Jambi	34.49%	16.76%	6.29%	35.84%	6.01%	0.61%	100.00%
Sumatera Selatan	31.53%	24.43%	3.67%	34.97%	4.50%	0.91%	100.00%
Bengkulu	27.49%	27.59%	4.67%	32.41%	7.21%	0.64%	100.00%
Lampung	29.42%	22.82%	3.89%	30.00%	13.11%	0.76%	100.00%
Kep. Babel	31.84%	8.70%	8.53%	44.66%	5.72%	0.54%	100.00%
Kep. Riau	20.50%	4.62%	3.51%	67.71%	3.37%	0.29%	100.00%
DKI Jakarta	30.10%	2.71%	3.69%	58.86%	3.95%	0.70%	100.00%
Jabar	26.26%	8.70%	3.79%	46.59%	14.05%	0.61%	100.00%
Jateng	24.15%	18.19%	4.36%	36.62%	15.35%	1.33%	100.00%
DIY	20.28%	20.36%	6.29%	39.67%	11.23%	2.16%	100.00%
Jatim	22.83%	19.51%	5.82%	36.14%	14.72%	0.99%	100.00%

Tabel 6.13. Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga atau tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Banten	27.19%	6.51%	2.69%	55.68%	7.33%	0.60%	100.00%
Bali	20.29%	14.75%	3.95%	51.71%	7.85%	1.46%	100.00%
NTB	23.82%	25.40%	4.06%	30.34%	15.16%	1.22%	100.00%
NTT	25.10%	45.58%	2.93%	21.94%	3.77%	0.68%	100.00%
Kalbar	26.49%	24.84%	4.22%	38.16%	5.46%	0.82%	100.00%
Kalteng	29.24%	13.75%	3.72%	47.80%	4.92%	0.58%	100.00%
Kalsel	30.66%	18.55%	4.02%	40.66%	5.38%	0.73%	100.00%
Kaltim	28.08%	7.81%	4.23%	55.07%	4.27%	0.55%	100.00%
Kalut	31.43%	10.39%	5.12%	49.86%	2.69%	0.51%	100.00%
Sulut	36.87%	7.42%	4.55%	38.55%	11.84%	0.76%	100.00%
Sulteng	34.81%	22.93%	5.79%	28.50%	7.35%	0.63%	100.00%
Sulsel	32.47%	23.35%	4.68%	34.72%	3.73%	1.06%	100.00%
Sultra	30.42%	24.39%	4.52%	35.03%	4.84%	0.78%	100.00%
Gorontalo	33.34%	17.65%	6.54%	30.29%	11.66%	0.51%	100.00%
Sulbar	31.90%	28.84%	3.21%	28.66%	6.69%	0.71%	100.00%

Tabel 6.13. Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-laki yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Tahun 2019.

Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/tdk dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga atau tidak dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maluku	43.82%	16.73%	2.22%	33.56%	2.79%	0.88%	100.00%
Malut	41.98%	18.75%	4.34%	30.49%	3.75%	0.69%	100.00%
Papbar	31.21%	15.39%	3.31%	46.49%	2.90%	0.71%	100.00%
Papua	26.05%	48.10%	1.44%	22.70%	0.93%	0.78%	100.00%
Indonesia	26.85%	16.35%	4.48%	40.75%	10.70%	0.87%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.14. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	19.77%	41.79%	25.81%	12.64%	100.00%	3.74%	26.50%	49.89%	19.88%	100.00%
Sumatera Utara	18.40%	42.30%	27.04%	12.25%	100.00%	3.39%	27.32%	48.64%	20.65%	100.00%
Sumatera Barat	23.50%	40.74%	21.85%	13.91%	100.00%	4.10%	28.07%	47.68%	20.15%	100.00%
Riau	20.98%	41.83%	26.51%	10.69%	100.00%	5.60%	29.81%	47.37%	17.22%	100.00%
Jambi	20.78%	41.73%	32.00%	5.48%	100.00%	3.00%	36.37%	47.37%	13.26%	100.00%
Sumatera Selatan	19.21%	40.20%	27.43%	13.17%	100.00%	2.48%	28.19%	50.01%	19.32%	100.00%
Bengkulu	34.14%	38.45%	17.29%	10.11%	100.00%	5.38%	32.18%	50.10%	12.34%	100.00%
Lampung	22.84%	40.51%	30.44%	6.20%	100.00%	2.81%	32.23%	52.14%	12.81%	100.00%
Kep. Babel	26.97%	52.59%	13.90%	6.55%	100.00%	4.64%	37.63%	48.23%	9.49%	100.00%
Kep. Riau	34.91%	40.85%	19.44%	4.81%	100.00%	5.60%	37.51%	45.95%	10.94%	100.00%
DKI Jakarta	27.99%	44.44%	18.89%	8.68%	100.00%	7.91%	37.33%	45.17%	9.59%	100.00%
Jabar	30.48%	42.95%	21.15%	5.42%	100.00%	4.74%	38.41%	45.99%	10.87%	100.00%
Jateng	31.81%	39.43%	21.84%	6.92%	100.00%	4.05%	37.71%	44.91%	13.33%	100.00%
DIY	52.80%	27.90%	15.48%	3.82%	100.00%	14.90%	35.43%	39.77%	9.89%	100.00%
Jatim	31.73%	42.09%	19.39%	6.79%	100.00%	5.63%	39.30%	44.16%	10.91%	100.00%
Banten	15.69%	46.70%	25.15%	12.46%	100.00%	3.55%	32.85%	51.02%	12.58%	100.00%
Bali	47.33%	37.98%	13.36%	1.33%	100.00%	8.20%	33.60%	41.88%	16.32%	100.00%

Tabel 6.14. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NTB	21.34%	54.19%	21.75%	2.72%	100.00%	3.89%	38.96%	47.64%	9.51%	100.00%
NTT	29.82%	30.32%	21.63%	18.22%	100.00%	7.66%	23.56%	35.06%	33.71%	100.00%
Kalbar	18.88%	40.98%	25.57%	14.57%	100.00%	4.16%	27.43%	49.91%	18.50%	100.00%
Kalteng	23.01%	50.01%	19.33%	7.65%	100.00%	4.96%	35.15%	46.12%	13.78%	100.00%
Kalsel	28.63%	47.83%	19.32%	4.22%	100.00%	6.12%	37.70%	46.15%	10.03%	100.00%
Kaltim	23.41%	45.55%	23.53%	7.51%	100.00%	6.66%	33.82%	44.81%	14.71%	100.00%
Kalut	24.69%	43.44%	24.24%	7.63%	100.00%	6.16%	29.69%	45.38%	18.77%	100.00%
Sulut	30.41%	41.80%	17.46%	10.33%	100.00%	5.59%	35.18%	42.62%	16.61%	100.00%
Sulteng	23.44%	46.88%	17.61%	12.06%	100.00%	5.33%	29.68%	45.18%	19.81%	100.00%
Sulsel	16.01%	39.99%	25.61%	18.39%	100.00%	4.07%	27.57%	44.76%	23.60%	100.00%
Sultra	26.37%	38.29%	23.19%	12.15%	100.00%	4.55%	24.72%	43.50%	27.23%	100.00%
Gorontalo	31.11%	42.77%	16.43%	9.69%	100.00%	4.29%	34.31%	42.62%	18.79%	100.00%
Sulbar	10.82%	41.25%	29.16%	18.77%	100.00%	5.91%	27.04%	45.30%	21.75%	100.00%
Maluku	14.02%	36.13%	28.24%	21.61%	100.00%	5.24%	24.35%	41.42%	28.98%	100.00%
Malut	29.18%	22.46%	23.80%	24.56%	100.00%	8.76%	24.57%	38.25%	28.42%	100.00%
Papbar	19.87%	32.79%	27.18%	20.16%	100.00%	6.42%	25.98%	43.82%	23.78%	100.00%
Papua	26.68%	36.31%	21.47%	15.55%	100.00%	6.84%	34.18%	39.63%	19.36%	100.00%
Indonesia	28.39%	41.96%	21.56%	8.09%	100.00%	5.17%	35.64%	45.87%	13.32%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.15. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	21.99%	43.51%	24.25%	10.24%	100.00%	2.01%	25.79%	50.75%	21.45%	100.00%
Sumatera Utara	28.14%	40.98%	22.86%	8.02%	100.00%	2.30%	30.93%	45.81%	20.97%	100.00%
Sumatera Barat	27.51%	42.10%	21.70%	8.69%	100.00%	2.33%	30.67%	46.30%	20.70%	100.00%
Riau	16.43%	43.42%	25.43%	14.72%	100.00%	2.16%	31.88%	50.87%	15.08%	100.00%
Jambi	24.17%	49.96%	20.13%	5.74%	100.00%	2.26%	38.63%	48.74%	10.37%	100.00%
Sumatera Selatan	26.00%	42.60%	26.63%	4.76%	100.00%	2.00%	35.53%	51.27%	11.19%	100.00%
Bengkulu	32.91%	41.95%	22.08%	3.05%	100.00%	2.36%	38.00%	48.60%	11.05%	100.00%
Lampung	26.09%	49.08%	21.90%	2.94%	100.00%	1.96%	41.83%	46.34%	9.87%	100.00%
Kep. Babel	30.20%	47.44%	19.72%	2.65%	100.00%	3.15%	38.56%	46.66%	11.63%	100.00%
Kep. Riau	24.25%	38.99%	27.04%	9.73%	100.00%	4.46%	41.33%	46.30%	7.91%	100.00%
DKI Jakarta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jabar	39.05%	40.50%	16.88%	3.58%	100.00%	2.59%	47.81%	42.25%	7.36%	100.00%
Jateng	32.22%	44.60%	19.10%	4.08%	100.00%	2.09%	41.55%	45.99%	10.37%	100.00%
DIY	32.06%	46.77%	17.59%	3.58%	100.00%	2.64%	45.25%	40.64%	11.47%	100.00%
Jatim	32.29%	42.27%	21.48%	3.95%	100.00%	2.27%	45.07%	42.05%	10.61%	100.00%
Banten	25.30%	35.84%	27.87%	10.99%	100.00%	1.10%	31.71%	49.04%	18.16%	100.00%
Bali	46.09%	38.53%	11.73%	3.64%	100.00%	1.61%	39.21%	41.47%	17.72%	100.00%

Tabel 6.15. Persentase Kepala Rumah Tangga di Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NTB	18.57%	59.66%	16.87%	4.89%	100.00%	2.21%	46.37%	42.26%	9.16%	100.00%
NTT	16.56%	40.67%	29.53%	13.24%	100.00%	2.58%	23.30%	43.20%	30.92%	100.00%
Kalbar	19.71%	45.42%	28.25%	6.61%	100.00%	2.73%	30.14%	49.21%	17.91%	100.00%
Kalteng	30.41%	47.37%	17.31%	4.91%	100.00%	4.08%	41.47%	43.87%	10.58%	100.00%
Kalsel	31.58%	45.01%	18.95%	4.45%	100.00%	3.16%	41.45%	45.55%	9.85%	100.00%
Kaltim	24.91%	37.46%	27.49%	10.14%	100.00%	4.32%	33.30%	47.90%	14.48%	100.00%
Kalut	21.78%	42.05%	18.45%	17.72%	100.00%	4.69%	30.43%	44.81%	20.06%	100.00%
Sulut	24.97%	40.15%	24.96%	9.92%	100.00%	3.08%	39.80%	42.46%	14.67%	100.00%
Sulteng	24.64%	41.77%	23.78%	9.82%	100.00%	2.49%	35.45%	44.18%	17.89%	100.00%
Sulsel	22.16%	42.65%	25.33%	9.86%	100.00%	2.00%	30.15%	46.30%	21.56%	100.00%
Sultra	22.04%	40.09%	27.28%	10.59%	100.00%	2.33%	29.70%	46.18%	21.79%	100.00%
Gorontalo	26.10%	39.89%	21.98%	12.02%	100.00%	1.96%	36.36%	44.52%	17.16%	100.00%
Sulbar	18.39%	44.58%	22.73%	14.31%	100.00%	2.95%	33.64%	43.11%	20.30%	100.00%
Maluku	15.80%	40.09%	26.77%	17.34%	100.00%	2.02%	22.91%	41.75%	33.32%	100.00%
Malut	14.98%	42.46%	27.19%	15.36%	100.00%	1.79%	24.64%	47.10%	26.46%	100.00%
Papbar	24.92%	33.40%	20.79%	20.89%	100.00%	6.48%	31.60%	39.80%	22.12%	100.00%
Papua	28.75%	44.13%	20.92%	6.20%	100.00%	6.36%	42.18%	37.92%	13.54%	100.00%
Indonesia	28.94%	43.25%	21.60%	6.22%	100.00%	2.42%	38.69%	45.17%	13.72%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.16 Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	21.35%	43.01%	24.70%	10.94%	100.00%	2.59%	26.02%	50.46%	20.93%	100.00%
Sumatera Utara	23.04%	41.67%	25.05%	10.24%	100.00%	2.89%	28.98%	47.33%	20.79%	100.00%
Sumatera Barat	25.56%	41.44%	21.77%	11.23%	100.00%	3.15%	29.46%	46.94%	20.45%	100.00%
Riau	18.39%	42.73%	25.89%	12.99%	100.00%	3.55%	31.05%	49.46%	15.94%	100.00%
Jambi	23.03%	47.19%	24.13%	5.65%	100.00%	2.50%	37.91%	48.31%	11.29%	100.00%
Sumatera Selatan	23.24%	41.62%	26.95%	8.18%	100.00%	2.17%	32.99%	50.84%	14.00%	100.00%
Bengkulu	33.40%	40.56%	20.18%	5.86%	100.00%	3.33%	36.13%	49.08%	11.46%	100.00%
Lampung	25.07%	46.38%	24.58%	3.96%	100.00%	2.21%	39.02%	48.04%	10.73%	100.00%
Kep. Babel	28.49%	50.16%	16.64%	4.71%	100.00%	3.98%	38.05%	47.54%	10.44%	100.00%
Kep. Riau	33.78%	40.65%	20.24%	5.33%	100.00%	5.49%	37.90%	45.98%	10.63%	100.00%
DKI Jakarta	27.99%	44.44%	18.89%	8.68%	100.00%	7.91%	37.33%	45.17%	9.59%	100.00%
Jabar	33.05%	42.22%	19.87%	4.87%	100.00%	4.22%	40.67%	45.09%	10.03%	100.00%
Jateng	32.01%	42.01%	20.48%	5.50%	100.00%	3.08%	39.61%	45.44%	11.87%	100.00%
DIY	49.04%	31.33%	15.86%	3.78%	100.00%	11.65%	38.04%	40.00%	10.31%	100.00%
Jatim	32.01%	42.18%	20.43%	5.38%	100.00%	4.09%	41.96%	43.19%	10.77%	100.00%

Tabel 6.16 Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Banten	18.80%	43.19%	26.03%	11.98%	100.00%	2.89%	32.54%	50.49%	14.08%	100.00%
Bali	46.94%	38.16%	12.84%	2.06%	100.00%	6.18%	35.32%	41.75%	16.75%	100.00%
NTB	19.87%	57.09%	19.16%	3.87%	100.00%	3.01%	42.83%	44.83%	9.33%	100.00%
NTT	19.69%	38.23%	27.66%	14.42%	100.00%	3.81%	23.37%	41.22%	31.60%	100.00%
Kalbar	19.37%	43.58%	27.14%	9.91%	100.00%	3.22%	29.22%	49.45%	18.11%	100.00%
Kalteng	27.46%	48.42%	18.11%	6.00%	100.00%	4.42%	39.00%	44.75%	11.83%	100.00%
Kalsel	30.14%	46.38%	19.13%	4.34%	100.00%	4.55%	39.68%	45.83%	9.93%	100.00%
Kaltim	23.88%	43.04%	24.76%	8.33%	100.00%	5.90%	33.65%	45.81%	14.63%	100.00%
Kalut	23.92%	43.07%	22.71%	10.29%	100.00%	5.58%	29.98%	45.16%	19.27%	100.00%
Sulut	28.09%	41.09%	20.65%	10.16%	100.00%	4.37%	37.42%	42.54%	15.67%	100.00%
Sulteng	24.21%	43.59%	21.58%	10.62%	100.00%	3.30%	33.79%	44.47%	18.44%	100.00%
Sulsel	19.49%	41.50%	25.45%	13.56%	100.00%	2.88%	29.05%	45.65%	22.42%	100.00%
Sultra	23.81%	39.36%	25.61%	11.22%	100.00%	3.16%	27.82%	45.17%	23.84%	100.00%
Gorontalo	28.58%	41.32%	19.24%	10.87%	100.00%	2.94%	35.50%	43.73%	17.84%	100.00%

Tabel 6.16 Persentase Kepala Rumah Tangga di Perkotaan dan Perdesaan menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Perempuan					Laki-Laki				
	1	2-3	4-5	6+	Total	1	2-3	4-5	6+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sulbar	16.36%	43.69%	24.45%	15.50%	100.00%	3.61%	32.16%	43.60%	20.62%	100.00%
Maluku	14.87%	38.02%	27.54%	19.57%	100.00%	3.43%	23.54%	41.61%	31.42%	100.00%
Malut	20.74%	34.35%	25.82%	19.09%	100.00%	3.74%	24.62%	44.63%	27.01%	100.00%
Papbar	22.44%	33.10%	23.94%	20.53%	100.00%	6.46%	29.34%	41.42%	22.78%	100.00%
Papua	28.15%	41.87%	21.08%	8.90%	100.00%	6.48%	40.06%	38.37%	15.08%	100.00%
Indonesia	28.64%	42.54%	21.58%	7.25%	100.00%	3.96%	36.98%	45.56%	13.49%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.17. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Provinsi, Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan, dan Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	40% bawah		40% menengah		20% atas	
	1-2	3+	1-2	3+	1-2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29.65	70.35	43.47	56.53	61.01	38.99
Sumatera Utara	23.98	76.02	49.36	50.64	64.74	35.26
Sumatera Barat	34.80	65.20	46.33	53.67	64.55	35.45
Riau	17.14	82.86	40.32	59.68	70.60	29.40
Jambi	42.82	57.18	43.71	56.29	63.00	37.00
Sumatera Selatan	27.00	73.00	46.11	53.89	65.30	34.70
Bengkulu	37.31	62.69	56.75	43.25	76.94	23.06
Lampung	35.58	64.42	53.36	46.64	62.51	37.49
Kepulauan Bangka Belitung	44.08	55.92	66.65	33.35	79.17	20.83
Kepulauan Riau	29.62	70.38	56.93	43.07	78.16	21.84
DKI Jakarta	27.65	72.35	52.08	47.92	70.75	29.25
Jawa Barat	46.15	53.85	55.30	44.70	73.16	26.84
Jawa Tengah	42.68	57.32	55.71	44.29	72.01	27.99
DI Yogyakarta	48.99	51.01	55.64	44.36	85.52	14.48
Jawa Timur	46.49	53.51	59.43	40.57	68.75	31.25
Banten	29.04	70.96	36.96	63.04	58.94	41.06
Bali	59.54	40.46	72.37	27.63	79.58	20.42
Nusa Tenggara Barat	35.56	64.44	60.08	39.92	70.05	29.95
Nusa Tenggara Timur	11.33	88.67	37.48	62.52	69.45	30.55
Kalimantan Barat	22.95	77.05	40.03	59.97	59.80	40.20
Kalimantan Tengah	32.48	67.52	54.02	45.98	75.77	24.23
Kalimantan Selatan	37.80	62.20	57.83	42.17	75.26	24.74
Kalimantan Timur	23.40	76.60	42.35	57.65	74.83	25.17
Kalimantan Utara	10.29	89.71	43.00	57.00	63.85	36.15
Sulawesi Utara	23.05	76.95	44.88	55.12	73.36	26.64
Sulawesi Tengah	25.93	74.07	46.87	53.13	69.64	30.36

Tabel 6.17. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Provinsi, Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan, dan Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	40% bawah		40% menengah		20% atas	
	1-2	3+	1-2	3+	1-2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Selatan	26.34	73.66	42.73	57.27	58.79	41.21
Sulawesi Tenggara	22.60	77.40	48.41	51.59	67.92	32.08
Gorontalo	13.81	86.19	45.80	54.20	75.67	24.33
Sulawesi Barat	25.44	74.56	41.48	58.52	58.03	41.97
Maluku	7.64	92.36	26.40	73.60	61.35	38.65
Maluku Utara	8.16	91.84	41.17	58.83	60.01	39.99
Papua Barat	10.42	89.58	27.46	72.54	71.27	28.73
Papua	22.74	77.26	46.16	53.84	75.74	24.26
Total	38.95	61.05	52.15	47.85	69.50	30.50

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.18. Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki menurut Provinsi, Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan, dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	40% bawah		40% menengah		20% atas	
	1-2	3+	1-2	3+	1-2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3.55	96.45	8.60	91.40	25.78	74.22
Sumatera Utara	4.86	95.14	11.27	88.73	28.87	71.13
Sumatera Barat	5.85	94.15	12.49	87.51	28.06	71.94
Riau	3.11	96.89	8.43	91.57	31.81	68.19
Jambi	5.96	94.04	11.61	88.39	28.69	71.31
Sumatera Selatan	4.41	95.59	11.11	88.89	27.02	72.98
Bengkulu	7.32	92.68	13.71	86.29	28.85	71.15
Lampung	7.25	92.75	12.67	87.33	28.50	71.50

Tabel 6.18. Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki menurut Provinsi, Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan, dan Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Distribusi Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	40% bawah		40% menengah		20% atas	
	1-2	3+	1-2	3+	1-2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Bangka Belitung	6.37	93.63	13.13	86.87	32.36	67.64
Kepulauan Riau	4.75	95.25	20.45	79.55	43.28	56.72
DKI Jakarta	7.05	92.95	23.52	76.48	39.79	60.21
Jawa Barat	10.42	89.58	17.40	82.60	32.36	67.64
Jawa Tengah	12.18	87.82	15.84	84.16	28.58	71.42
DI Yogyakarta	15.76	84.24	21.70	78.30	51.08	48.92
Jawa Timur	13.66	86.34	17.15	82.85	32.62	67.38
Banten	4.87	95.13	10.16	89.84	26.80	73.20
Bali	11.39	88.61	19.55	80.45	39.02	60.98
Nusa Tenggara Barat	9.60	90.40	15.62	84.38	28.94	71.06
Nusa Tenggara Timur	2.29	97.71	8.45	91.55	28.14	71.86
Kalimantan Barat	4.99	95.01	10.57	89.43	27.35	72.65
Kalimantan Tengah	5.56	94.44	13.70	86.30	35.54	64.46
Kalimantan Selatan	7.48	92.52	16.60	83.40	35.14	64.86
Kalimantan Timur	5.54	94.46	15.16	84.84	35.62	64.38
Kalimantan Utara	5.16	94.84	13.10	86.90	37.59	62.41
Sulawesi Utara	5.48	94.52	16.96	83.04	37.02	62.98
Sulawesi Tengah	5.00	95.00	14.89	85.11	31.38	68.62
Sulawesi Selatan	6.45	93.55	11.89	88.11	25.22	74.78
Sulawesi Tenggara	4.36	95.64	11.79	88.21	23.75	76.25
Gorontalo	5.05	94.95	14.24	85.76	30.98	69.02
Sulawesi Barat	5.07	94.93	10.33	89.67	28.54	71.46
Maluku	1.41	98.59	7.74	92.26	27.32	72.68
Maluku Utara	1.00	99.00	7.85	92.15	29.33	70.67
Papua Barat	4.80	95.20	9.85	90.15	40.64	59.36
Papua	6.45	93.55	18.00	82.00	48.26	51.74
Total	9.29	90.71	14.75	85.25	31.69	68.31

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.19. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita, 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	14.24%	85.76%	100.00%	14.18%	85.82%	100.00%	14.20%	85.80%	100.00%
Sumatera Utara	13.56%	86.44%	100.00%	13.85%	86.15%	100.00%	13.69%	86.31%	100.00%
Sumatera Barat	12.05%	87.95%	100.00%	7.77%	92.23%	100.00%	9.85%	90.15%	100.00%
Riau	11.98%	88.02%	100.00%	16.28%	83.72%	100.00%	14.43%	85.57%	100.00%
Jambi	7.75%	92.25%	100.00%	6.76%	93.24%	100.00%	7.09%	92.91%	100.00%
Sumatera Selatan	24.01%	75.99%	100.00%	12.50%	87.50%	100.00%	17.18%	82.82%	100.00%
Bengkulu	8.05%	91.95%	100.00%	9.55%	90.45%	100.00%	8.95%	91.05%	100.00%
Lampung	4.47%	95.53%	100.00%	3.94%	96.06%	100.00%	4.11%	95.89%	100.00%
Kep. Babel	6.10%	93.90%	100.00%	1.68%	98.32%	100.00%	4.02%	95.98%	100.00%
Kep. Riau	16.25%	83.75%	100.00%	7.08%	92.92%	100.00%	15.29%	84.71%	100.00%
DKI Jakarta	27.99%	72.01%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.99%	72.01%	100.00%
Jabar	11.34%	88.66%	100.00%	6.25%	93.75%	100.00%	9.81%	90.19%	100.00%
Jateng	7.54%	92.46%	100.00%	3.30%	96.70%	100.00%	5.42%	94.58%	100.00%

Tabel 6.19. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita, 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DIY	23.24%	76.76%	100.00%	0.72%	99.28%	100.00%	19.15%	80.85%	100.00%
Jatim	8.70%	91.30%	100.00%	4.22%	95.78%	100.00%	6.47%	93.53%	100.00%
Banten	8.72%	91.28%	100.00%	6.26%	93.74%	100.00%	7.92%	92.08%	100.00%
Bali	20.28%	79.72%	100.00%	4.43%	95.57%	100.00%	15.28%	84.72%	100.00%
NTB	19.27%	80.73%	100.00%	17.47%	82.53%	100.00%	18.31%	81.69%	100.00%
NTT	33.24%	66.76%	100.00%	19.69%	80.31%	100.00%	22.89%	77.11%	100.00%
Kalbar	7.57%	92.43%	100.00%	12.17%	87.83%	100.00%	10.26%	89.74%	100.00%
Kalteng	11.48%	88.52%	100.00%	10.30%	89.70%	100.00%	10.77%	89.23%	100.00%
Kalsel	14.03%	85.97%	100.00%	6.56%	93.44%	100.00%	10.20%	89.80%	100.00%
Kaltim	13.00%	87.00%	100.00%	18.45%	81.55%	100.00%	14.69%	85.31%	100.00%
Kalut	7.52%	92.48%	100.00%	13.49%	86.51%	100.00%	9.09%	90.91%	100.00%
Sulut	15.78%	84.22%	100.00%	11.21%	88.79%	100.00%	13.83%	86.17%	100.00%
Sulteng	11.28%	88.72%	100.00%	13.83%	86.17%	100.00%	12.92%	87.08%	100.00%

Tabel 6.19. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita, 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total	<10m ² per kapita	≥10m ² per kapita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sulsel	13.44%	86.56%	100.00%	7.10%	92.90%	100.00%	9.85%	90.15%	100.00%
Sultra	17.72%	82.28%	100.00%	12.66%	87.34%	100.00%	14.73%	85.27%	100.00%
Gorontalo	22.34%	77.66%	100.00%	16.46%	83.54%	100.00%	19.37%	80.63%	100.00%
Sulbar	11.22%	88.78%	100.00%	12.72%	87.28%	100.00%	12.32%	87.68%	100.00%
Maluku	19.21%	80.79%	100.00%	22.33%	77.67%	100.00%	20.70%	79.30%	100.00%
Malut	18.10%	81.90%	100.00%	15.18%	84.82%	100.00%	16.36%	83.64%	100.00%
Papbar	27.42%	72.58%	100.00%	19.98%	80.02%	100.00%	23.65%	76.35%	100.00%
Papua	21.83%	78.17%	100.00%	36.71%	63.29%	100.00%	32.42%	67.58%	100.00%
Total	13.23%	86.77%	100.00%	8.37%	91.63%	100.00%	11.05%	88.95%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.20. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	<10m2 per kapita	≥10m2 per kapita	Total	<10m2 per kapita	≥10m2 per kapita	Total	<10m2 per kapita	≥10m2 per kapita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	21.64%	78.36%	100.00%	28.67%	71.33%	100.00%	26.32%	73.68%	100.00%
Sumatera Utara	17.90%	82.10%	100.00%	27.29%	72.71%	100.00%	22.22%	77.78%	100.00%
Sumatera Barat	17.15%	82.85%	100.00%	20.54%	79.46%	100.00%	18.97%	81.03%	100.00%
Riau	19.40%	80.60%	100.00%	20.03%	79.97%	100.00%	19.78%	80.22%	100.00%
Jambi	16.24%	83.76%	100.00%	16.46%	83.54%	100.00%	16.39%	83.61%	100.00%
Sumatera Selatan	32.37%	67.63%	100.00%	23.75%	76.25%	100.00%	26.74%	73.26%	100.00%
Bengkulu	16.73%	83.27%	100.00%	20.56%	79.44%	100.00%	19.33%	80.67%	100.00%
Lampung	11.72%	88.28%	100.00%	7.25%	92.75%	100.00%	8.56%	91.44%	100.00%
Kep. Babel	12.49%	87.51%	100.00%	11.11%	88.89%	100.00%	11.88%	88.12%	100.00%
Kep. Riau	14.26%	85.74%	100.00%	12.33%	87.67%	100.00%	14.06%	85.94%	100.00%
DKI Jakarta	43.52%	56.48%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.52%	56.48%	100.00%
Jabar	20.18%	79.82%	100.00%	17.06%	82.94%	100.00%	19.43%	80.57%	100.00%
Jateng	8.21%	91.79%	100.00%	4.94%	95.06%	100.00%	6.59%	93.41%	100.00%
DIY	13.72%	86.28%	100.00%	2.53%	97.47%	100.00%	10.75%	89.25%	100.00%
Jatim	12.17%	87.83%	100.00%	6.03%	93.97%	100.00%	9.35%	90.65%	100.00%
Banten	17.32%	82.68%	100.00%	15.73%	84.27%	100.00%	16.89%	83.11%	100.00%
Bali	20.29%	79.71%	100.00%	9.75%	90.25%	100.00%	17.07%	82.93%	100.00%
NTB	29.45%	70.55%	100.00%	29.42%	70.58%	100.00%	29.44%	70.56%	100.00%

Tabel 6.20. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Luas Lantai per Meter Persegi per Kapita Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	<10m2 per kapita	≥10m2 per kapita	Total	<10m2 per kapita	≥10m2 per kapita	Total	<10m2 per kapita	≥10m2 per kapita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NTT	37.68%	62.32%	100.00%	32.67%	67.33%	100.00%	33.88%	66.12%	100.00%
Kalbar	13.59%	86.41%	100.00%	21.86%	78.14%	100.00%	19.06%	80.94%	100.00%
Kalteng	24.43%	75.57%	100.00%	20.51%	79.49%	100.00%	22.04%	77.96%	100.00%
Kalsel	20.94%	79.06%	100.00%	15.04%	84.96%	100.00%	17.81%	82.19%	100.00%
Kaltim	18.49%	81.51%	100.00%	17.43%	82.57%	100.00%	18.15%	81.85%	100.00%
Kalut	23.09%	76.91%	100.00%	17.67%	82.33%	100.00%	20.97%	79.03%	100.00%
Sulut	24.39%	75.61%	100.00%	23.34%	76.66%	100.00%	23.88%	76.12%	100.00%
Sulteng	21.04%	78.96%	100.00%	25.93%	74.07%	100.00%	24.53%	75.47%	100.00%
Sulsel	20.32%	79.68%	100.00%	14.81%	85.19%	100.00%	17.14%	82.86%	100.00%
Sultra	23.04%	76.96%	100.00%	19.39%	80.61%	100.00%	20.77%	79.23%	100.00%
Gorontalo	24.44%	75.56%	100.00%	30.62%	69.38%	100.00%	28.04%	71.96%	100.00%
Sulbar	21.22%	78.78%	100.00%	23.33%	76.67%	100.00%	22.86%	77.14%	100.00%
Maluku	30.52%	69.48%	100.00%	31.81%	68.19%	100.00%	31.25%	68.75%	100.00%
Malut	19.57%	80.43%	100.00%	22.21%	77.79%	100.00%	21.47%	78.53%	100.00%
Papbar	37.32%	62.68%	100.00%	30.77%	69.23%	100.00%	33.40%	66.60%	100.00%
Papua	34.50%	65.50%	100.00%	56.56%	43.44%	100.00%	50.73%	49.27%	100.00%
Total	19.21%	80.79%	100.00%	16.25%	83.75%	100.00%	17.91%	82.09%	100.00%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.21. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	98.89	1.11	100.00	94.92	5.08	100.00	96.24	3.76	100.00
Sumatera Utara	99.30	0.70	100.00	97.35	2.65	100.00	98.41	1.59	100.00
Sumatera Barat	99.61	0.39	100.00	99.35	0.65	100.00	99.47	0.53	100.00
Riau	99.83	0.17	100.00	98.87	1.13	100.00	99.26	0.74	100.00
Jambi	99.26	0.74	100.00	97.96	2.04	100.00	98.37	1.63	100.00
Sumatera Selatan	99.67	0.33	100.00	95.86	4.14	100.00	97.18	2.82	100.00
Bengkulu	99.66	0.34	100.00	97.21	2.79	100.00	97.99	2.01	100.00
Lampung	99.17	0.83	100.00	94.32	5.68	100.00	95.74	4.26	100.00
Kep. Babel	99.87	0.13	100.00	99.88	0.12	100.00	99.88	0.12	100.00
Kep. Riau	99.24	0.76	100.00	99.42	0.58	100.00	99.26	0.74	100.00
DKI Jakarta	99.84	0.16	100.00				99.84	0.16	100.00
Jabar	98.93	1.07	100.00	97.47	2.53	100.00	98.58	1.42	100.00
Jateng	94.70	5.30	100.00	84.54	15.46	100.00	89.68	10.32	100.00
DIY	98.30	1.70	100.00	90.87	9.13	100.00	96.33	3.67	100.00

Tabel 6.21. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jatim	97.45	2.55	100.00	86.91	13.09	100.00	92.60	7.40	100.00
Banten	98.35	1.65	100.00	95.47	4.53	100.00	97.58	2.42	100.00
Bali	99.25	0.75	100.00	98.10	1.90	100.00	98.90	1.10	100.00
NTB	99.11	0.89	100.00	95.58	4.42	100.00	97.27	2.73	100.00
NTT	96.00	4.00	100.00	74.97	25.03	100.00	80.08	19.92	100.00
Kalbar	100.00	0.00	100.00	99.61	0.39	100.00	99.74	0.26	100.00
Kalteng	99.98	0.02	100.00	99.25	0.75	100.00	99.53	0.47	100.00
Kalsel	99.95	0.05	100.00	99.50	0.50	100.00	99.71	0.29	100.00
Kaltim	99.63	0.37	100.00	99.24	0.76	100.00	99.50	0.50	100.00
Kalut	99.89	0.11	100.00	99.60	0.40	100.00	99.78	0.22	100.00
Sulut	97.54	2.46	100.00	96.29	3.71	100.00	96.93	3.07	100.00
Sulteng	99.07	0.93	100.00	97.26	2.74	100.00	97.78	2.22	100.00
Sulsel	99.28	0.72	100.00	98.66	1.34	100.00	98.92	1.08	100.00
Sultra	99.53	0.47	100.00	97.27	2.73	100.00	98.12	1.88	100.00

Tabel 6.21. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Gorontalo	99.69	0.31	100.00	98.11	1.89	100.00	98.77	1.23	100.00
Sulbar	99.19	0.81	100.00	96.94	3.06	100.00	97.45	2.55	100.00
Maluku	98.44	1.56	100.00	93.48	6.52	100.00	95.65	4.35	100.00
Malut	98.48	1.52	100.00	91.78	8.22	100.00	93.66	6.34	100.00
Papbar	99.35	0.65	100.00	97.65	2.35	100.00	98.33	1.67	100.00
Papua	98.57	1.43	100.00	69.82	30.18	100.00	77.42	22.58	100.00
Total	98.34	1.66	100.00	92.35	7.65	100.00	95.71	4.29	100.00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.22. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	98.55	1.45	100.00	94.41	5.59	100.00	95.60	4.40	100.00
Sumatera Utara	99.42	0.58	100.00	97.12	2.88	100.00	98.33	1.67	100.00
Sumatera Barat	99.94	0.06	100.00	99.59	0.41	100.00	99.76	0.24	100.00
Riau	99.73	0.27	100.00	99.27	0.73	100.00	99.47	0.53	100.00
Jambi	100.00	0.00	100.00	98.18	1.82	100.00	98.79	1.21	100.00
Sumatera Selatan	99.95	0.05	100.00	96.29	3.71	100.00	97.77	2.23	100.00
Bengkulu	100.00	0.00	100.00	98.15	1.85	100.00	98.89	1.11	100.00
Lampung	98.18	1.82	100.00	95.63	4.37	100.00	96.43	3.57	100.00
Kep. Babel	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Kep. Riau	99.47	0.53	100.00	100.00	0.00	100.00	99.53	0.47	100.00
DKI Jakarta	100.00	0.00	100.00				100.00	0.00	100.00
Jabar	98.26	1.74	100.00	96.40	3.60	100.00	97.70	2.30	100.00
Jateng	92.01	7.99	100.00	77.97	22.03	100.00	85.01	14.99	100.00
DIY	98.32	1.68	100.00	81.58	18.42	100.00	95.28	4.72	100.00
Jatim	95.80	4.20	100.00	82.58	17.42	100.00	89.22	10.78	100.00
Banten	97.03	2.97	100.00	93.36	6.64	100.00	95.84	4.16	100.00

Tabel 6.22. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bali	99.14	0.86	100.00	96.36	3.64	100.00	98.26	1.74	100.00
NTB	97.73	2.27	100.00	95.79	4.21	100.00	96.70	3.30	100.00
NTT	94.55	5.45	100.00	73.97	26.03	100.00	78.83	21.17	100.00
Kalbar	100.00	0.00	100.00	99.42	0.58	100.00	99.66	0.34	100.00
Kalteng	100.00	0.00	100.00	99.38	0.62	100.00	99.63	0.37	100.00
Kalsel	100.00	0.00	100.00	99.39	0.61	100.00	99.69	0.31	100.00
Kaltim	99.25	0.75	100.00	100.00	0.00	100.00	99.48	0.52	100.00
Kalut	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Sulut	98.85	1.15	100.00	97.35	2.65	100.00	98.21	1.79	100.00
Sulteng	100.00	0.00	100.00	95.82	4.18	100.00	97.31	2.69	100.00
Sulsel	99.09	0.91	100.00	98.57	1.43	100.00	98.80	1.20	100.00
Sultra	97.94	2.06	100.00	97.50	2.50	100.00	97.68	2.32	100.00
Gorontalo	100.00	0.00	100.00	98.43	1.57	100.00	99.21	0.79	100.00
Sulbar	98.91	1.09	100.00	95.39	4.61	100.00	96.33	3.67	100.00
Maluku	99.67	0.33	100.00	94.92	5.08	100.00	97.40	2.60	100.00

Tabel 6.22. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total	Bukan Tanah	Tanah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Malut	97.85	2.15	100.00	94.27	5.73	100.00	95.72	4.28	100.00
Papbar	99.18	0.82	100.00	97.99	2.01	100.00	98.57	1.43	100.00
Papua	98.25	1.75	100.00	76.16	23.84	100.00	82.54	17.46	100.00
Total	97.40	2.60	100.00	89.89	10.11	100.00	94.04	5.96	100.00

Tabel 6.23. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Atap Terluas Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2.6%	2.0%	.5%	94.91%	100.0%	.8%	.6%	5.3%	93.36%	100.0%	1.3%	1.0%	3.9%	93.81%	100.0%
Sumatera Utara	2.1%	3.2%	.8%	93.88%	100.0%	.5%	.9%	2.9%	95.73%	100.0%	1.3%	2.1%	1.8%	94.76%	100.0%
Sumatera Barat	1.2%	1.6%	.0%	97.15%	100.0%	.8%	1.1%	0.3%	97.70%	100.0%	1.0%	1.4%	0.2%	97.43%	100.0%
Riau	2.5%	3.5%	.3%	93.71%	100.0%	.2%	3.4%	2.9%	93.55%	100.0%	1.2%	3.4%	1.8%	93.61%	100.0%
Jambi	3.3%	24.5%	.0%	72.22%	100.0%	1.4%	22.5%	0.4%	75.58%	100.0%	2.1%	23.2%	0.3%	74.45%	100.0%
Sumatera Selatan	2.9%	41.8%	.4%	54.87%	100.0%	2.5%	65.0%	0.5%	31.91%	100.0%	2.7%	55.6%	0.5%	41.24%	100.0%
Bengkulu	0.9%	1.7%	.0%	97.40%	100.0%	.0%	6.5%	0.0%	93.50%	100.0%	0.4%	4.6%	0.0%	95.05%	100.0%
Lampung	0.5%	85.5%	.0%	14.02%	100.0%	.9%	89.5%	0.0%	9.67%	100.0%	0.7%	88.2%	0.0%	11.04%	100.0%
Kep. Babel	1.7%	17.8%	.0%	80.49%	100.0%	.4%	16.7%	0.2%	82.75%	100.0%	1.1%	17.3%	0.1%	81.55%	100.0%
Kep. Riau	3.7%	7.0%	.0%	89.26%	100.0%	.3%	.0%	1.4%	98.34%	100.0%	3.3%	6.3%	0.2%	90.22%	100.0%
DKI Jakarta	4.4%	40.7%	.0%	54.96%	100.0%	-	-	-	-	-	4.4%	40.7%	0.0%	54.96%	100.0%
Jabar	2.4%	79.1%	.0%	18.49%	100.0%	.8%	93.2%	0.1%	5.88%	100.0%	1.9%	83.3%	0.0%	14.70%	100.0%
Jateng	0.9%	88.7%	.0%	10.40%	100.0%	.7%	89.0%	0.0%	10.29%	100.0%	0.8%	88.9%	0.0%	10.34%	100.0%
DIY	2.1%	93.7%	.0%	4.21%	100.0%	.0%	96.7%	0.0%	3.26%	100.0%	1.7%	94.3%	0.0%	4.04%	100.0%
Jatim	2.3%	90.4%	.0%	7.37%	100.0%	1.1%	95.8%	0.1%	3.06%	100.0%	1.7%	93.1%	0.0%	5.22%	100.0%
Banten	1.1%	73.3%	.1%	25.49%	100.0%	.9%	85.4%	0.0%	13.74%	100.0%	1.0%	77.2%	0.1%	21.69%	100.0%

Tabel 6.23. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Atap Terluas Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bali	1.9%	83.6%	.1%	14.38%	100.0%	1.7%	70.4%	0.5%	27.37%	100.0%	1.9%	79.4%	0.2%	18.48%	100.0%
NTB	3.1%	60.8%	.0%	36.07%	100.0%	1.6%	60.4%	0.5%	37.40%	100.0%	2.3%	60.6%	0.3%	36.78%	100.0%
NTT	1.1%	1.7%	.1%	97.16%	100.0%	.1%	.4%	9.4%	90.11%	100.0%	0.3%	.7%	7.2%	91.78%	100.0%
Kalbar	0.3%	5.4%	.0%	94.31%	100.0%	.0%	2.7%	4.2%	93.10%	100.0%	0.1%	3.8%	2.5%	93.61%	100.0%
Kalteng	1.2%	10.5%	.8%	87.51%	100.0%	.0%	8.7%	1.8%	89.54%	100.0%	0.5%	9.4%	1.4%	88.73%	100.0%
Kalsel	0.6%	4.4%	.4%	94.50%	100.0%	.0%	2.5%	8.2%	89.28%	100.0%	0.3%	3.5%	4.4%	91.83%	100.0%
Kaltim	0.1%	7.4%	.0%	92.45%	100.0%	.6%	8.1%	0.7%	90.61%	100.0%	0.3%	7.6%	0.2%	91.88%	100.0%
Kalut	2.0%	0.0%	.0%	98.05%	100.0%	.1%	.0%	0.0%	99.87%	100.0%	1.5%	.0%	0.0%	98.53%	100.0%
Sulut	2.1%	0.3%	.0%	97.66%	100.0%	.8%	1.4%	0.9%	96.88%	100.0%	1.5%	.8%	0.4%	97.33%	100.0%
Sulteng	0.7%	2.0%	2.5%	94.68%	100.0%	.1%	.9%	7.0%	92.02%	100.0%	0.3%	1.3%	5.4%	92.96%	100.0%
Sulsel	1.7%	2.9%	.4%	94.98%	100.0%	.6%	1.8%	1.4%	96.27%	100.0%	1.1%	2.3%	0.9%	95.71%	100.0%
Sultra	0.9%	4.1%	.1%	94.98%	100.0%	.8%	3.2%	2.8%	93.18%	100.0%	0.8%	3.6%	1.7%	93.91%	100.0%
Gorontalo	0.0%	2.1%	.3%	97.65%	100.0%	.0%	.7%	0.8%	98.47%	100.0%	0.0%	1.4%	0.6%	98.06%	100.0%
Sulbar	0.8%	2.5%	2.8%	93.95%	100.0%	.0%	.5%	4.3%	95.20%	100.0%	0.2%	1.0%	3.9%	94.87%	100.0%
Maluku	0.2%	1.5%	1.6%	96.69%	100.0%	1.6%	1.1%	4.5%	92.78%	100.0%	0.9%	1.3%	3.0%	94.82%	100.0%

Tabel 6.23. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Atap Terluas Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Malut	0.0%	0.0%	.0%	100.00%	100.0%	.6%	.0%	2.7%	96.77%	100.0%	0.3%	.0%	1.6%	98.08%	100.0%
Papbar	0.5%	2.7%	.0%	96.80%	100.0%	1.3%	1.3%	1.2%	96.15%	100.0%	0.9%	2.0%	0.6%	96.47%	100.0%
Papua	0.7%	1.6%	1.2%	96.48%	100.0%	.1%	1.0%	26.4%	72.56%	100.0%	0.3%	1.2%	19.1%	79.47%	100.0%
Total	2.1%	59.8%	.1%	38.04%	100.0%	.8%	56.5%	1.7%	41.03%	100.0%	1.5%	58.3%	0.8%	39.38%	100.0%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.24. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Atap Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	3.6%	2.6%	.9%	92.83%	100.0%	1.4%	1.4%	4.4%	92.74%	100.0%	2.2%	1.8%	3.3%	92.77%	100.0%
Sumatera Utara	2.9%	2.1%	.5%	94.54%	100.0%	.9%	.7%	2.6%	95.76%	100.0%	1.9%	1.5%	1.5%	95.10%	100.0%
Sumatera Barat	1.2%	2.1%	.4%	96.27%	100.0%	1.3%	1.2%	0.8%	96.65%	100.0%	1.3%	1.6%	0.6%	96.47%	100.0%
Riau	2.8%	2.5%	.3%	94.47%	100.0%	1.3%	2.4%	1.7%	94.59%	100.0%	1.9%	2.5%	1.1%	94.54%	100.0%
Jambi	4.6%	19.1%	.0%	76.28%	100.0%	1.2%	24.0%	0.3%	74.47%	100.0%	2.3%	22.4%	0.2%	75.04%	100.0%
Sumatera Selatan	5.1%	42.0%	.8%	52.08%	100.0%	.9%	63.4%	1.3%	34.43%	100.0%	2.3%	56.0%	1.1%	40.53%	100.0%
Bengkulu	0.7%	2.2%	.0%	97.14%	100.0%	.7%	6.1%	0.0%	93.17%	100.0%	0.7%	4.9%	0.0%	94.44%	100.0%
Lampung	0.8%	80.9%	.0%	18.27%	100.0%	.8%	85.9%	0.0%	13.26%	100.0%	0.8%	84.4%	0.0%	14.73%	100.0%
Kep. Babel	1.7%	10.4%	.3%	87.67%	100.0%	.6%	7.5%	0.7%	91.16%	100.0%	1.2%	9.1%	0.5%	89.22%	100.0%
Kep. Riau	4.8%	11.5%	.1%	83.67%	100.0%	1.3%	1.4%	2.8%	94.58%	100.0%	4.4%	10.5%	0.4%	84.77%	100.0%
DKI Jakarta	4.6%	35.3%	.0%	60.05%	100.0%	.0%	.0%	0.0%	0.00%	.0%	4.6%	35.3%	0.0%	60.05%	100.0%
Jabar	3.4%	79.5%	.0%	17.08%	100.0%	1.6%	92.1%	0.1%	6.29%	100.0%	3.0%	82.5%	0.0%	14.48%	100.0%
Jateng	1.1%	87.8%	.0%	11.02%	100.0%	1.1%	86.4%	0.0%	12.53%	100.0%	1.1%	87.1%	0.0%	11.76%	100.0%
DIY	1.2%	94.9%	.0%	3.89%	100.0%	.4%	98.0%	0.0%	1.59%	100.0%	1.0%	95.7%	0.0%	3.28%	100.0%
Jatim	2.3%	89.1%	.0%	8.56%	100.0%	1.1%	96.3%	0.0%	2.62%	100.0%	1.8%	92.4%	0.0%	5.82%	100.0%
Banten	2.4%	72.9%	.1%	24.68%	100.0%	1.1%	84.9%	2.6%	11.33%	100.0%	2.0%	76.1%	0.8%	21.08%	100.0%
Bali	1.9%	82.4%	.0%	15.67%	100.0%	1.5%	76.2%	0.1%	22.18%	100.0%	1.8%	80.5%	0.1%	17.66%	100.0%

Tabel 6.24. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Atap Terluas Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total	Beton	Genteng	Jerami/ ijuk/ daun/ rumbia	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NTB	4.5%	58.3%	.1%	37.15%	100.0%	1.2%	51.1%	1.0%	46.66%	100.0%	2.8%	54.5%	0.6%	42.12%	100.0%
NTT	0.5%	0.2%	.9%	98.42%	100.0%	.1%	.5%	9.8%	89.62%	100.0%	0.2%	.4%	7.6%	91.75%	100.0%
Kalbar	0.7%	7.2%	.2%	91.83%	100.0%	.2%	1.8%	2.5%	95.62%	100.0%	0.4%	3.6%	1.7%	94.33%	100.0%
Kalteng	1.2%	14.5%	.3%	83.94%	100.0%	.6%	10.9%	1.3%	87.11%	100.0%	0.8%	12.3%	0.9%	85.87%	100.0%
Kalsel	0.5%	6.4%	.6%	92.56%	100.0%	.2%	4.5%	5.0%	90.26%	100.0%	0.3%	5.4%	2.9%	91.34%	100.0%
Kaltim	1.1%	7.2%	.0%	91.61%	100.0%	.6%	5.8%	0.1%	93.50%	100.0%	1.0%	6.7%	0.1%	92.23%	100.0%
Kalut	1.9%	0.7%	.0%	97.41%	100.0%	.6%	1.3%	0.1%	98.01%	100.0%	1.4%	.9%	0.0%	97.65%	100.0%
Sulut	2.1%	1.1%	.3%	96.49%	100.0%	1.0%	1.4%	1.8%	95.78%	100.0%	1.6%	1.2%	1.1%	96.14%	100.0%
Sulteng	1.7%	1.1%	2.9%	94.30%	100.0%	.4%	1.7%	8.8%	89.06%	100.0%	0.8%	1.5%	7.1%	90.56%	100.0%
Sulsel	1.9%	2.7%	.6%	94.80%	100.0%	.7%	1.3%	2.5%	95.50%	100.0%	1.2%	1.9%	1.7%	95.21%	100.0%
Sultra	2.0%	2.2%	1.5%	94.30%	100.0%	.5%	5.5%	5.2%	88.93%	100.0%	1.1%	4.2%	3.8%	90.95%	100.0%
Gorontalo	0.1%	1.7%	.6%	97.70%	100.0%	.0%	1.0%	3.1%	95.92%	100.0%	0.0%	1.3%	2.0%	96.67%	100.0%
Sulbar	2.0%	1.6%	3.7%	92.70%	100.0%	.4%	.8%	4.5%	94.24%	100.0%	0.8%	1.0%	4.3%	93.89%	100.0%
Maluku	2.6%	0.9%	1.6%	94.90%	100.0%	.7%	1.3%	6.8%	91.20%	100.0%	1.5%	1.1%	4.5%	92.82%	100.0%
Malut	0.0%	0.0%	.3%	99.68%	100.0%	.1%	.0%	4.2%	95.66%	100.0%	0.1%	.0%	3.1%	96.78%	100.0%
Papbar	0.8%	0.4%	.0%	98.78%	100.0%	.9%	1.0%	0.9%	97.17%	100.0%	0.9%	.8%	0.5%	97.82%	100.0%
Papua	1.7%	3.6%	.5%	94.16%	100.0%	.1%	.5%	36.1%	63.30%	100.0%	0.5%	1.3%	26.7%	71.46%	100.0%
Total	2.6%	59.4%	.2%	37.79%	100.0%	1.0%	52.5%	2.3%	44.22%	100.0%	1.9%	56.4%	1.1%	40.61%	100.0%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.25. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	62.1%	35.8%	.0%	2.07%	100.0%	41.8%	54.0%	0.3%	3.95%	100.0%	47.7%	48.7%	0.2%	3.40%	100.0%
Sumatera Utara	80.7%	16.3%	.2%	2.81%	100.0%	48.3%	47.6%	0.5%	3.55%	100.0%	65.3%	31.2%	0.4%	3.16%	100.0%
Sumatera Barat	84.8%	13.3%	.0%	1.96%	100.0%	67.2%	28.9%	0.4%	3.54%	100.0%	75.7%	21.3%	0.2%	2.77%	100.0%
Riau	76.0%	20.1%	.0%	3.93%	100.0%	40.7%	54.4%	0.1%	4.75%	100.0%	55.9%	39.7%	0.1%	4.40%	100.0%
Jambi	79.7%	19.5%	.0%	0.76%	100.0%	57.0%	41.8%	0.1%	1.14%	100.0%	64.6%	34.3%	0.1%	1.01%	100.0%
Sumatera Selatan	73.7%	24.4%	.0%	1.85%	100.0%	51.9%	44.7%	0.5%	2.89%	100.0%	60.8%	36.5%	0.3%	2.47%	100.0%
Bengkulu	89.2%	8.6%	.0%	2.20%	100.0%	43.7%	42.5%	0.8%	13.02%	100.0%	61.8%	29.0%	0.5%	8.72%	100.0%
Lampung	92.4%	4.8%	.0%	2.78%	100.0%	78.6%	14.6%	0.6%	6.15%	100.0%	82.9%	11.5%	0.4%	5.09%	100.0%
Kep. Babel	89.9%	9.9%	.0%	0.18%	100.0%	71.6%	28.1%	0.1%	0.18%	100.0%	81.3%	18.5%	0.0%	0.18%	100.0%
Kep. Riau	85.8%	13.9%	.0%	0.22%	100.0%	50.4%	44.5%	0.0%	5.12%	100.0%	82.1%	17.2%	0.0%	0.74%	100.0%
DKI Jakarta	96.6%	2.6%	.0%	0.84%	100.0%	.0%	.0%	0.0%	0.00%	.0%	96.6%	2.6%	0.0%	0.84%	100.0%
Jabar	89.6%	2.6%	.3%	7.49%	100.0%	68.5%	5.3%	1.4%	24.75%	100.0%	83.3%	3.4%	0.6%	12.68%	100.0%
Jateng	87.2%	9.8%	.1%	2.95%	100.0%	67.0%	26.0%	0.9%	6.15%	100.0%	77.1%	17.9%	0.5%	4.55%	100.0%
DIY	97.5%	1.3%	.0%	1.25%	100.0%	73.9%	16.6%	0.7%	8.82%	100.0%	93.2%	4.1%	0.1%	2.62%	100.0%
Jatim	93.9%	2.8%	.2%	3.09%	100.0%	76.4%	12.8%	1.0%	9.86%	100.0%	85.2%	7.8%	0.6%	6.47%	100.0%
Banten	92.8%	2.2%	.1%	4.94%	100.0%	74.2%	4.0%	2.7%	19.20%	100.0%	86.7%	2.8%	0.9%	9.55%	100.0%
Bali	98.8%	0.4%	.4%	0.46%	100.0%	96.4%	.8%	0.5%	2.32%	100.0%	98.0%	.6%	0.4%	1.05%	100.0%

Tabel 6.25. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Tembok	Kayu/Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/Papan	Bambu	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NTB	92.6%	2.3%	.3%	4.76%	100.0%	77.2%	10.6%	0.9%	11.28%	100.0%	84.4%	6.7%	0.7%	8.22%	100.0%
NTT	67.1%	6.9%	6.0%	19.99%	100.0%	35.4%	13.1%	22.2%	29.28%	100.0%	42.9%	11.6%	18.4%	27.09%	100.0%
Kalbar	70.8%	10.5%	.0%	18.69%	100.0%	29.1%	34.3%	0.2%	36.40%	100.0%	46.4%	24.5%	0.1%	29.06%	100.0%
Kalteng	47.3%	51.1%	.0%	1.53%	100.0%	15.2%	84.7%	0.0%	0.12%	100.0%	28.0%	71.3%	0.0%	0.68%	100.0%
Kalsel	30.3%	67.8%	.0%	1.91%	100.0%	9.1%	88.5%	0.0%	2.46%	100.0%	19.4%	78.4%	0.0%	2.20%	100.0%
Kaltim	56.5%	41.5%	.0%	2.02%	100.0%	26.0%	71.4%	0.0%	2.59%	100.0%	47.0%	50.8%	0.0%	2.19%	100.0%
Kalut	44.4%	54.1%	.0%	1.45%	100.0%	16.0%	83.9%	0.0%	0.07%	100.0%	36.9%	62.0%	0.0%	1.09%	100.0%
Sulut	80.9%	16.9%	.1%	2.10%	100.0%	72.2%	24.6%	0.6%	2.69%	100.0%	77.2%	20.2%	0.3%	2.35%	100.0%
Sulteng	79.9%	19.5%	.0%	0.62%	100.0%	59.2%	39.8%	0.3%	0.69%	100.0%	66.6%	32.6%	0.2%	0.66%	100.0%
Sulsel	68.3%	24.0%	.2%	7.46%	100.0%	32.1%	47.6%	1.3%	19.05%	100.0%	47.8%	37.3%	0.9%	14.03%	100.0%
Sultra	64.4%	33.4%	.4%	1.86%	100.0%	39.5%	57.7%	0.4%	2.42%	100.0%	49.7%	47.8%	0.4%	2.19%	100.0%
Gorontalo	94.7%	4.3%	.0%	0.95%	100.0%	79.1%	16.0%	0.3%	4.63%	100.0%	86.8%	10.2%	0.1%	2.81%	100.0%
Sulbar	50.1%	34.0%	.9%	14.92%	100.0%	33.9%	54.9%	0.6%	10.56%	100.0%	38.3%	49.3%	0.7%	11.73%	100.0%
Maluku	86.1%	12.8%	.0%	1.12%	100.0%	84.1%	13.4%	0.2%	2.26%	100.0%	85.2%	13.1%	0.1%	1.67%	100.0%
Malut	95.3%	4.7%	.0%	0.00%	100.0%	80.8%	18.1%	0.0%	1.09%	100.0%	86.7%	12.7%	0.0%	0.65%	100.0%
Papbar	85.2%	14.1%	.0%	0.71%	100.0%	62.5%	34.9%	0.0%	2.64%	100.0%	73.6%	24.6%	0.0%	1.69%	100.0%
Papua	77.7%	20.6%	.0%	1.67%	100.0%	18.9%	74.6%	0.0%	6.52%	100.0%	35.9%	59.0%	0.0%	5.12%	100.0%
Total	86.7%	9.0%	.2%	4.16%	100.0%	60.4%	27.2%	1.6%	10.84%	100.0%	74.9%	17.1%	0.8%	7.15%	100.0%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.26. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	66.7%	30.5%	.1%	2.73%	100.0%	49.2%	47.3%	0.3%	3.15%	100.0%	55.0%	41.7%	0.2%	3.01%	100.0%
Sumatera Utara	80.6%	16.0%	.2%	3.22%	100.0%	54.2%	39.7%	0.7%	5.42%	100.0%	68.4%	26.9%	0.4%	4.23%	100.0%
Sumatera Barat	81.2%	16.7%	.1%	1.93%	100.0%	70.2%	26.4%	0.2%	3.27%	100.0%	75.3%	21.9%	0.2%	2.65%	100.0%
Riau	77.6%	20.1%	.0%	2.26%	100.0%	49.6%	46.9%	0.0%	3.53%	100.0%	60.9%	36.1%	0.0%	3.02%	100.0%
Jambi	74.4%	23.7%	.0%	1.92%	100.0%	62.2%	36.6%	0.1%	1.15%	100.0%	66.0%	32.5%	0.0%	1.39%	100.0%
Sumatera Selatan	76.9%	22.1%	.1%	0.92%	100.0%	55.7%	41.3%	0.8%	2.10%	100.0%	63.1%	34.7%	0.6%	1.69%	100.0%
Bengkulu	87.0%	8.1%	.5%	4.43%	100.0%	57.2%	34.5%	0.8%	7.46%	100.0%	66.8%	26.0%	0.7%	6.49%	100.0%
Lampung	88.7%	7.1%	.7%	3.54%	100.0%	76.4%	17.5%	0.5%	5.67%	100.0%	80.0%	14.4%	0.5%	5.05%	100.0%
Kep. Babel	90.4%	9.3%	.0%	0.28%	100.0%	74.6%	24.8%	0.2%	0.44%	100.0%	83.4%	16.1%	0.1%	0.35%	100.0%
Kep. Riau	85.5%	12.3%	.1%	2.13%	100.0%	59.7%	37.6%	0.0%	2.75%	100.0%	82.9%	14.8%	0.1%	2.19%	100.0%
DKI Jakarta	95.2%	4.1%	.0%	0.62%	100.0%	.0%	.0%	0.0%	0.00%	.0%	95.2%	4.1%	0.0%	0.62%	100.0%
Jabar	91.9%	1.8%	.2%	6.00%	100.0%	73.2%	5.9%	1.1%	19.75%	100.0%	87.5%	2.8%	0.4%	9.31%	100.0%
Jateng	90.5%	6.8%	.1%	2.59%	100.0%	73.8%	21.6%	0.5%	4.13%	100.0%	82.3%	14.1%	0.3%	3.35%	100.0%
DIY	98.5%	0.5%	.0%	0.99%	100.0%	87.6%	7.3%	0.2%	4.87%	100.0%	95.6%	2.3%	0.1%	2.02%	100.0%
Jatim	94.8%	2.8%	.2%	2.19%	100.0%	82.7%	11.6%	0.5%	5.21%	100.0%	89.2%	6.8%	0.4%	3.58%	100.0%
Banten	94.7%	1.7%	.1%	3.48%	100.0%	72.2%	3.3%	2.6%	21.85%	100.0%	88.7%	2.2%	0.8%	8.43%	100.0%
Bali	98.2%	0.8%	.0%	0.93%	100.0%	95.4%	1.2%	0.2%	3.27%	100.0%	97.3%	.9%	0.1%	1.65%	100.0%

Tabel 6.26. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan					Perkotaan+Perdesaan				
	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total	Tembok	Kayu/ Papan	Bambu	lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NTB	90.4%	4.5%	.4%	4.71%	100.0%	72.4%	16.4%	1.1%	10.02%	100.0%	81.0%	10.7%	0.8%	7.48%	100.0%
NTT	70.9%	5.4%	5.7%	18.05%	100.0%	37.9%	13.8%	18.7%	29.54%	100.0%	45.9%	11.8%	15.6%	26.75%	100.0%
Kalbar	70.9%	10.9%	.0%	18.25%	100.0%	38.3%	28.9%	0.1%	32.71%	100.0%	49.4%	22.8%	0.1%	27.81%	100.0%
Kalteng	44.9%	53.7%	.0%	1.40%	100.0%	26.8%	71.9%	0.0%	1.31%	100.0%	33.9%	64.8%	0.0%	1.34%	100.0%
Kalsel	40.3%	58.2%	.0%	1.46%	100.0%	20.9%	76.8%	0.1%	2.26%	100.0%	30.0%	68.1%	0.1%	1.88%	100.0%
Kaltim	55.3%	43.6%	.0%	1.17%	100.0%	28.0%	69.9%	0.0%	2.09%	100.0%	46.4%	52.1%	0.0%	1.47%	100.0%
Kalut	55.3%	44.4%	.0%	0.32%	100.0%	16.9%	82.5%	0.0%	0.58%	100.0%	40.3%	59.3%	0.0%	0.42%	100.0%
Sulut	75.6%	20.8%	.3%	3.32%	100.0%	65.6%	29.7%	1.1%	3.62%	100.0%	70.7%	25.1%	0.7%	3.47%	100.0%
Sulteng	75.2%	23.5%	.0%	1.32%	100.0%	51.1%	46.0%	0.6%	2.31%	100.0%	58.0%	39.6%	0.4%	2.03%	100.0%
Sulsel	68.6%	22.3%	.1%	9.03%	100.0%	37.3%	43.8%	1.2%	17.70%	100.0%	50.6%	34.7%	0.7%	14.02%	100.0%
Sultra	69.8%	28.5%	.1%	1.61%	100.0%	40.0%	57.8%	0.2%	2.05%	100.0%	51.2%	46.8%	0.2%	1.88%	100.0%
Gorontalo	87.2%	10.7%	.0%	2.04%	100.0%	69.0%	25.6%	0.1%	5.34%	100.0%	76.6%	19.4%	0.0%	3.96%	100.0%
Sulbar	67.8%	26.9%	.3%	5.02%	100.0%	44.6%	49.1%	0.6%	5.60%	100.0%	49.8%	44.2%	0.5%	5.47%	100.0%
Maluku	82.3%	15.5%	.3%	1.97%	100.0%	73.8%	22.0%	0.3%	3.88%	100.0%	77.5%	19.1%	0.3%	3.05%	100.0%
Malut	88.1%	11.3%	.1%	0.49%	100.0%	71.1%	27.0%	0.2%	1.62%	100.0%	75.9%	22.6%	0.2%	1.30%	100.0%
Papbar	80.3%	18.4%	.0%	1.22%	100.0%	61.8%	35.9%	0.1%	2.27%	100.0%	69.2%	28.9%	0.0%	1.85%	100.0%
Papua	74.2%	23.1%	.0%	2.61%	100.0%	13.6%	81.5%	0.1%	4.84%	100.0%	29.6%	66.0%	0.1%	4.25%	100.0%
Total	87.8%	8.4%	.2%	3.63%	100.0%	63.4%	27.1%	1.1%	8.37%	100.0%	77.1%	16.6%	0.6%	5.71%	100.0%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.27 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Aceh	99.98%	99.83%	99.06%	99.49%	99.33%	99.60%
Sumatera Utara	99.45%	99.83%	95.77%	96.96%	97.70%	98.51%
Sumatera Barat	99.43%	99.71%	97.20%	98.21%	98.28%	98.91%
Riau	99.12%	99.27%	96.16%	96.60%	97.43%	97.68%
Jambi	99.83%	99.99%	97.52%	98.43%	98.30%	98.93%
Sumatera Selatan	99.94%	99.72%	98.57%	98.76%	99.13%	99.09%
Bengkulu	99.94%	99.62%	96.87%	98.53%	98.09%	98.88%
Lampung	100.00%	99.96%	98.98%	99.57%	99.30%	99.68%
Kep. Babel	100.00%	99.81%	100.00%	99.51%	100.00%	99.68%
Kep. Riau	100.00%	99.76%	97.05%	98.43%	99.69%	99.63%
DKI Jakarta	100.00%	100.00%	-	-	100.00%	100.00%
Jabar	99.96%	99.96%	99.83%	99.97%	99.92%	99.96%
Jateng	99.89%	99.97%	99.78%	99.94%	99.84%	99.95%
DIY	99.89%	99.73%	100.00%	100.00%	99.91%	99.80%

Tabel 6.27 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Jatim	99.95%	99.95%	99.82%	99.82%	99.88%	99.89%
Banten	100.00%	99.98%	100.00%	99.47%	100.00%	99.84%
Bali	100.00%	99.96%	99.80%	99.63%	99.94%	99.86%
NTB	100.00%	99.93%	99.42%	99.67%	99.69%	99.80%
NTT	99.80%	99.77%	79.79%	81.99%	84.51%	86.31%
Kalbar	99.82%	99.60%	93.72%	91.97%	96.25%	94.56%
Kalteng	99.98%	99.49%	96.10%	96.94%	97.65%	97.93%
Kalsel	99.75%	99.97%	99.23%	99.28%	99.48%	99.60%
Kaltim	100.00%	99.82%	98.47%	98.67%	99.52%	99.45%
Kalut	100.00%	99.80%	100.00%	99.52%	100.00%	99.69%
Sulut	99.74%	99.67%	98.43%	99.56%	99.19%	99.62%
Sulteng	99.55%	99.63%	95.16%	94.95%	96.73%	96.29%
Sulsel	99.69%	99.80%	98.57%	98.77%	99.06%	99.21%
Sultra	100.00%	99.97%	97.27%	98.07%	98.38%	98.78%

Tabel 6.27 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Gorontalo	100.00%	100.00%	99.05%	97.72%	99.52%	98.67%
Sulbar	100.00%	99.57%	98.11%	97.45%	98.61%	97.93%
Maluku	98.98%	99.15%	91.03%	92.04%	95.18%	95.15%
Malut	99.71%	99.96%	92.16%	93.85%	95.23%	95.56%
Papbar	99.11%	99.82%	91.93%	90.46%	95.47%	94.22%
Papua	98.65%	99.40%	57.19%	63.07%	69.16%	72.68%
Total	99.87%	99.90%	97.67%	97.50%	98.89%	98.84%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.28. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Aceh	84.87	88.75	58.40	64.21	66.06	72.41
Sumatera Utara	89.61	87.84	57.26	62.04	74.22	75.97
Sumatera Barat	87.78	84.75	62.98	64.74	75.03	73.99
Riau	91.21	92.21	75.30	81.42	82.14	85.77
Jambi	86.11	88.94	62.79	64.67	70.63	72.35
Sumatera Selatan	87.36	86.15	54.16	59.41	67.66	68.66
Bengkulu	73.31	70.57	34.52	39.87	49.96	49.72
Lampung	66.52	72.49	48.36	55.57	54.07	60.52
Kep. Babel	86.29	89.52	75.06	78.34	81.00	84.57
Kep. Riau	94.73	95.01	60.70	61.79	91.15	91.63
DKI Jakarta	85.09	89.17			85.09	89.17
Jabar	75.76	76.67	57.22	60.58	70.19	72.80
Jateng	82.29	81.44	75.36	76.94	78.84	79.21
DIY	81.13	77.88	73.17	82.07	79.69	78.99
Jatim	77.45	81.12	70.34	72.01	73.91	76.92
Banten	79.26	82.62	53.24	51.71	70.84	74.29

Tabel 6.28. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Bali	94.61	94.69	81.78	79.93	90.56	90.17
NTB	78.07	81.83	62.25	70.96	69.68	76.15
NTT	91.07	88.09	61.35	62.20	68.36	68.49
Kalbar	98.18	95.06	72.02	67.07	82.85	76.55
Kalteng	89.11	90.40	63.70	67.10	73.83	76.20
Kalsel	90.72	89.78	50.07	59.70	69.88	73.85
Kaltim	97.61	98.80	81.71	86.09	92.67	94.68
Kalut	99.72	98.14	70.13	83.74	91.92	92.51
Sulut	89.40	91.41	72.58	73.21	82.24	82.56
Sulteng	95.34	92.02	69.98	67.42	79.03	74.46
Sulsel	92.89	92.04	68.48	72.23	79.06	80.63
Sultra	92.12	93.67	77.53	74.16	83.49	81.51
Gorontalo	94.61	90.50	76.97	75.48	85.70	81.76
Sulbar	77.05	84.25	58.90	59.40	63.76	64.98
Maluku	83.81	86.19	64.71	67.70	74.67	75.79
Malut	86.76	89.56	60.37	59.46	71.07	67.88

Tabel 6.28. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Papbar	93.49	96.08	70.96	71.30	82.06	81.24
Papua	87.28	92.65	47.26	45.58	58.81	58.03
Total	82.04	83.13	65.00	67.16	74.42	76.13

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.29. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Sanitasi Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	82.24	17.76	100.00	54.82	45.18	100.00	62.76	37.24	100.00
Sumatera Utara	83.56	16.44	100.00	60.96	39.04	100.00	72.80	27.20	100.00
Sumatera Barat	63.36	36.64	100.00	45.30	54.70	100.00	54.07	45.93	100.00
Riau	79.58	20.42	100.00	57.18	42.82	100.00	66.80	33.20	100.00
Jambi	77.99	22.01	100.00	51.74	48.26	100.00	60.57	39.43	100.00
Sumatera Selatan	85.30	14.70	100.00	55.29	44.71	100.00	67.49	32.51	100.00
Bengkulu	75.00	25.00	100.00	27.63	72.37	100.00	46.48	53.52	100.00
Lampung	76.75	23.25	100.00	43.82	56.18	100.00	54.17	45.83	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	90.21	9.79	100.00	74.35	25.65	100.00	82.74	17.26	100.00
Kepulauan Riau	71.53	28.47	100.00	59.29	40.71	100.00	70.24	29.76	100.00
DKI Jakarta	79.55	20.45	100.00				79.55	20.45	100.00
Jawa Barat	62.54	37.46	100.00	41.86	58.14	100.00	56.32	43.68	100.00
Jawa Tengah	72.16	27.84	100.00	56.67	43.33	100.00	64.43	35.57	100.00
DI Yogyakarta	66.37	33.63	100.00	62.78	37.22	100.00	65.72	34.28	100.00

Tabel 6.29. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Sanitasi Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jawa Timur	72.14	27.86	100.00	45.33	54.67	100.00	58.79	41.21	100.00
Banten	81.63	18.37	100.00	28.32	71.68	100.00	64.38	35.62	100.00
Bali	83.12	16.88	100.00	59.36	40.64	100.00	75.62	24.38	100.00
Nusa Tenggara Barat	64.42	35.58	100.00	46.89	53.11	100.00	55.12	44.88	100.00
Nusa Tenggara Timur	58.42	41.58	100.00	35.99	64.01	100.00	41.28	58.72	100.00
Kalimantan Barat	72.96	27.04	100.00	40.56	59.44	100.00	53.97	46.03	100.00
Kalimantan Tengah	72.91	27.09	100.00	35.95	64.05	100.00	50.68	49.32	100.00
Kalimantan Selatan	69.15	30.85	100.00	43.79	56.21	100.00	56.15	43.85	100.00
Kalimantan Timur	80.15	19.85	100.00	52.87	47.13	100.00	71.68	28.32	100.00
Kalimantan Utara	74.10	25.90	100.00	55.77	44.23	100.00	69.27	30.73	100.00
Sulawesi Utara	67.49	32.51	100.00	63.45	36.55	100.00	65.77	34.23	100.00
Sulawesi Tengah	78.70	21.30	100.00	56.16	43.84	100.00	64.20	35.80	100.00
Sulawesi Selatan	81.74	18.26	100.00	69.53	30.47	100.00	74.82	25.18	100.00
Sulawesi Tenggara	73.33	26.67	100.00	60.03	39.97	100.00	65.46	34.54	100.00

Tabel 6.29. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Perempuan, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Sanitasi Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Gorontalo	70.74	29.26	100.00	39.90	60.10	100.00	55.17	44.83	100.00
Sulawesi Barat	77.80	22.20	100.00	46.35	53.65	100.00	54.77	45.23	100.00
Maluku	66.56	33.44	100.00	58.82	41.18	100.00	62.86	37.14	100.00
Maluku Utara	66.90	33.10	100.00	56.09	43.91	100.00	60.47	39.53	100.00
Papua Barat	75.29	24.71	100.00	58.13	41.87	100.00	66.58	33.42	100.00
Papua	71.38	28.62	100.00	17.83	82.17	100.00	33.29	66.71	100.00
Total	72.07	27.93	100.00	49.49	50.51	100.00	61.96	38.04	100.00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.30. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis-jenis Sanitasi Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	83.25	16.75	100.00	57.83	42.17	100.00	66.33	33.67	100.00
Sumatera Utara	85.03	14.97	100.00	62.20	37.80	100.00	74.53	25.47	100.00
Sumatera Barat	66.20	33.80	100.00	43.79	56.21	100.00	54.15	45.85	100.00
Riau	85.41	14.59	100.00	59.79	40.21	100.00	70.13	29.87	100.00
Jambi	80.37	19.63	100.00	56.09	43.91	100.00	63.77	36.23	100.00
Sumatera Selatan	82.85	17.15	100.00	57.28	42.72	100.00	66.13	33.87	100.00
Bengkulu	75.53	24.47	100.00	27.83	72.17	100.00	43.14	56.86	100.00
Lampung	72.97	27.03	100.00	43.99	56.01	100.00	52.47	47.53	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	91.14	8.86	100.00	77.23	22.77	100.00	84.98	15.02	100.00
Kepulauan Riau	85.71	14.29	100.00	59.38	40.62	100.00	83.04	16.96	100.00
DKI Jakarta	80.11	19.89	100.00				80.11	19.89	100.00
Jawa Barat	66.09	33.91	100.00	45.25	54.75	100.00	61.08	38.92	100.00
Jawa Tengah	75.13	24.87	100.00	60.90	39.10	100.00	68.10	31.90	100.00
DI Yogyakarta	75.81	24.19	100.00	66.90	33.10	100.00	73.44	26.56	100.00

Tabel 6.30. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis-jenis Sanitasi Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jawa Timur	77.96	22.04	100.00	52.17	47.83	100.00	66.09	33.91	100.00
Banten	83.92	16.08	100.00	27.48	72.52	100.00	68.71	31.29	100.00
Bali	85.12	14.88	100.00	69.07	30.93	100.00	80.21	19.79	100.00
Nusa Tenggara Barat	73.40	26.60	100.00	59.21	40.79	100.00	65.99	34.01	100.00
Nusa Tenggara Timur	67.38	32.62	100.00	35.75	64.25	100.00	43.43	56.57	100.00
Kalimantan Barat	75.18	24.82	100.00	38.34	61.66	100.00	50.82	49.18	100.00
Kalimantan Tengah	75.51	24.49	100.00	40.93	59.07	100.00	54.43	45.57	100.00
Kalimantan Selatan	75.54	24.46	100.00	47.82	52.18	100.00	60.86	39.14	100.00
Kalimantan Timur	87.63	12.37	100.00	62.54	37.46	100.00	79.49	20.51	100.00
Kalimantan Utara	72.70	27.30	100.00	54.72	45.28	100.00	65.67	34.33	100.00
Sulawesi Utara	72.47	27.53	100.00	60.48	39.52	100.00	66.64	33.36	100.00
Sulawesi Tengah	76.93	23.07	100.00	55.79	44.21	100.00	61.84	38.16	100.00
Sulawesi Selatan	83.02	16.98	100.00	69.74	30.26	100.00	75.37	24.63	100.00
Sulawesi Tenggara	79.75	20.25	100.00	59.67	40.33	100.00	67.24	32.76	100.00

Tabel 6.30. Persentase Rumah Tangga menurut Kepala Rumah Tangga Laki-laki, Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis-jenis Sanitasi Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total	Sanitasi Layak	Tidak Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Gorontalo	69.16	30.84	100.00	44.37	55.63	100.00	54.74	45.26	100.00
Sulawesi Barat	75.09	24.91	100.00	49.66	50.34	100.00	55.37	44.63	100.00
Maluku	68.53	31.47	100.00	57.69	42.31	100.00	62.43	37.57	100.00
Maluku Utara	79.18	20.82	100.00	53.22	46.78	100.00	60.48	39.52	100.00
Papua Barat	72.65	27.35	100.00	55.13	44.87	100.00	62.16	37.84	100.00
Papua	75.65	24.35	100.00	14.12	85.88	100.00	30.39	69.61	100.00
Total	75.56	24.44	100.00	52.06	47.94	100.00	65.26	34.74	100.00

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.31. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Aceh	0.46%	0.79%	0.24%	0.51%	0.30%	0.60%
Sumatera Utara	1.83%	2.09%	0.27%	0.11%	1.09%	1.18%
Sumatera Barat	2.21%	2.39%	0.00%	0.26%	1.07%	1.25%
Riau	2.15%	1.85%	0.35%	0.32%	1.12%	0.93%
Jambi	2.08%	2.89%	0.32%	0.27%	0.91%	1.10%
Sumatera Selatan	2.66%	3.44%	0.00%	0.24%	1.08%	1.35%
Bengkulu	2.88%	3.40%	0.00%	0.13%	1.15%	1.18%
Lampung	0.34%	1.10%	0.00%	0.00%	0.11%	0.32%
Kep. Babel	1.84%	2.02%	0.07%	0.09%	1.01%	1.17%
Kep. Riau	1.29%	3.57%	0.00%	0.00%	1.15%	3.21%
DKI Jakarta	12.74%	9.73%	0.00%	0.00%	12.74%	9.73%
Jabar	4.30%	3.51%	0.15%	0.35%	3.05%	2.75%
Jateng	4.45%	3.79%	0.14%	0.30%	2.30%	2.07%
DIY	4.99%	6.48%	0.38%	0.05%	4.15%	4.78%
Jatim	3.11%	2.72%	0.14%	0.22%	1.63%	1.57%
Banten	3.70%	2.97%	0.00%	0.02%	2.50%	2.17%
Bali	1.86%	5.08%	0.88%	0.72%	1.55%	3.74%
NTB	0.24%	0.91%	0.08%	0.07%	0.15%	0.47%

Tabel 6.31. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
NTT	2.41%	1.43%	0.04%	0.10%	0.60%	0.43%
Kalbar	1.42%	2.61%	0.00%	0.07%	0.59%	0.93%
Kalteng	0.84%	1.52%	0.00%	0.03%	0.33%	0.61%
Kalsel	1.13%	1.57%	0.00%	0.26%	0.55%	0.88%
Kaltim	4.00%	3.97%	0.60%	0.38%	2.94%	2.81%
Kalut	0.03%	1.62%	0.00%	0.12%	0.02%	1.03%
Sulut	0.96%	1.04%	0.35%	0.26%	0.70%	0.66%
Sulteng	1.05%	2.05%	0.00%	0.11%	0.38%	0.66%
Sulsel	1.17%	1.18%	0.08%	0.28%	0.55%	0.66%
Sultra	1.01%	1.79%	0.04%	0.02%	0.44%	0.69%
Gorontalo	0.00%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
Sulbar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Maluku	0.31%	1.22%	0.20%	0.19%	0.26%	0.64%
Malut	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%
Papbar	0.40%	1.44%	0.98%	0.23%	0.70%	0.71%
Papua	0.28%	1.89%	0.00%	0.09%	0.08%	0.56%
Total	3.97%	3.50%	0.13%	0.22%	2.25%	2.06%

Sumber: BPS RI - Susenas, 2019

Tabel 6.32. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler/Handphone menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	92.40	97.87	77.83	93.57	82.05	95.01
Sumatera Utara	93.09	97.73	84.77	94.26	89.13	96.13
Sumatera Barat	95.68	97.95	83.17	92.72	89.25	95.14
Riau	97.02	99.14	87.43	96.99	91.55	97.86
Jambi	91.94	98.03	78.71	93.96	83.16	95.25
Sumatera Selatan	94.20	97.14	79.36	93.00	85.39	94.43
Bengkulu	95.41	97.79	70.45	91.31	80.38	93.39
Lampung	91.90	97.08	78.36	95.18	82.62	95.74
Kepulauan Bangka Belitung	91.43	97.47	75.79	94.40	84.07	96.11
Kepulauan Riau	96.89	99.03	79.88	95.16	95.09	98.64
DKI Jakarta	94.13	98.88	-	-	94.13	98.88
Jawa Barat	81.83	94.79	64.36	88.18	76.58	93.20
Jawa Tengah	82.18	94.11	71.71	90.80	76.96	92.47
DI Yogyakarta	87.48	94.67	72.23	91.45	84.71	93.81
Jawa Timur	83.99	94.89	71.09	90.56	77.57	92.90
Banten	89.27	96.76	72.15	89.45	83.73	94.79
Bali	88.41	97.25	64.71	91.75	80.93	95.57
Nusa Tenggara Barat	88.76	96.05	83.18	92.99	85.80	94.45

Tabel 6.32. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler/Handphone menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Nusa Tenggara Timur	96.64	97.91	76.88	86.32	81.55	89.13
Kalimantan Barat	96.81	98.33	78.86	88.14	86.29	91.60
Kalimantan Tengah	96.21	98.63	77.44	93.51	84.92	95.51
Kalimantan Selatan	91.04	98.40	73.22	93.34	81.91	95.72
Kalimantan Timur	94.73	99.07	85.09	97.81	91.74	98.66
Kalimantan Utara	93.07	99.52	90.49	95.72	92.39	98.03
Sulawesi Utara	94.88	96.95	86.04	92.65	91.12	94.86
Sulawesi Tengah	96.54	96.99	79.79	88.22	85.76	90.73
Sulawesi Selatan	95.27	98.91	87.65	95.98	90.95	97.22
Sulawesi Tenggara	94.83	98.92	84.34	95.47	88.62	96.77
Gorontalo	96.18	96.92	87.23	93.67	91.66	95.03
Sulawesi Barat	95.77	95.96	81.28	89.96	85.16	91.31
Maluku	96.74	97.61	82.13	88.18	89.75	92.31
Maluku Utara	97.59	96.90	79.41	84.52	86.78	87.98
Papua Barat	98.00	98.70	79.58	87.84	88.65	92.20
Papua	90.94	96.28	33.23	44.03	49.89	57.85
Total	87.52	96.12	74.72	90.54	81.79	93.67

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.33. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29.10	20.17	62.96	51.66	53.16	41.13
Sumatera Utara	5.71	4.50	28.17	22.79	16.40	12.92
Sumatera Barat	5.81	6.94	27.80	23.95	17.12	16.09
Riau	8.18	5.44	28.74	19.93	19.91	14.08
Jambi	6.15	6.17	32.31	18.25	23.51	14.43
Sumatera Selatan	7.17	5.51	36.78	27.84	24.74	20.11
Bengkulu	5.13	4.33	41.85	24.49	27.24	18.02
Lampung	6.14	10.17	34.89	34.12	25.86	27.11
Kepulauan Bangka Belitung	5.16	1.88	18.10	5.46	11.25	3.46
Kepulauan Riau	2.82	1.61	20.93	16.55	4.73	3.13
DKI Jakarta	0.85	0.18	-	-	0.85	0.18
Jawa Barat	2.97	2.82	8.17	8.65	4.53	4.22
Jawa Tengah	1.87	1.49	2.19	1.25	2.03	1.37

Tabel 6.33. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DI Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jawa Timur	2.38	1.42	10.03	8.36	6.19	4.61
Banten	5.65	3.05	41.95	47.80	17.40	15.11
Bali	3.83	5.26	10.29	10.54	5.87	6.88
Nusa Tenggara Barat	26.16	24.66	49.38	49.67	38.48	37.72
Nusa Tenggara Timur	10.10	6.50	46.18	47.63	37.66	37.65
Kalimantan Barat	5.19	3.80	32.99	28.46	21.48	20.11
Kalimantan Tengah	4.91	2.89	16.20	8.49	11.70	6.31
Kalimantan Selatan	4.11	3.63	22.65	13.84	13.61	9.04
Kalimantan Timur	3.06	1.59	22.37	18.47	9.06	7.06
Kalimantan Utara	4.62	3.08	27.49	17.52	10.65	8.73
Sulawesi Utara	7.86	9.11	29.39	28.92	17.02	18.73
Sulawesi Tengah	7.54	9.01	49.00	42.35	34.21	32.81

Tabel 6.33. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT, dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Selatan	4.78	3.79	21.11	19.52	14.03	12.85
Sulawesi Tenggara	5.87	7.85	40.89	37.64	26.60	26.42
Gorontalo	4.78	3.50	16.57	17.47	10.73	11.62
Sulawesi Barat	27.37	22.70	54.78	37.26	47.44	34.00
Maluku	9.01	12.57	35.98	40.77	21.91	28.43
Maluku Utara	3.87	4.71	26.17	22.73	17.13	17.69
Papua Barat	12.66	6.61	50.97	47.31	32.10	30.98
Papua	10.58	8.01	45.26	42.71	35.25	33.53
Total	4.28	3.47	21.49	19.69	11.99	10.58

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.34. Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan yang Pernah Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastrea) selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jumlah Beras yang Dibeli Tahun 2019.

Provinsi	Jumlah Beras yang Dibeli			Jumlah
	<10 kg	10 - 40 kg	>40 kg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	53.08	45.85	1.07	100.00
Sumatera Utara	62.35	35.44	2.21	100.00
Sumatera Barat	34.44	64.28	1.28	100.00
Riau	40.65	54.58	4.76	100.00
Jambi	49.61	48.53	1.86	100.00
Sumatera Selatan	63.00	36.48	0.52	100.00
Bengkulu	18.80	72.60	8.59	100.00
Lampung	44.09	54.55	1.36	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	8.68	89.99	1.33	100.00
Kepulauan Riau	41.80	53.97	4.23	100.00
DKI Jakarta	28.51	55.93	15.56	100.00
Jawa Barat	52.31	45.40	2.30	100.00
Jawa Tengah	68.06	27.86	4.08	100.00
DI Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	51.25	47.76	1.00	100.00
Banten	62.39	37.61	0.00	100.00
Bali	13.92	81.88	4.20	100.00
Nusa Tenggara Barat	70.14	29.86	0.00	100.00
Nusa Tenggara Timur	21.88	65.13	12.99	100.00
Kalimantan Barat	58.71	37.70	3.59	100.00
Kalimantan Tengah	43.92	52.65	3.42	100.00
Kalimantan Selatan	35.55	60.86	3.59	100.00
Kalimantan Timur	46.21	46.05	7.74	100.00
Kalimantan Utara	38.55	56.63	4.83	100.00
Sulawesi Utara	34.88	60.45	4.67	100.00

Tabel 6.34. Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Perempuan yang Pernah Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastrea) selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jumlah Beras yang Dibeli Tahun 2019.

Provinsi	Jumlah Beras yang Dibeli			Jumlah
	<10 kg	10 - 40 kg	>40 kg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sulawesi Tengah	37.37	59.91	2.72	100.00
Sulawesi Selatan	28.48	69.26	2.26	100.00
Sulawesi Tenggara	40.33	57.58	2.09	100.00
Gorontalo	10.08	89.92	0.00	100.00
Sulawesi Barat	42.42	57.58	0.00	100.00
Maluku	17.54	58.59	23.87	100.00
Maluku Utara	42.07	55.52	2.41	100.00
Papua Barat	29.56	54.16	16.28	100.00
Papua	33.59	51.07	15.34	100.00
Total	48.60	48.29	3.11	100.00

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.35. Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Laki-Laki yang Pernah Menerima/Membeli Beras Miskin selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jumlah Beras yang Dibeli Tahun 2019.

Provinsi	Jumlah Beras yang Dibeli			Jumlah
	<10 kg	10 - 40 kg	>40 kg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	54.42	44.70	0.88	100.00
Sumatera Utara	58.20	39.96	1.84	100.00
Sumatera Barat	32.65	63.89	3.46	100.00
Riau	41.58	51.18	7.24	100.00
Jambi	46.11	50.15	3.74	100.00
Sumatera Selatan	62.90	36.00	1.10	100.00
Bengkulu	19.94	69.30	10.76	100.00

Tabel 6.35. Persentase Rumah Tangga yang Dikepalai Laki-Laki yang Pernah Menerima/Membeli Beras Miskin selama Empat Bulan Terakhir menurut Provinsi, dan Jumlah Beras yang Dibeli Tahun 2019.

Provinsi	Jumlah Beras yang Dibeli			Jumlah
	<10 kg	10 - 40 kg	>40 kg	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung	40.83	58.00	1.17	100.00
Kepulauan Bangka Belitung	14.92	85.08	0.00	100.00
Kepulauan Riau	32.86	63.50	3.64	100.00
DKI Jakarta	30.29	69.38	0.32	100.00
Jawa Barat	57.20	42.14	0.66	100.00
Jawa Tengah	76.39	23.32	0.29	100.00
DI Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	54.48	44.21	1.31	100.00
Banten	61.09	38.15	0.77	100.00
Bali	15.37	82.96	1.67	100.00
Nusa Tenggara Barat	70.01	29.75	0.24	100.00
Nusa Tenggara Timur	13.70	70.80	15.50	100.00
Kalimantan Barat	59.68	38.18	2.14	100.00
Kalimantan Tengah	55.59	39.88	4.53	100.00
Kalimantan Selatan	41.64	57.87	0.49	100.00
Kalimantan Timur	39.91	56.01	4.09	100.00
Kalimantan Utara	41.35	55.42	3.23	100.00
Sulawesi Utara	34.47	63.42	2.11	100.00
Sulawesi Tengah	37.18	59.48	3.34	100.00
Sulawesi Selatan	29.45	68.87	1.68	100.00
Sulawesi Tenggara	37.71	59.81	2.49	100.00
Gorontalo	11.57	87.61	0.82	100.00
Sulawesi Barat	50.80	48.96	0.24	100.00
Maluku	27.02	57.43	15.55	100.00
Maluku Utara	39.37	53.94	6.69	100.00
Papua Barat	22.61	61.40	15.99	100.00
Papua	25.65	55.16	19.19	100.00
Total	46.87	49.44	3.69	100.00

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.36. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	94.74	97.96	93.68	97.97	93.98	97.97
Sumatera Utara	90.55	95.05	85.45	93.37	88.12	94.28
Sumatera Barat	89.63	96.41	79.55	94.20	84.45	95.22
Riau	91.40	97.36	95.34	97.95	93.65	97.71
Jambi	95.71	96.90	94.31	98.54	94.78	98.02
Sumatera Selatan	91.28	96.13	90.26	96.82	90.67	96.58
Bengkulu	93.35	97.58	94.95	99.40	94.32	98.81
Lampung	95.03	98.80	97.99	98.96	97.06	98.91
Kepulauan Bangka Belitung	97.03	98.62	97.31	99.19	97.16	98.87
Kepulauan Riau	87.50	97.67	84.96	95.84	87.23	97.48
DKI Jakarta	89.42	94.25	-	-	89.42	94.25
Jawa Barat	85.22	93.78	85.74	93.13	85.37	93.62
Jawa Tengah	92.79	97.51	93.03	98.37	92.91	97.93

Tabel 6.36. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DI Yogyakarta	92.55	97.44	96.33	99.49	93.23	97.98
Jawa Timur	91.35	97.67	92.51	98.28	91.93	97.95
Banten	94.13	97.42	90.20	93.78	92.86	96.44
Bali	86.62	97.54	83.23	95.50	85.55	96.91
Nusa Tenggara Barat	86.19	94.99	89.13	96.41	87.75	95.73
Nusa Tenggara Timur	79.27	91.38	87.99	94.49	85.93	93.73
Kalimantan Barat	97.41	98.20	93.63	98.12	95.20	98.14
Kalimantan Tengah	93.67	97.91	91.11	97.77	92.13	97.82
Kalimantan Selatan	92.07	96.83	91.58	98.02	91.82	97.46
Kalimantan Timur	94.54	98.24	95.32	98.96	94.79	98.47
Kalimantan Utara	94.34	96.76	94.97	97.52	94.51	97.06
Sulawesi Utara	88.46	90.64	89.47	94.26	88.89	92.40
Sulawesi Tengah	91.24	96.01	94.79	96.21	93.52	96.16

Tabel 6.36. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Selatan	94.84	97.25	96.06	98.46	95.53	97.94
Sulawesi Tenggara	89.96	96.99	92.12	97.29	91.23	97.18
Gorontalo	87.82	93.01	90.78	94.70	89.31	93.99
Sulawesi Barat	93.93	93.90	92.94	97.33	93.20	96.56
Maluku	83.36	90.33	81.97	88.52	82.70	89.31
Maluku Utara	88.17	95.34	89.83	94.64	89.15	94.84
Papua Barat	82.94	91.99	84.05	89.11	83.50	90.27
Papua	87.08	91.02	64.82	64.39	71.25	71.43
Total	89.99	95.92	90.72	96.05	90.32	95.97

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.37. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Transportasi* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	71.95	91.71	58.87	88.39	62.66	89.50
Sumatera Utara	58.64	86.19	48.00	80.33	53.58	83.49
Sumatera Barat	63.47	89.21	50.09	85.59	56.59	87.27
Riau	75.33	93.70	72.90	92.54	73.95	93.01
Jambi	71.66	91.72	62.54	91.77	65.61	91.75
Sumatera Selatan	63.85	86.37	58.12	87.46	60.45	87.09
Bengkulu	70.95	91.37	53.70	88.76	60.56	89.60
Lampung	63.24	89.24	58.21	91.23	59.79	90.65
Kepulauan Bangka Belitung	70.99	94.04	66.50	95.10	68.88	94.51
Kepulauan Riau	69.41	93.90	59.95	89.49	68.41	93.45
DKI Jakarta	58.63	85.16	-	-	58.63	85.16
Jawa Barat	48.69	79.68	32.76	68.41	43.90	76.97

Tabel 6.37. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Transportasi* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa Tengah	62.34	87.92	53.24	84.28	57.80	86.12
DI Yogyakarta	64.48	90.81	56.16	84.95	62.97	89.25
Jawa Timur	62.65	90.30	54.59	87.24	58.64	88.89
Banten	70.85	90.37	51.32	75.51	64.53	86.37
Bali	71.26	94.30	43.79	87.49	62.59	92.22
Nusa Tenggara Barat	45.88	81.87	40.74	75.77	43.15	78.68
Nusa Tenggara Timur	40.75	75.23	21.48	43.46	26.03	51.17
Kalimantan Barat	79.31	93.35	63.97	87.31	70.32	89.36
Kalimantan Tengah	74.99	94.17	52.66	89.26	61.56	91.18
Kalimantan Selatan	69.04	90.80	55.26	91.61	61.98	91.23
Kalimantan Timur	75.18	93.05	67.13	93.95	72.68	93.34
Kalimantan Utara	64.80	90.99	65.25	88.65	64.92	90.08
Sulawesi Utara	36.56	70.00	35.95	67.11	36.30	68.60

Tabel 6.37. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Transportasi* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tengah	80.54	87.97	53.62	78.79	63.23	81.42
Sulawesi Selatan	66.05	89.09	50.53	82.58	57.26	85.34
Sulawesi Tenggara	50.87	86.26	47.90	82.14	49.11	83.69
Gorontalo	46.75	73.49	37.65	70.67	42.16	71.85
Sulawesi Barat	52.07	80.91	51.28	80.67	51.49	80.72
Maluku	44.25	66.69	22.66	52.76	33.93	58.85
Maluku Utara	52.56	81.51	29.91	59.40	39.09	65.58
Papua Barat	53.57	77.18	44.86	68.18	49.15	71.79
Papua	62.78	80.39	22.54	26.99	34.16	41.11
Total	59.51	86.17	49.49	80.74	55.02	83.79

*Keterangan: *)Memiliki aset sepeda motor/perahu/perahu motor/mobil*

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.38. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	70.38	81.20	44.20	60.27	51.78	67.27
Sumatera Utara	64.67	73.50	30.60	42.71	48.46	59.34
Sumatera Barat	60.87	73.45	39.72	51.77	50.00	61.80
Riau	68.01	80.35	45.77	61.48	55.33	69.10
Jambi	75.36	79.23	45.79	61.55	55.74	67.15
Sumatera Selatan	70.50	79.14	41.34	50.70	53.19	60.54
Bengkulu	61.16	82.47	38.39	56.95	47.45	65.14
Lampung	68.09	75.03	41.34	48.27	49.75	56.10
Kepulauan Bangka Belitung	82.69	89.70	65.72	79.19	74.70	85.05
Kepulauan Riau	64.72	84.88	34.42	55.69	61.53	81.91
DKI Jakarta	76.07	79.01	-	-	76.07	79.01
Jawa Barat	58.19	70.47	35.35	46.42	51.33	64.69
Jawa Tengah	52.29	66.77	35.67	46.80	43.99	56.91
DI Yogyakarta	43.35	65.94	34.83	46.19	41.81	60.70

Tabel 6.38. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Jawa Timur	60.85	71.60	36.45	47.73	48.70	60.61
Banten	77.23	81.97	44.46	53.34	66.63	74.26
Bali	54.76	71.95	35.61	46.57	48.72	64.17
Nusa Tenggara Barat	29.97	49.74	21.50	32.47	25.48	40.72
Nusa Tenggara Timur	40.42	51.27	7.50	10.52	15.27	20.41
Kalimantan Barat	79.68	83.02	36.49	42.71	54.37	56.37
Kalimantan Tengah	70.57	78.46	40.27	56.71	52.35	65.20
Kalimantan Selatan	66.28	79.29	42.46	58.26	54.07	68.15
Kalimantan Timur	78.80	86.83	63.57	67.20	74.07	80.46
Kalimantan Utara	75.98	85.65	44.86	64.79	67.78	77.50
Sulawesi Utara	62.59	71.46	53.18	58.02	58.58	64.93
Sulawesi Tengah	61.92	73.59	38.37	40.71	46.77	50.13
Sulawesi Selatan	80.70	82.91	59.49	65.68	68.69	72.98
Sulawesi Tenggara	49.67	73.58	40.12	48.54	44.02	57.97

Tabel 6.38. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Gorontalo	58.78	65.72	48.50	48.16	53.59	55.51
Sulawesi Barat	66.44	60.44	34.13	36.60	42.79	41.95
Maluku	61.38	67.44	35.68	33.82	49.09	48.53
Maluku Utara	60.72	70.58	20.19	25.48	36.62	38.09
Papua Barat	65.20	67.92	34.78	40.75	49.76	51.65
Papua	66.49	71.39	9.97	9.90	26.29	26.16
Total	61.66	73.06	37.07	47.51	50.65	61.86

*Keterangan: *) Memiliki aset tabung gas/kulkas/AC/water heater*

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.39. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga Lainnya* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	79.47	81.53	87.46	85.53	85.15	84.19
Sumatera Utara	73.36	68.65	76.54	72.36	74.87	70.36
Sumatera Barat	72.16	68.70	59.66	63.61	65.73	65.96
Riau	71.09	71.88	82.73	78.17	77.73	75.63
Jambi	82.06	80.91	87.15	87.40	85.44	85.35
Sumatera Selatan	67.86	73.43	82.53	82.97	76.57	79.67
Bengkulu	77.40	84.01	92.38	94.19	86.42	90.92
Lampung	90.44	88.78	95.34	91.56	93.80	90.75
Kepulauan Bangka Belitung	81.16	85.66	87.97	87.35	84.37	86.41
Kepulauan Riau	57.89	74.61	76.58	78.96	59.86	75.05
DKI Jakarta	70.43	65.54	-	-	70.43	65.54
Jawa Barat	70.16	70.56	76.62	76.94	72.11	72.10
Jawa Tengah	80.54	83.21	86.25	89.82	83.39	86.48
DI Yogyakarta	83.08	82.69	93.42	91.74	84.96	85.09

Tabel 6.39. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga Lainnya* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa Timur	77.44	79.03	84.52	85.04	80.97	81.80
Banten	76.46	75.95	77.53	74.37	76.81	75.52
Bali	56.80	68.36	72.60	74.02	61.78	70.09
Nusa Tenggara Barat	78.26	80.79	83.05	87.92	80.80	84.52
Nusa Tenggara Timur	71.77	76.34	85.18	90.63	82.01	87.16
Kalimantan Barat	84.24	82.40	85.30	88.09	84.86	86.17
Kalimantan Tengah	81.10	77.77	84.03	83.37	82.86	81.18
Kalimantan Selatan	77.51	73.97	84.09	84.07	80.88	79.32
Kalimantan Timur	79.22	81.10	90.82	88.29	82.82	83.43
Kalimantan Utara	87.20	78.18	88.09	87.13	87.43	81.68
Sulawesi Utara	74.81	71.68	84.10	80.17	78.76	75.81
Sulawesi Tengah	74.00	80.24	88.15	87.11	83.10	85.14
Sulawesi Selatan	82.83	81.85	90.88	92.00	87.39	87.70
Sulawesi Tenggara	80.32	83.54	87.72	89.11	84.70	87.01

Tabel 6.39. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Rumah Tangga Lainnya* menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gorontalo	81.90	72.29	81.46	84.39	81.68	79.32
Sulawesi Barat	85.25	80.31	90.04	88.27	88.76	86.48
Maluku	68.85	71.43	76.42	74.65	72.47	73.24
Maluku Utara	81.89	81.10	89.49	88.37	86.41	86.34
Papua Barat	72.73	71.11	75.70	74.35	74.24	73.05
Papua	73.13	69.89	58.82	56.16	62.95	59.79
Total	75.12	75.20	83.13	83.43	78.71	78.81

Keterangan: *) Memiliki aset telepon rumah/komputer/laptop/emas/televisi/tanah

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.40. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	12.57	22.00	9.66	19.65	10.50	20.43
Sumatera Utara	12.23	21.44	14.22	22.65	13.18	22.00
Sumatera Barat	18.33	32.75	17.42	29.95	17.87	31.24
Riau	14.62	21.41	12.41	27.18	13.36	24.85
Jambi	15.96	27.34	11.07	27.20	12.71	27.24
Sumatera Selatan	13.61	21.77	11.04	20.25	12.08	20.77
Bengkulu	15.60	39.09	16.78	35.22	16.31	36.46
Lampung	17.11	23.51	12.68	24.80	14.07	24.42
Kepulauan Bangka Belitung	17.76	19.86	10.39	15.90	14.29	18.11
Kepulauan Riau	12.40	19.95	4.12	16.41	11.53	19.59
DKI Jakarta	7.73	12.66	-	-	7.73	12.66
Jawa Barat	16.55	28.77	16.82	32.95	16.63	29.77
Jawa Tengah	24.10	38.15	22.31	38.71	23.20	38.43
DI Yogyakarta	22.31	36.51	30.59	48.83	23.81	39.77

Tabel 6.40. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa Timur	19.27	30.79	15.12	28.33	17.20	29.66
Banten	15.50	21.83	11.75	20.47	14.28	21.46
Bali	23.75	40.47	14.20	44.66	20.73	41.75
Nusa Tenggara Barat	24.90	37.02	24.70	35.89	24.79	36.43
Nusa Tenggara Timur	25.86	38.19	23.76	30.30	24.26	32.21
Kalimantan Barat	15.53	22.84	13.14	21.86	14.13	22.19
Kalimantan Tengah	14.97	25.66	6.72	18.48	10.01	21.28
Kalimantan Selatan	12.70	26.25	9.86	18.51	11.24	22.15
Kalimantan Timur	13.45	23.17	8.30	16.56	11.85	21.02
Kalimantan Utara	20.41	23.28	10.65	15.66	17.84	20.30
Sulawesi Utara	15.72	26.43	21.52	29.41	18.19	27.88
Sulawesi Tengah	22.36	32.07	17.77	26.30	19.41	27.95
Sulawesi Selatan	19.67	32.51	15.46	25.70	17.29	28.59
Sulawesi Tenggara	19.81	32.90	13.86	25.69	16.29	28.41

Tabel 6.40. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gorontalo	23.57	37.29	24.59	38.16	24.09	37.79
Sulawesi Barat	21.42	31.13	11.97	21.39	14.50	23.58
Maluku	14.00	18.46	8.79	11.33	11.51	14.45
Maluku Utara	20.80	30.70	8.71	10.87	13.62	16.41
Papua Barat	24.21	27.06	11.68	17.77	17.85	21.50
Papua	17.73	16.44	5.10	5.29	8.75	8.24
Total	17.47	28.11	16.25	27.99	16.93	28.06

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.41. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	26.01	22.17	5.84	7.41	11.68	12.35
Sumatera Utara	12.98	12.17	8.01	9.37	10.61	10.88
Sumatera Barat	15.57	20.74	7.17	7.61	11.25	13.68
Riau	14.16	14.09	3.73	7.39	8.22	10.09
Jambi	15.38	15.52	5.62	5.82	8.90	8.89
Sumatera Selatan	14.27	14.70	3.83	4.58	8.08	8.08
Bengkulu	16.98	22.88	4.95	6.20	9.74	11.55
Lampung	12.19	10.55	1.72	4.34	5.01	6.16
Kepulauan Bangka Belitung	14.73	18.23	4.59	8.25	9.96	13.81
Kepulauan Riau	19.65	15.11	4.62	6.34	18.06	14.22
DKI Jakarta	9.64	8.10	-	-	9.64	8.10
Jawa Barat	16.17	15.08	7.26	5.80	13.49	12.85
Jawa Tengah	15.60	16.72	7.15	6.70	11.38	11.77
DI Yogyakarta	13.44	20.42	22.55	23.56	15.10	21.25
Jawa Timur	13.20	12.36	4.07	4.43	8.65	8.71
Banten	12.21	13.61	5.89	6.22	10.16	11.62
Bali	6.98	13.65	8.61	8.52	7.49	12.08

Tabel 6.41. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Nusa Tenggara Barat	8.63	12.89	3.20	6.54	5.75	9.57
Nusa Tenggara Timur	18.91	24.51	4.01	5.73	7.53	10.29
Kalimantan Barat	18.94	14.14	3.73	7.10	10.03	9.48
Kalimantan Tengah	17.54	20.27	11.74	16.04	14.05	17.69
Kalimantan Selatan	19.14	23.63	9.02	11.12	13.95	17.00
Kalimantan Timur	15.26	24.59	12.84	16.09	14.51	21.83
Kalimantan Utara	15.11	23.57	13.53	9.86	14.69	18.21
Sulawesi Utara	11.92	12.71	13.31	7.44	12.51	10.15
Sulawesi Tengah	18.40	21.54	8.80	7.56	12.22	11.56
Sulawesi Selatan	19.04	18.82	7.31	6.48	12.40	11.71
Sulawesi Tenggara	23.24	29.92	6.95	8.84	13.60	16.78
Gorontalo	17.99	17.96	15.35	7.95	16.66	12.14
Sulawesi Barat	22.00	15.98	6.71	8.31	10.81	10.04
Maluku	24.88	13.04	10.20	8.07	17.86	10.24
Maluku Utara	27.70	25.36	7.02	6.95	15.40	12.10
Papua Barat	15.62	14.03	16.01	11.67	15.82	12.61
Papua	22.13	16.14	4.16	4.33	9.35	7.45
Total	14.64	14.90	6.20	6.72	10.86	11.31

Sumber: Susenas Maret 2019

Tabel 6.42. Persentase Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kejahatan Sejak 1 Januari-31 Desember 2018 menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6.37	4.03	2.35	2.62	3.52	3.09
Sumatera Utara	5.04	5.39	2.79	3.62	3.97	4.57
Sumatera Barat	6.85	5.35	3.13	2.96	4.94	4.06
Riau	3.52	7.07	4.59	4.06	4.13	5.28
Jambi	4.69	3.60	2.77	3.61	3.42	3.60
Sumatera Selatan	4.97	6.44	3.96	3.57	4.37	4.56
Bengkulu	9.06	8.80	2.13	3.18	4.89	4.98
Lampung	3.62	7.02	5.71	4.99	5.05	5.58
Kepulauan Bangka Belitung	4.63	3.24	2.65	1.58	3.70	2.50
Kepulauan Riau	5.59	4.62	0.97	2.58	5.10	4.42
DKI Jakarta	3.36	4.40	-	-	3.36	4.40
Jawa Barat	3.89	4.29	2.38	2.99	3.44	3.98
Jawa Tengah	3.46	3.48	2.19	2.23	2.82	2.86

Tabel 6.42. Persentase Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kejahatan Sejak 1 Januari-31 Desember 2018 menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DI Yogyakarta	5.68	5.29	0.65	1.37	4.77	4.25
Jawa Timur	3.42	3.48	1.83	2.22	2.63	2.90
Banten	3.60	4.20	4.55	3.72	3.91	4.07
Bali	3.01	1.51	0.00	1.45	2.06	1.49
Nusa Tenggara Barat	5.92	7.53	5.70	5.64	5.80	6.54
Nusa Tenggara Timur	2.68	5.10	3.60	3.89	3.38	4.18
Kalimantan Barat	5.88	3.77	1.07	1.79	3.06	2.46
Kalimantan Tengah	3.48	3.63	2.99	2.39	3.19	2.88
Kalimantan Selatan	3.65	4.14	2.06	3.48	2.83	3.79
Kalimantan Timur	4.54	5.32	1.25	1.98	3.52	4.24
Kalimantan Utara	8.03	7.82	8.90	5.43	8.26	6.89
Sulawesi Utara	4.29	3.54	2.67	3.10	3.60	3.32
Sulawesi Tengah	10.38	10.61	4.37	3.81	6.51	5.76
Sulawesi Selatan	5.79	6.53	2.91	3.06	4.16	4.53

Tabel 6.42. Persentase Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kejahatan Sejak 1 Januari-31 Desember 2018 menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019.

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Tenggara	7.94	5.96	3.36	3.27	5.23	4.28
Gorontalo	3.85	4.90	3.53	2.98	3.69	3.78
Sulawesi Barat	2.42	3.13	4.30	3.20	3.80	3.19
Maluku	5.93	6.88	4.52	3.04	5.25	4.72
Maluku Utara	3.84	7.30	3.25	4.38	3.49	5.20
Papua Barat	10.34	10.71	5.13	5.60	7.70	7.65
Papua	5.48	6.24	4.43	4.80	4.73	5.18
Total	4.16	4.46	2.78	3.07	3.54	3.85

Sumber: Susenas Maret 2019

H. Lampiran Bab VII. Perempuan dan Kekerasan

Tabel 7.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tanggal Laporan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019.

Bulan	Tanggal Laporan	Tanggal Kejadian
Januari	1149	1181
Februari	869	725
Maret	829	748
April	804	661
Mei	657	593
Juni	601	632
Juli	820	673
Agustus	699	622
September	707	637
Oktober	632	538
November	520	498
Desember	458	476
JUMLAH	8745	7984

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020

Tabel 7.2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tanggal Laporan, Tanggal Kejadian dan Selisih Jumlah Kasus dan Korban Tahun 2019.

Bulan	Tanggal Laporan			Tanggal Kejadian		
	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Selisih Jumlah kasus dengan Jumlah Korban	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Selisih Jumlah kasus dengan Jumlah Korban
Januari	1149	1167	18	1181	1198	17
Februari	869	876	7	725	730	5
Maret	829	834	5	748	759	11
April	804	812	8	661	668	7
Mei	657	665	8	593	598	5
Juni	601	605	4	632	639	7
Juli	820	833	13	673	682	9
Agustus	699	705	6	622	628	6
September	707	718	11	637	643	6
Oktober	632	642	10	538	548	10
November	520	523	3	498	501	3
Desember	458	462	4	476	479	3

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020

Tabel 7.3. Persentase Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Tanggal Laporan dan Tanggal Kejadian Tahun 2019

Bulan	Tanggal Laporan				Tanggal Kejadian			
	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban KDRT	Persentase Korban KDRT	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Korban KDRT	Persentase Korban KDRT
Januari	1149	1167	809	69.32	1181	1198	807	67.36
Februari	869	876	559	63.81	725	730	443	60.68
Maret	829	834	525	62.95	748	759	490	64.56
April	804	812	535	65.89	661	668	433	64.82
Mei	657	665	449	67.52	593	598	391	65.38
Juni	601	605	406	67.11	632	639	412	64.48
Juli	820	833	540	64.83	673	682	433	63.49
Agustus	699	705	434	61.56	622	628	377	60.03
September	707	718	442	61.56	637	643	393	61.12
Oktober	632	642	400	62.31	538	548	313	57.12
November	520	523	334	63.86	498	501	307	61.28
Desember	458	462	274	59.31	476	479	295	61.59

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020

Tabel 7.4. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tanggal Kejadian dan Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2019

Bulan	Korban fisik	Korban Psikis	Korban Seksual	Korban Eksploitasi	Korban Trafficking	Korban Penelantaran	Korban Lainnya
Januari	654	456	197	2	13	186	75
Februari	412	279	94	3	8	129	46
Maret	493	256	94	1	8	98	42
April	425	244	86	1	2	95	34
Mei	402	208	70	1	5	72	20
Juni	375	211	105	1	8	75	32
Juli	400	244	91	2	16	85	43
Agustus	405	227	78	2	4	53	46
September	404	220	79	2	7	72	41
Oktober	319	187	94	0	12	57	48
Nopember	306	180	61	0	7	55	30
Desember	269	163	79	1	5	61	31
JUMLAH	4,864	2,875	1,128	16	95	1,038	488

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020

Tabel 7.5. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tanggal Laporan dan Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2019

Bulan	Korban fisik	Korban Psikis	Korban Seksual	Korban Eksploitasi	Korban Trafficking	Korban Penelantaran	Korban Lainnya
Januari	661	467	189	3	10	203	75
Februari	471	359	127	1	6	158	56
Maret	504	303	114	5	6	136	49
April	497	326	128	2	10	110	49
Mei	425	252	69	0	6	96	33
Juni	365	197	94	1	3	88	27
Juli	462	338	122	5	18	143	59
Agustus	436	289	91	2	4	86	44
September	422	259	95	3	4	92	64
Oktober	352	233	94	0	17	83	65
Nopember	311	210	71	0	3	77	37
Desember	252	182	71	0	7	72	32
JUMLAH	5,158	3,415	1,265	22	94	1,344	590

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020

Tabel 7.6. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tanggal Laporan dan Jenis Layanan yang Diterima Tahun 2019

Bulan	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
Januari	703	342	531	99	151	34	25	15
Februari	572	264	365	67	145	23	25	12
Maret	492	278	335	64	129	13	7	9
April	517	339	244	49	102	23	6	5
Mei	364	244	228	46	68	13	8	9
Juni	330	174	199	25	83	16	6	3
Juli	526	313	314	35	197	18	23	9
Agustus	378	233	254	40	78	12	6	5
September	393	273	220	51	110	7	8	8
Oktober	339	204	229	61	61	14	7	3
Nopember	273	217	192	44	66	4	3	1
Desember	227	182	126	23	48	9	8	

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020

Tabel 7.7. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tanggal Kejadian dan Jumlah Layanan yang Diterima Tahun 2019

Bulan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	5 Layanan
Januari	427	169	57	46	85
Februari	255	114	33	30	38
Maret	270	129	27	23	51
April	256	108	29	20	49
Mei	230	94	19	24	30
Juni	267	108	17	18	27
Juli	277	117	30	28	42
Agustus	266	97	24	14	27
September	245	96	31	19	33
Oktober	222	84	19	14	27
November	207	74	18	17	20
Desember	207	82	14	14	20
JUMLAH	3,129	1,272	318	267	449

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020

Tabel 7.8. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tanggal Pelaporan dan Jumlah Layanan yang Diterima Tahun 2019

Bulan	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	5 Layanan
Januari	374	181	52	54	81
Februari	279	157	39	47	56
Maret	287	141	34	27	64
April	280	145	41	30	58
Mei	245	103	20	34	38
Juni	232	107	22	14	27
Juli	299	130	41	37	71
Agustus	277	108	35	20	40
September	269	101	39	25	47
Oktober	255	102	21	14	29
November	208	77	24	18	30
Desember	184	76	13	19	19
JUMLAH	3,189	1,428	381	339	560

Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA, 2020